

# DINAMIKA DIPLOMASI & PEMBANGUNAN GLOBAL

Tantangan, Inovasi, dan Transformasi



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

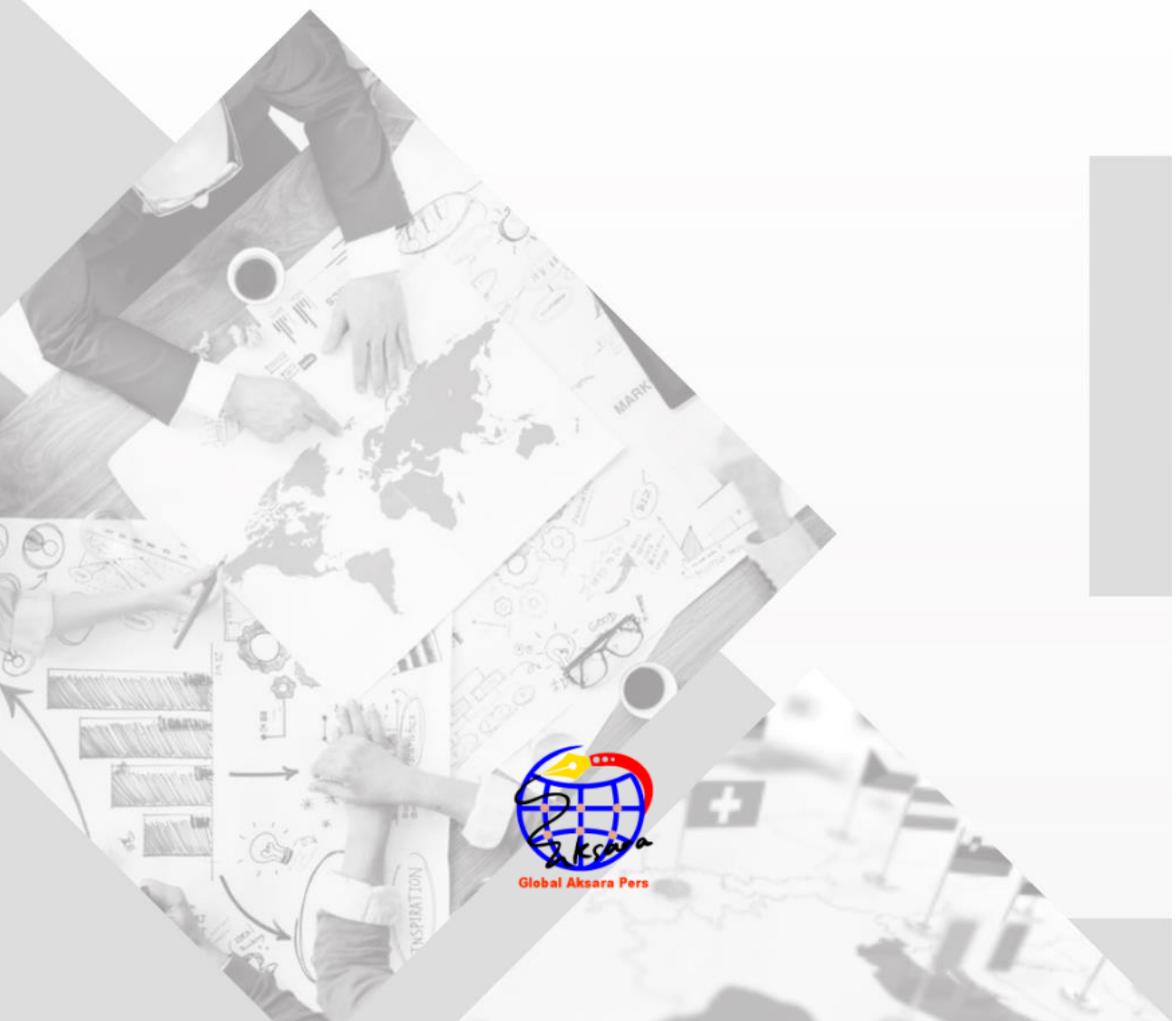
**PASAL 113  
KETENTUAN PIDANA  
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Zaky Ismail, M.S.I | Muhammad Rafi Azizi, S.Sos | Mutiara Nasywa Kirana, S.Sos  
| Dian Putri Ratnadewi, S.Sos | Ahmad Ziyad, S.Sos | Moh. Fathoni Hakim M.Si |  
Fabian Widyadhana | Alifiyah Mashuri | Keysha Amelia Patricia | Shafira Zelinda  
Rahma | Daffa' Aji Alfazza | Reno Firmansyah Putra Hermawan | Muhammad  
Rhenaldy Ferdiansyah | Sulthan Farrel Wicaksono | Yoga Jahfal

# **DIPLOMASI & PEMBANGUNAN GLOBAL**

## **Tantangan, Inovasi, dan Transformasi**



# Dinamika Diplomasi dan Pembangunan Global: Tantangan, Inovasi, dan Transformasi

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia  
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

**ISBN: 978-623-462-861-6**

xii + 196 hal.; Ukuran Unesco (15,8 x 23 cm)

Cetakan Pertama, Juni 2025

**Copyright © 2025 Global Aksara Pers**

Penulis : Zaky Ismail, M.S.I | Muhammad Rafi Azizi, S.Sos |  
Mutiara Nasywa Kirana, S.Sos | Dian Putri Ratnadewi, S.Sos |  
Ahmad Ziyad, S.Sos | Moh. Fathoni Hakim M.Si |  
Fabian Widyadhana | Alifiyah Mashuri | Keysha Amelia  
Patricia | Shafira Zelinda Rahma | Daffa' Aji Alfazza |  
Reno Firmansyah Putra Hermawan | Muhammad Rhenaldy  
Ferdiansyah | Sulthan Farrel Wicaksono | Yoga Jahfal

Penyunting : Alaika M. Bagus Kurnia PS.

Desain cover : Hamim Thohari Mahfudhillah

Layouter : Hamim Thohari Mahfudhillah

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

**Diterbitkan oleh:**



**CV. Global Aksara Pers**  
**Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,**  
**No. 282/JTI/2021**  
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya  
+628977416123/+628573269334  
[globalaksarapers.com](http://globalaksarapers.com)

# KATA PENGANTAR

Buku yang ada di tangan anda ini hadir sebagai sebuah upaya untuk menelaah berbagai aspek penting dalam dinamika diplomasi dan pembangunan global yang terus berkembang, di tengah tantangan yang begitu kompleks dan peluang-peluang inovatif yang muncul. Judul “***Dinamika Diplomasi dan Pembangunan Global: Tantangan, Inovasi, dan Transformasi***” dipilih untuk menggambarkan esensi perjalanan perubahan dalam hubungan antarnegara serta dampaknya terhadap kebijakan ekonomi, sosial, dan politik yang saling terhubung. Setiap bab yang terdapat dalam buku ini menyajikan topik-topik yang saling berinteraksi dan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana diplomasi, pembangunan, serta dinamika global membentuk berbagai kebijakan di tingkat domestik dan internasional.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan analisis yang luas dan tajam mengenai berbagai topik yang menarik perhatian global. Bab pertama membahas Saudi Vision 2030 dan bagaimana kebijakan ekonomi yang ambisius dari Mohammad bin Salman berupaya mengubah wajah ekonomi Arab Saudi menjadi lebih dinamis, berdaya saing, dan terdiversifikasi. Kemudian, pembaca diajak untuk menganalisis hubungan antara dua kekuatan besar di Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Iran, yang semakin kompleks dengan hadirnya China sebagai kekuatan baru yang semakin memperkuat posisi tawar masing-masing pihak.

Tidak hanya itu, buku ini juga merangkul perspektif diplomasi publik melalui pembahasan yang kritis terhadap Surabaya Cross



Culture International Folk Art Festival 2023, sebuah acara yang mencerminkan dinamika antarbudaya yang berkembang dalam hubungan internasional. Dengan demikian, buku ini menyoroti pentingnya peran diplomasi budaya dalam membangun hubungan yang lebih baik antarnegara.

Pentingnya pembangunan berkelanjutan juga mendapat perhatian besar dalam bab-bab lainnya, seperti yang digambarkan dalam analisis mengenai peran pemerintah desa dalam pencegahan stunting melalui penerapan SDGs serta kolaborasi internasional dalam penanggulangan bencana alam dan kesehatan. Melalui kajian tersebut, buku ini ingin menegaskan pentingnya kolaborasi global dalam mencapai tujuan bersama, di mana baik pemerintah pusat maupun lokal, sektor swasta, serta organisasi internasional memiliki peran yang tak terpisahkan.

Tidak kalah menarik adalah kajian mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, yang menjadi topik krusial di dunia global dewasa ini. Beberapa bab mengupas lebih dalam tentang peran BP2MI, penempatan pekerja migran melalui skema pemerintah ke pemerintah, serta upaya-upaya perlindungan yang terus diperkuat oleh negara-negara “pengirim” pekerja migran, utamanya Indonesia. Melalui bab ini, pembaca akan memahami lebih jauh bagaimana kebijakan yang digulirkan oleh Indonesia dan negara penerima pekerja migran dapat saling mendukung untuk menciptakan perlindungan yang lebih optimal bagi para pekerja.

Topik terbaru yang mengemuka dan relevan dalam beberapa waktu terakhir adalah dampak dari perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian global, dengan fokus pada dampaknya terhadap Indonesia. Mengapa konteks ini penting, sebab ini menjadi semacam “peristiwa tiba-tiba” yang menyesak rasa kemanusiaan kita. Maka sebagai bentuk sikap global bagi “katastrofi” tersebut maka dalam buku ini, sebuah analisis yang mendalam disajikan untuk menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dalam negeri harus beradaptasi dengan fluktuasi yang terjadi akibat ketegangan internasional ini.

Buku ini juga menyajikan pemikiran-pemikiran strategis terkait diplomasi komersial, seperti yang tercermin dalam kolaborasi antara Jawa Timur dan Tiongkok dalam bidang perdagangan dan industri. Proses *business matching* yang diinisiasi oleh pemerintah daerah menunjukkan bagaimana diplomasi ekonomi menjadi alat yang efektif dalam memperkuat posisi tawar ekonomi Indonesia di pasar global.

Pada akhirnya, buku ini merupakan sebuah refleksi dan pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan internasional dan bagaimana negara-negara, baik besar maupun kecil, berusaha untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat domestik tetapi juga memperhitungkan konteks global yang semakin saling terhubung. Setiap bab menyajikan tantangan yang harus dihadapi serta inovasi dan transformasi yang dihadirkan untuk mencapainya. Melalui penyajian yang sistematis dan berbasis data terkini, buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi para akademisi, peneliti, praktisi diplomasi, serta pengambil kebijakan yang tengah terlibat dalam upaya memahami dan merespon perubahan global yang terjadi.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi, referensi, dan pemahaman yang lebih luas bagi pembaca yang ingin mendalami topik-topik terkait diplomasi, pembangunan, dan tantangan global di era modern ini. Selamat Membaca...

Surabaya, Mei 2025

Zaky Ismail



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB 1 KEBIJAKAN A THRIVING ECONOMY MOHAMMAD BIN SALMAN MENCAPAI SAUDI VISION 2030</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Pemberian Kesempatan (Rewarding Opportunities) .....	4
C. Investasi Jangka Panjang ( <i>Investing For The Long-Term</i> ) .....	7
D. Terbuka Untuk Bisnis ( <i>Open For Business</i> ).....	10
E. Memanfaatkan Posisi Unik yang Dimiliki ( <i>Leveraging Its         Unique Position</i> ) .....	13
F. Kesimpulan .....	14
<b>BAB 2 HEGEMONIC STABILITY: DINAMIKA HUBUNGAN ARAB SAUDI-IRAN PASCA KEHADIRAN TIONGKOK SEBAGAI KEKUATAN BARU DI TIMUR TENGAH</b> .....	<b>16</b>
A. Pendahuluan .....	16
B. Sejarah Konflik Arab Saudi dan Iran.....	19
C. Normalisasi Hubungan Arab Saudi-Iran oleh China .....	21
D. Pergeseran Hegemoni di Timur Tengah.....	22
E. Penutup.....	25
<b>BAB 3 GLOKALISME, DARI LOKAL KE GLOBAL: MENYOROTI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PENERAPAN SDGs</b> .....	<b>27</b>
A. Pendahuluan .....	27
B. Stunting .....	32

1. Peran Pemerintah Desa Sawaran Lor dalam Pencegahan Stunting .....	36
2. Penerapan Pencegahan Stunting SDGs Poin 2 .....	38
C. Kesimpulan .....	41
<b>BAB 4 PERAN BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN DENGAN SKEMA <i>SPECIAL PLACEMENT TO TAIWAN</i>.....</b>	<b>43</b>
A. Pendahuluan .....	43
B. Permasalahan <i>Job Order</i> PMI di Taiwan .....	47
C. Kerja Sama TETO dan KDEI Taipei Mengenai Perekrutan, Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia .....	48
D. Peran BP3MI dalam Pelaksanaan SP2T .....	50
1. Mempromosikan Skema SP2T melalui Web Resmi, Sosial Media Resmi BP3MI, dan <i>Job Fair</i> .....	52
2. Pendaftaran dan Verifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia.....	52
3. Fasilitator Pelaksanaan Seleksi Interview .....	52
4. Pendampingan Pengurusan Visa Kerja CPMI di TETO .....	53
5. Pelaksanaan Kelas Orientasi Pra Pemberangkatan ....	53
6. Menjadwalkan Keberangkatan PMI ke Taiwan .....	53
E. Penutup.....	54
<b>BAB 5 DIFUSI NORMA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (<i>INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES</i>) DI JAWA TIMUR .....</b>	<b>55</b>
A. Pendahuluan .....	55
B. Lokalisasi Norma Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012.....	59
C. Indonesia dan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.....	64
D. Difusi Norma Konvensi Internasional Melalui Undang Undang No. 18 Tahun 2017 .....	65

E.	Lokalisasi Norma Konvensi Internasional dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur .....	68
F.	Kesimpulan .....	74
<b>BAB 6</b>	<b>PERAN BP2MI DALAM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA SKEMA KERJA SAMA GOVERNMENT TO GOVERNMENT ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN ..</b>	<b>76</b>
A.	Pendahuluan .....	76
B.	Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dengan Korea Selatan .....	79
C.	Penempatan Pekerja Migran Indonesia .....	83
1.	Government to Government Korea Selatan.....	83
2.	Skema G to G Korea Selatan .....	84
3.	Pekerja Migran Indonesia Melalui Skema G to G 2023 .....	85
D.	Peran BP2MI dalam skema G to G .....	88
1.	Fasilitator Penempatan Pekerja Migran Indonesia ....	89
2.	Lembaga perlindungan hukum dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia .....	92
3.	Implementasi dari kebijakan UU No. 18 tahun 2017 dan Pengawasan standar kerja .....	92
E.	Kesimpulan .....	93
<b>BAB 7</b>	<b>UPAYA PEMERINTAH KOTA MADIUN MEMBANGUNCITRA GLOBAL: TRANSFORMASI KOTA KECIL MENUJU PANGGUNG INTERNASIONAL.....</b>	<b>94</b>
A.	Pendahuluan .....	94
B.	Walikota Madi dan Visi Internasional.....	95
C.	Kesimpulan .....	98
<b>BAB 8</b>	<b>ANALISIS PENUNJUKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK BERKOLABORASI DENGAN WORLD ORGANISATIONS FOR ANIMAL HEALTH DALAM PENANGANAN KESEHATAN IKAN OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA TAHUN 2022.....</b>	<b>100</b>
A.	Pendahuluan .....	100
B.	World Organisations for Animal Health (WOAH) .....	102



C.	Dasar Kolaborasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan <i>World Organisations for Animal Health</i> .....	103
D.	Tujuan Dipilihnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Untuk Berkolaborasi Dengan <i>World Organisations for Animal Health</i> .....	106
1.	Kesehatan Ikan, Manusia, dan Lingkungan .....	106
2.	Pembangunan Sektor Perikanan Yang Berkelanjutan .....	108
E.	Kesimpulan .....	109
<b>BAB 9</b>	<b>STRATEGI DIPLOMASI KOMERSIAL: <i>BUSINESS MATCHING</i> JAWA TIMUR-TIONGKOK DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR</b> .....	<b>111</b>
A.	Pendahuluan .....	111
B.	Diplomasi Komersial Sebagai Kerangka Berpikir .....	112
C.	<i>Business matching</i> dan Strategi Diplomasi Komersial Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Tiongkok .....	115
D.	Kesimpulan .....	119
<b>BAB 10</b>	<b>DAMPAK PERANG UKRAINA DAN RUSSIA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA ....</b>	<b>120</b>
A.	Pendahuluan .....	120
B.	Dampak Perang terhadap Pasokan Energi .....	122
C.	Dampak Perang terhadap Ketahanan Pangan .....	123
D.	Dampak pada Sektor Investasi.....	125
E.	Peluang yang Muncul akibat Perang.....	127
F.	Langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perang.....	129
G.	Kesimpulan .....	131
<b>BAB 11</b>	<b>ANALISIS PUBLIC DIPLOMACY DALAM ACARA SURABAYA CROSS CULTURE INTERNATIONAL FOLK ART FESTIVAL TAHUN 2023</b> .....	<b>133</b>
A.	Pendahuluan .....	133
B.	Diplomasi Publik Sebagai Kerangka Konseptual .....	135
C.	SCCF dan Diplomasi Publik Pemkot Surabaya .....	138
D.	Kesimpulan .....	144
<b>BAB 12</b>	<b>ANALISIS BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) JAWA TIMUR DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI TAIWAN TAHUN 2022 .</b>	<b>146</b>

A. Pendahuluan.....	146
B. Kerja Sama Indonesia dan Taiwan .....	147
C. Manfaat Jaminan Sosial Bagi PMI .....	148
D. Kecelakaan Kerja Pada PMI .....	150
E. Peran BP3MI Jawa Timur .....	151
F. Kesimpulan .....	152
<b>BAB 13 UPAYA PROMOSI KERANGKA KERJA SENDAI 2015-2030 OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MITIGASI BENCANA ALAM PADA FORUM UCLG ASPAC TAHUN 2019 .....</b>	<b>154</b>
A. Pendahuluan.....	154
B. Konsep Upaya Promosi.....	157
C. Konsep Kerangka Kerja Sendai atau <i>Sendai Framework For Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .....	157
D. United Cities and Local Government in Asia Pacific Council Meeting and Disaster Risk Reduction and Management Forum 2019 .....	158
E. Teori Manajemen Perkotaan .....	159
F. <i>United Cities and Local Government In Asia Pacific</i> dan Keanggotaan Kota Surabaya.....	160
G. Kondisi Kota Surabaya Sebelum Mengadopsi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Target E .....	163
H. Kondisi Kota Surabaya Setelah Mengadopsi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Target E .....	166
I. Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Diadopsi Oleh Kota Lain di Kawasan Asia Pasifik.....	172
J. Prestasi Kota Surabaya Dalam Manajemen Perkotaan dan Pelaksanaan Mitigasi Bencana Alam.....	175
K. Promosi Kerangka Kerja Sendai 2015 -2030 Oleh Pemerintah Kota Surabaya pada <i>United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019 and Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Forum</i> .....	177
L. Kesimpulan .....	179
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>181</b>

# BAB 1

## KEBIJAKAN A *THRIVING ECONOMY* MOHAMMAD BIN SALMAN MENCAPAI SAUDI VISION 2030

*Ahmad Ziyad, S.Sos | Zaky Ismail, M.S.I | Moh. Fathoni Hakim M.Si*

### A. Pendahuluan

Kerajaan Arab Saudi (KSA) secara faktual merupakan salah satu negara terbesar di kawasan Timur Tengah. Namun wilayah yang besar tersebut hanya mampu memproduksi sekitar 1% saja. Selebihnya wilayah KSA merupakan wilayah gurun pasir yang kering, sehingga persebaran penduduk menjadi tidak merata. Distribusi penduduk KSA terkonsentrasi di daerah perkotaan dengan tingkat urbanisasi dan pusat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada akhirnya terjadi di perkotaan seperti Makkah, Riyadh dan beberapa kota di Kawasan Timur dikarenakan lapangan kerja yang melimpah dan dikerjakannya berbagai proyek infrastruktur oleh pemerintah di sana. Sebagai negara yang berada di tengah Jazirah Arabia, KSA memiliki lokasi strategis untuk akses jalur darat, laut, dan bahkan jalur udara. Wilayah ini juga berbatasan dengan dua rute yang menjadi rute tersibuk di dunia, yaitu Terusan Suez dan Laut Merah, yang mengarah ke Laut Persia (Ghafur, 2019).

KSA, sesuai namanya mengadopsi sistem monarki absolut sebagai sistem negara, dimana raja dan keluarga kerajaan merupakan pemegang otoritas tertinggi. Bahkan dalam banyak hasil kajian para akademisi dan analisis media, disebutkan bahwa pemerintahan KSA adalah negara dengan sistem politik yang bersifat oligarki. Hal ini bisa dilihat dari model penerapan sistem kekuasaan sebagaimana tercermin dalam susunan menteri di kabinetnya. Oleh karenanya, semua kekuatan politik di KSA secara otoritatif ada di tangan raja, sementara rakyat Saudi hanya bisa menerima sebagai keputusan kerajaan. Sistem ini mengakar kuat



dalam budaya masyarakat Saudi dan dengan senang hati dijalankan oleh orang-orang yang umumnya dihormati. Karena status negara diturunkan melalui keluarga, maka keluarga kerajaan memiliki kekuatan khusus yang memudahkan kerajaan untuk mengelola seluruh wilayah KSA. Ini akan memungkinkan Arab Saudi untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Akibatnya, masyarakat Saudi tidak memiliki kekuatan untuk berinovasi secara bebas, dan seperti mereka tidak punya pilihan selain mengikuti pedoman yang ditetapkan pemerintah (Aziz, 2017).

Arab Saudi adalah pengeksport minyak terbesar di dunia. Arab Saudi telah menjadi produsen minyak terbesar di dunia sejak menemukan cadangan minyaknya pada tahun 1938. Negara tersebut berhasil menguasai pasar minyak dunia dan menjadi pemasok utama minyak ke berbagai negara di dunia. Produksi minyak harian yang besar memungkinkan Arab Saudi untuk mengontrol produksi minyak di Timur Tengah. Berkat produksi minyak ini, perekonomian Arab Saudi berkembang sangat pesat, yang sangat bermanfaat bagi negara (EIA SAUDI ARABIA, 2021).

Pada tahun 2014, harga minyak turun secara signifikan. Harga telah turun di bawah \$50 dari harga awal \$100 per barel, dan harga minyak diperkirakan tidak akan segera pulih. Masalahnya mengancam stabilitas ekonomi Saudi, yang secara tradisional mengandalkan sektor minyak. Ini dibuktikan dengan pendapatan minyak dan non-minyak Saudi. Ketergantungan ini telah menyebabkan ekonomi Saudi mengalami defisit 367 miliar riyal (\$97,9 miliar) (KPMG, 2019).

Pada bulan April 2016, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mengumumkan "Saudi Vision 2030", membuat Arab Saudi menjadi perhatian. Hal ini karena Saudi Vision 2030 mengandung tujuan yang sangat berbeda dengan Arab Saudi pada umumnya. Mereka tidak hanya berusaha mengekang pendapatan ekspor minyak, tetapi juga berusaha mengurangi ketergantungan negara pada minyak dengan menggandakan harga bahan bakar. Visi Saudi 2030 mencakup tujuan reformasi dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak dan membangun sistem ekonomi yang lebih moderat (Naseem & Dhruva, 2017).

Kebijakan ini sejalan dengan beberapa norma dalam Pasal 3 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Desember 1979, yang melindungi kebebasan dasar hak asasi perempuan dan kesetaraan dengan laki-

laki. Kebebasan ini harus mencakup semua bidang, terutama politik, sosial, ekonomi dan budaya. Demikian pula, pasal 8 menyerukan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili pemerintah di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi internasional atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, tanpa diskriminasi. Dia mengatakan negara-negara perlu mengambil tindakan. tanpa diskriminasi. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi, Arab Saudi harus mematuhi semua persyaratan CEDAW untuk mengecualikan orang-orang yang mendiskriminasi perempuan.(Rodi, 2009)

Adapun beberapa studi yang juga meneliti kebijakan Arab Saudi dari segmentasi lain seperti dari jurnal dari Muhammad Ali. Dalam tulisannya menerangkan bahwa kebijakan yang ditempuh MBS sehubungan dengan postur militer Arab Saudi di kawasan akan berdampak kuat pada ambisi MBS dalam mengimplementasikan program Saudi Vision 2030 (Ali, 2021). Arab Saudi mengalami defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi melambat akibat anjloknya harga minyak dunia. Tapi bukan berarti keuangan Arab Saudi dalam krisis. Negara ini masih memiliki mata uang asing yang cukup untuk berinvestasi di banyak negara untuk mencapai visinya dan mewujudkan ambisinya (Sianturi, 2017). Saudi Vision 2030 merupakan program yang dicanangkan oleh Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dengan fokus pada sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik seperti: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan pariwisata (Hikmah & Abrar, 2019).

Peran Mohammed bin Salman sebagai putra mahkota berkontribusi pada modernisasi dan reformasi Arab Saudi. Perubahan dari konservatif ke modern adalah untuk mengakhiri ketergantungannya pada minyak bumi, sumber energi tak terbarukan yang bisa habis di masa depan (Adriansah, 2021). Menuju Visi Saudi 2030, Arab Saudi telah mencanangkan sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan citra Arab. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan citra Arab Saudi sebagai negara yang terbuka, efektif, dan aman untuk investasi (Adriansah, 2021).

Saudi Vision 2030 memiliki beberapa pilar utama yaitu *a vibrant society, a thriving economy, an ambitious nation*. Pangeran Mohammed bin Salman melakukan strategi tersebut yang berfokus pada perekonomian negara mereka agar Arab Saudi tidak terlalu bergantung pada penghasilan dari produksi minyak mereka



yang terus menurun. Terdapat banyak tinjauan literatur tentang kebijakan MBS terutama pada kebijakan Saudi Vision 2030. Namun penelitian yang memfokuskan pada salah satu dari pilar-pilar utama dari Saudi Vision masih belum banyak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan pada aspek *a thriving economy* sebagai salah satu pilar dari Saudi Vision 2030.

A thriving economy merupakan sebuah strategi ekonomi berkembang yang merupakan salah satu dari tiga pilar dalam Visi Saudi 2030, yang merupakan rencana komprehensif untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Tujuannya adalah untuk mengubah negara menjadi kekuatan investasi global dan membuat Arab Saudi menjadi pusat yang menghubungkan tiga benua. Adapun poin penting dalam strategi ini adalah sebagai berikut pemberian kesempatan (*rewarding opportunities*), investasi jangka panjang (*investing for the long-term*), terbuka untuk bisnis (*open for business*), memanfaatkan posisi unik yang dimiliki (*leveraging its unique position*). Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan untuk studi lebih lanjut tentang Saudi Vision 2030 dan kebijakan lainnya.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu “Bagaimana Mohammad bin Salman (MBS) melaksanakan gagasan *a thriving economy* dalam Saudi Vision 2030?”. Penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan Saudi Vision 2030 dalam pilar *a thriving economy*. Sementara itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan pembaharuan akademik, khususnya saat membahas implementasi Saudi Vision 2030.

## **B. Pemberian Kesempatan (Rewarding Opportunities)**

Keterampilan dan kompetensi anak-anak Arab Saudi adalah salah satu aset yang paling penting dan dihargai. Untuk memaksimalkan potensi mereka, Arab Saudi akan membangun budaya yang menghargai tekad, memberikan peluang untuk semua dan membantu semua orang memperoleh yang diperlukan. Keterampilan untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Untuk ini, Arab Saudi akan memperkuat kemampuan ekonomi agar menghasilkan peluang pekerjaan yang beragam dan melakukan paradigma baru dalam menarik talenta dan kualifikasi global.

Perekonomian akan memberikan kesempatan bagi semua orang baik itu laki-laki dan perempuan, tua dan muda sehingga mereka dapat berkontribusi dengan kemampuan terbaik mereka. Arab Saudi akan menempatkan penekanan baru pada pelatihan seumur hidup dan akan berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja Arab Saudi dengan mendorong budaya kinerja tinggi. Upaya ini akan dikoordinasikan oleh *Job Creation and Anti-Unemployment Commission* yang baru dibentuk. Salah satu aset terpenting Arab Saudi adalah masa muda yang hidup dan bersemangat. Arab Saudi akan menjamin keterampilan mereka dikembangkan dan digunakan dengan benar. Sementara banyak negara lain prihatin dengan populasi yang menua, lebih dari setengah populasi Saudi berusia di bawah 25 tahun. Arab Saudi akan memanfaatkan keuntungan demografis ini dengan memanfaatkan energi kaum muda Arab Saudi dan dengan memperluas peluang kewirausahaan dan usaha. (Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia, 2020)

Wanita Saudi adalah aset besar lainnya. Dengan lebih dari 50 persen lulusan universitas Arab Saudi adalah perempuan, Arab Saudi akan terus mengembangkan bakat mereka, berinvestasi dalam kemampuan produktif mereka dan memungkinkan mereka memperkuat masa depan mereka dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan ekonomi Arab Saudi. Arab Saudi juga akan memungkinkan para penyandang disabilitas untuk menerima pendidikan dan kesempatan kerja yang akan memastikan kemandirian dan integrasi mereka sebagai anggota masyarakat yang efektif. Mereka akan diberikan semua fasilitas dan alat yang diperlukan untuk menempatkan mereka di jalan menuju kesuksesan komersial.

Mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan membutuhkan lingkungan yang menarik keterampilan dan kemampuan yang diperlukan dari dalam dan luar Kerajaan. Arab Saudi akan meningkatkan kemampuan warga negara non-Saudi untuk memiliki properti di wilayah tertentu, meningkatkan kualitas hidup mereka, memungkinkan lebih banyak sekolah swasta didirikan, dan memperkenalkan sistem penerbitan visa yang efektif dan sederhana, penerbitan dan izin tinggal.

Tujuan Arab Saudi adalah untuk menarik dan mempertahankan orang-orang Saudi dan orang asing terbaik dan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Kehadiran warga negara non-Saudi di Kerajaan akan berkontribusi pada



pembangunan ekonomi dan memberikan tambahan akan menarik investasi asing. Dari beberapa tujuan yang ingin dicapai Arab Saudi pada sector pemberian kesempatan, berikut juga merupakan harapan yang ingin dicapai melalui Saudi Vision 2030 (Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia, 2020):

1. Menurunkan tingkat pengangguran dari 11,6% menjadi 7%
2. Meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDB dari 20% menjadi 35%
3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22% menjadi 30%

Arab Saudi akan menjembatani kesenjangan antara hasil pendidikan tinggi dan permintaan pasar tenaga kerja. Itu juga mendidik siswa dan membantu mereka membuat pilihan karir yang hati-hati sambil memfasilitasi transisi antara jalur pendidikan yang berbeda. Pada tahun 2030, ini bertujuan untuk memiliki setidaknya lima universitas Saudi di antara 200 universitas teratas dalam peringkat internasional. Arab Saudi membantu siswa Arab Saudi untuk mendapatkan skor di atas rata-rata internasional dalam indikator pendidikan global.

Untuk tujuan ini, Arab Saudi menyiapkan kurikulum modern yang berfokus pada standar literasi, numerasi, keterampilan, dan pembangunan karakter yang ketat. Lacak kemajuan dan publikasikan serangkaian hasil pendidikan yang berbeda yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Arab Saudi akan bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa hasil pendidikan tinggi memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Arab Saudi berinvestasi dalam kemitraan strategis dengan penyedia magang, seperti industri-industri baru dan perusahaan swasta besar. Arab Saudi juga berupaya membuat deskripsi pekerjaan untuk semua bidang pendidikan. Selain itu, membuat database siswa terpusat yang melacak siswa dari anak usia dini hingga K-12 dan pendidikan tinggi (perguruan tinggi dan kejuruan) untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, penilaian, dan hasil pendidikan.

Usaha kecil dan menengah (UKM) hanya menyumbang 20% terhadap PDB, namun kontribusi ini bisa mencapai 70% di negara maju. Terlepas dari upaya untuk meningkatkan lingkungan bisnis, UKM masih bertahan dalam proses hukum dan administrasi yang panjang dan rumit. Mereka juga berjuang untuk menarik keterampilan, kompetensi, dan pendanaan yang diperlukan karena

lembaga keuangan menyediakan kurang dari 5% dari total pendanaan, jauh di bawah rata-rata global.

Arab Saudi akan bekerja untuk meningkatkan akses ke keuangan dan mendorong lembaga keuangan untuk memberikan hingga 20% dari total pinjaman kepada UKM pada tahun 2030. Lembaga yang mengatur UKM di Arab Saudi baru-baru ini membuat rencana untuk meneliti undang-undang dan peraturan, menghilangkan hambatan, memfasilitasi akses ke keuangan, dan memungkinkan kaum muda orang dan pengusaha untuk memasarkan ide dan produk mereka. Pada saat yang sama, Arab Saudi akan terus membangun inkubator bisnis baru, lembaga pelatihan profesional, dan dana modal. Ini membantu pengusaha mengembangkan keterampilan dan jaringan mereka. Itu juga menggunakan e-commerce dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan internasional untuk membantu usaha kecil memasarkan dan mengeksport produk dan layanan mereka.

### C. Investasi Jangka Panjang (*Investing For The Long-Term*)

Diversifikasi ekonomi Arab Saudi sangat penting untuk keberlanjutannya. Meskipun minyak dan gas adalah pilar penting perekonomian, Arab Saudi telah mulai memperluas investasi ke sektor-sektor tambahan, Arab Saudi memahami bahwa ada tantangan-tantangan yang rumit ke depan, tetapi Arab Saudi punya rencana jangka panjang untuk mengatasinya. Dalam 25 tahun terakhir, ekonomi Saudi telah tumbuh dengan tingkat rata-rata tahunan lebih dari 4 persen, berkontribusi pada penciptaan jutaan industri baru.

Meskipun Arab Saudi sudah termasuk 20 perekonomian terbesar di dunia, ambisi ini bahkan lebih besar. Arab Saudi berharap untuk memiliki peringkat yang lebih tinggi pada tahun 2030, meskipun sulit perlambatan ekonomi global dan dampak yang diharapkan dari reformasi ekonomi struktural. Hal ini mengharuskan Arab Saudi untuk berinvestasi di semua sumberdaya untuk diversifikasi ekonomi, melepaskan kemampuan sektor ekonomi yang menjanjikan dan memprivatisasi beberapa layanan pemerintah.

Arab Saudi akan mengembangkan lebih lanjut kecanggihan sarana investasi Arab Saudi, terutama setelah mengalihkan kepemilikan Aramco ke Dana Investasi Publik, yang akan menjadi



dana kekayaan negara terbesar di dunia. Arab Saudi akan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan meningkatkan laba atas investasinya, dengan tujuan mendiversifikasi sumber daya pemerintah dan ekonomi Arab Saudi. Dana Investasi Publik tidak akan bersaing dengan sektor swasta, melainkan membantu membuka sektor-sektor strategis yang membutuhkan masukan modal yang intensif. Ini akan berkontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi yang sama sekali baru dan membangun korporasi nasional yang tahan lama. (Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia, 2020)

Arab Saudi akan mendukung industri yang menjanjikan dan mempromosikan keberhasilan mereka sehingga menjadi pilar baru ekonomi Arab Saudi. Di industri manufaktur, Arab Saudi akan berupaya menemukan energi terbarukan dan bidang peralatan industri. Di bidang pariwisata dan rekreasi, menciptakan atraksi yang memenuhi standar internasional tertinggi, meningkatkan prosedur pemberian visa kepada pengunjung, menyiapkan dan mengembangkan situs sejarah dan bersejarah. Di bidang teknologi, meningkatkan investasi dalam ekonomi digital dan memimpin ekonomi digital.

Seiring dengan diversifikasi ekonomi, Arab Saudi terus melakukan regionalisasi sektor minyak dan gas Arab Saudi. Arab Saudi tidak hanya akan menciptakan kota energi baru, tetapi juga menggandakan produksi gas dan membangun jaringan distribusi gas nasional. Arab Saudi juga memanfaatkan kepemimpinan dan keahlian global dalam perminyakan dan petrokimia untuk berinvestasi dalam pengembangan sektor tetangga dan pendukung. Meskipun Arab Saudi sangat percaya pada peran penting sektor swasta, saat ini kontribusinya kurang dari 40 persen dari PDB. Untuk meningkatkan kontribusi jangka panjangnya terhadap perekonomian, Arab Saudi akan membuka peluang investasi baru, memfasilitasi investasi, mendorong inovasi dan persaingan serta menghilangkan semua hambatan yang menghalangi sektor swasta untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan.

Dengan terus memperbaiki dan mereformasi peraturan, membuka jalan bagi investor dan sektor swasta untuk memperoleh dan memberikan layanan - seperti perawatan kesehatan dan pendidikan - yang saat ini disediakan oleh sektor publik. Arab Saudi akan berupaya mengalihkan peran pemerintah dari menyediakan layanan menjadi peran yang berfokus pada pengaturan dan pemantauannya, dan akan membangun kemampuan untuk

memantau transisi ini. Arab Saudi akan berupaya untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta dengan mendorong investasi, baik lokal maupun internasional, di bidang kesehatan, layanan kota, perumahan, keuangan, energi, dan sebagainya. Dari beberapa tujuan yang ingin dicapai Arab Saudi pada sector investasi jangka panjang, berikut juga merupakan harapan yang ingin dicapai melalui Saudi Vision 2030 (Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia, 2020):

1. Untuk berpindah dari posisi Arab Saudi saat ini sebagai ekonomi terbesar ke-19 di dunia menjadi 15 besar
2. Meningkatkan lokalisasi sektor migas dari 40% menjadi 75%
3. Meningkatkan aset Dana Investasi Publik, dari SAR 600 miliar menjadi lebih dari 7 triliun

Meskipun Kerajaan adalah pembelanja militer terbesar ketiga di dunia, hanya 2 persen dari pengeluaran ini ada di dalam Kerajaan. Sektor industri pertahanan nasional dibatasi hanya tujuh perusahaan dan dua pusat penelitian. Manfaat melokalkan industri pertahanan Arab Saudi sendiri tidak terbatas hanya pada pengurangan pengeluaran militer. Hal ini juga mendorong sektor industri lainnya seperti peralatan industri, komunikasi dan teknologi informasi, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Tujuan Arab Saudi adalah melokalkan lebih dari 50 persen pengeluaran peralatan militer pada tahun 2030. Arab Saudi telah mulai mengembangkan industri yang tidak terlalu rumit seperti industri yang menyediakan suku cadang, kendaraan lapis baja, dan amunisi dasar.

Lokalisasi akan dicapai melalui investasi langsung dan kemitraan strategis dengan perusahaan terkemuka di sektor ini. Langkah-langkah ini akan mentransfer pengetahuan dan teknologi, serta membangun keahlian nasional di bidang manufaktur, pemeliharaan, perbaikan, penelitian dan pengembangan. Arab Saudi telah diberkati dengan sumber daya mineral yang kaya seperti aluminium, fosfat, emas, tembaga, uranium, dan bahan mentah lainnya. Meskipun sektor pertambangan telah mengalami perbaikan untuk memenuhi kebutuhan industri, namun kontribusinya terhadap PDB masih belum sesuai harapan. Karena itu, Arab Saudi bertekad untuk memastikannya mencapai SAR 97 miliar pada tahun 2020, menciptakan 90.000 peluang kerja dalam prosesnya.

Arab Saudi sedang merencanakan sejumlah reformasi struktural, yang meliputi merangsang investasi sektor swasta



dengan mengintensifkan eksplorasi, membangun basis data sumber daya Kerajaan yang komprehensif, meninjau prosedur perizinan untuk ekstraksi, berinvestasi dalam infrastruktur, mengembangkan metode pendanaan, dan mendirikan pusat keunggulan. Arab Saudi juga akan membentuk kemitraan strategis internasional dan meningkatkan daya saing dan produktivitas perusahaan nasional Arab Saudi. Ini akan meningkatkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan sektor, serta lokalisasi pengetahuan dan keahlian.

Meskipun Arab Saudi memiliki potensi alam yang mengesankan untuk tenaga surya dan angin, dan konsumsi energi lokal meningkat tiga kali lipat pada tahun 2030, Arab Saudi masih kekurangan sektor energi terbarukan yang kompetitif saat ini. Untuk membangun sektor ini, Arab Saudi telah menetapkan target awal untuk menghasilkan 9,5 gigawatt energi terbarukan. Arab Saudi juga akan berupaya melokalkan sebagian besar rantai nilai energi terbarukan dalam ekonomi Saudi, termasuk penelitian dan pengembangan, dan manufaktur, di antara tahapan lainnya.

Dari input seperti silika dan petrokimia, hingga keahlian ekstensif dari perusahaan terkemuka Saudi Arab Saudi dalam produksi berbagai bentuk energi, Arab Saudi memiliki semua bahan mentah untuk sukses. Arab Saudi akan mempraktikkannya dengan peluncuran Inisiatif Energi Terbarukan Raja Salman yang akan datang. Arab Saudi akan meninjau kerangka hukum dan peraturan yang memungkinkan sektor swasta membeli dan berinvestasi di sektor energi terbarukan. Untuk melokalkan industri dan menghasilkan keahlian yang diperlukan, Arab Saudi juga akan mendorong kemitraan publik-swasta. Terakhir, Arab Saudi akan menjamin daya saing energi terbarukan melalui liberalisasi pasar bahan bakar secara bertahap.

#### **D. Terbuka Untuk Bisnis (*Open For Business*)**

Membuka Arab Saudi lebih lanjut untuk bisnis akan meningkatkan produktivitas dan muluskan perjalanan Arab Saudi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Arab Saudi akan terus mengembangkan kemitraan publik swasta untuk lebih mendorong arus investasi swasta dan meningkatkan daya saing. Arab Saudi mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan pembelaan layanan. Berkoordinasi dengan legislator untuk meninjau peraturan saat ini dengan tujuan meningkatkan lingkungan bisnis dan memperkuat kontrak.



Alokasikan area utama di dalam kota untuk pusat pendidikan, ritel, dan hiburan, alokasikan area pantai yang luas untuk proyek pariwisata, dan persil yang sesuai untuk proyek industri. Arab Saudi memungkinkan bank dan lembaga keuangan lainnya menyesuaikan produk dan layanan keuangan mereka untuk memenuhi kebutuhan setiap sektor, mulai dari pembiayaan proyek besar hingga modal kerja jangka pendek untuk UKM. Ini juga mempercepat dan mempercepat proses perizinan berdasarkan prioritas ekonomi masing-masing negara. Arab Saudi secara ketat menerapkan peraturan hukum dan komersial internasional untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investasi jangka panjang.

Arab Saudi akan berusaha untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang di pelabuhan dan untuk memudahkan prosedur kepabeanan. Dengan cara ini, dapat menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor dalam dan luar negeri dan mendapatkan kepercayaan pada ketahanan dan potensi ekonomi Arab Saudi. Pekerjaan terhenti di beberapa kota, sementara yang lain menghadapi tantangan yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Arab Saudi bekerja sama dengan Aramco untuk membangun kembali Kota Ekonomi Jizan. Arab Saudi akan berupaya menyelamatkan kota-kota ekonomi lainnya, terutama yang memiliki keunggulan komparatif. Untuk mencapai hal ini, Arab Saudi akan bekerja sama dengan perusahaan pemilik kota-kota ini untuk mengubah dan merelokasi fasilitas penting. Upaya ini bergantung pada kemauan perusahaan-perusahaan tersebut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Tujuan Arab Saudi adalah agar kota-kota ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan menarik investasi berkualitas serta talenta lokal dan internasional. Semua ini sejalan dengan prioritas nasional.

Arab Saudi akan mempertimbangkan keunggulan komparatif dari berbagai wilayah Kerajaan, menilai kelayakan sektor yang menjanjikan, dan kemudian menetapkan zona khusus seperti logistik, pariwisata, industri, dan keuangan. Zona ini memiliki peraturan komersial khusus untuk mempromosikan peluang investasi dan mendiversifikasi pendapatan pemerintah. Arab Saudi berencana untuk meningkatkan efisiensi sistem pendukung pemerintah dan memanfaatkan manfaatnya sebaik-baiknya dengan mengarahkannya kembali dan menargetkan warga negara dan sektor ekonomi yang memenuhi syarat. Misalnya, memahami bahwa memberikan subsidi tanpa kriteria kelayakan yang jelas merupakan hambatan besar bagi daya saing sektor energi. Harga



pasar bebas, dalam jangka panjang, akan merangsang produktivitas dan daya saing di antara perusahaan utilitas dan membuka pintu bagi investasi dan diversifikasi bauran energi di Kerajaan. Arab Saudi juga akan berusaha untuk menetapkan kriteria subsidi yang jelas berdasarkan kematangan sektor ekonomi, kemampuan mereka untuk bersaing secara lokal dan internasional dan kebutuhan aktual mereka akan subsidi, tanpa membahayakan sektor yang menjanjikan dan strategis. Dari beberapa tujuan yang ingin dicapai Arab Saudi pada sector terbuka untuk bisnis, berikut juga merupakan harapan yang ingin dicapai melalui Saudi Vision 2030 (Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia, 2020):

1. Untuk bangkit dari posisi Arab Saudi saat ini di 25 menjadi 10 negara teratas di Global Competitiveness Index
2. Meningkatkan investasi asing langsung dari 3,8% ke tingkat internasional 5,7% dari PDB
3. Meningkatkan kontribusi sektor swasta dari 40% menjadi 65% dari PDB

Selama dekade terakhir, sektor ritel mencapai tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 10 persen. Saat ini mempekerjakan 1,5 juta pekerja, dimana hanya 0,3 juta orang Saudi. Ritel tradisional juga masih mendominasi 50 persen pasar di Kerajaan dibandingkan dengan 20 persen di sejumlah negara di Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dengan pasar ritel Arab Saudi menderita keterbatasan penetrasi perdagangan modern dan e-commerce. Arab Saudi bertujuan untuk memberikan peluang kerja bagi satu juta orang Saudi tambahan pada tahun 2020 di sektor ritel yang berkembang yang menarik merek modern, lokal, regional, dan internasional di seluruh wilayah negara.

Infrastruktur digital yang canggih merupakan bagian integral dari kegiatan industri maju saat ini. Ini menarik investor dan meningkatkan daya saing fundamental ekonomi. Arab Saudi akan bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi, terutama broadband berkecepatan tinggi, memperluas cakupan dan kapasitasnya di dalam dan sekitar kota serta meningkatkan kualitasnya. Sasaran khusus Arab Saudi adalah melampaui 90 persen cakupan perumahan di kota-kota padat penduduk dan 66 persen di zona perkotaan lainnya. Arab Saudi juga akan mengembangkan standar bangunan untuk memfasilitasi perluasan jaringan broadband. Arab Saudi akan memperkuat tata kelola transformasi digital melalui dewan nasional. Selain itu, Arab Saudi

akan meningkatkan peraturan Arab Saudi dan menjalin kemitraan yang efektif dengan operator telekomunikasi untuk mengembangkan infrastruktur penting ini dengan lebih baik. Arab Saudi juga akan mendukung investasi lokal di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi.

## **E. Memanfaatkan Posisi Unik yang Dimiliki (*Leveraging Its Unique Position*)**

Arab Saudi tepat di persimpangan rute perdagangan internasional penting, antara tiga benua: Asia, Eropa dan Afrika. Karena itu Arab Saudi akan memaksimalkan keuntungan dari posisi geografis luar biasa dan strategis. Arab Saudi telah banyak berinvestasi dalam membangun pelabuhan, rel kereta api, jalan raya, dan bandara. Untuk memaksimalkan nilai investasi ini, Arab Saudi berencana untuk bekerja sama dengan sektor swasta dan menjalin serangkaian kemitraan internasional baru untuk melengkapi, meningkatkan, dan menghubungkan infrastruktur di dalam dan lintas batas. Aku disini. Ini juga membebaskan infrastruktur “keras” dengan sistem yang memungkinkan kinerja lebih tinggi, seperti tata kelola yang lebih ketat, proses yang lebih efisien, dan sistem kepastian yang lebih efisien. Arab Saudi meningkatkan dan menegakkan hukum dan peraturan yang ada. Maskapai penerbangan, perusahaan pelayaran, dan maskapai lain didorong untuk memanfaatkan kemampuan mereka sebaik mungkin. Menciptakan koneksi permanen antara pusat perdagangan yang ada dan membuka jalur perdagangan baru. Ini memperkuat posisi Arab Saudi sebagai gerbang logistik unik ke tiga benua. (Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia, 2020)

Dengan PDB sebesar SAR 2,4 triliun, ekonomi Arab Saudi sudah menjadi yang terbesar di Timur Tengah. Arab Saudi menikmati hubungan ekonomi yang erat dengan *Gulf Cooperation Council* dan negara-negara Arab lainnya, serta hubungan yang konstruktif dengan negara-negara Islam dan asing. Arab Saudi akan berupaya membangun kemitraan bisnis baru dan memfasilitasi arus barang, orang, dan modal yang lebih lancar. Di antara prioritas utama Arab Saudi adalah memperkuat dan memperluas interkoneksi dan integrasi ekonomi kami dengan negara-negara *Gulf Cooperation Council* lainnya. Arab Saudi akan berusaha untuk menyelesaikan proses penerapan pasar bersama GCC, menyatukan bea cukai, kebijakan ekonomi dan hukum, dan



membangun jaringan jalan raya dan kereta api bersama. Arab Saudi akan berusaha untuk terhubung secara efektif dengan negara-negara lain di kawasan ini, melalui layanan logistik yang ditingkatkan.

Fokus pada bidang keunggulan komparatif, kekuatan dan kepemimpinan nasional, daripada persaingan habis-habisan. Pertama, terutama perminyakan, petrokimia, perbankan, telekomunikasi, makanan, kesehatan, dan ritel. Arab Saudi juga akan mendukung perusahaan Saudi dengan peluang pertumbuhan yang menjanjikan dan berusaha untuk menjadi pemimpin regional dan global baru. Terakhir, Arab Saudi mendukung penuh industri dalam negeri untuk membantu menjual ke luar negeri dan mengekspor produk Arab Saudi. Dari beberapa tujuan yang ingin dicapai Arab Saudi pada sector pemanfaatan posisi unik, berikut juga merupakan harapan yang ingin dicapai melalui Saudi Vision 2030 (Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia, 2020):

1. Untuk menaikkan peringkat global Arab Saudi dalam Indeks Kinerja Logistik dari 49 menjadi 25 dan memastikan Kerajaan menjadi pemimpin regional.
2. Meningkatkan pangsa ekspor nonmigas dalam PDB nonmigas dari 16% menjadi 50%.

## F. Kesimpulan

*A thriving economy* merupakan sebuah strategi ekonomi berkembang yang merupakan salah satu dari tiga pilar dalam Visi Saudi 2030, yang merupakan rencana komprehensif untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Tujuannya adalah untuk mengubah negara menjadi kekuatan investasi global dan membuat Arab Saudi menjadi pusat yang menghubungkan tiga benua.

Secara keseluruhan, Visi Saudi 2030 bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih dinamis, terdiversifikasi, dan berkelanjutan yang kurang bergantung pada pendapatan dari minyak. Dengan mengejar tujuan ini, pemerintah berharap memberikan peluang baru bagi warga Saudi dan menciptakan masa depan yang lebih makmur bagi kerajaan.

Dengan demikian keputusan Pangeran Mohammed bin Salman untuk menggunakan strategi liberalisasi untuk mencapai Visi Saudi 2030 adalah mengakhiri ketergantungan Arab Saudi pada minyak tanpa membahayakan permukiman Saudi. Arab Saudi berikutnya sebagai negara yang dikenal memegang kekuasaan di

dunia global, Arab Saudi perlu membuat dirinya lebih terlihat di dunia internasional, termasuk dengan menciptakan kerja sama ekonomi dan kesepakatan antara kedua negara. Ini tidak hanya akan membantu reputasi Arab Saudi di dunia, tetapi juga perkembangan ekonomi negara untuk mencapai Visi Saudi 2030.



# BAB 2

## **HEGEMONIC STABILITY: DINAMIKA HUBUNGAN ARAB SAUDI-IRAN PASCA KEHADIRAN TIONGKOK SEBAGAI KEKUATAN BARU DI TIMUR TENGAH**

*Fabian Widyadhana*

### **A. Pendahuluan**

Timur Tengah telah menjadi pusat perhatian dunia tidak hanya karena konflik sektarian yang terus membara, tetapi juga karena posisinya yang strategis sebagai pusat sumber daya minyak dan gas global. Dengan lebih dari 50% cadangan minyak dunia berada di wilayah ini, Timur Tengah menjadi daya tarik bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Tidak hanya itu, jalur perdagangan seperti Selat Hormuz yang menjadi titik transit utama perdagangan energi dunia menambah signifikansi strategis kawasan ini. Dalam beberapa dekade terakhir, intervensi kekuatan global telah memperumit konflik yang ada. Peran Amerika Serikat sebagai hegemon tradisional di kawasan sering kali dianggap memihak dan kontroversial, menciptakan celah yang kini dimanfaatkan oleh China untuk memperluas pengaruhnya melalui pendekatan ekonomi. Pendekatan non-intervensi China dinilai sebagai alternatif bagi negara-negara Timur Tengah yang lelah dengan dominasi militer dan politik Amerika Serikat

Timur Tengah dan konflik adalah dua hal yang tak terpisahkan. Salah satu contoh yaitu konflik antara Arab Saudi dan Iran. Ketika Arab Saudi dan Iran baru saja berdiri sebagai negara, hubungan bilateral mereka berjalan baik. Pada tahun 1929, Arab Saudi dan Iran menandatangani Perjanjian Persahabatan Saudi-Iran yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam membangun hubungan politik, diplomatik, dan perdagangan di antara keduanya. Perjanjian tersebut berjalan dengan relatif stabil hingga

tahun 1943. Namun, pada tahun 1979, terjadi peristiwa bersejarah di Iran dengan berdirinya Republik Islam. Revolusi ini menggulingkan pemerintahan sebelumnya yang bersifat sekuler di Iran di bawah kepemimpinan Syah Pahlevi, dan menggantinya dengan pemerintahan teokratik Syi'ah di bawah kepemimpinan Imam Khomeini. Sejak tahun 1979, identitas telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pandangan Arab Saudi dan Iran terhadap satu sama lain. Agama menjadi elemen terpenting dalam identitas kedua negara tersebut.<sup>1</sup>

Agama merupakan dasar legitimasi bagi Arab Saudi dan Iran<sup>2</sup>. Kedua negara ini menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik mereka, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam implementasi agama yang berasal dari dua ideologi yang berbeda, yang sangat mempengaruhi keduanya. Arab Saudi menganut mazhab Sunni, sedangkan Iran menganut mazhab Syi'ah. Setelah Revolusi Iran, hubungan antara Arab Saudi dan Iran terus memburuk karena perbedaan ideologi ini, sedangkan Arab Saudi melihat kemunculan Republik Islam Iran sebagai ancaman. Ketegangan ini dimulai pada tahun 1980-an saat pecahnya Perang Iran-Irak. Konflik Iran-Irak ini dipenuhi dengan sentimen mazhab, dianggap sebagai benturan antara mazhab Syi'ah dan Sunni setelah revolusi 1979.<sup>3</sup> Arab Saudi dan Iran tidak terlibat langsung dalam konflik terbuka, tetapi mereka menggunakan *proxy war* untuk melindungi kepentingan nasional mereka, seperti yang terjadi di Suriah, Irak, dan Yaman. Kedua negara selalu mempertimbangkan kelompok ideologi yang mereka dukung dalam mengambil posisi, yang menunjukkan betapa besarnya perbedaan antara Sunni dan Syi'ah dalam mempengaruhi dinamika hubungan antara Arab Saudi dan Iran di kawasan ini.

Gejolak Arab Spring menjadi arena *proxy war* antara aliansi Arab Saudi dan aliansi Iran.<sup>4</sup> Arab Spring merujuk pada gelombang gerakan perlawanan rakyat yang pro-demokrasi dan menuntut perubahan politik di Timur Tengah. Dalam konflik di Suriah, Arab Saudi mendukung oposisi terhadap rezim, sementara Iran secara penuh mendukung Presiden Bashar al-Assad. Kedua negara

---

<sup>1</sup> Tali R. Grumet, "New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran's Rivalry," (Thesis, University of Denver, 2015).

<sup>2</sup> Mohamed Huwaidin, "The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations," *Review of History and Political Science* 2, no. 2 (Desember 2015).

<sup>3</sup> Ahmad Sahide. *Ketegangan Politik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah*, (Yogyakarta: The Pinisi Press, 2013).

<sup>4</sup> Mustahyun, "Rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah pada Arab Spring Suriah Tahun 2011-2016," *Journal of Islamic World and Politics* 1, no. 1 (Juli 2017).



memberikan dukungan finansial dan militer. Keberadaan Arab Saudi dan Iran di Suriah menegaskan pentingnya wilayah tersebut dalam mencapai pengaruh politik di Timur Tengah. Sementara itu, dalam konflik di Yaman antara pemerintahan Yaman dan kelompok pemberontak Houthi, Iran terlibat dengan mengirim bantuan pelatihan militer kepada militan Houthi, persenjataan, dan dana untuk perang. Keterlibatan Iran di Yaman memicu tanggapan Arab Saudi yang meluncurkan kebijakan intervensi militer di Yaman untuk mengembalikan Presiden Hadi dan menghentikan pemberontakan Houthi yang didukung oleh Iran.<sup>5</sup> Selain keterlibatan di Suriah dan Yaman, rivalitas Iran dan Arab Saudi juga terlihat dalam dinamika politik Lebanon. Iran, melalui dukungannya terhadap kelompok Hizbullah, memiliki pengaruh besar dalam politik Lebanon, yang sering kali ditentang oleh Arab Saudi yang mendukung koalisi Sunni. Rivalitas ini tidak hanya memengaruhi stabilitas Lebanon, tetapi juga menciptakan tantangan bagi keamanan regional. Lebih jauh, konflik antara kedua negara juga tercermin dalam dukungan yang diberikan kepada berbagai kelompok Palestina. Iran, melalui Hamas dan Jihad Islam, menegaskan posisinya sebagai pendukung perlawanan terhadap Israel, sementara Arab Saudi cenderung mendukung pendekatan diplomatik dengan negara-negara Barat dalam menyelesaikan isu Palestina.

Perlu diperhatikan pula, bahwa ketegangan antara Saudi dan Iran tidak terlepas dari campur tangan negara-negara asing yang signifikan dalam mempengaruhi dinamika konflik di antara keduanya. Konflik antara Saudi dan Iran saat ini merupakan upaya mereka untuk mencapai hegemoni di Timur Tengah. Kedua negara ingin memperluas pengaruh mereka di wilayah ini. Namun, di balik konflik antara Saudi dan Iran, terdapat kekuatan besar yang turut berperan. Konflik ini muncul pada saat yang bersamaan dengan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana kedua kekuatan tersebut saling bersaing untuk memperebutkan pengaruh di dunia, terutama di Timur Tengah. Arab Saudi mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, sementara Iran bekerja sama dengan Uni Soviet. Hal ini dapat dilihat sebagai adanya proxy war yang melibatkan dua kekuatan adidaya dan

---

<sup>5</sup> Jeremy M. Sharp, *Yemen: Civil War and Regional Intervention*, (Congressional Research Service Report, 2021), <https://crsreports.congress.gov/>.



merupakan sisa-sisa masa Perang Dingin.<sup>6</sup> Dalam konflik ini, dapat diamati bahwa Arab Saudi dan Iran berada di dua sisi yang berbeda.

China, sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia, telah memainkan peran yang signifikan di Timur Tengah dalam dekade terakhir. Ketika dominasi Amerika Serikat atas kawasan tersebut menunjukkan tanda-tanda penurunan, China berhasil berperan sebagai mediator dalam mencapai kesepakatan bersejarah untuk memulihkan hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Hal ini menunjukkan bahwa China kemungkinan akan meningkatkan peran dan pengaruhnya di Timur Tengah, dan berpotensi menentang dominasi AS di kawasan yang kaya akan sumber daya minyak tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai di China beberapa waktu lalu, Arab Saudi dan Iran setuju untuk membuka kembali kedutaan mereka dan melakukan pertukaran duta besar setelah tujuh tahun hubungan diplomatik terputus akibat konflik.<sup>7</sup>

## B. Sejarah Konflik Arab Saudi dan Iran

Arab Saudi dan Iran, dua negara yang kuat di kawasan timur tengah, terlibat dalam perseteruan sengit untuk memperebutkan dominasi regional. Perseteruan yang telah berlangsung selama puluhan tahun di antara keduanya diperparah oleh perbedaan agama. Mereka masing-masing mengikuti salah satu dari dua cabang utama Islam, Iran sebagian besar adalah Muslim Syi'ah, sementara Arab Saudi melihat dirinya sebagai kekuatan Muslim Sunni terkemuka. Perpecahan keyakinan ini tercermin dalam peta Timur Tengah yang lebih luas, di mana negara-negara lain mayoritas juga menganut Syi'ah atau Sunni, beberapa di antaranya melihat ke Iran atau Arab Saudi sebagai sosok *guidance* di kawasan Timur Tengah.<sup>8</sup>

Secara historis, Arab Saudi, sebuah negara monarki dan rumah bagi tempat kelahiran Islam, melihat dirinya sebagai pemimpin dunia Muslim. Namun, hal ini ditantang pada tahun 1979 oleh revolusi Islam di Iran yang menciptakan jenis negara baru di wilayah tersebut. Implikasi dari peristiwa tersebut menggambarkan bahwa Iran memiliki kekuatan terhadap masyarakat Syi'ah untuk

<sup>6</sup> Yon Machmudi, *Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

<sup>7</sup> "Pengaruh Cina di Timur Tengah Meningkat," Deutsche Welle, diakses 29 Juni 2023. <https://www.dw.com/id/pengaruh-cina-di-timur-tengah-meningkat/a-65003091>.

<sup>8</sup> Utami, A. Nurdina, et. al., "Pengaruh Pertentangan Ideologi Sunni-Syi'ah Terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi-Iran di Timur Tengah," *Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 4, no. 1 (2018).



menggulingkan kekuasaan rezim monarki di Iran. Iran yang telah menjadi negara Islam revolusioner memiliki tujuan eksplisit untuk mengeksport model pemerintahannya ini ke kawasan Timur Tengah.<sup>9</sup> Lebih lanjut, Arab Saudi harus senantiasa melindungi rezim monarki di Timur Tengah dari penyebaran gagasan revolusioner Islam oleh Iran.

Selanjutnya, peristiwa lain yang menjelaskan alasan mengapa Iran dan Arab Saudi berkonflik yaitu adanya perang Iran-Irak tahun 1980-1988. Adapun perang tersebut membuat Arab Saudi melakukan intervensi untuk melindungi Irak yang merupakan negara sekutunya dari kebangkitan Syi'ah di Irak.<sup>10</sup> Di satu sisi, pemicu lainnya yang dapat berkontribusi dalam menciptakan konflik Iran dan Arab Saudi adalah adanya invasi Irak oleh Amerika Serikat 2003 yang mampu menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein yang juga didalamnya ditemukan perang saudara Sunni dan Syi'ah.<sup>11</sup> Adanya penggulingan kekuasaan Saddam Hussein tersebut dilakukan oleh populasi Syi'ah di Irak. Untuk itu, hal tersebut merupakan bukti bahwa kebangkitan Syi'ah di Timur Tengah semakin mengancam eksistensi dari Arab Saudi yang merupakan rival Iran.

Setelah adanya invasi Irak oleh Amerika Serikat tahun 2003, pemicu lainnya yang mendorong Arab Saudi dan Iran memiliki hubungan konflik satu sama lain yaitu adanya fenomena Arab Spring tahun 2010 di Mesir, Bahrain dan Tunisia. Fenomena tersebut memberikan gambaran mengenai aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut adanya demokrasi di kawasan Timur Tengah.<sup>12</sup> Maka dari itu, hal tersebut membuat Arab Saudi harus mempertahankan kekuasaan rezim monarki. Adapun pada awalnya konflik antara Iran dengan Arab Saudi dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan atau sektarianisme Sunni dan Syi'ah. Faktor ini dibuktikan dengan kekuatan proksi kedua negara yang mempertentangkan kedua aliran Islam tersebut sebagai asas pergerakannya. Namun, dalam perkembangannya konflik Iran dan Arab Saudi juga dipengaruhi oleh adanya kompetisi secara geopolitik khususnya di regional Timur Tengah, dapat dilihat dari persepsi keduanya mengenai supremasi kekuatan di Timur Tengah.

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Abdul H. Daud, et. al., "Hubungan Iran-Arab Saudi dan Kestabilan Rantau Timur Tengah," *Malaysian Journal of History, Politics & Strategy* 45, no. 1 (September 2019).

<sup>11</sup> Abdul H. Daud, et. al., "Hubungan Iran-Arab Saudi dan Kestabilan Rantau Timur Tengah."

<sup>12</sup> M. Muttaqien, "Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional dan Global," *Jurnal Global & Strategis* 15, no. 9 (2015).

## C. Normalisasi Hubungan Arab Saudi-Iran oleh China

Setelah konflik yang berkepanjangan dan mengancam stabilitas serta keamanan di Timur Tengah, akhirnya Arab Saudi dan Iran mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar mereka. Normalisasi hubungan ini disepakati di Beijing, China, pada Maret 2023 lalu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wang Yi, Direktur Kantor Komisi Urusan Luar Negeri China, Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, dan Menteri Negara dan Keamanan Nasional Arab Saudi, Musaad bin Mohammed Al Aiban. Keduanya sepakat untuk berdamai setelah China hadir untuk menjadi mediator. Faktor dimulainya normalisasi ini karena Iran merasa semakin terisolasi di panggung internasional dan Arab Saudi yang mengubah kebijakan luar negerinya untuk lebih fokus pada diplomasi ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), telah berupaya memperbaiki hubungan dengan beberapa rival regional mereka. Oleh karena itu, sebelum kedutaan besar dibuka kembali, Arab Saudi dan Iran terlebih dahulu membahas cara untuk mengakhiri.

China memiliki kepentingan dalam meningkatkan hubungan transportasi dengan negara-negara di wilayah Timur Tengah untuk mendukung tercapainya Belt and Road Initiative (BRI). Pada tahun 2015, China resmi menjadi importir minyak mentah terbesar di dunia, dengan hampir sebagian pasokannya berasal dari Timur Tengah. Sebagai strategi kawasan yang menghubungkan jalur perdagangan antara Asia, Eropa, dan Afrika, Timur Tengah memiliki peran penting dalam keberhasilan BRI. Oleh karena permusuhan di antara mereka. itu, China merasa perlu untuk menciptakan stabilitas dan menghilangkan hambatan di kawasan tersebut demi mencapai kepentingan nasionalnya. kerja sama China di Timur Tengah berfokus pada sektor energi, pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan investasi. Namun, tidak ada kerja sama keamanan yang terjerat, karena keterlibatan China di wilayah ini tidak bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politiknya.

Keberhasilan mediasi China dalam merestorasi hubungan Arab Saudi dan Iran tidak lepas dari pendekatan pragmatis yang didukung oleh kerja sama ekonomi yang sudah terjalin lama. Proyek Belt and Road Initiative (BRI) menjadi faktor penting yang



mendorong stabilitas di kawasan. Melalui BRI, China tidak hanya membangun infrastruktur transportasi, tetapi juga mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara Timur Tengah dengan Asia. Misalnya, investasi besar-besaran China di pelabuhan dan jaringan transportasi di Teluk Persia membuka peluang untuk memperkuat perdagangan regional yang lebih stabil.

China juga telah lama mengembangkan hubungan ekonomi dan politik yang kuat dengan Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi merupakan pemasok minyak terbesar bagi China, dengan nilai perdagangan antara kedua negara mencapai 87 miliar dolar AS pada tahun 2021. Sedangkan perdagangan antara Iran dan China mencapai lebih dari 16 miliar dolar AS pada tahun yang sama. Sebanyak 30 persen dari total perdagangan luar negeri Iran bergantung pada China, yang telah berjanji untuk melakukan investasi senilai 400 miliar dolar AS di Iran selama 25 tahun. Presiden China, Xi Jinping, secara langsung terlibat dalam kekacauan damai dengan melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi pada Desember 2022, sementara Presiden Iran, Ebrahim Raisi, mengunjungi Beijing pada bulan Februari yang lalu.

#### **D. Pergeseran Hegemoni di Timur Tengah**

Suksesnya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran telah menempatkan China dalam peran utama dalam politik Timur Tengah, sebuah posisi yang sebelumnya sering dipegang oleh Amerika Serikat. Hegemoni AS di Timur Tengah telah berlangsung sejak 1990, ketika cadangan minyak di wilayah ini ditemukan. Dengan kekuatannya, AS berhasil mendapatkan dukungan dari para pemimpin negara-negara di Timur Tengah untuk menjalankan agenda politiknya. Selain itu, AS juga memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi dalam kebijakan ekonomi di kawasan tersebut. Bersekutu dengan AS dalam berbagai persoalan di Timur Tengah dapat dilihat dari berbagai kebijakannya, terutama dalam konflik antara Arab Saudi dan Iran. Amerika Serikat terlalu memprioritaskan hubungan khusus dengan Arab Saudi melalui kepentingan bersama dalam keamanan dan pasokan minyak. Pada tahun 1951, AS dan Arab Saudi kesepakatan bagi hasil dari eksplorasi minyak di Saudi. AS juga memberikan dukungan militer dan politik kepada Arab Saudi, termasuk perdagangan senjata dan pemanfaatan pangkalan militer di negara tersebut.

Sebaliknya, Iran diperlakukan secara terisolasi oleh Amerika Serikat, dengan mem-framing Iran sebagai negara otoriter,

meskipun sebenarnya negara tersebut merupakan republik. Salah satu tindakan AS adalah terlibat dalam kudeta di Iran pada tahun 1953. Pada saat itu, perdana menteri yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mosaddegh, dijatuhkan melalui operasi yang melibatkan AS dan Inggris yang mendukung kekuatan monarki Mohammad Reza Pahlevi. Pada tahun 1979, rakyat Iran yang tidak puas dengan peran Reza Pahlevi sebagai boneka AS melancarkan Revolusi Islam. Dipimpin oleh ulama Syi'ah Ayatullah Khomeini, mereka mengakhiri sistem monarki dan mendirikan Republik Islam Iran. Dalam revolusi ini, beberapa staf kedutaan AS bahkan disandera. Sejak itu, hubungan antara AS dan Iran tidak berjalan baik. Iran juga sering digambarkan sebagai negara yang memiliki nuklir untuk tujuan senjata pemusnah massal.<sup>13</sup> Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sejak awal hubungan AS dengan Iran tidak harmonis, dan AS tidak dapat berperan sebagai mediator dalam konflik antara Arab Saudi dan Iran. Dekatnya hubungan AS dengan Arab Saudi juga menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dalam konflik antara Arab Saudi dan Iran. Negara-negara yang diperlakukan tidak adil oleh negara adikuasa kemungkinan besar tidak akan memiliki hubungan yang harmonis.

Seiring berjalannya waktu, hubungan antara AS dan Arab Saudi mulai mengalami keretakan sejak masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Biden telah mengkritik Kerajaan Saudi yang dipimpin oleh Raja Salman dengan menyebutnya sebagai negara 'pariah' karena isu Hak Asasi Manusia. Selain itu, Gedung Putih juga terus menuduh Putra Mahkota Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS), atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Tindakan ini telah menimbulkan respons dari Arab Saudi. Saudi, bersama dengan negara-negara pengekspor minyak lain yang tergabung dalam OPEC, memutuskan untuk memangkas produksi minyak. Pemotongan produksi terus berlanjut, dengan rencana terbaru Arab Saudi untuk mengurangi produksi sebesar satu juta barel per hari (bpd) pada bulan Juli mendatang.<sup>14</sup>

Selama bertahun-tahun, Arab Saudi dan Iran telah menjadi rival di wilayah Timur Tengah, yang telah menjadi panggung bagi sejumlah konflik di negara lain. Namun, keberhasilan China dalam

---

<sup>13</sup> "The U.S. Shouldn't Choose Saudi Arabia Over Iran," Politico Magazine, diakses 29 Juni 2023, <https://www.politico.com/magazine/story/2016/01/saudi-arabia-iran-213504/>.

<sup>14</sup> "Adu Kekuatan AS-China di Arab Saudi, Siapa Pikat Raja Salman?," CNBC Indonesia, diakses 3 Desember 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230615155607-4-446273/adu-kekuatan-as-china-di-arab-saudi-siapa-pikat-raja-salman>.



mendamaikan kedua negara ini membawa era baru dalam politik Timur Tengah. China memiliki pendekatan yang netral dan non-intervensi untuk mempromosikan perdamaian melalui pendekatan "perdamaian pembangunan" daripada "perdamaian demokrasi." Pendekatan ini sangat berbeda dengan tren Amerika Serikat yang lebih tertarik pada Timur Tengah karena sumber daya minyaknya dan kepentingan politiknya. Dalam konteks ini, penulis menyimpulkan bahwa hegemoni AS telah menjadi kontroversial dan menimbulkan perlawanan dari negara-negara di Timur Tengah. Stabilitas sistem internasional bergantung pada kemampuan negara dominan untuk mempertahankan kepemimpinannya dan mengatasi masalah dengan negara lain. Oleh karena itu, pemulihan hubungan antara Arab Saudi dan Iran menjadi babak baru dalam politik Timur Tengah. China, sebagai kekuatan hegemoni baru, berhasil menjadi mediator dalam memulihkan hubungan antara kedua negara Teluk tersebut.

China juga berhasil menjalin hubungan yang baik dengan Arab Saudi dan Iran. Hubungan China dengan negara-negara Arab dapat dilihat dari perkembangan dialog resmi melalui China-Arab States Cooperation Forum (CASC) dan China-Gulf Cooperation Council Strategic Dialogue (CGCC). Penguatan hubungan China dengan negara-negara Timur Tengah, sambil melihat penurunan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut, menunjukkan adanya pergeseran hegemoni yang sedang terjadi. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh China dan AS. Amerika Serikat cenderung menggunakan pendekatan *hard power* seperti sanksi ekonomi dan intervensi militer, untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, China memiliki pendekatan yang berbeda dalam hubungan internasional. China lebih condong menggunakan *soft power* dan non-intervensi dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Pendekatan ini membantu China membangun hubungan yang lebih harmonis dengan berbagai negara, termasuk Arab Saudi dan Iran. Dalam hal ini, China berperan sebagai mediator netral yang memfasilitasi dialog antara kedua pihak tanpa campur tangan yang berlebihan.

Tidak semua negara Timur Tengah menyambut baik meningkatnya peran China. Israel, misalnya, memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan melihat pengaruh China sebagai tantangan potensial terhadap aliansi strategisnya dengan Barat. Di sisi lain, Turki, yang memiliki ambisi menjadi pemain utama di kawasan, mungkin melihat pengaruh China sebagai peluang

sekaligus ancaman bagi agendanya di Timur Tengah. Di luar itu, kehadiran China sebagai mediator netral juga memiliki keterbatasan. China belum memiliki kemampuan militer untuk melindungi kepentingannya di kawasan jika terjadi eskalasi konflik. Selain itu, ketergantungan ekonomi negara-negara Timur Tengah pada ekspor minyak ke China dapat menciptakan hubungan yang tidak seimbang di masa depan.

## E. Penutup

Konflik antara Iran dengan Arab Saudi dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan Sunni dan Syi'ah. Namun, dalam perkembangannya konflik Iran dan Arab Saudi juga dipengaruhi oleh adanya kompetisi secara geopolitik khususnya di regional Timur Tengah. Setelah lama berkonflik, normalisasi hubungan Iran - Arab Saudi akhirnya disepakati di Beijing, China, pada Maret 2023 lalu. Keduanya sepakat untuk berdamai setelah China hadir untuk menjadi mediator. Pendekatan China lebih diterima ketimbang Amerika Serikat yang telah menjadi hegemoni di kawasan Timur Tengah sejak tahun 1990 karena China memiliki pendekatan yang netral dan non-intervensi untuk mempromosikan stabilitas daripada Amerika yang lebih mementingkan kepentingan politiknya. Pemulihan hubungan antara Arab Saudi dan Iran oleh China menjadi babak baru dalam politik Timur Tengah. Selama Amerika Serikat menjadi hegemoni di kawasan Timur Tengah banyak menimbulkan perlawanan dari negara-negara di Timur Tengah mengakibatkan dinamika di kawasan Timur Tengah menjadi tidak stabil. Hal itu disebabkan karena stabilitas sistem internasional bergantung pada kemampuan negara dominan untuk mempertahankan kepemimpinannya dan mengatasi masalah dengan negara lain sesuai dengan konsep *hegemonic stability*. Oleh karena itu, pemulihan hubungan antara Arab Saudi dan Iran menjadi babak baru dalam politik Timur Tengah. China, sebagai kekuatan hegemon baru, berhasil menjadi mediator dalam memulihkan hubungan antara kedua negara tersebut dan menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Kesuksesan mediasi China memberikan pelajaran penting tentang pentingnya pendekatan yang netral dan pragmatis dalam menyelesaikan konflik internasional. Namun, dalam jangka panjang, keberhasilan ini bergantung pada kemampuan China untuk mempertahankan pengaruhnya tanpa memicu resistensi dari negara-negara lain di kawasan. Stabilitas di Timur Tengah tidak



hanya memerlukan hubungan baik antarnegara, tetapi juga solusi yang lebih holistik untuk mengatasi akar permasalahan seperti kesenjangan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan konflik sektarian yang telah berlangsung lama.



# BAB 3

## GLOKALISME, DARI LOKAL KE GLOBAL: MENYOROTI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PENERAPAN SDGs

*Mutiara Nasywa Kirana*

### A. Pendahuluan

Permasalahan mengenai stunting menjadi masalah yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia. Stunting menjadi masalah serius karena dampaknya yang tidak hanya mempengaruhi fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, prestasi belajar, serta produktivitas di masa depan<sup>15</sup>. Pencegahan stunting perlu diusahakan bersama supaya generasi selanjutnya menjadi semakin baik dan unggul. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting<sup>16</sup>.<sup>2</sup> Stunting bukan berarti hanya orang dengan badan pendek, akan tetapi perawakan pendek yang disebabkan oleh kondisi kesehatan yang tidak optimal, yakni kekurangan gizi dengan jangka panjang terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disertai perkembangan otak tidak optimal dan mudah menderita penyakit. 1000 HPK terdiri dari 270 hari masa kehamilan dan 730 hari pada usia 2 tahun awal kehidupan. 1000 HPK merupakan masa-masa penting dalam pertubuhan anak, kurangnya asupan gizi yang cukup pada anak selama 1000 HPK merupakan salah satu penyebab stunting yang dapat menyebabkan kematian pada janin.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ova Emilia, “Stunting-Deteksi dan Intervensi,” UGM Channel, 2022, <https://youtu.be/icotQZUZRA4?si=Qa7nR7W3oP1QmyYl>.

<sup>16</sup> Tri Nur Azizah and Isna Fitria Agustina, “Peran Desa Dalam Menekan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian SDGs Desa Sukondo,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2023, 1–12, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>.

<sup>17</sup> Emilia, “Stunting-Deteksi Dan Intervensi.”



Masalah gizi yang menyebabkan gangguan perkembangan anak menjadi fokus utama pemerintah untuk mencapai kesejahteraan. Sebelum pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi beban malnutrisi dalam tiga bentuk (*triple burden malnutrition*), yakni stunting, defisiensi zat gizi mikro, serta kelebihan berat badan pada balita. Kondisi tersebut dapat memperburuk seiring dengan menurunnya pendapatan dan terbatasnya akses layanan kesehatan dan akses terhadap pangan sehat atau bergizi. Resiko dan potensi terjadinya kenaikan angka kekurangan gizi dan obesitas disebabkan karena konsumsi pangan olahan ultra processed food dengan kandungan gula, garam, dan lemak tinggi, yang harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan makanan-makanan sehat.<sup>18</sup>

Dalam rangka mewujudkan “Indonesia Emas 2045”, yang berkaitan erat dengan Pembangunan manusia dan IPTEK untuk mengembangkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia harus memerangi tantangan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah stunting. Tantangan tersebut terkait dengan Zero Hunger, poin kedua dari 17 tujuan SDGs yang bertujuan untuk menghilangkan kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dengan gizi seimbang. Dengan diterapkannya poin tersebut, diharapkan mampu memperoleh akses pangan yang aman dan bersih sesuai kebutuhan nutrisi dan kelaparan dapat diakhiri.<sup>19</sup>

Prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan kesuksesan upaya penanganan stunting dalam lima tahun terakhir, dengan penurunan rata-rata 1,85% per tahun. Apabila merujuk pada standar WHO, batas maksimal yang ditentukan ialah 20%, sementara target yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia pada tahun 2024 adalah 14%. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, berpendapat bahwa perlu ada akselerasi dalam mencapai target prevalensi stunting sebesar 14% pada akhir tahun 2024. Kerja sama dari semua pihak diperlukan untuk melakukan intervensi yang spesifik dan sensitif, terutama pada indikator yang masih

---

<sup>18</sup> Sri Wahyuni Sukotjo, “Webinar Hari Anak Nasional 2020: Stunting Dan COVID-19 Di Indonesia,” CIMSA, 2020, [https://www.youtube.com/live/Rfg\\_9k-4wo0?si=vEIgqHVbcPTQ6BnG](https://www.youtube.com/live/Rfg_9k-4wo0?si=vEIgqHVbcPTQ6BnG).

<sup>19</sup> Jonathan Edward Lopian and Insan Harapan Harahap, “Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Menurunkan Stunting (SDG 2.2),” *Management, and Industry (JEMI)* 06, no. 03(2023): 175–86.

rendah<sup>20,6</sup> Menangani masalah stunting bukan hanya penting dalam hal kesehatan balita, tetapi juga dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Memastikan anak-anak sehat dan berkembang dengan baik akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara di masa depan.<sup>21</sup>

SDGs merupakan program pembangunan global yang universal dan melibatkan negara berkembang dan negara maju. SDGs dilaksanakan secara global tanpa membedakan negara berkembang dengan negara maju. SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, dan menjaga kualitas lingkungan hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs lahir sebagai respons untuk mewujudkan keadilan dan keamanan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. SDGs merupakan kewajiban bagi semua negara di dunia secara lebih luas, dibandingkan dengan *Millennium Development Goals* (MDGs). MDGs hanya menganggap negara berkembang sebagai objek pembangunannya yang dilakukan oleh negara-negara adidaya. SDGs menghindari pengobjektivikasi negara berkembang dan mengajak semua negara untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk Indonesia. Indonesia telah menyepakati agenda SDGs yang juga menunjukkan komitmen yang sejalan dengan pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Dalam pelaksanaannya SDGs memiliki program dengan 17 tujuan dan 169 target yang tentunya diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang disusun. SDGs berfokus pada keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, pembangunan inklusif, dan tata kelola yang mendukung peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pencapaian target-target SDGs ini menjadi prioritas dalam pembangunan nasional dan memerlukan kebijakan perencanaan yang sinergis di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, yang sejalandengan rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) IV 2020-2024. Pembangunan

---

<sup>20</sup> BPMI-Setwapres DMA/RJP, "Buka Rakornas Stunting, Wapres Ungkap Keberhasilan Pemerintah Turunkan Prevalensi Lima Tahun Terakhir," 2024, [https://www.youtube.com/live/Rfg\\_9k-4w0o?si=vEIgqHVbcPTQ6BnG](https://www.youtube.com/live/Rfg_9k-4w0o?si=vEIgqHVbcPTQ6BnG).

<sup>21</sup> Azizah and Agustina, "Peran Desa Dalam Menekan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian SGDs Desa Sukondo."

<sup>22</sup> L Apriska et al., "STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENCAPAI SDGs DESA: (STUDI KASUS PENURUNAN TINGKAT STUNTING DI DESA SAKRA SELATAN KABUPATEN ...," *Jurnal Konstanta*, 2022, 82–90, <http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/365%0>



sumber daya manusia memiliki kaitan dengan masalah stunting, yang tercermin dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perbaikan gizi adalah salah satu target SDGs poin kedua yang harus dicapai, dengan memutus rantai kelaparan, menciptakan ketahanan pangan, dan menyediakan akses gizi berkualitas serta mendukung pertanian berkelanjutan. Karena prevalensi stunting yang tinggi di Indonesia, masalah ini menjadi prioritas dalam pembangunan skala nasional, sesuai dengan peraturan presiden dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Bappenas.<sup>23</sup>

Tujuan SDGs adalah perjanjian pembangunan berkelanjutan global yang disahkan oleh PBB pada September 2015. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai dalam 15 tahun ke depan, dari 2016 hingga 2030. Salah satu tujuannya adalah menghapuskan kelaparan dan malnutrisi. Kemiskinan dapat menimbulkan masalah sosial dan secara ekonomi menjadi beban negara dan masyarakat. Pembangunan negara ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan negara bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan salah satu indikator keberhasilannya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pembangunan ini harus dilakukan dengan memperhatikan interaksi manusia dengan lingkungan dan hubungan antara elemen-elemen dalam sistem yang kompleks. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sektor kunci dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global yang meliputi perubahan iklim, digitalisasi, dan globalisasi. Pendidikan harus mencerminkan realitas tantangan ini karena dunia ini terhubung, dinamis, dan kompleks. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebutuhan akan pendidikan yang mendukung dunia yang lebih berkelanjutan semakin nyata. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kepedulian terhadap lingkungan dan integritas sosial, dengan membagi biaya dan manfaat secara adil untuk kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan.

---

<sup>23</sup> Ibid

Di negara-negara berkembang, faktor resiko umum terjadinya stunting adalah karena kondisi nutrisi sebelum hamil, saat hamil, hamil pada usia remaja, dan terjadinya kehamilan dengan jarak dekat. Jumlah masalah gizi di Indonesia pada tahun 2020 terbilang cukup tinggi, sekitar  $\pm 7$  juta anak Indonesia mengalami stunting,  $\pm 2$  juta mengalami *wasting*, dan  $\pm 1,7$  mengalami *overweight*. Sementara di tingkat global, terdapat 144 juta anak mengalami stunting, 47 juta mengalami *wasting*, dan 38 juta mengalami *overweight*.<sup>24</sup> Di Indonesia sendiri, penyebab utama terjadinya stunting berkaitan dengan kualitas *Antenatal Care* (ANC) pada saat kehamilan, status nutrisi ibu hamil, terjadinya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), ASI eksklusif yang belum 100%, pola pemberian makan, infeksi yang terjadi pada bayi, imunisasi, tingkat pendidikan orang tua, serta akses kesehatan dan kebersihan.<sup>25</sup>

Target global dalam menurunkan stunting sebanyak 40% pada tahun 2030 dikatakan belum berhasil. Dalam mempercepat penurunan stunting dan menolong jutaan anak di dunia, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor penyebab, sinergi dan interaksi yang menyebabkan stunting.<sup>26</sup> *The Whole Child Approach*, selain melalui aspek fisik, gizi, dan genetik, aspek pengasuhan dari lingkungan keluarga juga sangat menentukan yang dapat dilihat dari sanitasi dan keamanan akses pangan. Dalam hal ini stunting tidak hanya dilihat dari faktor tinggi badan, akan tetapi juga dari aspek kognitif. Pendekatan ini diharapkan mampu menguatkan kembali komitmen dan aksi untuk mencapai penurunan stunting secara global serta meningkatkan dialog dan advokasi SDGs poin 2. Tujuannya untuk menciptakan dunia yang berkeadilan sosial tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan dengan energi dan kesehatan yang terjangkau.

Dalam mengatasi penurunan angka stunting di Indonesia, tentunya dibutuhkan peran dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pada setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatasi penurunan angka stunting. Untuk mengatasinya, Kabupaten Lumajang sendiri menerapkan kebijakan satu hari dua telur. Desa Sawaran Lor, merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lumajang. Berbagai faktor penyebab stunting di desan ini antara lain, yakni pola makan yang

<sup>24</sup> Sukotjo, "Webinar Hari Anak Nasional 2020: Stunting Dan COVID-19 Di Indonesia."

<sup>25</sup> Emilia, "Stunting-Deteksi Dan Intervensi."

<sup>26</sup> Umi Fahmida, "Talkshow Capai Target SDGs Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Era Dan Pasca Covid Di Indonesia," SEAMEO REPCON, 2021, <https://www.youtube.com/live/8I6QefiYn4w?si=TWuFAkOz1iVG-iGt>.



kurang baik, sanitasi yang tidak memadai, akses terhadap pelayanan kesehatan yang terbatas, serta pola asuh yang belum optimal. Pengembangan pola asuh yang baik menjadi salah satu strategi utama dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sawaran Lor. Pola asuh yang optimal dapat meningkatkan asupan gizi anak, kebersihan lingkungan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Melalui edukasi dan pelatihan untuk para orang tua dan pengasuh, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal, khususnya para bayi di Desa Sawaran Lor.

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan jenis penelitian deskriptif sehingga dapat menghasilkan data terkait penelitian. Data yang digunakan adalah data primer dengan wawancara dengan orang tua balita, data stunting, dan data gizi buruk di wilayah Sawaran Lor selama dua triwulan didapat dari bidan. Lokasi penelitian yaitu di Desa Sawaran Lor, Kabupaten Lumajang ini memiliki luas sebesar 12,43 km, di Desa Sawaran Lor terdapat 7 Dusun yaitu Pocok, Krajan, Jabon, Sekolahan, Bakah, Waru, Kalipocang. Pada wilayah ini merupakan salah satu wilayah dengan angka stunting yang tinggi.

## B. Stunting

Stunting adalah pendek, yang artinya panjang atau tinggi badan menurut umur berdasarkan usia dan jenis kelamin berada di titik bawah  $-2$  standart deviasi (SD) pada kurva WHO. Stunting ini adalah pendek atau *stunted* yang disebabkan oleh kekurangan gizi berkepanjangan pada 1000 HPK. Berdasarkan literatur, 11,2% stunting dapat terjadi di dalam kandungan, disebabkan oleh kondisi ibu hamil yang lemah dan nutrisi yang kurang baik. Kemudian 60,6% terjadi sejak lahir sampai usia 2 tahun, disebabkan oleh beberapa kondisi yang meningkatkan resiko stunting, seperti terlahir prematur, BBLR, alergi susu sapi, dan yang sering terjadi adalah disebabkan oleh pemberian makanan yang tidak sesuai, serta 28% terjadi di usia 2-5 tahun. Sementara usia 5 tahun keatas disebut dengan gangguan gizi atau gangguan nutrisi.<sup>27</sup>

Sudah ditetapkan oleh WHO, bahwa stunting tidak hanya aspek pertumbuhan fisik tapi juga perkembangan motori, kognitif,

---

<sup>27</sup> Meta Herdiana Hanindita, "Stunting Tidak Mengenal Sosial Dan Ekonomi," Nikita Willy Official, n.d., [https://youtu.be/vao1NB\\_i6eA?si=yYg76d8gBB7LAWk2](https://youtu.be/vao1NB_i6eA?si=yYg76d8gBB7LAWk2).



bahasa, dan sosial emosional. Dan karenanya sangat relevan dengan pilar pembangunan, yaitu penguatan sumber daya manusia. Stunting adalah salah satu tantangan utama dalam mencapai tujuan SDGs poin 2. Jangka pendek dari stunting yang bisa dirasakan adalah sakit secara terus menerus, sementara dalam jangka panjang, stunting dapat menurunkan IQ, menurunkan fungsi kognitif berpikir (*11% IQ loss*), menurunkan performa pada saat sekolah, menurunkan durasi sekolah (beresiko tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya), menurunkan daya tahan tubuh pada saat dewasa, menurunkan pendapatan per kapita dikarenakan penurunan produktivitas kerja (*22% penurunan pendapatan*), resiko obesitas, sehingga meningkatkan resiko penyakit tdiak menular seperti jantung, struk, dan hipertensi.<sup>28</sup> Apabila pencegahan stunting tidak diatasi dengan optimal, dalam 20-30 tahun ke depan maka anak-anak tersebut tumbuh sebagai generasi dengan kualitas yang kurang baik. Penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan mengurangi prevalensi stunting, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

Stunting dapat bermula dari status gizi pada saat kehamilan, disebabkan oleh konsumsi makanan yang kurang, dalam artian jumlah atau ketersediaan dan komponen gizi pada makanan. Kemudian dapat terjadi karena status infeksi pada ibu atau anak, dengan tanda-tanda sering mengalami sakit atau infeksi, sehingga pertumbuhan janin atau anak terganggu. Status infeksi atau konsumsi makanan yang kurang, dapat terjadikarena ketersediaan dan pola konsumsi di rumah tangga tidak optimal. Hal tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi, di mana keluarga tidak mampu menyediakan makanan yang cukup bergizi dan komposisi yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Sementara jika dilihat dari faktor pola asuh, stunting dapat terjadi karena cara pemberian ASI yang tidak tepat, pemberian MP-ASI yang tidak sesuai, dan pola asuh psikososial.<sup>29</sup>

Dalam mengatasi pencegahan stunting, pemerintah menerapkan program-program terkait gizi, dimulai dari remaja

---

<sup>28</sup> Hanindita

<sup>29</sup> Yayuk Setyowati, "Webinar Nasiona: Pencegahan Dan Penanganan Stunting Dengan Pendekatan Holistik," Healthy Cendikia, 2023, <https://www.youtube.com/live/gQJAjpp1qeg?si=caQIgzTVegw-jUIM>.



putri dengan pemeriksaan status anemia dan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), sementara pada Calon Pengantin (Catin) diberikan TTD atau vaksin serta bimbingan persiapan perkawinan. Apabila ibu hamil mengalami status anemia maka beresiko lebih tinggi terjadi BBLR saat lahir. Remaja putri dan Catin memerlukan Cadangan zat besi untuk mengukur status anemia, sehingga diperlukan pemeriksaan status anemia dan pemberian TTD.

Ketika remaja putri dan Catin memiliki status anemia yang baik, maka tidak beresiko terjadinya anemia saat kehamilan. Dan apabila tidak memiliki status anemia yang baik, maka akan beresiko mengalami energi kronik atau KEK, yang mana KEK berkaitan dengan sumber makanan tinggi zat besi yang rata-rata mengandung makanan tinggi protein. Maka dari itu diperlukan persiapan sejak usia remaja, sehingga saat kehamilan memiliki cadangan gizi yang cukup untuk mencegah terjadinya stunting.

Pada ibu hamil juga diterapkan program pemeriksaan ANC, peserta KB pasca persalinan, ibu hamil KEK mendapatkan PMT, dan konsumsi TTD. Selanjutnya pada anak usia 0 sampai 59 bulan dilakukan pemantauan tumbuh kembang, anak dengan status stunting atau gizi kurang mendapatkan PMT dan konseling gizi, serta imunisasi dasar lengkap. Sementara untuk keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan mendapatkan akses sumber air bersih, jamban sehat, hingga sanitasi dan pembuangan limbah layak<sup>30</sup>.

Keluarga menjadi pilar penting dalam pertumbuhan anak pada 1000HPK. Pola Asuh yang tidak optimal dapat menghambat pertumbuhan anak yang dapat diartikan terkena stunting. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi pemberian asupan gizi dan nutrisi yang baik pada anak. Pola asuh makan anak mencakup interaksi orang tua dengan anak, termasuk tindakan penyediaan waktu, perhatian, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Kebiasaan makan yang terbentuk sejak usia balita memiliki peranan penting karena pada masa ini merupakan periode di mana sikap, kebiasaan, dan pola tingkah laku yang menentukan perkembangan individu di masa depan ditanamkan.

Resiko kematian pada balita dengan gizi buruk adalah 11,6 kali lebih tinggi daripada resiko kematian pada anak dengan gizi baik. Sementara balita stunted dan mengalami gizi buruk, akan lebih tinggi, yakni sebesar 12,3%. Anak-anak yang pulih dari gizi buruk juga beresiko mengalami masalah tumbuh kembang dalam siklus

---

<sup>30</sup> Afna Ratna Sulistyoning, "Gizi Dan Stunting: Ruang Cakap SDGs Desa," DESA Institute, 2023, <https://www.youtube.com/live/NbynamXCWIU?si=HjdkkNcL2Z-nZbos>.

hidupnya, setelah pulih seringkali asupan makanan mereka tidak optimal, sehingga beresiko kembali menjadi anak dengan status kekurangan gizi. Dalam hal ini tentunya diperlukan dukungandan pola asuh dari keluarga hingga masyarakat sekitar.<sup>31</sup> Penerapan pola asuh yang optimal seringkali memberikan dampak terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Saat lahir, 25% perkembangan otak manusia sudah terbentuk dan tumbuh menjadi 80% saat 2 tahun pertama, yang sering disebut dengan *critical period* atau *window of opportunity*. Pada periode tersebut terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dan terjadi perkembangan berbagai organ tubuh.<sup>32</sup> Kemudian 90% perkembangan otak terjadi pada anak usia 5 tahun, sehingga apabila terjadi keterlambatan pola asuh, tentunya tumbuh kembang anak menjadi tidak optimal, yang juga dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia kedepannya.<sup>33</sup>

Seperti yang diketahui bersama, bahwa 1000 HPK merupakan periode yang peka dan kritis bagi seorang anak untuk tumbuh secara optimal. Pemberian ASI eksklusif pada anak selama 6 bulan berdampak pada tumbuh kembang anak, karena 60% asupan makanan digunakan untuk perkembangan otak. Bayi berudis di bawah enam bulan yang tidak menerima ASI, 3-4 kali lebih besar resiko kematiannya daripada bayi yang menerima ASI. Dengan meningkatkan program menyusui dapat mencegah 54% of *diarrhea episodes* serta 32% of *respiratory infections*. Pemberian ASI tentunya mencegah dari penyakit-penyakit, seperti otitis media akut (<2 tahun), maloklusi, diabetes tipe 2, hingga obesitas. Dalam jangka panjang pemberian ASI selama 2 tahun dapat meningkatkan kinerja kognitif dengan rata-rata 3 poin IQ, peningkatan prestasi akademik, dan peningkatan pendapatan saat dewasa.<sup>34</sup> Tidak hanya bermanfaat untuk bayi saja, tetapi kegiatan menyusui juga bermanfaat untuk sang ibu. Dengan kegiatan menyusui, menurunkan resiko wanita terkena kanker payudara invasive hingga 6%. Ibu menyusui harus mendapat dukungan dan perlindungan dari keluarga hingga masyarakat.

Setelah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) juga harus diberikan secara tepat waktu, bersifat adekuat, aman, dan *hygienic*. Sebetulnya tidak ada rakyat Indonesia yang tidak memiliki akses dengan sumber

---

<sup>31</sup> Sukotjo, "Webinar Hari Anak Nasional 2020: Stunting Dan COVID-19 Di Indonesia."

<sup>32</sup> Hanindita, "Stunting Tidak Mengenal Sosial Dan Ekonomi."

<sup>33</sup> Sukotjo, "Webinar Hari Anak Nasional 2020: Stunting Dan COVID-19 Di Indonesia."

<sup>34</sup> Ibid



pangan yang berkualitas. Apabila merujuk pada potensi kekayaan alam Indonesia, potensi ikan nasional di Indonesia berjumlah 12,5 juta ton pada tahun 2021. Akan tetapi, konsumsi ikan di Indonesia masih lebih rendah dari negara-negara di Asia Tenggara. Konsumsi pangan masyarakat hingga kini masih didominasi oleh produk sereal atau nasi dan tepung terigu.<sup>35</sup> Tidak hanya kekayaan sumber daya laut, Indonesia juga kaya akan rempah-rempah dan hasil olahan ternak.

Pemberian MP-ASI yang tepat dan optimal tentunya berdampak pada tumbuh kembang anak. Pada anak terindikasi stunting kadar amino esensialnya lebih rendah, sehingga membutuhkan protein hewani untuk mencegah stunting. Telur sendiri mengandung *asam amino choline* dan *lutein* yang penting untuk perkembangan otak. Pemerintah menyuarakan pencegahan stunting, melalui satu hari satu telur yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat gerakan satu telur satu hari untuk pencegahan stunting.

Berdasarkan SKI 2023, prevalensi angka stunting di Jawa Timur mencapai 17,70%, angka tersebut turun 1,5% dari tahun sebelumnya dan lebih rendah dari rata-rata nasional, membuktikan efektivitas upaya Jawa Timur. Prevalensi stunting di Jawa Timur terus menurun, dengan rata-rata 6,10% pada Januari-Juni 2024, di bawah target 14%. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Jawa Timur dalam menciptakan generasi sehat bebas stunting. Sementara angka stunting di Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 mencapai 29,9%, yang artinya mengalami peningkatan sebesar 6,1 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 23,8% pada tahun 2022.

## 1. Peran Pemerintah Desa Sawaran Lor dalam Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan memberikan nutrisi yang sesuai usia dan diberikan dengan benar, mengevaluasi pertumbuhan setiap bulan dengan datang ke posyandu untuk melengkapi status imunisasi. Dalam pelaksanaannya, Desa Sawaran Lor mengadakan posyandu setiap bulan di masing-masing dusun secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai status

---

<sup>35</sup> Doni Monardo, "Talkshow Capai Target SDGs Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Era Dan Pasca Covid Di Indonesia," SEAMEO REFCON, 2021, <https://www.youtube.com/live/8I6QefiYn4w?si=TWuFAkOz1iVG-iGt>.

gizi anak dan upaya untuk mengatasi masalah gizi pada anak. Pencegahan stunting harus menjadi prioritas sejak dini, dimulai dari remaja dengan mengonsumsi tablet darah untuk mencegah anemia dan meningkatkan simpanan zat besi untuk menghindari risiko gizi buruk selama kehamilan dan mencegah komplikasi kehamilan, kebutuhan nutrisi harus dipenuhi sebelum kehamilan untuk menciptakan cadangan dalam tubuh.

Masyarakat Desa Sawaran Lor memiliki kebiasaan meminum teh saat berkunjung ataupun bertamu. Namun, kebiasaan tersebut sebaiknya dihindari, karena teh dapat menghambat penyerapan zat besi pada tubuh. Sebab, kandungan asam fitat yang terdapat pada teh dapat menghancurkan penyerapan zat gizi pada tubuh. Oleh karenanya, menghindari minum teh baiknya dilakukan sejak dini, terlebih pada anak yang terindikasi stunting. Tidak hanya itu, konsumsi teh setelah makan beresiko memicu peningkatan asam lambung pada perut dan kandungan tanin pada teh dapat memicu terjadinya konstipasi yang dapat menyebabkan susah buang air besar. Asam tanin pada teh ketika bertemu dengan makanan dapat memberikan masalah terkait penyerapan protein dan zat besi.

Pada dasarnya zat besi berfungsi untuk meningkatkan energi, menjaga fokus tubuh, dan meningkatkan stamina sehingga menjaga kehamilan tetap sehat. Maka dari itu dianjurkan untuk mengonsumsi sumber makanan yang kaya akan zat besi setiap hari sedari masa remaja mulai. Zat besi berperan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, dengan begitu dapat mencegah terjadinya penyakit. Asupan zat besi yang cukup mampu menurunkan resiko kelahiran prematur, BBLR, simpanan zat besi rendah, dan defisit kognitif dan perilaku pada bayi. Seorang ibu hamil dengan konsumsi zat besi dalam makanan sehari-harinya lebih kecil terkena resiko terserang virus dan menderita infeksi.

Tabel 1 Data Tingkat Gizi Anak di Desa Sawaran Lor

<b>Bulan</b>	<b>Stunted</b>	<b>Gizi Kurang</b>	<b>Gizi Buruk</b>
Januari	19	16	2
Februari	15	28	1
Maret	12	28	1
April	12	16	1
Mei	0	0	0
Juni	0	3	2



Dalam catatan tersebut bisa mengetahui angka stunting di Desa Sawaran lor menunjukkan adanya penurunan di beberapa bulan terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa program dan penanganan yang diberikan oleh posyandu terlihat cukup efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan Puskesmas Pembantu Desa Sawaran Lor yakni Bidan Eristin menjelaskan bahwa penurunan ini juga didukung dengan adanya kemauan masyarakat untuk pencegahan stunting yang menyebabkan pertumbuhan anak kurang maksimal. Dalam diskusi tersebut, bidan menjelaskan bahwa meskipun telah ada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada beberapa anak yang mengalami masalah gizi. Hal tersebut didukung dengan bukti berupa data angka gizi anak pada bulan Juni, dimana kenaikan angka stunting dan gizi buruk di Dusun Krajan dan Sekolah ini kembali terjadi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Beliau menekankan pentingnya program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya asupan gizi seimbang. Bidan juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pola makan sehat.

## **2. Penerapan Pencegahan Stunting SDGs Poin 2**

### **a. Edukasi “Satu Piring Cegah Stunting”**

Media promosi kesehatan merupakan salah satu sarana penyampaian informasi kesehatan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat menerima informasi. Media massa efektif menjangkau khalayak luas terkait isu stunting. Pencegahan stunting dapat dimulai dengan memanfaatkan media massa untuk edukasi masyarakat di era 4.0. Media massa berpotensi memengaruhi masyarakat dalam berperilaku, dalam hal ini pola makan dan pola pengasuhan keluarga terhadap anak, sehingga dapat membantu mengurangi angka stunting. Pemanfaatan platform media massa harus dimanfaatkan dengan lebih bertanggung jawab dan berbasis bukti, yang diharapkan ke depannya masyarakat lebih mudah menjangkau literasi kesehatan dan gizi.

Proses pemberian edukasi dilakukan dengan memanfaatkan media cetak berupa brosur dengan tema "Satu Piring Cegah Stunting". Edukasi ini meliputi penjelasan tentang pentingnya asupan gizi seimbang sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun, yang dikenal sebagai periode 1000 HPK, informasi mendetail mengenai jenis-jenis makanan bergizi yang diperlukan untuk

mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengajarkan cara-cara sederhana untuk memastikan kebersihan dan sanitasi yang baik. Selain itu, disampaikan juga informasi mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Setelah enam bulan, pemberian MP-ASI yang bergizi dan sesuai dengan usia anak juga sangat dianjurkan. Para ibujuga diajarkan untuk mengenali tanda-tanda awal stunting, seperti pertumbuhan yang lambat, berat badan yang kurang sesuai dengan usia, dan lingkaran kepala yang kecil.

Melalui kegiatan posyandu, terungkap beberapa informasi mengenai anak-anak yang teridentifikasi mengalami stunting di Dusun Krajan dan Sekolahan. Langkah yang harus dilakukan dilakukan saat anak terkena stunting, salah satunya dengan memperbaiki tata laksanaan nutrisi atau terapi nutrisi dengan tinggi protein hewani. Dalam hal ini, PMT kepada anak-anak yang berada dalam kategori waspada stunting sangat diperlukan. Kegiatan PMT ini diadakan setiap minggu dalam tiga pekan setelah pelaksanaan posyandu, bekerja sama dengan dinas dan tenaga kesehatan lainnya. Makanan tambahan tersebut diberikan secara rutin dan teratur, yang dirancang oleh ahli gizi setempat untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang. Makanan tambahan yang disediakan meliputi berbagai olahan rumahan menggunakan bahan makanan lokal yang terjangkau dan tersedia di Desa SawaranLor.

## **b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)**

Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan untuk mengatasi masalah status gizi kurang, yakni dengan memberikan makanan tambahan berupa biskuit PMT secara teratur dengan kandungan energi 380-420 kkal dan protein 12-14 gram. Prinsip dasar PMT pada balita adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi sehingga balita dapat mencapai tinggi dan berat badan sesuai dengan usianya. PMT diberikan kepada balita yang memiliki status gizi kurang berdasarkan indeks berat badan terhadap tinggi badan di bawah -2 SD. Setiap bungkus Makanan Tambahan (MT) pada balita berisi 4 keping biskuit dengan berat 40 gram. Balita usia 6-11 bulan diberikan 8 keping (2 bungkus) per hari, sedangkan balita usia 12-59 bulan diberikan 12 keping (3 bungkus) per hari dan setiap pemberian MT harus dihabiskan. Pertambahan tinggi dan berat badan balita dipantau setiap bulan di Posyandu. Jika balita mencapai status gizi yang baik, maka PMT dapat dihentikan dan



balita harus mengonsumsi makanan keluarga yang seimbang gizinya. Pemantauan terus dilakukan setiap bulan untuk mempertahankan status gizi yang baik.

Dalam mencapai status gizi yang seimbang, disusun Angka Kecukupan Gizi (AKG) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Mengenai Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia. Ketentuan MT pada balita telah ditetapkan dan harus memenuhi kebutuhan sesuai usia, sehingga menjadi efektif dalam upaya pemulihan status gizi. MT yang diberikan harus dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin serta mineral. Pada setiap kemasan MT harus mengandung 160 kalori, 4-7,2 gram lemak, dan 3,2-4,8 gram protein. MT tersebut juga diperkaya dengan 10 jenis vitamin dan 7 jenis mineral, yang di antaranya vitamin A, D, E, K, B1, B2, B3, B6, B12, asam folat, serta mineral zat besi, seng, lodium, kalsium, selenium, natrium, dan fosfor.<sup>36</sup>

Pencegahan stunting melalui PMT merupakan langkah strategis yang efektif untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai. PMT bertujuan untuk melengkapi kebutuhan nutrisianak-anak yang mungkin tidak terpenuhi melalui makanan sehari-hari di rumah. Melalui program ini, anak-anak diberikan makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral penting yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, PMT seringkali disertai dengan edukasi gizi bagi orang tua, membantu mereka memahami pentingnya pola makan yang seimbang dan cara menyiapkan makanan bergizi. Program ini juga melibatkan pemantauan rutin pertumbuhan anak, sehingga setiap tanda-tanda stunting dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, PMT menjadi kunci dalam upaya pencegahan stunting, memastikan generasi muda tumbuh sehat dan kuat.

Kegiatan penyuluhan PMT juga dilakukan dengan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala agar dapat diketahui perkembangan pada anak apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Jika anak yang mengalami stunting menunjukkan peningkatan selama pemberian PMT ini adalah tanda

---

<sup>36</sup> Nur Laelah and Sukarni Setya Ningsih, "Efektivitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Terhadap Kenaikan Tinggi Badan Dan Berat Badan Balita Stunting Di Puskesmas Gunung Kaler Tangerang," *Malahayati Nursing Journal* 6, no. 5 (2024): 1930-38, <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i5.11261>.



yang positif. Peningkatan ini bisa mencakup peningkatan berat badan, tinggibadan, dan perkembangan fisik serta kognitif yang lebih baik. Peningkatan yang terus berlanjut dan anak menunjukkan perkembangan yang baik, ini merupakan hasil yang sangat baik dariintervensi yang dilakukan. Namun, penting untuk terus melakukan upaya yang konsisten untuk memastikan anak tetap berada pada jalur pertumbuhan yang sehat. Jika anak yang mengalami stunting menunjukkan penurunan atau tidak ada perbaikan selama pemberian PMT, ini adalah tanda yang memerlukan perhatian serius. Maka dariitu sebagai orang tua harus lebih peka terhadap makanan yang disukai anak agar asupan nutrisinya tercukupi. Pengolahan dan penyajian makanan juga berpengaruh terhadap peningkatan nafsu makan anak.

Berikut disertakan tips sehat menurut UNICEF:

1. Konsumsi makanan bergizi secara rutin, setiap kalimakan
2. Perbanyak konsumsi buah dan sayur untuk meningkatkan imunitas.
3. Hindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak (*ultra-processed food*)
4. Aktivitas fisik dan perbanyak minum air putih
5. Lakukan kegiatan menyenangkan bersama keluarga, seperti memasak, berkebun, membersihkan rumah, dan lain-lain.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, komitmen serta partisipasi masyarakat menjadi fokus utama. Program "Satu Piring Cegah Stunting" secara efektif menyadarkan masyarakat akan pentingnya nutrisi seimbang, terutama pada 1000 HPK dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Dalam hal ini, media massa tentunya juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkait untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi. Terlepas dari keberhasilan peneliti, terdapat kesenjangan dalam memastikan akses yang konsisten, terutama terkait gizi seimbang pada usia 1000 HPK. Secara keseluruhan, program "Satu Piring Cegah Stunting" telah memberdayakan para ibu untuk mengupayakan kehidupan anak yang lebih baik dan berkualitas. Upaya berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat tentu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan jangka panjang. Saran dari peneliti untuk instansi pemerintah Kabupaten Lumajang, pemerintah perlu



mempertahankan komitmen dalam upaya pencegahan stunting, salah satunya dengan 1 hari 2 telur. Edukasi mengenai pencegahan stunting serta pentingnya pola gizi yang seimbang juga perlu diupayakan.

# BAB 4

## PERAN BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN DENGAN SKEMA *SPECIAL PLACEMENT TO TAIWAN*

*Alifyah Mashuri*

### A. Pendahuluan

Perpindahan manusia atau dari satu tempat ke tempat lainnya atau biasa dikenal sebagai migrasi merupakan sesuatu yang telah berlangsung sejak lama. International Organization for Migration (IOM) mendefinisikan migran sebagai seseorang yang sedang berada dalam proses berpindah atau telah berpindah tempat, baik melintasi perbatasan internasional maupun masih dalam satu wilayah suatu negara.<sup>37</sup> Ada beberapa bentuk migrasi yakni berpindah atas pilihannya sendiri, dan mereka yang berpindah karena terpaksa, bisa karena menjadi pekerja migran, dan juga pengungsi.<sup>38</sup> Faktor yang menjadi latar belakang bentuk-bentuk perpindahan tersebut sangat beragam, seperti bencana alam, mengungsi karena perang, serta mencari pekerjaan dengan upah yang setara.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2) menjelaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk bekerja dan kehidupan yang layak. Untuk mencapai kehidupan yang layak tersebut, setiap individu bisa mendapatkannya dengan cara bekerja. Dalam realitasnya lapangan pekerjaan di Indonesia cukup terbatas dan tidak sepadan dengan tingginya jumlah usia produktif. Hal tersebut

<sup>37</sup> IOM UN Migration. 2021. *Membuat Narasi Migrasi Panduan Praktis Meliputi Migrasi Berstandar Etika Untuk Profesional Media*. [https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/ID%20Media%20Guidelines%20-%20Membuat%20Narasi%20Migrasi\\_%202021.pdf](https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/ID%20Media%20Guidelines%20-%20Membuat%20Narasi%20Migrasi_%202021.pdf). Diakses pada 28 Oktober 2024.

<sup>38</sup> Haryono. 2017. "Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan)". *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, Vol. 3, No. 2.



menjadi salah satu faktor banyaknya individu yang memilih untuk bermigrasi demi mendapatkan pekerjaan. Pemerintah juga telah mengizinkan dan memfasilitasi Masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri, seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 18 Tahun 2017 bahwa salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hak bekerja dan memiliki kehidupan yang layak bagi Masyarakat adalah dengan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan menjamin hak serta perlindungan hukum bagi PMI. Indonesia menjadi negara dengan jumlah tertinggi kedua dalam mengirim pekerja migran se-ASEAN.<sup>39</sup> Pengiriman pekerja migran ke negara-negara lain umumnya didasari karena Pengiriman PMI memiliki dampak positif dalam segi perekonomian Indonesia karena remitansi mereka selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa bagi Indonesia.

Penempatan PMI terus mengalami kenaikan sejak dua tahun terakhir. Seperti yang dilansir oleh web resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2021 terdapat 72.624 PMI yang telah berangkat, kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 176% dengan jumlah 200.802 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 37% menjadi 274.965 pekerja migran yang berhasil di tempatkan pada negara-negara tujuan.<sup>40</sup> Dari banyaknya negara penempatan, Taiwan menjadi negara penempatan PMI terbanyak nomor satu pada tahun 2023, dengan total jumlah penempatan sekitar 83.216 PMI. Terdapat peningkatan sekitar 56% atau 29.733 jumlah penempatan dari yang sebelumnya berjumlah 53.459 penempatan di tahun 2022. Hal tersebut didasari dari adanya tandatangan kesepakatan kerja sama antara Indonesia dengan Taiwan di bidang tenaga kerja pada 17 Desember 2004 silam.<sup>41</sup> Indonesia dan Taiwan belum memiliki hubungan diplomatik secara resmi karena pada dasarnya Indonesia menganut kebijakan *One China Policy* yaitu pengakuan satu negara China yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan tidak mengakui secara resmi negara Taiwan. Namun, walaupun tidak ada hubungan diplomatik secara resmi, Taiwan dan Indonesia memiliki kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, dan *people-to-people*

---

<sup>39</sup> Isnarti, R, Astuti, W.R.D., Irawan, P. 2021. "Analisa Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pemberlakuan Mutual Recognition Agreement (MRA) di Negara-Negara Anggota ASEAN". *Jurnal TransBorders*, Vol. 4, No. 2.

<sup>40</sup> BP2MI. 2023. *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2023*. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023>. hal 6. Diakses pada 4 Mei 2024.

<sup>41</sup> TETO. 2016. *Kondisi Hubungan Bilateral antara Taiwan dan Indonesia*. [https://www.roc-taiwan.org/id\\_en/post/50.html](https://www.roc-taiwan.org/id_en/post/50.html). Diakses pada April 2024.



*exchange*.<sup>42</sup> Indonesia dan Taiwan telah sepakat untuk mendirikan kantor perwakilan di Jakarta dan Taipei sejak tahun 1971 silam.

Banyaknya jumlah penempatan PMI di Taiwan diiringi pula dengan banyaknya pengaduan permasalahan yang diterima. Berdasarkan data dari laman resmi BP2MI tahun 2023, Taiwan menjadi negara penempatan PMI yang memiliki jumlah pengaduan tertinggi ketiga setelah Arab Saudi dan Malaysia dengan jumlah pengaduan mencapai 370 selama tahun 2023, dan meningkat hingga 231 pengaduan pada tahun 2024 (s.d bulan Oktober) sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini:<sup>43</sup>

Tabel 2 Pengaduan PMI di Tiga Negara Penempatan Terbanyak Periode 2021-2024 (s.d Oktober)

No.	Negara	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	Malaysia	403	451	381	378	1.613
1.	Saudi Arabia	265	475	498	159	1.397
3.	Taiwan	143	197	370	231	941

Sumber: BP2MI, 2024

Keselamatan PMI di Taiwan belum benar-benar terjamin baik. Terdapat banyak kasus pelanggaran hak yang dilakukan terhadap PMI. Beberapa permasalahan yang seringkali dijumpai dari PMI Taiwan adalah Biaya penempatan melebihi struktur biaya, penipuan peluang kerja gaji yang tidak dibayarkan, *overcharging*, dan masih banyak lainnya. Untuk bekerja di Taiwan, PMI harus melakukan masa pelatihan selama beberapa bulan. Belum lagi pengeluaran biaya yang digunakan untuk mengurus visa, *medical check up*, tiket pesawat, dan juga paspor. Biaya tersebut umumnya didapat melalui pinjaman bank perusahaan dan agensi penyalur PMI. Kemudian setelah bekerja selama kurang-lebih 9 bulan pertama, gaji PMI akan dipotong oleh agensi penyalur sebanyak beberapa persen untuk membayarkan biaya pengurusan keberangkatan yang ada di awal tersebut.<sup>44</sup> Tidak jarang dari agensi penyalur bertindak nakal dan memeras para PMI. Hal tersebut dapat ditinjau dari adanya pembicaraan serius oleh Asosiasi Tenaga

<sup>42</sup> Mahardika. T.M., Darmawan. A. 2020. "Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan". *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5. No. 2.

<sup>43</sup> BP2MI, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia...99*.

<sup>44</sup> Sudarmanto. H. 2022. "Upaya Meningkatkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Penempatan Wilayah Asia". *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.11.



Kerja Indonesia di Taiwan bersama Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) terkait isu *overcharging* serta praktik jual beli *job* yang menysasar PMI Taiwan. Para PMI Taiwan menyatakan bahwa terdapat pembebanan biaya berlebih yang bervariasi bagi setiap PMI.<sup>45</sup> Ditemukannya celah-celah pihak swasta atau agen penyalur yang melakukan pelanggaran tersebut dikarenakan peran pemerintah Indonesia tidak dapat berkerja secara keseluruhan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan PMI di Taiwan.

Oleh karenanya peran BP2MI tentu saja sangat diperlukan. Secara ideal, tugas BP2MI adalah melaksanakan pelayanan mengenai penempatan dan perlindungan terhadap PMI secara terpadu. Sedangkan beberapa fungsi BP2MI menurut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 adalah pemenuhan hak PMI, pelaksanaan penempatan PMI atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi PMI dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di Negara tujuan penempatan, dan pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan PMI kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan PMI.<sup>46</sup>

Dari fungsi yang telah ditetapkan oleh Presiden, BP2MI memiliki solusi untuk mengatasi atau mencegah terjadinya masalah *overcharging* dan praktik jual beli *job* tersebut terulang kembali. BP2MI meluncurkan suatu program skema penempatan untuk PMI Taiwan yang dikenal dengan *Special Placement Program to Taiwan* (SP2T). SP2T adalah program yang diluncurkan oleh BP2MI dan pemerintah Taiwan untuk memfasilitasi penempatan PMI di Taiwan melalui *Direct Hiring Service Centre* (DHSC) yang mana itu adalah badan pelayanan milik pemerintah Taiwan yang berada di bawah koordinasi *Ministry of Labour*.<sup>47</sup> Menurut Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, SP2T dapat dinilai sebagai solusi dari adanya permasalahan jual beli *job* yang menelan banyak biaya hingga puluhan juta rupiah serta permasalahan *overcharging* yang banyak terjadi di Taiwan.

---

<sup>45</sup> Mappapa. L. 2017. *Organisasi TKI Taiwan Keluhkan Praktik Overcharging*. Organisasi TKI Taiwan Keluhkan Praktik Overcharging (detik.com). Diakses pada 15 April 2024.

<sup>46</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>47</sup> Konkrit News. 2020. *Peluang kerja Taiwan melalui Penempatan Direct Hiring Special Placement Program to Taiwan (SP2T)*. <https://www.konkritnews.com/2020/03/peluang-kerja-taiwan-melalui-penempatan.html>. Diakses pada 15 April 2024.



Dalam pelaksanaannya, BP2MI dibantu oleh unit pelayanannya yakni BP3MI yang memiliki fungsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis BP2MI sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022. Sehingga dalam pelaksanaan program SP2T ini, BP3MI memiliki tugas teknis dan BP2MI memiliki peran secara administratif.

## B. Permasalahan *Job Order* PMI di Taiwan

Permasalahan terkait *job order* kerap kali menjadi hambatan dalam penempatan PMI di Taiwan yang mengarah pada kondisi yang menekan dan merugikan pekerja secara materil. Beberapa kasus *job order* di antaranya adalah pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai atau bahkan tidak ada sama sekali, ketidaksesuaian kontrak kerja, dan biaya *job order* yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BP2MI. Permasalahan *job order* yang seringkali ditemui di Taiwan adalah tentang banyaknya pengaduan terkait tingginya biaya *job* dan pemutusan kontrak secara sepihak pada sektor formal. Dalam sebuah rilis media, ditemukan misalnya, salah seorang ketua dari suatu komunitas pekerja di Taiwan asal Indonesia mengeluhkan banyaknya pengaduan tentang tingginya biaya *job* yang ternyata susah dilaporkan. BP2MI telah mengeluarkan aturan tentang biaya penempatan yang harus dikeluarkan oleh CPMI Taiwan yakni hanya sebesar Rp 27 juta yang sudah mencakup biaya visa, paspor, *medical check-up* dan biaya lainnya. Akan tetapi dari laporan pengaduan dari PMI yang telah bekerja di Taiwan mengatakan bahwa mereka telah dikenakan biaya yang beragam untuk pembelian *job* yang berkisar antara Rp 25 Juta sampai dengan Rp 100 Juta.<sup>48</sup> Analisis bidang ketenagakerjaan KDEI mengatakan bahwa apabila terdapat laporan mengenai biaya *job* maka akan diselesaikan dengan mediasi yang memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan. Agensi hanya diperkenankan menarik biaya jasa layanan per bulan sekitar NT\$1800 untuk PMI di tahun pertama tiba, NT\$ 1700 untuk PMI di tahun kedua bekerja, dan NT\$ 1500 untuk PMI di tahun ketiga. Apabila PMI dikenakan biaya

---

<sup>48</sup> Fokus Taiwan. 2024. Wawancara/Aktivas: Pengaduan PMI beli *job* hingga Rp100 Juta melalui Sponsor, tak Punya Bukti Kuat untuk Melapor. <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202408205009>. Diakses pada 20 Oktober 2024.



di luar ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa agensi tersebut menipu.<sup>49</sup>

### C. Kerja Sama TETO dan KDEI Taipei Mengenai Perekrutan, Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pada 14 Desember 2018 di Taipei, Pemerintah Indonesia melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta (TETO) mengenai perekrutan, penempatan, dan perlindungan PMI guna meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan PMI. Penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh perwakilan Kepala KDEI, Didi Sumedi dan Kepala TETO, John C. Chen, dan disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia saat itu, M. Hanif Dhakiri serta Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Hsu Ming Chun di Taipei, Taiwan.<sup>50</sup> MoU ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Taiwan dalam perekrutan, penempatan dan perlindungan PMI, serta memberikan ruang untuk kedua belah pihak meningkatkan hubungan berkelanjutan yang saling menguntungkan di masa depan.

Dalam kesepahaman MoU ini, para pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran bilateral di bidang pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan, dukungan ketenagakerjaan, kewirausahaan perempuan dan peningkatan kapasitas penyandang disabilitas melalui platform organisasi internasional dan mekanisme kemitraan regional. Selain itu dijelaskan pula tentang system rekrutmen yang ada, dan kedua belah pihak setuju untuk mempersingkat prosedur, menyederhanakan dokumen persyaratan serta memberikan prioritas bagi Program *Re-Entry Hiring* dan untuk perluasan jenis pekerjaan pada program *Direct Hiring* yang pada tahun 2019 ke depan dikenal sebagai *Special Placement Program to Taiwan* (SP2T) apabila diberikan izin oleh peraturan oleh Para Pihak. Penandatanganan MoU ini juga dinilai sebagai bentuk respon terhadap kendala PMI tentang isu ketenagakerjaan yang dihadapi

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Sarana Advokasi & Edukasi Save PMI Taiwan. 2018. Indonesia-Taiwan Teken MOU Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://savepmi.kdei-taipei.org/2018/12/indonesiataiwan-teken-mou-peningkatan.html>. Diakses pada 13 Mei 2024.



PMI Taiwan selama ini melalui pembahasan *Joint Working Group* (JWG) serta *Joint Task Force* (JTF). Karena sebelumnya pada forum tersebut, perwakilan PMI menjelaskan bahwa banyaknya pengaduan mengenai praktik jual beli *job* yang dirasa sangat memberatkan PMI dalam proses penempatannya ke Taiwan. Nota kesepahaman ini wajib berlaku selama empat tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Masing-masing pihak dapat mengakhirinya dengan pemberitahuan tertulis paling lambat tiga bulan sebelum tanggal habis masa berlakunya.<sup>51</sup>

Pada 21 Agustus 2019, BP2MI yang saat itu masih bernama BNP2TKI melaksanakan *Review Meeting Pilot Project* Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui *Skema Special Placement Program to Taiwan* (SP2T) sebagai tindak lanjut dari adanya MoU yang telah ditandatangani pada 14 Desember 2018. Pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut antar lain Pejabat dan Perwakilan dari *Ministry of Labor* (MOL) Taiwan, Perwakilan TETO Jakarta, KDEI Taipei, Kemnaker, Kemendikbud, Kemenkumham dan unit kerja terkait dari BP2MI dan BP3MI. Kegiatan *review meeting* ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Delegasi BP2MI (BNP2TKI) ke Taiwan pada Juni 2018.<sup>52</sup> Pada kegiatan monitoring tersebut Delegasi BNP2TKI didampingi oleh KDEI Taipei melakukan *bilateral meeting* dengan *Direct Recruitment Service Center* (DSHC) sebagai bentuk keseriusan kedua pihak atas pelaksanaan program SP2T. Kegiatan rewiu ini memaparkan proses bisnis penempatan ke Taiwan melalui program penempatan DHSC yang disebut dengan SP2T. Selanjutnya, proyek percontohan pendirian bisnis manufaktur di Shinkong Co., Ltd., sebuah pabrik tekstil yang ada di Taiwan. Hal ini dilakukan oleh BP3TKI Jakarta sebagai *pilot project* pelaksana. Kegiatan ini akan menarik keterlibatan seluruh pihak di Taiwan dan Indonesia serta menjadi forum terbaik untuk meningkatkan penempatan PMI yang memenuhi syarat di Taiwan melalui program SP2T dan diharapkan proses bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> BP2MI. 2019. *BNP2TKI Adakan Kegiatan Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Placement to Taiwan (SP2T)*. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>. Diakses pada 14 Mei 2024.

<sup>53</sup> Ibid.



## D. Peran BP3MI dalam Pelaksanaan SP2T

Program SP2T pertama kali dibahas pada 2017 pada pertemuan *Employment Business Meeting* yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, dan BNP2TKI (sebelum menjadi BP2MI). Pada agenda tersebut, BNP2TKI menyatakan keinginannya tentang perluasan penempatan PMI formal ke beberapa Negara tujuan dengan cara memperkuat cakupan pasar kerja di luar negeri. Sebagai tindakan positif dari KDEI dalam menyambut keinginan BNP2TKI, dilakukanlah penandatanganan Nota kesepahaman antara Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dan Kantor Dagang Ekonomi Taipei di Jakarta, Indonesia pada tahun 2018 mengenai perekrutan, penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh John Chen selaku Kepala TETO, dan Didi Sumedi selaku Kepala KDEI dan disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan dari Indonesia dan Taiwan.

SP2T merupakan skema yang mengikuti sistem *Direct Hiring* yang mana PMI berangkat ke Taiwan tidak melalui P3MI, agensi, maupun pihak ketiga dalam melakukan proses penempatannya. SP2T bertujuan untuk memperkecil kemungkinan adanya monopoli atau kecurangan yang sebelumnya dilakukan oleh PPTKIS atau agensi swasta dalam menyalurkan PMI ke Taiwan, khususnya dalam isu *overcharging* serta jual beli *job*. Demi suksesnya program ini, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan lembaga yang bekerja di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan yang kemudian dikenal dengan DSHC.<sup>54</sup> Pemberangkatan PMI dengan skema penempatan SP2T dilakukan pertama kali pada tahun 2019 dengan tiga orang PMI yang nantinya akan bekerja di Perusahaan Shinkong Textile, Taiwan. Peminat SP2T dinilai masih massif karena hanya ada dua sektor yang ditawarkan oleh pihak Taiwan yakni *operator* dan *worker*. Pada 2024 terdapat penambahan satu jenis sektor baru, yakni *Nursing Home Worker* (perawat) dengan peminat sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> General Information for Direct Hiring Service. 2018. <https://dhsc.wda.gov.tw/en/Info/About>. Diakses pada 13 Mei 2024

Tabel 3 Penempatan PMI SP2T Taiwan Berdasarkan Jabatan Tahun 2024 (s.d Oktober)

No.	Jabatan/Sektor	2022	2023	2024	Jumlah
1.	<i>Worker</i>	8	20	25	53
2.	<i>Operator</i>	16	0	0	16
3.	<i>Nursing Home</i>	-	-	1	1

Sumber: BP2MI

Keuntungan yang didapat PMI ketika melakukan penempatan dengan skema ini adalah *Zero Cost* karena biaya pemberkasan dan urusan lainnya seperti paspor, visa, tiket keberangkatan, dan biaya *Medical Check Up* akan ditanggung oleh pihak *User* Taiwan.<sup>55</sup> Dalam skema penempatan PMI melalui SP2T ini, BP2MI memiliki peranan yang cukup besar, mengingat program ini adalah keinginan dari BP2MI sebagai wujud dari perluasan pasar kerja dan sebagai upaya yang dilakukan untuk menekan jumlah permasalahan *overcharging* serta praktik jual beli *job*. Namun selain itu, KDEI serta DSHC juga memiliki andil dalam porsi yang telah ditentukan sebelumnya. Proses rekrutmen dan wawancara dilaksanakan di Kantor BP3MI melalui media *Skype* dan *Teleconference* antara Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), perusahaan pengguna yang akan didampingi oleh *Direct Hiring Service Center* (DSHC) Taiwan, KDEI Taiwan, serta pihak dari BP3MI.

Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan serta perlindungan PMI, BP2MI dan BP3MI memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan SP2T demi mewujudkan pemenuhan hak PMI dan terjaminnya hukum PMI di Taiwan. Dalam peraturan BP2MI nomor 6 Tahun 2022, BP2MI memiliki beberapa fungsi administratif dan BP3MI memiliki fungsi sebagai pengoptimalisasi tugas dan pelayanan dari BP2MI.

Dalam konteks skema SP2T ini, BP2MI berperan sebagai melaksanakan penempatan PMI atas perjanjian kerja sama tertulis dengan PT yang berkenan untuk melakukan penempatan melalui KDEI dan DSHC, menyusun dan menetapkan peraturan tentang standar kerja, kualifikasi pekerja, serta alur dan proses dalam pelaksanaan SP2T. Sebagai unit pelayanan teknis, BP3MI melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah dirancang dan

<sup>55</sup> BP2MI. 2019. Pelepasan PMI ke Taiwan Melalui Skema Penempatan Special Placement Program to Taiwan (SP2T). <https://bp2mi.go.id/berita-detail/pelepasan-pmi-ke-taiwan-melalui-skema-penempatan-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>. Diakses pada 20 Mei 2024.



ditetapkan oleh BP2MI. Beberapa peran BP3MI dalam pelaksanaan skema SP2T adalah,

### **1. Mempromosikan Skema SP2T melalui Web Resmi, Sosial Media Resmi BP3MI, dan Job Fair**

Untuk memperluas cakupan kerja, BP3MI aktif dalam melakukan promosi terhadap skema SP2T melalui laman resmi dan sosial media resmi BP3MI. Bentuk promosi tersebut dilakukan untuk menarik minat seluruh masyarakat Indonesia. Kemudahan akses dan digitalisasi informasi menjadikan masyarakat Indonesia lebih mudah untuk mengupdate berita tentang lowongan pekerjaan secara *online*. Selain itu BP3MI juga aktif dalam mempromosikan skema SP2T secara *offline* melalui kegiatan *Job Fair* yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

### **2. Pendaftaran dan Verifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia**

Proses pelayanan ini dimulai dengan pendaftaran PMI, umumnya PMI telah mendaftarkan diri atau membuat akun pada laman SISKOP2MI. SISKOP2MI sendiri adalah Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana sistem ini mengatur tentang administrasi penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Namun jika PMI memang telah memiliki akun SISKOP2MI, maka dapat langsung login dan memperbarui data. Kemudian selanjutnya CPMI akan memilih lowongan pekerjaan yang tersedia untuk Skema SP2T, dan dilanjut untuk mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kemudian memilih tempat lokasi BP3MI/P4MI/LTSA untuk pelaksanaan verifikasi. Setelah tahap pendaftaran selesai BP3MI akan melakukan cek kelengkapan dan kesesuaian dokumen penempatan yang tertera pada akun SISKOP2MI, kemudian BP3MI akan menerbitkan hasil verifikasi dokumen melalui e-mail. Setelah itu, pihak pemberi kerja akan menentukan CPMI dan melakukan penjadwalan seleksi *interview* melalui SISKOP2MI. CPMI yang terpilih untuk mengikuti seleksi akan mendapat notifikasi melalui e-mail.

### **3. Fasilitator Pelaksanaan Seleksi Interview**

Dalam hal ini, BP3MI berperan sebagai fasilitator dalam wawancara seleksi CPMI bersama DSHC. BP3MI menyediakan

ruangan dan menyambungkan antara pihak CPMI dan DHSC. Pelaksanaan seleksi wawancara dilakukan selama satu hari secara *daring* melalui video conference yang berlokasi di BP3MI. CPMI akan diseleksi langsung secara virtual oleh perusahaan terkait dan dihadiri secara virtual oleh DSHC Taiwan, KDEI Taipei, pihak BP2MI yang diwakili oleh Direktorat Penempatan Non Pemerintahan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI. CPMI akan di tes meliputi tes buta warna, keterampilan, kesehatan, matematika, fisik dan beberapa macam tes lainnya.

#### **4. Pendampingan Pengurusan Visa Kerja CPMI di TETO**

Apabila CPMI lolos dalam seleksi wawancara, maka CPMI akan dihimbau untuk mengurus visa di TETO. CPMI akan diminta untuk melakukan pemenuhan dokumen di antaranya SKCK, Paspor, hasil *Medical Check Up*, BPJS Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja, serta Visa. Uniknya, pada skema SP2T ini, pengurusan visi kerja CPMI akan diantar dan didampingi oleh pihak BP3MI di TETO sebagaimana SOP yang telah ditetapkan oleh BP2MI. Hal tersebut berbeda dengan Skema penempatan P to P Taiwan yang proses pengurusan visanya dilakukan secara mandiri dan dengan biaya mandiri juga.

#### **5. Pelaksanaan Kelas Orientasi Pra Pemberangkatan**

CPMI yang telah melaksanakan pemenuhan seluruh dokumen dan administratif wajib melaksanakan kelas Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di kantor BP3MI untuk membekali CPMI dengan materi-materi seperti perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan Luar Negeri, adat istiadat, mental kepribadian, dan hal-hal yang perlu dihindari (seperti Narkoba, HIV/AIDS, perdagangan manusia, dan lain-lain). Selain itu perekaman sidik jari biometrik juga akan dilakukan di BP3MI untuk menyelesaikan proses serta tahapan keberangkatan PMI.

#### **6. Menjadwalkan Keberangkatan PMI ke Taiwan**

Peranan BP3MI dalam penempatan Skema SP2T yang terakhir adalah menjadwalkan keberangkatan PMI ke Taiwan apabila rangkaian proses pendaftaran dan seleksi telah diselesaikan oleh PMI.



## E. Penutup

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Taiwan mengalami problematika yang sama sejak 2017 silam, yakni tentang *overcharging* dan praktik jual beli *job*. BP2MI sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk melindungi dan memberikan pelayanan terhadap PMI mengusulkan adanya program penempatan baru yakni *Special Placement Program to Taiwan* sebagai terobosan baru untuk memperluas pasar kerja, serta sebagai solusi dari adanya permasalahan *overcharging* dan praktik jual beli *job*, karena pada pelaksanaannya tidak dipungut biaya atau *zero cost*. Dalam hal ini BP3MI memiliki peranan yang dinilai dapat menjadi bentuk suatu perlindungan terhadap PMI maupun CPMI.

Beberapa bentuk peranan yang dilakukan antara lain melaksanakan proses administratif seperti pendaftaran pada akun SISKOP2MI dan verifikasi berkas, menjadi fasilitator agenda seleksi wawancara antara PMI, Perusahaan terkait yang akan dihadiri secara online oleh KDEI Taipei, DSHC, dan BP2MI yang diwakili oleh Direktorat Penempatan non Pemerintah Kawasan Asia-Afrika, Melakukan pendampingan PMI dalam mengurus visa kerja di TETO, melakukan penjadwalan pemberangkatan PMI ke Taiwan, dan aktif dalam mempromosikan dan mengenalkan skema SP2T kepada masyarakat Indonesia.

# BAB 5

## DIFUSI NORMA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN (*INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES*) DI JAWA TIMUR

*Keysha Amelia Patricia*

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang menduduki peringkat pertama terkait pengirim migran terbesar, berdasarkan pada kondisi ini, Indonesia dihadapi dengan berbagai permasalahan, salah satunya adalah kondisi ketenagakerjaan yang selalu menjadi isu yang tidak pernah terlepas dari pandangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dapat terlihat dari perhatian Indonesia terhadap kondisi ketenagakerjaan Indonesia dengan bergabung kepada anggota ILO (*International Labour Organization*) sejak tahun 1950 dan menjadi negara pertama di Asia serta negara kelima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok yang ditetapkan oleh organisasi tersebut (Adha, 2013).

Namun, hal yang menjadi permasalahan adalah, meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi dari ILO tersebut, tidak menjadikan negara tersebut terlepas dari permasalahan tentang kondisi ketenagakerjaan. Seperti yang diketahui, permasalahan yang sering dihadapi setiap negara termasuk Indonesia adalah permasalahan terkait kurang tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Tingginya angka pengangguran di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang mana juga tidak terlepas dari berbagai macam faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan, tidak seimbang pertumbuhannya lapangan pekerja dengan pertumbuhan angkatan kerja, adanya urbanisasi,



rendahnya pertumbuhan ekonomi, serta kesenjangan ekonomi yang sulit untuk diatasi (Aryadi & Hoesin, 2022). Dalam menghadapi permasalahan tersebut, sebagian masyarakat Indonesia akhirnya memilih untuk menghidupi dirinya dengan menjadi Pekerja Migran Indonesia -selanjutnya akan disebut sebagai PMI- di luar negeri. Kondisi ini akhirnya menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran tertinggi di Asia dengan mengirimkan sebanyak 150.000 sampai dengan 250.000 pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri setiap tahunnya. (*IOM Joins Hands with BPS to Support the Development of a Roadmap for the Implementation of the One International Migration Data*, t.t.)

Dengan arus migrasi pekerja migran yang terus meningkat ini, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan kebijakan resmi dalam peraturan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam undang undang tersebut membahas terkait kewajiban pemerintah maupun pekerja migran Indonesia, tata cara pelaksanaan serta aturan dalam penempatan PMI di luar negeri, perlindungan terhadap PMI, serta pengaturan terkait pengawasan terhadap seluruh PMI yang bekerja di luar negeri. Namun, meskipun Indonesia sudah menegakkan hukum yang memberikan kerangka perlindungan bagi para pekerja migran pada tahun 2004, data pada tahun 2011 justru menunjukkan lemahnya penegakkan dan kekuatan hukum yang dirancang, tepatnya pada 7 tahun setelah hukum ditegakkan, Indonesia masih menghadapi kasus kekerasan terhadap pekerja migran dengan angka yang cukup tinggi.

Hal tersebut dapat terlihat melalui data yang dikeluarkan oleh BNP2TKI yang sekarang telah menjadi BP3MI yang mana menjelaskan bahwa dalam rentang tahun 2011 ada sebanyak 48.002 pekerja migran dari Indonesia yang tersebar di Arab Saudi dan Hongkong yang mengalami kasus kekerasan. Selain itu, data dari BNP2TKI juga menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dan 2011 Indonesia masih memiliki regulasi dan kelemahan kerangka hukum perlindungan nasional yang menyebabkan meningkatnya angka penderita HIV/AIDS kepada 80% para pekerja migran dari Indonesia, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam sistem perlindungan kesehatan yang diterapkan oleh negara-negara penempatan, serta minimnya akses pekerja migran terhadap layanan kesehatan yang memadai selama bekerja di luar negeri. Seiring dengan tingginya angka kasus

kekerasan dan permasalahan kesehatan di kalangan PMI, dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana Indonesia dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran dengan tidak hanya mengandalkan regulasi domestik, tetapi juga dengan mengadopsi norma-norma internasional yang telah diakui secara luas dalam perlindungan pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan Indonesia meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families* melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012.

Keberadaan konvensi internasional ini juga dapat dikatakan sebagai suatu rezim internasional, hal ini dikarenakan pokok pokok yang tertuang dalam konvensi internasional tersebut memiliki kesinambungan terhadap kebutuhan negara negara internasional dalam mengatasi permasalahan terkait pekerja migran ini. Sehingga, pada akhirnya kesinambungan yang terjadi antara pokok pokok konvensi internasional dan negara internasional ini menciptakan suatu kesepakatan bersama yang memuat tentang prinsip maupun pedoman terkait perlindungan terhadap pekerja migran itu sendiri. Lebih lanjut, sesuai dengan karakteristik konvensi internasional tersebut yang telah menjadi rezim internasional, maka kondisi ini menyebabkan adanya konsekuensi yang tercipta, yakni terbentuknya arah kebijakan yang menuntut untuk menyesuaikan nilai nilai yang tertuang di dalam konvensi internasional tersebut ke dalam hukum nasional.

Kondisi ini memberikan kesesuaian dengan teori rezim internasional itu sendiri yang menjelaskan bahwa setiap negara yang memiliki keterikatan terhadap suatu rezim maka diwajibkan untuk mematuhi dan mengimplementasikan pokok pokok yang terkandung di dalam rezim tersebut -dalam hal ini konvensi internasional- ke dalam kebijakan nasional negara yang bersangkutan. Berdasarkan pada hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi internasional terkait pekerja migran mewujudkan konsekuensi tersebut melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”. Lebih lanjut, sebagai bentuk dari komitmen Indonesia dalam menerima keberadaan konvensi internasional ini, maka Indonesia perlu untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut terkait dengan hukum domestic Indonesia, hal ini berarti modifikasi terhadap hukum turunan dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 perlu untuk disesuaikan dengan pokok pokok yang tertuang dalam Konvensi Internasional Tentang Pekerja Migran



tahun 1990. Namun, yang menjadi permasalahan adalah masih terdapat celah pada Undang Undang Nasional tersebut dikarenakan dalam Konvensi Internasional telah menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran beserta keluarganya perlu dilakukan tanpa memberikan diskriminasi termasuk dengan status keimigrasian yang dimiliki oleh pekerja migran yang bersangkutan. Namun, dalam peraturan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 hanya memaksimalkan perlindungan kepada pekerja migran yang melalui jalur procedural. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan nilai nilai konvensi internasional padahal sejatinya aturan aturan yang terkandung di dalam Undang Undang perlu memiliki kesesuaian terhadap apa yang telah tertuang di dalam Konvensi Internasional.

Berdasarkan pada hal tersebut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai produk turunan tentu saja berkewajiban untuk memiliki keselarasan terhadap hukum nasional yang berlaku. Hal ini menyebabkan Perda Provinsi yang berupaya untuk menegakkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya tersebut juga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada Pekerja Migran Non Prosedural. Padahal, Ketika melihat ke dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022, maka dapat ditelusuri lebih jauh terkait bagaimana kondisi Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi terbesar yang mengirimkan pekerja migran Indonesia pada tahun 2024. Data yang dikeluarkan oleh Pusdatin BP2MI terhitung dari bulan Januari sampai dengan Maret 2024, PMI jalur procedural yang berasal dari Jawa Timur berada di angka 22.066 jiwa.

Berdasarkan pada hal ini, belum dapat dipastikan berapa jumlah keseluruhan pekerja migran non procedural yang berasal dari Jawa Timur, padahal sepanjang tahun 2023 dapat diperkirakan jumlah pekerja Migran Indonesia sebanyak 9 juta orang. Namun, menurut data yang dikeluarkan oleh SISKOP2MI hanya mencatat sebanyak 4,6 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, hal ini menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 4,4 juta Pekerja Migran Indonesia yang bekerja melalui jalur yang non procedural (Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023) Kondisi tersebut pada akhirnya menempatkan Jawa Timur memiliki kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakatnya. Akan tetapi, upaya perlindungan yang diupayakan oleh Provinsi Jawa Timur pada akhirnya akan terbatas dikarenakan hukum yang tingkatannya

berada di atas Perda Provinsi tersebut tidak mencantumkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menempuh jalur yang non procedural. Oleh karena itu, penelitian ini akan mempertanyakan terkait “*Mengapa Indonesia Melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tidak Mengadopsi seluruh norma yang telah tertuang di dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families terutama dalam perlindungan kepada pekerja migran Non Prosedural?*”. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut menggunakan konsep Difusi Norma yang dibawakan oleh Amitav Acharya dan melihat bagaimana Perda Provinsi Jawa Timur sebagai produk hukum turunan mengadopsi norma norma internasional tersebut ke dalam peraturan daerah mereka.

## **B. Lokalisasi Norma Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012**

Dalam penulisan ini, penulis berupaya untuk memberikan gambaran terkait “Lokalisasi Norma Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012”. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan terkait beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari unsur kesamaan dan menjadi pembeda dari penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, keberadaan tinjauan literatur juga berfungsi untuk memberikan kekuatan bagi penelitian yang dilakukan oleh penulis agar pembahasan yang dilakukan tidak akan terlepas dari topik utama yang diteliti. Salah satu tinjauan literatur yang memiliki pembahasan yang sesuai dengan isu ini dipaparkan oleh Pamungkas A. Dewanto melalui penelitiannya pada tahun 2020 yang berjudul “*The Domestication of Protection: The state and Civil Society in Indonesia’s Overseas Labour Migration*” yang mana membahas tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil dalam memberikan definisi, membingkai, dan memberikan implementasi terhadap “perlindungan” yang mana dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan pekerja migran dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Dalam penelitiannya, Pamungkas berargumen bahwa “domestikasi perlindungan” sebagai bentuk sikap para pemangku



kebijakan yang melihat masalah masalah terkait pekerja migran di luar negeri itu sebagai masalah yang berasal dari dalam negeri. Sehingga, tindakan perlindungan yang dilakukan kepada pekerja migran ini terbatas kepada tinakan yang telah diarahkan oleh negara asal sebelumnya kepada proses keimigrasian yang berada di dalam yuridiksi negara penempatan (Dewanto, 2020).

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Brenda S.A. Yeoh dan Charmian Goh dalam penelitiannya pada tahun 2020 yang berjudul “***Social Protection for Migrant Domestic Workers in Singapore: International Conventions, the Law, and Civil Society Action***” yang mana membahas tentang bagaimana implementasi yang dilakukan dalam mengurangi adanya kerentanan pekerja migran non formal di Singapura. Karena seperti yang diketahui bahwa kondisi pekerja migran yang terjadi di Singapura yang menunjukkan tentang rendahnya perlindungan sosial yang ditandai dengan perlindungan yang tidak pasti serta tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan pekerjaan sektor non formal cenderung dijauhi oleh masyarakat, dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang rendah, tidak terlihat, dan dibayar rendah. Dalam hal ini Brenda dan Charmian menemukan bahwa terbatasnya perlindungan terhadap pekerja migran melalui konvensi internasional dan kebijakan nasional disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial dan perlindungan terhadap pekerja migran di negara penempatan, ini artinya seberapa besar perhatian suatu negara terhadap keberadaan pekerja migran juga menjadi faktor penentu terkait sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran yang bersangkutan.

Implementasi yang dapat terlihat dari negara Singapura adalah ketika Singapura melakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* pada tahun 1979, yang mana meskipun ratifikasi yang dilakukan oleh Singapura ini belum memberikan dampak yang berarti terhadap perlindungan sosial pekerja migran non formal di negara tersebut, namun konvensi ini memberikan suatu mekanisme kepada para Lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan advokasinya agar pekerja migran sektor non formal ini dapat disertakan kedalam undang undang ketenagakerjaan Singapura dan memiliki hak atas tunjangan cuti sakit, jam kerja maksimal, memiliki waktu istirahat, mendapatkan kompensasi jika bekerja lembur, serta hak hak yang perlu dipenuhi saat sedang hamil. Tulisan ini juga menjelaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia

dan standar ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam konvensi internasional belum melebur ke dalam tingkat domestik sehingga menyebabkan kebijakan nasional Singapura terkait Pekerja Migran itu sendiri masih terbatas (Yeoh dkk., 2020).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Mireille Marcia dan Rizky Widian yang berjudul “**Challenges in norm-localization at the city level: the case of localizing in the human rights city concept in Bandung, Indonesia**” membahas tentang bagaimana implementasi konsep kota yang menegakkan norma norma hak asasi manusia dalam pemerintahan dan Pembangunan daerah yang telah diatur sebagai norma global. Dalam hal ini, penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana upaya kota Bandung yang telah sah menjadi Kota HAM pertama di Indonesia. Sehingga, melalui konsep lokalisasi norma yang dibawakan oleh Acharya, peneliti berupaya untuk melihat konsep global ini dapat dilokalisasi sehingga dapat mempengaruhi konstitusi rezim menjadi kota yang menekankan konsep konsep hak asasi manusia di dalamnya. Dalam penelitiannya Mireille dan Rizky menemukan fakta bahwa upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bandung terhadap penegakan norma norma hak asasi manusia tersebut tidak secara langsung dapat memperkuat rezim kota HAM di kota Bandung.

Hal ini dikarenakan berbagai macam upaya yang dilakukan menciptakan kondisi yang membingungkan di antara para pejabat pemerintahan dan pemangku kepentingan kota Bandung dikarenakan adanya berbagai macam inisiatif terkait penegakan norma HAM ini tidak sesuai jika disesuaikan ke dalam konsep kebijakan Kota HAM. Kondisi ini terjadi dikarenakan struktur local yang telah diterapkan di Kota Bandung saat ini telah dikaitkan dengan konsep Kota HAM melalui peraturan nasional. Hal ini menyebabkan tidak adanya strategi yang jelas dan inisiatif lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah kota dikarenakan ketergantungan mereka kepada peraturan Kota HAM yang telah diatur pemerintah pusat sebelumnya (Karman dkk., 2020).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Asyifa Mahardika dalam tulisannya yang berjudul “**Penyesuaian Norma Global di Asia Tenggara: Konsep Adopsi Parsial Dalam Lokalisasi Responsibility to Protect Dalam Krisis Humaniter Myanmar Tahun 2008**”. Dalam tulisannya, Asyifa mencoba untuk meneliti bagaimana Responsibility to Protect dapat diimplementasikan secara parsial di ASEAN. Penelitian ini dilatar



belakangi oleh kehadiran *Responsibility to Protect* yang dinilai tidak dapat sesuai ASEAN dikarenakan nilai nilainya yang tidak sesuai jika dibandingkan dengan norma norma local ASEAN khususnya ketika membahas tentang nilai nilai kedaulatan dan prinsip non intervensi. Peneliti mengambil sebuah studi kasus terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar pada tahun 2008 dan menemukan fakta bahwa serangkaian bukti baik yang bersifat implisit maupun eksplisit mampu menjelaskan bahwa keberadaan *Responsibility to Protect* dapat diterapkan dengan baik di ASEAN. Hal ini dapat terlihat melalui hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa ASEAN telah berhasil dalam melakukan semua tahapan dalam proses lokalisasi *Responsibility to Protect* dan membuktikan bahwa ASEAN telah menerima prinsip prinsip utama dari *Responsibility to Protect* itu sendiri (Mahardika & Rosyidin, 2020).

Kemudian, penelitian yang memiliki kesesuaian dengan isu yang diangkat oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Aulia Nabila yang berjudul **“Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia”**. Dalam penelitiannya, kedua penulis ini berusaha untuk menganalisis terkait permasalahan yang terjadi atas pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan meskipun Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR), sebuah konvensi yang memiliki tujuan untuk mengukuhkan nilai nilai pokok HAM dalam bidang sipil maupun politik. Muhammad Iqbal dan Aulia Nabila berasumsi bahwa upaya implementasi norma internasional yang dilakukan oleh Indonesia merupakan faktor utama yang mempengaruhi Indonesia dalam menerapkan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. Namun, dalam penelitiannya, penulis menemukan bahwa terdapat gap antara norma internasional yang tertuang di dalam pasal 18 ICCPR dan hukum Indonesia yang mengatur tentang kebijakan keyakinan beragama dan berkeyakinan. Kemudian, peneliti juga menemukan bahwa karakteristik Indonesia yang berkaitan dengan keyakinan dan bagaimana perilaku masyarakat Indonesia dalam beragama juga menjadi faktor dalam upaya mengimplementasikan penjaminan terhadap keyakinan dalam beragama dan berkeyakinan. Hal ini menyebabkan upaya dalam melakukan implementasi norma melalui actor local seperti Komnas HAM dinilai kurang maksimal. Sehingga, pada akhirnya penulis

memberikan kesimpulannya bahwa dalam melakukan implementasi terhadap norma internasional tersebut, pemerintah menafsirkan konteks sosial dan politik masyarakat, kondisi ini menyebabkan pemerintah sering terdesak oleh berbagai macam desakan yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat sehingga negara berpotensi dalam melanggar aturan jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Yunazwardi & Nabila, 2021)

Secara keseluruhan, berbagai macam literatur yang telah dipaparkan tersebut memberikan gambaran terkait bagaimana upaya dalam domestikasi norma norma internasional ke dalam instrument lokal. Dalam berbagai upaya yang dilakukan tersebut, ditemukan berbagai macam tantangan yang pada akhirnya menciptakan norma internasional yang masuk ke dalam instrument lokal tersebut tidak dapat sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor yang terjadi seperti adanya perbedaan perspektif maupun kepercayaan, tidak setujunya beberapa pihak, ataupun kondisi internal seperti nilai sosial maupun agama yang tidak mampu secara langsung menerima norma internasional ke dalam instrument lokal mereka. Lebih lanjut, kesamaan yang ditemukan antara berbagai kajian literatur tersebut dengan topik yang ada di dalam tulisan ini adalah kesamaan terkait menganalisis bagaimana norma internasional dapat masuk dan sesuai dengan instrument lokal. Namun, dari beberapa literatur tersebut, belum ditemukan terkait bagaimana norma yang tertuang di dalam *International Convention on The Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families* diadaptasi dan disesuaikan ke dalam instrument lokal Indonesia melalui Undang Undang Nasional maupun Peraturan Daerah. Oleh karena itu, sebagai sisi pembeda dari penelitian penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian ini akan memberikan focus kepada analisis terkait bagaimana difusi norma antara Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran tahun 1990 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 sebagai produk hukum turunan dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017.



### C. Indonesia dan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

Keputusan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* pada tahun 2012 bertujuan untuk dapat memberikan kerangka hukum yang lebih luas dalam melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk hak atas upah yang layak, perlindungan dari diskriminasi, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia ini dinilai berasal dari masih banyaknya pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia (Maheswara & Sari, 2022). Hal ini dinilai sebagai suatu upaya yang cukup efektif dalam mengatasi permasalahan pekerja migran Indonesia dikarenakan berbagai macam pelanggaran hak yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia tersebut menandakan lemahnya Undang Undang No 39 Tahun 2004 yang mengatur persoalan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Secara keseluruhan, Konvensi Internasional tentang Pekerja Migran Tahun 1990 ini memuat 9 bagian dengan 93 pasal (OHCHR, 2005), antara lain:

1. Cakupan dan Definisi
2. Non-diskriminasi sehubungan dengan hak
3. Memuat Kewajiban Negara Ratifikasi
4. Pembahasan yang memuat hak asasi manusia terhadap Pekerja Migran beserta Anggota Keluarganya
5. Pemenuhan hak hak lain dari migran yang terdokumentasi atau dalam situasi regular
6. Ketentuan yang berlaku untuk kategori migran
7. Pembahasan mengenai kerja sama internasional yang diperlukan
8. Ketetapan yang memuat standarisasi terhadap pekerja migran beserta anggota keluarganya secara manusiawi dan legal yang berdasarkan kepada hukum migrasi internasional
9. Memuat penerapan atas konvensi dan laporan yang perlu diberikan oleh negara yang melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa konvensi internasional ini berusaha untuk memenuhi seluruh hak yang wajib dimiliki oleh pekerja migran dan keluarganya dengan memberikan



perlindungan yang optimal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa komitmen Indonesia sebagai negara yang menunjukkan perhatiannya kepada pemenuhan hak terhadap pekerja migran beserta keluarganya tidak hanya terlihat melalui ratifikasi Indonesia terhadap konvensi internasional melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012, akan tetapi implementasi yang dilakukan Indonesia juga dapat terlihat melalui upaya yang dilakukan untuk mengadaptasikan norma norma internasional yang terkandung di dalam konvensi internasional tersebut ke dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2017 tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”. Pengesahan terhadap undang undang ini merupakan bentuk respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi lemahnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang mengatur perihal yang sama, yakni tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu sendiri. Sehingga, dikeluarkannya Undang Undang No. 18 Tahun 2017 ini juga dapat dilihat sebagai suatu penyempurnaan terhadap kelemahan undang undang tersebut dengan berpedoman kepada standar universal yang telah ditetapkan oleh Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990.

#### **D. Difusi Norma Konvensi Internasional Melalui Undang Undang No. 18 Tahun 2017**

Konsep difusi norma yang dibawakan oleh Amitav acharya digambarkan sebagai suatu actor lokal dapat merekonstruksi norma norma asing dan menyesuaikan norma norma tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan dan norma yang tertanam oleh actor lokal tersebut (Acharya, 2004). Dalam hal ini, konsepsi difusi norma setidaknya memiliki 2 tahapan yakni *framing* dan juga *grafting*, kedua tahapan ini sangat penting untuk melihat sejauh mana norma norma internasional, khususnya yang tertuang dalam konvensi internasional perlindungan pekerja migran dapat terkonstruksi dengan baik kepada hukum nasional serta bagaimana norma tersebut dapat disesuaikan dengan norma yang telah ada sebelumnya. Ketika ingin melihat bagaimana tahapan *framing* bekerja di Indonesia, bagaimana konvensi Internasional mampu dalam memberikan nilai nilai internasionalnya ke dalam hukum domestic Indonesia.



Hal ini juga didasari dengan kebutuhan dari Indonesia sendiri yang mana memiliki kebutuhan untuk segera memiliki dasar perlindungan yang lebih terstandarisasi secara universal. Kebutuhan akan standar perlindungan ini didasari dengan masih banyaknya permasalahan terkait pekerja migran Indonesia. Selain itu, kebutuhan akan memasukkan norma norma internasional ke dalam hukum nasional Indonesia juga berasal dari lemahnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, Undang Undang ini dinilai memiliki kelemahan karena tidak memiliki prinsip prinsip perlindungan yang memadai kepada para Pekerja Migran Indonesia sehingga dalam kurun waktu sebelum diratifikasinya Konvensi Internasional tersebut, Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri sering mengalami kekerasan (Adha, 2013). Selanjutnya, pada tahap *grafting*, Amitav Acharya menjelaskannya sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh para pelaku norma untuk dapat mengkonstruksikan norma yang baru dengan cara menghubungkannya dengan suatu norma yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, ketika melihat kepada Indonesia itu sendiri dalam meratifikasi Konvensi Internasional tentang pekerja migran tahun 1990, Pemerintah Indonesia menggunakan norma norma yang tertuang di dalam Pancasila serta UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan penegakan terhadap harkat serta martabat manusia.

Ketika melihat ke dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan terhadap Konvensi Internasional terhadap perlindungan pekerja migran tahun 1990 yang mana dalam poin pertimbangannya menyebutkan “*bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ... hingga hak asasi manusia*” (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012, t.t.). Dengan adanya pertimbangan terhadap Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 2012, Indonesia berusaha untuk membawa norma Internasional tentang perlindungan hak pekerja migran melalui norma norma yang telah ada di Indonesia yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang memang sudah tercantum dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila serta pasal 28A hingga Pasal 28J yang secara langsung membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia.

Namun, hal yang menjadi pertanyaan adalah meskipun Indonesia mengedepankan norma norma Hak Asasi Manusia dalam meratifikasi Konvensi Internasional tentang perlindungan hak pekerja migran tahun 1990, akan tetapi dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mana merupakan suatu peraturan nasional yang membuktikan implementasi Indonesia terhadap perlindungan hak pekerja migran dan keluarganya tidak menyertakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja melalui jalur yang non procedural, padahal dalam Konvensi Internasional yang Indonesia ratifikasi tersebut telah jelas menyertakan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran dan keluarganya tanpa membedakan jalur procedural ataupun non procedural yang ditempuh oleh pekerja migran yang bersangkutan. Namun, ketika menganalisis dari alasan mengapa Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tersebut, dapat terlihat alasannya bahwa Indonesia selain berupaya untuk menegakkan perlindungan hak kepada pekerja migran beserta keluarganya, Indonesia juga berusaha berkomitmen terhadap keteraturan dan juga keamanan terhadap seluruh pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2014, yang mana Komnas Perempuan ini juga memberikan perhatiannya kepada Perempuan Pekerja Migran menerangkan, bahwa sepanjang tahun 2014 setidaknya mencatat 310 kasus perdagangan orang, serta 226 kasus kekerasan terhadap Perempuan pekerja migran (Murdijana dkk., 2019)

Kemudian, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan Terhadap catatan tahunan yang menerangkan tentang kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dapat ditemukan bahwa terhitung dari tahun 2001 sampai kepada tahun 2011 setidaknya terdapat 93.960 kasus pengaduan terhadap kekerasan seksual kepada Perempuan Pekerja Migran. Selain itu, melalui data yang dikeluarkan oleh BNP2TKI atau sekarang telah dikenal sebagai BP3MI, yang mana menjelaskan bahwa dalam rentang tahun 2011 ada sebanyak 48.002 pekerja migran dari Indonesia yang tersebar di Arab Saudi dan Hongkong yang mengalami kasus kekerasan dalam bekerja. Berbagai kekerasan yang terjadi kepada pekerja migran ini dapat dikatakan sebagai suatu resiko yang terjadi bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui jalur yang nonprocedural, hal ini dikarenakan ketika Pekerja Migran yang bersangkutan bekerja melalui jalur yang resmi maka dapat dipastikan bahwa Pekerja Migran tersebut telah terlindungi



melalui perjanjian hukum di antara Pekerja Migran dan pihak yang memberikan pekerjaan (Sinuraya, 2022).

Berdasarkan kepada hal ini, ketika menganalisis kembali terkait tidak tercantumnya perlindungan kepada pekerja migran non procedural dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia berupaya untuk mengurangi permasalahan yang kemungkinan dapat terus menerus berlanjut dan tidak dapat ditanggulangi ketika banyak calon pekerja migran Indonesia yang memilih untuk bekerja melalui jalur yang illegal, apabila Indonesia menerapkan perlindungan kepada seluruh pekerja migran tanpa memperdulikan jalur yang ditempuh pekerja migran tersebut melalui jalur yang resmi atau tidak.

## **E. Lokalisasi Norma Konvensi Internasional dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur**

Komitmen Indonesia ketika berada di bawah kewajiban memenuhi konvensi internasional mewajibkan untuk mengimplementasikannya ke dalam hukum nasional. Dalam hal ini, keberadaan hukum turunan dianggap perlu dalam mengoptimalkan upaya perlindungan kepada pekerja migran beserta keluarganya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berupaya untuk mengimplementasikan prinsip prinsip yang tertuang di dalam *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Sebelumnya Provinsi Jawa Timur telah memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, namun peraturan daerah ini dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum Indonesia terutama setelah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menciptakan perubahan bagi sistem perlindungan pekerja migran di Indonesia.

Selain itu, perlu diketahui bahwa Perda Provinsi Nomor 4 Tahun 2016 merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 meskipun di dalam peraturan tersebut telah menyertakan pertimbangannya terhadap Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 yang merupakan pengesahan

Indonesia atas ratifikasi terhadap konvensi internasional pekerja migran tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan baru pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut. Berdasarkan pada hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memang memberikan perhatiannya dalam menegakkan perlindungan kepada Pekerja Migran beserta anggota keluarganya.

Ketika membahas tentang lokalisasi norma, Amitav mendefinisikannya sebagai “*as the active construction (through discourse, framing, grafting, and cultural selection) of foreign ideas by local actors, which results in the former developing significant congruence with local beliefs and practices*” (Acharya, 2004). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketika suatu hukum internasional menjadi hukum nasional, maka unsur unsur yang telah tertuang di dalam hukum internasional tersebut telah disesuaikan dengan menyesuaikan terhadap kepercayaan maupun nilai nilai lokal yang terkandung dalam masyarakat lokal. Dalam hal ini setidaknya lokalisasi norma melalui beberapa tahapan, antara lain *Prelocalization (resistance and contestation)*, *Local initiative (entrepreneurship and framing)*, *Adaptation (grafting and pruning)*, serta *Amplification and “universalization*.”

Pada tahapan *Prelocalization*, apabila suatu norma yang baru itu tertolak karena adanya kekhawatiran terhadap rusaknya norma-norma lokal yang ada, atau bahkan hal yang sebaliknya dapat terjadi yakni penerimaan terhadap norma tersebut dimana norma-norma yang baru ini memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap kebutuhan penerima norma tanpa merusak norma-norma yang sudah ada secara signifikan. Ketika melihat ke dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022, maka dapat ditelusuri lebih jauh terkait bagaimana kondisi Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi terbesar yang mengirimkan pekerja migran Indonesia pada tahun 2024. Data yang dikeluarkan oleh Pusdatin BP2MI terhitung dari bulan Januari sampai dengan Maret 2024, PMI yang berasal dari Jawa Timur berada di angka 22.066 jiwa. Berdasarkan pada hal ini, kondisi tersebut pada akhirnya menempatkan Jawa Timur memiliki kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakatnya. Selain itu, melihat kewajiban dari Perda Provinsi yang merupakan produk hukum turunan dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjadikan Provinsi Jawa Timur baik



secara langsung maupun tidak langsung harus mengadopsi norma-norma konvensi internasional yang telah tertuang di dalam Undang Undang nasional tersebut.

Selanjutnya pada tahapan *local initiative*, Amitav acharya memaparkan bahwa dalam tahapan ini digambarkan bahwa actor lokal dapat meminjam dan membingkai norma norma baru tersebut dengan cara cara yang mengedepankan nilai actor lokal tersebut bagi audiens lokal. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai actor lokal berusaha untuk membingkai norma norma yang tertulis konvensi internasional dengan menyesuaikan nilai nilai yang telah terbingkai dalam provinsi Jawa Timur agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Dalam hal ini, *local initiative* datang dari pemerintah provinsi Jawa Timur dikarenakan kebutuhannya sebagai provinsi terbesar yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia berangkat ke luar negeri. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sebagai hukum turunan, Perda Provinsi Jawa Timur memang memiliki kewajiban untuk membentuk peraturan daerah yang sesuai dengan hukum perundang undangan yang berada di atasnya.

Sehingga, ketika mengacu kepada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, maka dapat dilihat *local initiative* Indonesia adalah memberikan standar aturan yang lebih memadai dalam hal perlindungan pekerja migran beserta keluarganya di luar negeri. Namun, karena Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan hukum yang tingkatannya berada di atas Peraturan Daerah tersebut, maka ketika Undang Undang Nasional tersebut tidak mengadopsi secara penuh nilai nilai yang tertuang dalam konvensi internasional, maka peraturan daerah tidak bisa serta merta melangkahi Undang Undang nasional tersebut untuk dapat mengadopsi Konvensi Internasional tersebut. Berdasarkan kepada kondisi ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur juga turut tidak mencantumkan perlindungan kepada Pekerja Migran Non-Prosedural. Namun, ketika melihatnya berdasarkan perspektif yang berbeda, maka tidak dicantumkannya poin perlindungan kepada pekerja migran non procedural adalah terbatasnya kemampuan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran baik yang berasal dari jalur procedural maupun non procedural.

Selain itu, akan terlihat lebih realistis apabila Pemerintah Provinsi lebih memprioritaskan perlindungan kepada pekerja migran yang procedural dibandingkan perlindungan kepada

pekerja migran non procedural. Hal ini dikarenakan, pekerja migran yang bekerja melalui jalur yang resmi tersebut telah terdata secara resmi oleh pemerintah dan akan memberikan kemudahan dalam proses perlindungan di kemudian hari. Kondisi ini kemudian akan berbeda apabila menangani pekerja migran yang berasal dari jalur yang non procedural, hal ini dikarenakan para pekerja migran yang non procedural ini bekerja dengan kondisi berkas yang tidak tercatat secara resmi dalam pusat data pemerintah. Hal tersebut yang menyebabkan Pemerintah Pusat dan Daerah menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengawasi ataupun memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang tidak mendapatkan perlindungan formal di negara penempatan.

Namun, meskipun Perda Provinsi Jawa timur tidak mencantumkan perlindungan kepada pekerja migran non procedural, akan tetapi dalam praktiknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pemerintah Pusat tetap memberikan fasilitasnya kepada pekerja migran non procedural. Hal ini dapat terlihat melalui data yang disampaikan melalui laman Instagram BP3MI Jawa Timur dengan nama akun @bp3mi.jatim, yang mana melaporkan sepanjang tahun 2024, terhitung sejak bulan Januari sampai pada bulan September 2024 setidaknya terdapat 814 kegiatan pemulangan yang difasilitasi pemerintah kepada Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Jawa Timur (BP3MI Jawa Timur, 2024).

Kegiatan pemulangan yang difasilitasi pemerintah ini berasal dari berbagai kasus, antara lain deportasi, pemulangan jenazah, PMI terkendala, PMI sakit, sampai kepada penangkalan terhadap dugaan tindakan perdagangan orang. Fasilitas pemulangan yang diberikan kepada pekerja migran ini tidak hanya diberikan kepada Pekerja Migran yang melalui jalur procedural, namun juga turut memfasilitasi pekerja migran yang bekerja melalui jalur non procedural. Hal ini diamati langsung oleh penulis melalui pengalaman yang dilakukan pada saat magang di BP3MI Jawa Timur. Dalam pengamatan tersebut, mendapatkan kesempatan untuk melihat bagaimana BP3MI Jawa Timur memberikan fasilitas pemulangan terhadap Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang bekerja di Malaysia dan melihat proses pemulangan jenazah pekerja migran non procedural yang berasal dari Malaysia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih memberikan perlindungannya kepada Pekerja Migran Non procedural meskipun dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak mencantumkan



terkait perlindungan kepada pekerja migran Indonesia non procedural.

Namun, perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran ini bukan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang bekerja melalui jalur yang tidak resmi, namun penulis menganalisis bahwa ini adalah bentuk perlindungan sebagai masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum*” (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Dari Undang Undang tersebut menjelaskan bahwa meskipun Pekerja Migran Indonesia itu merupakan pelaku dari pelanggaran hukum pekerja migran Indonesia, namun mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan yang sama sebagai seorang masyarakat Indonesia.

Kemudian pada tahapan *Adaptation*, Amitav Acharya berpendapat bahwa dalam tahapan ini norma norma yang baru dapat direkonstruksi agar dapat sesuai dengan kepercayaan praktik lokal. Hal ini dilakukan dengan mendefinisikan kembali norma norma baru yang ada kemudian dikaitkan dengan norma norma lokal yang telah ada sebelumnya, kemudian norma norma yang dapat sesuai dengan praktik lokal akan diadaptasi dan membuang elemen elemen yang memang tidak sesuai dengan norma lokal. Berdasarkan pada hal tersebut, ketika melihatnya dalam konteks yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat proses pengadaptasian melalui norma norma konvensi internasional terutama tentang pemenuhan hak asasi manusia serta prinsip non diskriminasi.

Dalam konvensi Internasional pemenuhan terhadap hak asasi manusia dan prinsip non diskriminasi tertuang dalam pasal 7 yang berbunyi “*States Parties undertake, in accordance with the international instruments concerning human rights, to respect and to ensure to all migrant workers and members of their families within their territory or subject to their jurisdiction the rights provided for in the present Convention without distinction of any kind such as to sex, race, colour, language, religion or conviction, political or other opinion, national, ethnic or social origin, nationality, age, economic position, property, marital status, birth or other status.*” (OHCHR, 2005). Dalam hal ini, norma terkait non

diskriminasi tersebut disampaikan melalui usaha untuk tidak membedakan latar belakang apapun baik jenis kelamin, ras, warna kulit, Bahasa, agama, pandangan politik ataupun hal lainnya. Sedangkan, dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai hukum nasional mencantumkan perihal tersebut dalam pasal 2 yang mana menekankan perlindungan pekerja migran Indonesia itu berdasarkan kepada asas nondiskriminasi.

Kemudian, dalam Undang Undang tersebut kembali dijelaskan bahwa asas nondiskriminasi itu sendiri adalah “*Bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik*”. Oleh karena itu sebagai suatu hukum turunan, Peraturan Daerah Jawa Timur dapat mengadaptasi norma internasional tersebut ke dalam peraturan daerah yang dapat terlihat melalui pasal 6 bagian d yang menyatakan bahwa setiap calon ataupun pekerja migran itu sendiri memiliki hak untuk “*Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja*”.

Dalam hal ini, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Acharya bahwa ketika norma baru yang masuk ke dalam instrumen lokal dapat sesuai apabila memiliki keselarasan dengan norma lokal yang memang sudah terlekat di dalam instrument lokal tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari system pemerintahan Indonesia yang memang sejak awal menekankan prinsip non diskriminasi dalam kerangka Hak Asasi Manusia pasti dapat menerima norma non diskriminasi ini secara baik dalam peraturan daerahnya. Sebagai tahapan terakhir dalam konsep lokalisasi norma Amitav Acharya, tahapan *Amplification and Universalization* merupakan penciptaan instrume yang dikembangkan dari kerangka kerja normative di mana pengaruh lokal tetap sangat terlihat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa keberadaan norma yang baru tidak hanya disesuaikan, namun juga berusaha untuk memperluas penerimaannya dalam instrument lokal. Pada tahapan ini terlihat bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Perda Nomor 2 Tahun 2022 melalui Pasal 25, Pasal 32, Pasal 33, dan juga pasal 46 merancang kebijakan yang memberikan penekanan terhadap kolaborasi antarlembaga.



Hal ini terlihat dalam pasal-pasal tersebut, melalui kolaborasi dengan pemerintah kota, Provinsi Jawa Timur berusaha untuk mengimplementasikan norma perlindungan hak kepada pekerja migran Indonesia, baik dalam perlindungan sebelum bekerja, pemberdayaan, maupun perluasan akses informasi kepada masyarakat luas tentang Pekerja Migran kepada instrument lokal. Sehingga, pada akhirnya implementasi dari perlindungan kepada hak-hak pekerja migran beserta keluarganya ini tidak hanya berada di level pemerintah pusat, namun juga terbagi sampai kepada level pemerintah desa. Hal ini akan memberikan suatu upaya yang efektif dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada pekerja migran beserta keluarganya.

## F. Kesimpulan

Indonesia dalam meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* melalui UU No. 6 Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan standar perlindungan yang lebih optimal kepada Pekerja Migran Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, Indonesia melalui UU No. 18 Tahun 2017 tidak menaruh poin perlindungan kepada Pekerja Migran non Prosedural. Hal ini menyebabkan pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2022 tidak dapat mengadopsi perlindungan kepada pekerja migran non procedural dikarenakan hukum turunan perlu sesuai dengan hukum yang memiliki tingkatan di atasnya. Secara keseluruhan hal ini merupakan hasil dari proses difusi dan lokalisasi norma, sebagaimana dijelaskan dalam teori Amitav Acharya.

Dalam Teori Acharya tentang difusi dan lokalisasi norma menjelaskan bahwa norma internasional tidak selalu dapat diadopsi secara penuh oleh negara, terutama di negara-negara yang memiliki konteks sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang berbeda. Proses lokalisasi norma perlu melalui penyesuaian norma agar sesuai dengan kebutuhan lokal sehingga dapat terimplementasikan dengan baik dalam masyarakat. Dalam analisis yang dilakukan kepada Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta Perda Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan bahwa tidak tercantumnya perlindungan kepada pekerja migran non procedural adalah sebagai bentuk untuk mengurangi maraknya pekerja migran yang bekerja secara non procedural. Diharapkan dengan Undang-Undang yang

memprioritaskan perlindungan kepada pekerja migran procedural ini akan menciptakan pencegahan bagi pekerja migran yang memilih untuk bekerja melalui jalur yang non procedural.



# BAB 6

## PERAN BP2MI DALAM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA SKEMA KERJA SAMA *GOVERNMENT TO GOVERNMENT* ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

*Shafira Zelinda Rahma*

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2023 Indonesia memiliki populasi yakni sebanyak 280,73 juta jiwa<sup>56</sup>. Dengan banyaknya penduduk yang padat, terdapat permasalahan yang dialami oleh Indonesia, salah satunya yakni keterbatasan dalam lapangan pekerjaan. Hal tersebut membuat negara Indonesia menjadi salah satu negara yang tinggi akan pekerja migran. Pada tahun 2023, sebanyak 274.965 masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri atau yang bisa disebut dengan pekerja migran Indonesia. Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Akan tetapi, dengan banyaknya populasi masyarakat Indonesia dengan angka lapangan pekerja di Indonesia tidak sebanding dengan populasi di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia memiliki strategi untuk mengurangi angka pengangguran yang terjadi di Indonesia, salah satunya yakni dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Terdapat beberapa negara tujuan yang dijadikan tujuan utama oleh pekerja migran Indonesia diantara lainnya ialah Taiwan, Malaysia, Hongkong, Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan merupakan salah satu tujuan utama bagi pekerja migran

<sup>56</sup> Irfan Fadhlurrahman. Jumlah Penduduk di 38 Provinsi Indonesia Desember 2023, 2023. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/d88acbb7c85bdb3/jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-desember-2023> pada tanggal 26 Oktober 2024.

Indonesia. Pada tahun 2023, Korea Selatan menjadi nomor empat dalam negara penempatan pekerja migran Indonesia. Tercatat bahwa pada tahun 2023, terdapat pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan sebanyak 12.580. Banyaknya pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan disebabkan beberapa faktor, antara lain karena Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki populasi yang sedikit, sementara kebutuhan terhadap pekerja cukup tinggi. Pada tahun 2023, Korea Selatan memiliki penduduk sebanyak 51.765.296 juta jiwa<sup>57</sup>. Selain itu, pada tahun 2017, Korea Selatan menjadi negara dengan ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, Korea Selatan juga menjadi salah satu negara yang menjadi GDP terbesar di dunia. Korea Selatan diketahui menempati posisi ke-12 sebagai negara GDP terbesar di dunia.

Kesejahteraan yang tinggi di Korea Selatan menyebabkan kekurangan sumber daya alam dalam sektor formal seperti manufaktur dan perikanan yang merupakan pekerjaan membutuhkan fisik bersifat 3D (*dirty, difficult, danger*)<sup>58</sup>. Hal tersebut mendorong pemerintah Korea Selatan untuk menerapkan kebijakan bagi pekerja migran yang hendak bekerja di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan yakni Industrial Trainee System (ITS) dan Employment Permit System (EPS)<sup>59</sup>. Kebijakan berupa *Industrial Trainee System* (ITS) telah dikeluarkan sejak 1991<sup>60</sup>. Sedangkan kebijakan Employment Permit System (EPS) dikeluarkan sejak 2004. EPS merupakan sistem penerimaan pekerja migran yang telah memiliki pemenuhan hak-hak pekerja migran yang lebih baik. Sistem tersebut dapat diterapkan apabila terdapat kerja sama bilateral yang telah disepakati oleh kedua negara seperti Indonesia dengan Korea Selatan.

Dalam hal ini kedua negara yakni Indonesia dengan Korea Selatan memiliki kerja sama dalam penempatan pekerja migran. Kerja sama yang dilakukan oleh dua negara tersebut ialah program *Government to Government*. Kerja sama yang dilakukan oleh dua negara tersebut telah menghasilkan *Momeration of Understanding* (MoU). MoU tersebut dilakukan oleh kementerian tenaga

---

<sup>57</sup> Trading Economics. Korea Selatan – Populasi tahun 2023. Diakses melalui <https://id.tradingeconomics.com/south-korea/population> pada tanggal 26 Oktober 2024.

<sup>58</sup> Dini Prilia Putri Syamsul. Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Melalui Employment Permit System Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Korea Selatan (2013-2017). Universitas Komputer Indonesia, n.d.

<sup>59</sup> Ibid. Hal 2.

<sup>60</sup> Tri Sulistiyono. Pelindungan Buruh Migran Indonesia di Korea Selatan di Masa Pandemi Covid-19. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021.



kerja dan transmigrasi Republik Indonesia dengan kementerian ketenagakerjaan dan perburuhan Republik . Tujuan dari pemerintah Indonesia ialah melindungi warga negaranya dari pra bekerja hingga setelah bekerja di negara penempatan<sup>61</sup>. Adanya kerja sama tersebut telah berlangsung sejak tahun 2013 hingga saat ini. Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan terkait pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan ini melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Program *Government to Government* sendiri tidak hanya dilaksanakan oleh Korea Selatan. Negara lain selain Korea Selatan yang memiliki kerja sama *Government to Government* dengan Indonesia ialah Jepang. Pemilihan Korea Selatan dalam penelitian ini dikarenakan *Government to Government* Korea Selatan sangat diminati oleh Masyarakat Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan. Diketahui bahwasannya Korea Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, tercatat ada sebanyak 65.113 penempatan Pekerja Migran Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwasannya terdapat peningkatan pada tahun 2022, mencapai 182.902 penempatan yang menunjukkan peningkatan sebesar 181% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2023, jumlah penempatan mengalami peningkatan yakni sebanyak 40% dengan jumlah 255.843 penempatan. Sedangkan dalam skema *G to G*, Pada tahun 2021, BP2MI mencatat 174 penempatan melalui penempatan *G to G* Korea Selatan. Jumlah penempatan ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan yakni tahun 2022, mencapai 11.530 penempatan. Tahun 2023, jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan meningkat lagi menjadi 11.570 di berbagai bidang<sup>62</sup>. Dari data yang telah digambarkan diatas terlihat bahwasannya Korea Selatan menjadi salah satu negara Pekerja Migran Indonesia dengan skema *Government to Government*.

Dalam skema *G to G* Korea Selatan terdapat beberapa bidang yang tersedia dalam penempatan di Korea Selatan yakni diantaranya ialah; *Manufacturing Worker, Operator, Fisherman, Ship's Engineer, Occasion Director, dan Oil Mixing Worker*. Dari keenam bidang tersebut, terdapat bidang yang paling diminati yakni *Manufacturing Worker dan Operator*. Pada tahun 2023 bidang

---

<sup>61</sup> Marwanto Rolasta, Siti Hayati, dkk. Analisis Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Terhadap Perekrutan Pekerja Migran Indonesia ke Jerman Tahun 2022. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

<sup>62</sup> BP2MI. Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Skema *G to G* Periode Tahun 2021-2023. BP2MI JDIH.



yang paling diminati oleh Pekerja Migran Indonesia yaitu *Manufacturing Worker* dengan jumlah 4.445. Selain *Manufacturing Worker*, terdapat bidang lain yang diminati oleh Pekerja Migran Indonesia yakni *Operator*. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 4.268 Pekerja Migran Indonesia yang minat dengan bidang *Operator*.

Dengan adanya skema *Government to Government* yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan ialah dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disingkat BP2MI. BP2MI merupakan instansi pemerintah non-kementerian yang memiliki wewenang sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan maupun pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. BP2MI memiliki fungsi dan tugas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia<sup>63</sup>. Tugas BP2MI ialah melaksanakan kebijakan serta pelayanan dalam rangka penempatan serta pelindungan bagi pekerja migran Indonesia secara terpadu. Dalam skema *G to G*, BP2MI memiliki tanggung jawab yakni seperti proses seleksi, pelatihan, penempatan, hingga pengawasan kondisi pekerja migran di negara penempatan.

Skema *G to G* tersebut dirancang untuk meningkatkan pelindungan dan tantangan dihadapi dalam implementasinya. Tantangan yang dihadapi dapat berupa prosedur administrasi yang cukup kompleks, pelindungan hak asasi, serta adanya kendala adaptasi seperti bahasa yang dialami oleh calon pekerja migran yang hendak bekerja di Korea Selatan melalui program *G to G*. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peran BP2MI melalui skema *G to G* yang dilakukan antara Indonesia dengan Korea Selatan khususnya dalam penempatan pekerja migran Indonesia pada tahun 2023.

## B. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dengan Korea Selatan

Hubungan bilateral merupakan suatu hubungan yang terjalin antar dua negara yang bersifat kerja sama, adanya hubungan tersebut umumnya terbentuk karena memiliki sifat yang privat atau tertutup, karena kerja sama tersebut terjalin antara dua negara yang

---

<sup>63</sup> BP2MI. Tugas dan Fungsi BP2MI. Diakses melalui <https://www.bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>, pada tanggal 28 Oktober 2024.



bersangkutan. Jika dilihat dari sejarah, kedua negara tersebut yakni Indonesia dengan Korea Selatan memiliki hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak lama. Dalam hal ini, maka terdapat beberapa sejarah dalam terbentuknya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan. Hubungan diplomatik yang terjalin oleh Indonesia dengan Korea Selatan telah terjalin sejak tahun 1968 yang awalnya hanya dalam bentuk hubungan konsuler. Kemudian pada tahun 1973, hubungan antar dua negara tersebut terjalin dengan secara signifikan dikarenakan berdirinya Kedutaan Besar. Tercatat hingga kini Indonesia dengan Korea Selatan telah memiliki 129 bentuk kerja sama atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak yakni dari Indonesia atau Korea Selatan<sup>64</sup>.

Hubungan yang dimiliki oleh kedua negara ini merupakan hubungan bilateral co-operative, dikarenakan Indonesia dengan Korea Selatan telah memiliki hubungan kerja sama yang telah terjalin sejak lama hingga kini<sup>65</sup>. Hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dengan Korea Selatan semakin meningkat. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penandatanganan pada tahun 2006 berupa Joint Declaration on Strategic Partnership to promote Friendship and Cooperation in the 21st Century yang dilakukan oleh dua negara tersebut. Hingga saat ini, kedua negara tersebut telah menjalin kerja sama di berbagai bidang. Salah satunya ialah kerja sama dalam penempatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Korea Selatan.

Kerja sama tersebut dapat terjadi dikarenakan Indonesia yang memiliki penduduk terpadat yakni sebanyak 278.696.200 juta jiwa<sup>66</sup>. Berbeda halnya dengan Korea Selatan yang mana negara tersebut memiliki penduduk yang rendah. Diketahui pada tahun 2023, Korea Selatan memiliki penduduk yakni sebanyak 51,784,059 juta jiwa<sup>67</sup>. Diketahui bahwasannya Korea Selatan hanya memiliki 0,72% dari total populasi di dunia. Dengan rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan, hal tersebut mengakibatkan negara tersebut kurang akan sumber daya manusia. Terutama dalam tenaga kerja, yang mana diketahui bahwasannya Korea Selatan

---

<sup>65</sup> Ester Imbir. Kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam Penempatan Tenaga Kerja Buruh Migran Indonesia di Korea Selatan di Masa Pandemi COVID-19. Universitas Komputer Indonesia, 2021.

<sup>66</sup> Cindy Mutia Annur. 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia tahun 2023. Databoks, 2023. Diakses di 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Pertengahan 2023 (katakata.co.id).

<sup>67</sup> Worldmeters. *South Korea Population*, 2023. Diakses di South Korea Population (2023) - Worldometer (worldometers.info)



merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang akan maju dalam berbagai bidang. Beberapa bidang yang berkembang dengan maju dan pesat di Korea Selatan antara lainnya yakni; teknologi, manufaktur, dan layanan. Adanya kekurangan tenaga kerja di Korea Selatan ini mendorong Korea Selatan untuk memiliki atau mencari sumber daya manusia dari luar negeri.

Korea Selatan yang memerlukan tenaga kerja untuk dikirimkan ke negaranya guna untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor Indonesia yang mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan. Banyaknya populasi Indonesia yang mengakibatkan banyaknya angka pengangguran di Indonesia serta kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Korea Selatan menjadi negara dengan ekonomi kreatif, yang memiliki banyak lapangan pekerjaan. Hubungan bilateral kedua negara ini terus berlanjut sehingga, pada tahun 2006 pemerintah Indonesia menyelenggarakan program *Government to Government (G to G)* bagi Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan yang kemudian program ini diserahkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia<sup>68</sup>.

Dari adanya faktor tersebut maka, terjalannya kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan yang menghasilkan MoU. MoU tersebut dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuan Republik Korea Selatan mengenai Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea berdasarkan Sistem Ijin Kerja. MoU tersebut telah berlangsung pada tanggal 14 Oktober 2010 terkait pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan. MoU yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan tertera pada gambar berikut,

---

<sup>68</sup> BNP2TKI, 2011



Judul	<b>Nota Kesepahaman antara Kemenakertrans RI dan Kemenaker dan Perburuhan Republik Korea Tentang mengenai Pengiriman TKI ke Republik Korea berdasarkan Sistem Ijin Kerja</b>
Nomor	
Jenis/Bentuk	MOU Negara Lain
Tahun	2013
Tanggal Penetapan	
Lokasi	Biro Hukum dan Humas BP2MI
Bahasa	Indonesia
Status	<b>BERLAKU</b>



Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BP2MI. (Diakses di [jdih.bp2mi.go.id/index.php/content/detail/37](http://jdih.bp2mi.go.id/index.php/content/detail/37), pada tanggal 29 Oktober 2024)

### Gambar 1 MoU antara Kemenakertrans RI dan Kemenaker dan Perburuhan Republik Korea tentang mengenai Pengiriman TKI ke Republik Korea Berdasarkan Sistem Ijin Kerja

*MoU* antara Indonesia dan Korea Selatan bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja yang nyata dalam kerjasama kedua pihak, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan. Melalui *MoU* ini, ditetapkan ketentuan bagi kedua pihak terkait pengiriman tenaga kerja berdasarkan Sistem Izin Kerja yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Korea Selatan. Dalam perjanjian ini, terdapat institusi pengirim dan penerima. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia bertanggung jawab mengirimkan tenaga kerja ke Korea, dan telah menunjuk Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang kini dikenal sebagai Badan Pelindungan Migran Indonesia (BP2MI), sebagai lembaga pengirim.

## C. Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Terdapat beberapa cara untuk calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, antara lain yakni sebagai berikut: Private to Private (P to P), Government to Government (G to G), Government to Private (G to P), Intern Corporate Transfership (ICT), Pekerja Migran Perseorangan (Mandiri) Pekerja Migran Perseorangan (Mandiri)<sup>69</sup>. Dari adanya beberapa cara dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Calon pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri dapat memilih lima diantara mekanisme yang ada. Dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan yakni sebagai berikut:

### 1. Government to Government Korea Selatan

*Government to Government* (G to G) merupakan suatu program kerja antara pemerintah Indonesia dengan negara penempatan. Program G to G memiliki tujuan yakni memfasilitasi pekerja Indonesia untuk bekerja di negara asing dengan secara legal dan dilindungi oleh hukum. Salah satu negara yang memiliki penempatan melalui G to G ialah Korea Selatan. Program G to G antara Indonesia dengan Korea Selatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2006. Penempatan pekerja migran Indonesia melalui program G to G di Korea Selatan ini dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Sebagai tindak lanjut kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan berdasarkan MoU antara kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Perburuhan Republik Korea Selatan tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Korea berdasarkan *Employment Permit System* (EPS). Calon pekerja migran yang berminat untuk bekerja di Korea Selatan mengikuti mekanisme *Employment Permit System* (EPS) yang harus mengikuti model rekrutmen sesuai sistem poin yang akan dilakukan oleh Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea).

Pada program G to G Korea Selatan memiliki beberapa bidang yang dapat dipilih bagi calon pekerja migran Indonesia yang hendak

---

<sup>69</sup> Farah Diana. Mekanisme dan Persyaratan Bekerja di Luar Negeri serta Alur Rekomendasi Pasport CPMI. Disnarketrans, 2022. Diakses melalui <https://disnakertrans.serangkota.go.id/detailpost/mechanisme-dan-persyaratan-bekerja-keluar-negeri-serta-alur-rekomendasi-pasport-cpmi> pada tanggal 30 Oktober 2024.



bekerja di Korea Selatan yakni terdapat beberapa bidang diantaranya: Manufacturing Worker, Operator, Fisherman, Ships's Engineer, Occasion Director, dan Oil Mixing Worker. Maka, program G to G Korea Selatan pada tahun 2023 memiliki sebanyak enam bidang yang ditawarkan untuk bekerja di Korea selatan.

## 2. Skema G to G Korea Selatan

Adapun skema G to G Korea Selatan pada tahun 2023 yakni berdasarkan surat HRD Korea Nomor EPSS-2161 tanggal 7 Juli 2023 Pekerja Migran Indonesia dalam Skema G to G Korea Selatan tahun 2023 telah dibuka kesempatan Pendaftaran Ujian EPS-TOPIK UBT Khusus Tahun 2023 bagi Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di Korea yang secara sukarela kembali ke Indonesia sebelum/sesudah masa kontrak kerja selesai dan ingin kembali bekerja di Korea<sup>70</sup>. Terdapat beberapa syarat bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang hendak bekerja di Korea Korea Selatan melalui skema G to G yakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan Ujian. Ujian yang dilakukan yakni sebanyak dua tahap yakni:
  - Ujian Tahap Pertama (EPS-TOPIK), Calon PMI harus mencapai setidaknya 110 poin untuk lulus dalam EPS-TOPIK dan akan dipilih berdasarkan urutan skor tertinggi hingga mencapai total 200 poin. Hanya mereka yang lulus Ujian Tahap Pertama yang diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Tahap Kedua.
  - Ujian Tahap Kedua yakni Skill Test, Penentuan kelulusan akhir didasarkan pada total skor dari Ujian Tahap Pertama dan Tahap Kedua (diambil jumlah skor tertinggi dari keduanya), serta pemeriksaan buta warna yang tidak menunjukkan hasil buta warna.
2. Jumlah Kelulusan, menurut surat HRD Korea Nomor EPSS-3511 tanggal 8 Desember 2022 mengenai seleksi pekerja asing di Korea Selatan tahun 2023, disepakati bahwa jumlah peserta yang lulus tahap akhir di sektor manufaktur dengan sistem poin adalah 10.000 orang, yang dipilih berdasarkan total skor dari Ujian Tahap Pertama dan Tahap Kedua (dengan mengambil total skor tertinggi).

---

<sup>70</sup> BP2MI. Pengumuman Pendaftaran Program G to G ke Korea dengan Sistem Poin tahun 2023. Diakses melalui <https://www.bp2mi.go.id/gtog-detail/korea/pengumuman-dan-pra-pendaftaran-ujian-eps-topik-ubt-khusus-program-g-to-g-ke-korea-dengan-sistem-poin-tahun-2023> pada tanggal 30 Oktober 2024.

3. Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran Program G to G ke Korea Selatan
4. Metode Pra Pendaftaran Program G to G ke Korea Selatan dengan Sistem Poin Melalui sistem online
5. Melakukan tahapan pra pendaftaran program G to G ke Korea dengan Sistem melalui poin sistem online
6. Tahapan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Ujian Tahap Pertama EPS-TOPIK
7. Perekaman Biometrik (sidik jari dan foto)
8. Pencetakan Kartu Ujian
9. Verifikasi Dokumen Pendaftaran dan Pengambilan Kartu Ujian (tidak dapat diwakilkan)

Persyaratan diatas merupakan skema dari program G to G Korea Selatan melalui BP2MI pada tahun 2023. Dengan melakukan beberapa tahapan atau skema yang telah ditentukan oleh kedua pemerintah yakni pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan para pekerja migran Indonesia dapat mengikuti program *Government to Government* yang setiap tahunnya dibuka oleh pemerintah Indonesia, yang tentunya dibuka untuk para pekerja migran Indonesia yang hendak ingin bekerja di Korea Selatan.

### 3. Pekerja Migran Indonesia Melalui Skema G to G 2023

Tabel 4 Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kawasan Asia dan Afrika Tahun 2021, 2022, dan 2023

NO	NEGARA	2021	2022	2023	JUMLAH
1	Taiwan	7.789	53.483	83.216	144.488
2	Malaysia	563	43.163	72.260	115.986
3	Hong Kong	52.278	60.096	65.916	178.290
4	Korea Selatan	174	11.571	12.580	24.325
5	Jepang	359	5.832	9.673	15.864
6	Singapura	3.217	6.624	7.898	17.739
7	Arab Saudi	747	4.676	6.310	11.733
8	Italia	3.225	3.582	3.519	10.326
9	Brunai Darussalam	0	0	2.872	2.872
10	Turki	874	1.489	2.289	4.652

Sumber: BP2MI. Laporan Publikasi Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2023.

Data di atas menunjukkan bahwasannya Korea Selatan merupakan salah satu negara yang diminati oleh pekerja migran Indonesia. Berdasarkan penempatan pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika, Korea Selatan menempati peringkat nomor empat selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Pada tahun 2023, lima negara penempatan Pekerja



Migran Indonesia terbanyak adalah Taiwan (83.216), Malaysia (72.260), Hong Kong (65.916), Korea Selatan (12.580), Jepang (9.673). Jumlah penempatan kelima negara tersebut mencapai 89% dari total penempatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penempatan pekerja di Korea Selatan memiliki kenaikan yakni sebanyak 9% (1.009)<sup>71</sup>.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 merupakan tahun dimana program *G to G* memiliki peminat terbanyak dibanding tiga tahun sebelumnya. Terdapat 35.000 calon pekerja migran Indonesia yang mendaftar bekerja di Korea Selatan<sup>72</sup>. Sedangkan dalam skema penempatan *G to G*, Korea Selatan merupakan negara penempatan pekerja migran Indonesia yang paling banyak oleh BP2MI. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5 Data Penempatan PMI Pada Tahun 2023 Berdasarkan Skema Penempatan

SKEMA	JUMLAH	PERSENTASE
Penempatan Oleh BP2MI	11.968	4,35%
- Jepang	314	0,11%
- Jerman	84	0,03%
- Korea Selatan	11.570	4,21%
Penempatan Oleh P3MI	217.265	79,02%
Penempatan Perseorangan	19.023	6,92%
Penempatan UKPS	415	0,15%
Pekerja Migran Indonesia Perpanjangan PK	3.900	1,42%
Pekerja Migran Indonesia Perpanjangan PK LN	22.394	8,14%
<b>Jumlah</b>	<b>274.965</b>	<b>100,00%</b>



Sumber: BP2MI. Laporan Tahunan 2023 Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwasannya Korea Selatan merupakan negara penempatan terbanyak oleh BP2MI. Penempatan yang dilakukan oleh BP2MI yakni sejumlah 11.968

<sup>71</sup> BP2MI. Data Laporan Tahunan 2023 mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Asia dan Afrika pada tahun 2021, 2022, 2023. Diakses melalui [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_07-02-2024\\_Laporan\\_Publikasi\\_Tahun\\_2023.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_07-02-2024_Laporan_Publikasi_Tahun_2023.pdf) pada tanggal 30 Oktober 2024.

<sup>72</sup> M. Chaerul dan Nursita Sari. BP2MI Ungkap 35.000 Warga Daftar Jadi Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan, 2023. Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/18/22385701/bp2mi-ungkap-35000-warga-daftar-jadi-pekerja-migran-indonesia-di-korea> pada tanggal 5 November 2024.

penempatan pada tahun 2023. Dengan rincian penempatan G to G Korea Selatan sebesar 11.570 penempatan atau 4.21% dari seluruh penempatan. Sedangkan 0.11% dari seluruh penempatan ialah penempatan G to G Jepang ialah sebanyak 314, dan 0.03% penempatan adalah penempatan G to G Jerman, yakni sebanyak 84 penempatan<sup>73</sup>. Dalam program G to G Korea Selatan, memiliki enam bidang yang ditawarkan bagi pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan.

Tabel 6 Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI tahun 2021, 2022, dan 2023 Berdasarkan skema G to G Korea Selatan

JABATAN	2021	2022	2023	JUMLAH
Manufacturing Worker	0	0	4.445	4.445
Operator	174	8.913	4.268	13.355
Fisherman	0	2.616	2.828	5.444
Ship's Engineer	0	0	28	28
Occasion Director	0	0	1	1
Oil Mixing Worker	0	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>174</b>	<b>11.530</b>	<b>11.570</b>	<b>23.274</b>

Dalam program G to G Korea Selatan terdapat enam bidang yang ditawarkan bagi pekerja migran Indonesia diantaranya yakni Manufacturing Worker, Operator, Fisherman, Ships's Engineer, Occasion Director, dan Oil Mixing Worker. Dari keenam bidang tersebut jika dilihat dari tabel diatas, terdapat bidang yang paling diminati oleh pekerja migran Indonesia yaitu Manufacturing Worker. Pada tahun 2023 bidang Manufacturing Worker memiliki peminat yakni sebanyak 4.445 orang.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penempatan pekerja migran Indonesia dengan jabatan Manufacturing Worker naik 100% yakni sebanyak 4.445, sedangkan bidang Operator turun sebanyak 52% dengan jumlah 4.645, Fisherman naik 8% dengan jumlah 212, Ship's Engineers naik 28, dan Occasion Director naik 1. Sedangkan jika dilihat dari data ketiga tahun yakni 2021, 2022, dan 2023 bidang yang diminati terbanyak oleh pekerja migran Indonesia G to G Korea Selatan adalah Operator sebanyak 13.355, Fisherman sebanyak 5.444, dan Manufacturing Worker 4.445. Diantara ketiga tahun tersebut, peminat paling banyak yakni di tahun 2023. Pada tahun 2021 program G to G Korea Selatan

<sup>73</sup> BP2MI. Data Laporan Tahunan 2023 mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Asia dan Afrika pada tahun 2021, 2022, 2023. Diakses melalui [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_07-02-2024\\_Laporan\\_Publikasi\\_Tahun\\_2023.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_07-02-2024_Laporan_Publikasi_Tahun_2023.pdf) pada tanggal 30 Oktober 2024.



memiliki peminat sebanyak 174, tahun 2022 sebanyak 11.530, dan tahun 2023 sebanyak 11.570<sup>74</sup>.

#### D. Peran BP2MI dalam skema G to G

Undang – Undang EPS atau *Employment Permit System* telah diberlakukan pada bulan Agustus tahun 2004. Dengan adanya Undang-Undang tersebut pada bulan Agustus tahun 2004, Korea Selatan telah menandatangani perjanjian bilateral dengan enam negara, salah satunya ialah Indonesia. Menindaklanjuti adanya kerja sama bilateral tersebut pada tahun 2006 pemerintah Indonesia mengadakan program *Government to Government (G to G)* Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) yang merupakan direktorat di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program G to G tersebut kemudian diserahkan kepada BNP2TKI yang saat ini menjadi BP2MI. Dengan adanya hal tersebut, maka program G to G Korea Selatan sejak tahun 2007 telah dilaksanakan oleh BP2MI.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BP2MI yakni berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tugas BP2MI yakni melaksanakan kebijakan serta pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Adapun fungsi BP2MI Pasal 5 yakni diantaranya; pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan, pelaksanaan pelayanan dan perlindungan PMI, penerbitan dan pencabutan surat izin PMI, penyelenggaraan pelayanan penempatan, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak PMI, pelaksanaan verifikasi dokumen PMI, dan pelaksanaan penempatan PMI atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah negara pemberi PMI atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan.

Dalam skema *Government to Government* antara Indonesia dan Korea Selatan terdapat lembaga yang memiliki peran penting, lembaga tersebut adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi pengiriman TKI atau sekarang yang disebut dengan PMI dari Indonesia ke Korea Selatan. BP2MI bertindak sebagai perantara antara pekerja migran dan pemerintah, memastikan

---

<sup>74</sup> BP2MI. Laporan Tahunan 2023 Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI tahun 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan skema G to G Korea Selatan.

bahwa proses pengiriman dilakukan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peran BP2MI dalam skema G to G antara Indonesia dan Korea Selatan adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan serta pemantauan pengiriman TKI serta memastikan kepentingan dan keamanan para pekerja migran terjaga. BP2MI merupakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana lembaga tersebut memiliki tugas sebagai kebijakan mengenai pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Sama halnya dengan program G to G Korea Selatan, yang mana BP2MI memiliki tugas dalam melaksanakan program G to G Korea Selatan diantaranya sebagai berikut:

### **1. Fasilitator Penempatan Pekerja Migran Indonesia**

BP2MI memiliki tugas utama yakni sebagai fasilitator penempatan bagi para pekerja migran Indonesia. Dalam hal tersebut, BP2MI sebagai fasilitator utama dalam menempatkan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan melalui program G to G. Terdapat beberapa fasilitas yang disediakan oleh BP2MI dalam program G to G Korea Selatan diantaranya:

a. Perekaman Biometrik

Perekaman biometrik merupakan sebuah inovasi baru dalam mengidentifikasi keamanan identitas<sup>75</sup>. Perekaman biometrik terdapat beberapa jenis diantaranya ialah suara, sidik jari, wajah, dan masih banyak lagi. Dalam program G to G Korea Selatan perekaman biometrik yang dilakukan ialah perekaman sidik jari dan wajah. Perekaman biometrik merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam skema G to G Korea Selatan. Perekaman biometrik sendiri bertujuan untuk mencocokkan adanya data atau dokumen yang telah didaftarkan secara online oleh calon pekerja migran Indonesia. Selain itu, dalam melaksanakan biometrik juga dapat menghindari adanya bentuk kecurangan yakni berupa pemalsuan dokumen atau data.

b. Verifikasi Dokumen G to G

Verifikasi dokumen ialah berisikan verifikasi data yang dapat dilakukan oleh pendaftar sendiri. Dalam kegiatan verifikasi dokumen, verifikator memeriksa kelengkapan dokumen, keaslian dokumen, kesamaan dokumen satu sama lain. Pada

---

<sup>75</sup> Calvin Alexander. Analisis Penyimpanan Data Biometrik pada Basis Data. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020.



tahun 2023, terdapat peraturan bahwasannya verifikasi dokumen dilakukan secara offline oleh pendaftar atau calon Pekerja Migran Indonesia<sup>76</sup>. Dalam kegiatan ini tentunya calon peserta ada yang terverifikasi atau tidak terverifikasi.

c. Pemberkasan Calon Pekerja Migran Indonesia Program G to G

Setelah Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah mengikuti peraturan dan lolos, hingga dimana Calon Pekerja Migran Indonesia akan melakukan pemberkasan yang dilakukan oleh pihak terkait seperti BP2MI, tepatnya pada deputi penempatan. Melakukan pada tahapan pemberkasan, Calon Pekerja Migran Indonesia disini mengisi lembar formulir yang berisikan pendataan diri CPMI dan melakukan pemeriksaan mengenai berkas Calon Pekerja Migran dalam program G to G. Pada tahapan ini, cpmi diharuskan memakai baju putih dan celana hitam sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pemberkasan G to G Korea Selatan ialah berisikan formulir pendaftaran yang disediakan oleh BP2MI. Calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan melalui program G to G Korea Selatan akan melakukan pengisian formulir tersebut. Formulir yang harus diisi ialah berisikan biodata pribadi CPMI seperti nama lengkap, NIK, alamat rumah, paspor, visa, dll. Selain itu, pada pemberkasan G to G Korea Selatan, CPMI diharuskan membawa kelengkapan semua dokumen yang mana telah diatur oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan yakni seperti: Surat kesehatan, berkas psikologi yang tenggatnya 6 bulan sebelum keberangkatan, berkas rekening bank, dll. Setelah melewati proses tersebut, pihak BP3MI Jawa Timur akan mengirimkan dokumen CPMI ke BP2MI yang berada di Jakarta. Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan pemanggilan berkas dokumen *G to G* Korea Selatan akan menunggu dipanggil hingga pemberangkatan untuk bekerja di Korea Selatan dalam program *G to G*.

---

<sup>76</sup> Interview oleh Deputi Penempatan BP3MI Jawa Timur. Mengenai Mekanisme Verifikasi Dokumen G to G Korea Selatan, 2024.

- d. Meneruskan data lamaran secara online ke HRD Korea<sup>77</sup>  
Dalam hal ini, BP2MI melakukan proses pengiriman lamaran kerja Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang ingin bekerja di Korea Selatan melalui program G to G. Terdapat beberapa tahap dalam meneruskan data lamaran ke HRD Korea diantaranya yakni: pengiriman dokumen (Data Sending), Verifikasi dan Persetujuan (Approved), Perubahan status dan proses selanjutnya, dan Registrasi ulang. Secara umum, meneruskan data lamaran secara online ke HRD Korea ialah proses administratif yang mana dokumen lamaran kerja yang telah diverifikasi oleh pihak Indonesia yakni oleh BP2MI akan diteruskan ke HRD Korea untuk ditindaklanjuti sebelum CPMI mendapatkan kesempatan bekerja di Korea Selatan.
- e. Pemberian pelatihan dan edukasi bagi calon pekerja migran Indonesia  
Setelah melakukan prosedur yang ada, para pekerja migran yang lolos dalam seleksi dan dinyatakan berangkat untuk bekerja di luar negeri harus mendapat pelatihan dan edukasi bagi calon pekerja migran Indonesia. BP2MI memberikan pelatihan dan edukasi bagi calon pekerja migran Indonesia yang hendak berangkat yakni mengenai budaya, bahasa, serta hak dan kewajiban di negara penempatan. Adanya pelatihan dan edukasi yang diberikan oleh BP2MI tersebut ialah untuk mengurangi risiko, adaptasi, dan konflik hukum di negara tujuan, terutama di Korea Selatan yang mana memiliki standar dan budaya yang cukup berbeda dengan Indonesia.
- f. Melepas pekerja migran Indonesia yang mengikuti program G to G Korea Selatan<sup>78</sup>.  
Selain kegiatan administrasi, BP2MI memiliki tugas yakni melepas para pekerja migran Indonesia dalam program G to G Korea Selatan. Dengan kata lain, BP2MI mengirim pekerja migran Indonesia yang mengikuti program G to G Korea Selatan.

---

<sup>77</sup> BP2MI. Pengumuman Kontak Pelayanan Program G to G Korea Selatan. Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, 2022. Diakses melalui <https://www.bp2mi.go.id/gtog-detail/korea/pengumuman-kontak-pelayanan-program-g-to-g-korea-selatan> pada tanggal 31 Oktober 2024.

<sup>78</sup> BP2MI. Pelepasan Pekerja Migran Indonesia G to G Korsel, sektor Manufaktur dan Perikanan jadi Favorit. Humas BP2MI, 2023. Diakses melalui <https://bp2mi.go.id/berita-detail/pelepasan-pekerja-migran-indonesia-g-to-g-korsel-sektor-manufaktur-dan-perikanan-jadi-favorit> pada tanggal 31 Oktober 2024.



## **2. Lembaga perlindungan hukum dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia**

Sebelum adanya sistem EPS atau Employment Permit System yang diberlakukan pada tahun 2004, pekerja migran Indonesia di Korea Selatan seringkali mengalami berbagai permasalahan sosial dan hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia yakni seperti jaminan upah, keamanan, kesehatan yang tidak layak bagi pekerja migran Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya sistem yang diberlakukan sejak tahun 2004 yakni Employment Permit System, BP2MI menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan hak-hak pekerja migran Indonesia yang terlindungi di negara penempatan salah satunya ialah Korea Selatan.

## **3. Implementasi dari kebijakan UU No. 18 tahun 2017 dan Pengawasan standar kerja**

Dalam rangka adanya meningkatkan perlindungan hukum serta mengurangi dominasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), BP2MI sendiri memiliki peran yang penting dalam kebijakan UU No. 18 Tahun 2017. Undang-Undang No.18 tahun 2017 ialah UU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia<sup>79</sup>. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, BP2MI memiliki peran dalam perekrutan, perlindungan, serta pemantauan pekerja migran Indonesia khususnya di Korea Selatan. Selain itu, BP2MI memiliki peran dalam proses perekrutan dan penempatan telah dilakukan sesuai standar dan prosedur yang telah disepakati dalam MoU antara kedua negara yakni Indonesia dengan Korea Selatan. Adanya pengawasan tersebut bertujuan agar BP2MI dapat mengidentifikasi permasalahan bagi pekerja migran Indonesia terhadap standar Employment Permit System. Selain itu, dalam adanya pengawasan tersebut BP2MI dapat berupaya dalam proses migrasi yang lebih transparan dan terdata dengan sebaaik mungkin sehingga mengurangi adanya permasalahan seperti pekerja migran Indonesia yang *overstay* atau pekerja migran ilegal.

Dari adanya penjelasan diatas, terlihat bahwasannya BP2MI memiliki peran yang penting mengenai penempatan pekerja migran Indonesia dalam program Government to Government. Banyaknya peminat G to G tahun 2023 yakni sebanyak 35.000 pendaftar

---

<sup>79</sup> BPK RI. Peraturan BPK mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508> pada tanggal 10 November 2024.

masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di Korea Selatan<sup>80</sup>. BP2MI memiliki cabang yang menyebar di beberapa wilayah di Indonesia yang disebut sebagai Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) atau Pos Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (P4MI). Maka dari itu, calon pekerja migran Indonesia yang akan mendaftar G to G Korea Selatan tidak hanya dilakukan oleh kantor pusat BP2MI yang terletak di Jakarta. BP2MI sendiri memiliki peran penting dalam skema G to G Korea Selatan yang mana tidak hanya kegiatan administratif saja akan tetapi banyak peran lainnya yang dilakukan oleh BP2MI dalam program G to G Korea Selatan.

## E. Kesimpulan

Dengan adanya latar belakang mengenai Indonesia dan Korea Selatan kedua negara tersebut menghasilkan kerja sama dalam pengiriman pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Kerja sama bilateral tersebut menghasilkan MoU antara Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuan Republik Korea Selatan mengenai Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea berdasarkan Sistem Ijin Kerja. MoU yang dilakukan kedua negara tersebut berlangsung pada tanggal 14 Oktober 2010. Menindaklanjuti adanya kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan terdapat lembaga yang memiliki tugas dalam program *Government to Government*. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan lembaga yang memiliki tugas sebagai kebijakan mengenai pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu salah satunya dalam program *Government to Government* Korea Selatan tepatnya pada tahun 2023. Peran BP2MI dalam program G to G Korea Selatan sangatlah penting baik seperti menjadi fasilitator program G to G Korea Selatan bagi calon pekerja migran Indonesia, memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, bentuk implementasi dari UU No.18 Tahun 2017, dan sebagai lembaga pengawasan bagi pekerja migran Indonesia.

---

<sup>80</sup> M. Chaerul dan Nursita Sari. BP2MI Ungkap 35.000 Warga Daftar Jadi Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan, 2023. Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/18/22385701/bp2mi-ungkap-35000-warga-daftar-jadi-pekerja-migran-indonesia-di-korea> pada tanggal 5 November 2024.



# BAB 7

## UPAYA PEMERINTAH KOTA MADIUN MEMBANGUN CITRA GLOBAL: TRANSFORMASI KOTA KECIL MENUJU PANGGUNG INTERNASIONAL

*Daffa' Aji Alfazza*

### A. Pendahuluan

Kota Madiun di Jawa Timur telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak terpilihnya H. Maidi sebagai walikota pada tahun 2019. Transformasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga pada peningkatan citra budaya dan pariwisata kota. Melalui berbagai inovasi, Madiun mulai berupaya menjembatani identitas lokal dengan tren global, suatu pendekatan yang tercermin dalam slogan baru kota, "Madiun Maju Mendunia." Di tengah persaingan global yang semakin kuat, Madiun berambisi menjadi kota yang menarik perhatian nasional dan internasional dengan menawarkan daya tarik budaya, pendidikan, dan pariwisata yang relevan bagi masyarakat luas.

Salah satu langkah penting dalam perjalanan Madiun menuju pengakuan internasional adalah pembangunan berbagai landmark ikonik dunia, seperti replika Patung Liberty, Menara Eiffel, dan Big Ben, yang menambah daya tarik wisata dan mencerminkan keterbukaan kota ini terhadap pengaruh global. Di samping itu, Madiun juga membangun infrastruktur pendukung seperti Wi-Fi gratis di ribuan titik yang tersebar di seluruh kota untuk menciptakan lingkungan digital yang modern. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan dan masyarakat setempat tetapi juga memosisikan Madiun sebagai kota yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan modern, selaras dengan konsep "smart city."

Di balik infrastruktur fisik, Madiun juga aktif dalam menggelar berbagai festival seni dan budaya lokal untuk mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya setempat. Sejak tahun 2021, sebanyak 73 festival telah diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi dan promosi budaya. Lebih jauh lagi, Madiun membangun kerjasama internasional melalui program "Sister City" dengan Plzeň, Republik Ceko, dan program pertukaran budaya, yang membuka kesempatan bagi masyarakat Madiun untuk berinteraksi dengan budaya global. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Madiun dalam menuju panggung internasional tidak hanya terfokus pada daya tarik fisik, tetapi juga melibatkan aspek budaya yang lebih mendalam, memperkuat peran kota ini dalam membangun harmoni global.

## **B. Walikota Madi dan Visi Internasional**

Sejak dipilihnya H. Madi sebagai Wali Kota Madiun untuk periode 2019 - 2024 telah mengalami banyak perubahan yang signifikan, terutama perubahan dalam tata kelola kota, kebudayaan, Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) dan pariwisata di Kota Madiun. Banyak perubahan yang semakin mencolok terutama dalam hal pembangunan tempat wisata baru dalam kota yang mengusung beberapa konsep - konsep landmark/ ikon terkenal dari penjuru dunia. hal ini tentunya juga berhubungan dengan slogan baru dari wali kota yaitu "Madiun maju Mendunia". Beberapa tempat wisata baru yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Kota Madiun dan menjadi daya tarik bagi wisatawan yaitu terdapat beberapa icon terkenal;

1. Replika Patung Liberty
2. Replika Kereta Cepat China
3. Replika Jam Big Ben London
4. Mushola Berbentuk Ka'bah
5. Pahlawan Street Center (PSC)
6. Replika Patung Merlion Singapura
7. Replika Menara Eiffel
8. Replika Kincir angin Belanda
9. European Building Replica
10. Restoran Kereta Api



Tujuan di banggunya beberapa landmark ini tentunya untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan dari lokal maupun mancanegara. Dalam meningkatkan sektor pariwisatanya, Pemerintah Kota Madiun tidak hanya menambahkan beberapa landmark terkenal tetapi juga melakukan pembangunan infrastruktur dan tata kota yang menjadi semakin bersih dan lebar, sehingga para wisatawan dan penduduk lokal kota dapat dengan nyaman beraktivitas. Pembaruan atau pembangunan Kota tersebut tentunya menambahkan fitur - fitur atau komponen kehidupan manusia yang modern. penambahan tersebut mencakup Wifi Gratis yang tersebar di beberapatitik kota madiun dengan jumlah total 3008 wifi dari dua bagian kota yaitu Kota pendekar sebanyak 2402 dan kota pintar sebanyak 606.<sup>1</sup> Dalam bidang kebudayaan, Kota Madiun berupaya meningkatkan budaya melalui pagelaran festival seni dan budaya. terhitung sejak 3 tahun terakhir mulai dari 2021 Kota Madiun telah menggelar 73 festival seni dan budaya. Dalam pergelaran tersebut terdiri dari 73 Budaya lokal yang telah dipentaskan dan mendapat3 prestasi bidang seni dan kebudayaan.<sup>2</sup> Dalam pelestariannya selama tiga tahun terakhir Kota Madiun telah melestarikan 27 budaya lokal.<sup>3</sup>

Upaya dalam memperkenalkan pariwisata dan budaya tidak hanya sekedar membangun infrastruktur yang baru dan juga pembangunan tempat wisata baru tetapi juga diiringi dengan upaya untuk mempromosikan apa yang dimiliki oleh kota Madiun ke kancan nasional maupun internasional secara bertahap. Beberapa acara dan juga kerjasama telah dirintis untuk menuju *Go - Internasional*. Penggelaran acara yang bernama Kakang dan Mbakyu merupakan organisasi atau komunitas di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mempromosikan budaya, pariwisata, dan kearifan lokal. Pada umumnya paguyuban ini beranggotakan pemuda - pemudi yang dipilih melalui sebuah ajang pemilihan yang sering kali diadakan oleh pemerintah daerah atau dinas pariwisata setempat. Acara grand final yang diselenggarakan oleh kota Madiun pada tahun 2023 lalu mengundang beberapa mahasiswa asing yang sedang menempuh studi di tanah air untuk menyaksikan untuk bertujuan mempromosikan pariwisata dan budaya. Terdapat total 9 mahasiswa/i dan staf AGE dari Belanda, Bangladesh, Yaman, Pakistan, Nigeria, Tanzania, Staf Divisi Student Mobility, AGE dan Staf Magang AGE. Dalam acara tersebut para mahasiswa asing tersebut tidak hanya hadir untuk menyaksikan

acara tetapi juga mendapatkan kesempatan mencicipi kuliner khas dan juga keliling kota Madiun.

Untuk terus merealisasikan tujuannya yaitu “Madiun Maju Mendunia”, Kota Madiun melakukan kerjasama dengan negara - negara maju untuk meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan, budaya dan pariwisata. Salah satu cara untuk memperkenalkan Kota Madiun ke kancah internasional yaitu berupa upaya kerjasama *Sister City* dengan salah satu negara eropa yang memiliki kesamaan dengan karakteristik kota madiun yaitu Plzen, Cekoslowakia.<sup>4</sup> Pada tanggal 23 Mei 2023 lalu, Wali Kota Madiun mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko, serta beberapa pakar politik seperti Prof. Herman Sulistiyo dan Suko Widodo.

Dari kerjasama ini memiliki tujuan dan juga manfaat dimana kerjasama ini dapat meningkatkan promosi budaya dan pariwisata kota madiun kepada masyarakat Plzen serta dapat mengembangkan wawasan masyarakat madiun untuk menuju Madiun mendunia. beberapa langkah yang sudah diambil dari pertemuan tersebut yaitu berupa pertukaran pelajar dan juga budaya yang dimana program pertukaran pelajar ini untuk mempromosikan budaya masing - masing. Kemudian Penyelenggaraan Event Internasional yang dimana mengundang delegasi dari Plzen untuk menghadiri festival budaya di Madiun dan sebaliknya. Hal yang membuat negara asing terkesan oleh Kota Madiun adalah Kota Madiun adalah kota yang mengedepankan pembangunan *smart city* yang kemudian dari konsep pembangunan itu mendapatkan apresiasi dari negara asing terutama oleh Ceko karena dengan adanya konsep pembangunan tersebut kota madiun menjadi daerah dengan indeks kebahagiaan tertinggi ketiga di provinsi Jawa Timur dengan capaian IPM 82,01.<sup>5</sup> Hal ini yang kemudian dianggap menarik oleh Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia.

Upaya Pemerintah Kota Madiun dalam membangun citra internasional melalui berbagai inisiatif lokal dapat dikategorikan sebagai bentuk *soft power*. *Soft power*, yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Joseph S. Nye, adalah kemampuan untuk membuat 'orang lain menginginkan hasil yang Anda inginkan' dan lebih khusus lagi 'kemampuan untuk mencapai tujuan melalui daya tarik dan bukan paksaan.<sup>6</sup> Berbeda dari *hard power* yang menggunakan tekanan langsung, *soft power* lebih mengandalkan daya tarik untuk memenangkan dukungan internasional dan memperkuat citra positif. Bentuk penggunaan *soft power* oleh Pemerintah Kota



Madiun dalam menunjukkan eksistensinya pada dunia terlihat dari program *Sister City* dengan kota Plzrn, Republik Ceko. Tujuan dari kerjasama ini untuk memebangun hubungan budaya dan juga pendidikan yang berkelanjutan antara Madiun dan Plzen. Melalui pertukaran beudaya dan pelajar, Madiun menampilkan citra yang ramah dan juga dinamis di mata masyarakat internasional. Pertukaran pelajar yang dilakukan antara kedua kota ini bertujuan untuk saling memahami antar budaya masing-masing dan juga menumbuhkan ikatan yang dapat memperkuat hubungan diplomatik pada tingkat masyarakat. Hubungan diplomatik ini pada akhirnya dapat meningkatkan daya tarik Madiun sebagai kota yang progresif, futuristik dan bersahabat dalam konteks internasional

### C. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dalam fenomena ini adalah sejak pemerintahan Wali Kota Madiun Dr. Drs. H. Maida SH, MM, M.Pd, Kota Madiun berupaya untuk mengubah wajahnya yang dahulunya tidak dikenal oleh masyarakat luar Madiun, kini menjadi kota yang sudah mulai dilirik oleh daerah lokal maupun Internasional berkat perkembangannya yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dari potensi yang dimiliki oleh Kota Madiun dari bidang pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan, Kota Madiun selama ini masih merintis upayanya dalam menuju apa yang disebut oleh Wali Kota Madiun yaitu “Madiun Maju Mendunia”. Upaya tersebut dilalui mulai dari merubah wajah kota, mengundang beberapa mahasiswa asing, kerjasama dengan pihak luar baik itu domestik maupun internasional terkait dengan pengembangan potensi tersebut. Dalam kajian hubungan internasional, upaya Pemerintah Kota Madiun dalam mempromosikan pariwisata dan budaya merupakan salah satu bentuk kontribusi terhadap perdamaian dunia.<sup>7</sup> Selanjutnya, pariwisata telah disajikan sebagai sebuah industri dan dorongan penting untuk pemahaman bersama, peningkatan tatanan sosial dan modal sosial negara. Pariwisata memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penghubung antar manusia di berbagai negara.<sup>8</sup> Madiun menunjukkan bahwa kota kecil juga mampu memanfaatkan *soft power* untuk meningkatkan pengaruhnya di panggung internasional. Dengan memperlihatkan budaya dan potensi lainnya melalui festival, landmark dan kerjasama internasional.

Madiun juga menampilkan diri sebagai kota yang menarik pihak luar secara damai seperti daerah lain yang sudah terkenal dunia layaknya Bali Yang menciptakan jaringan sosial yang dapat mendukung perkembangan ekonomi dan reputasi global.



# BAB 8

## ANALISIS PENUNJUKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK BERKOLABORASI DENGAN *WORLD ORGANISATIONS FOR ANIMAL HEALTH* DALAM PENANGANAN KESEHATAN IKAN OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA TAHUN 2022

*Muhammad Rafi Azizi*

### A. Pendahuluan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor perekonomian yang paling penting yang ada di Provinsi Jawa Timur<sup>81</sup>. Sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian bagi banyak masyarakat Jawa Timur ini tentunya akan mendapatkan perhatian khusus lewat bantuan-bantuan dan pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah lewat kepanjangan tangannya yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan ini tentunya diawasi dan dibimbing langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (DKP Jatim) agar terkelola dengan baik. Hal ini juga dikarenakan Jawa Timur juga tidak hanya memasok produk perikanan di dalam negeri namun juga menjamah hingga pasar luar negeri seperti ekspor yang dilakukan ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, China, Italia, Jepang, Australia, Thailand dan lainnya<sup>82</sup>.

Dilansir dari data DKP Jatim terkait statistik produk perikanan Jawa Timur di tahun 2022. Jawa Timur berhasil

<sup>81</sup> Wahyudi, Try. Kekayaan Laut Melimpah, Potensi Perikanan Layak Sumbang PAD Jawa Timur. 2024. DPRD Jawa Timur. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/12963/kekayaan-laut-melimpah-potensi-perikanan-layak-sumbang-pad-jawa-timur>. Diakses Pada 11 Mei 2024

<sup>82</sup> Kominfo Jawa Timur. Pemprov Jatim Ekspor Produk Perikanan Senilai 14,4 Juta Dollar. 2021. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemprov-jatim-ekspor-produk-perikanan-senilai-14-4-juta-dollar>. Diakses Pada 11 Mei 2024

memperoleh lebih dari \$1 miliar lewat ekspor produk perikanan menuju Amerika Serikat, \$211 Juta laba dalam ekspor menuju China, \$360 Juta laba dalam ekspor menuju Jepang, \$120 Juta laba dalam ekspor menuju Malaysia, dan \$118 Juta laba dalam ekspor menuju Arab Saudi<sup>83</sup>. Data yang dirangkum oleh statistik DKP Jatim ini merupakan salah satu bukti akan pangsa pasar yang besar dari produk perikanan Jawa Timur.

Ekosistem budidaya perikanan yang besar sebagai jawaban untuk memenuhi kebutuhan domestik dan internasional tentunya dibayangi akan permasalahan kesehatan yang bukan hanya berdampak pada ikan namun juga dapat berdampak pada manusia dan lingkungan. Kesehatan ikan yang terjaga menjadi fokus penting yang harus diperhatikan terutama ikan-ikan yang berasal dari sektor budidaya mengingat resiko yang dapat muncul terkait penyakit ikan yang dapat mewabah seperti *koi herpes virus* yang mewabah ditahun 2002.

*Koi Herpes Virus* (KHV) yang pertama kali mewabah di Inggris pada tahun 1996 merupakan salah satu dari contoh penyebaran wabah terhadap ikan. Penyakit ini mulai mewabah di Indonesia pertama kali pada tahun 2002 di Sumatra lewat perdagangan ikan lintas negara. Wabah yang menjangkit ikan mas dan ikan hias seperti koi ini kemudian menyebar luas di Pulau Sumatra, Jawa, dan Bali. Kasus KHV ini menjadi sebuah masalah besar mengingat ikan mas merupakan salah satu ikan konsumsi yang banyak diperdagangkan di Indonesia<sup>84</sup>.

KHV merupakan sebuah contoh kecil namun serius dalam permasalahan kesehatan ikan yang ada di Indonesia. Permasalahan kesehatan ikan juga dapat dilihat dalam peenggunaan obat yang beresiko mengingat akan mengurangi daya jual produk tersebut karena tidak sesuai standar *food safety*. Salah satu contoh dalam hal ini adalah seperti Amerika Serikat yang menolak ekspor ikan patin dari Vietnam yang mana ikan-ikan tersebut mengandung zat-zat antibiotik didalamnya yang merupakan sebuah pelanggaran bagi

---

<sup>83</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. (2022). DKP “Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2022”. [https://dkp.jatimprov.go.id/public/uploads/2024/01/rb\\_lampiran\\_20240123010202\\_422825.pdf](https://dkp.jatimprov.go.id/public/uploads/2024/01/rb_lampiran_20240123010202_422825.pdf). Diakses Pada 27 Mei 2024

<sup>84</sup> Wasito, Raden. Wuryastuti, Hastari. Sutrisno, Bambang. (2013). Identifikasi Koi Herpesvirus dengan Uji Imunopatologi Imunohistokimia Streptavidin Biotin pada Ikan Mas Karier. *Jurnal Veteriner* Maret 2013. Vol. 14 No. 1: 37-44. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/article/download/6217/4709>. Diakses Pada 27 Mei 2024



*food safety* di Amerika Serikat<sup>85</sup>. Dari contoh yang ada diatas, perlunya keaktifan instansi pemerintahan seperti DKP Jatim ini menjadi salah satu penentu dalam menjamin kesehatan ikan di Jawa Timur. Permasalahan terkait kesehatan ikan yang dapat mengancam sumber pangan dan sumber ekonomi tentunya harus segera dapat diatasi dan diatur dengan baik lewat kebijakan-kebijakan yang ada. Salah satu dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan seperti CBIB atau cara budidaya ikan yang baik.

Tidak cukup lewat kebijakan akan budidaya yang baik dan sosialisasi lainnya. DKP Jatim pada tahun 2022 lewat kerja sama yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan *World Organisation for Animal Health* (WOAH) yang merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan hewan di dunia yang berbasis Paris di mana kedua instansi tersebut berkolaborasi dalam penanganan kesehatan ikan.

Eksistensi WOAH dalam membantu negara-negara di dunia terkait kesehatan hewan tentunya merupakan hal yang sangatlah penting. WOAH sendiri bekerja dalam peningkatan kesehatan hewan diseluruh dunia dengan mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi ilmiah terkait kedokteran hewan. WOAH juga mendorong solidaritas internasional dalam pengendalian risiko kesehatan hewan di seluruh dunia. WOAH juga mendorong *One Health Approach* dalam misi globalnya<sup>86</sup>.

Dengan menggunakan metode kualitatif eksplanatif, tulisan ini kemudian akan fokus menjawab pertanyaan mengapa Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang ditujuk untuk berkolaborasi dengan WOAH?

## B. World Organisations for Animal Health (WOAH)

*World Organisations for Animal Health* atau WOAH merupakan sebuah *intergovernmental organisation* yang bergerak di bidang kesehatan hewan. WOAH didirikan pada tahun 1924 dengan nama *Office International des Epizooties* atau OIE sebelum

---

<sup>85</sup> Nurhayat, Wiji. AS Hentikan Impor Ikan Patin dari Vietnam karena Mengandung Antibiotik. (2017). Kumparan Bisnis. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/mengandung-antibiotik-as-hentikan-impor-ikan-patin-dari-vietnam>. Diakses Pada 27 Mei 2024.

<sup>86</sup> World Organisation for Animal Health. What We Do? <https://www.woah.org/en/what-we-do/>. Diakses Pada 27 Mei 2024

merubah namanya menjadi WOAAH pada Mei 2003. WOAAH didirikan sebagai respon dari terjadinya wabah yang menjangkiti hewan ternak yakni *rinderpest* yang mewabah diseluruh dunia yang mana merusak ternak dan juga menghancurkan kehidupan masyarakat.

Krisis yang terjadi tersebut jelas sekali mendemonstrasikan bagaimana wabah terhadap hewan dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu komunitas global perlu menangani isu ini dengan cara yang terorganisir. WOAAH yang berbasis di Paris ini berfokus pada penyebaran informasi hewan yang transparan, meningkatkan kesehatan hewan secara global dan dengan demikian membangun dunia yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.

Bersama dalam solidaritas dengan 183 negara anggota di dunia. WOAAH juga membangun hubungan permanen dengan 70 organisasi internasional seperti WHO serta FAO. WOAAH juga menjadli hubungan dengan organisasi regional serta mendirikan kantor perwakilan diwilayah regional dan sub-regional. Bersama-sama, *World Organisations for Animal Health* dan anggotanya mengoordinasikan respons global terhadap keadaan darurat akan kesehatan hewan, pencegahan penyakit *zoonosis*, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hewan, dan juga akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan hewan<sup>87</sup>.

### C. Dasar Kolaborasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan *World Organisations for Animal Health*

Kolaborasi antara DKP Jatim dan WOAAH diinisiasi oleh KKP RI atau Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kolaborasi ini merupakan bagian dari kesepakatan WOAAH-KKP dalam melaksanakan evaluasi *Performance Veterinary Services (PVS) pathway* sebagai upaya perbaikan manajemen kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan di Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu menyatakan bahwa manajemen kesehatan ikan dan lingkungan merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan perikanan budidaya di

---

<sup>87</sup> World Organisations for Animal Health. Who we are. <https://www.woah.org/en/who-we-are/>. Diakses Pada 9 Mei 2024



Indonesia<sup>88</sup>. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melalui program terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi biru. KKP tentunya memberikan dukungan maksimal pada kegiatan evaluasi yang dilakukan agar memastikan produk perikanan Indonesia, khususnya perikanan budidaya Indonesia dapat bebas dari penyakit, aman untuk dikonsumsi, berorientasi ekspor serta menerapkan pengelolaan lingkungan budidaya yang berkelanjutan<sup>89</sup>.

Kolaborasi yang dilakukan oleh kedua instansi ini dimulai lewat kunjungan yang dilakukan oleh tim WOAHA ke kantor DKP Jatim pada Senin 22 Agustus 2022. Kunjungan WOAHA yang diwakili oleh beberapa anggota WOAHA yakni Dr. Ana Luisa da Silva Afonso (Portugal), Dr. Stian Johnsen (Norwegia), Dr. Mario Ignacio Alguerno (Chile), dan Prof. Grossel Geoff (Australia). Kunjungan dari delegasi World Organisations for Animal Health ini juga didampingi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI<sup>90</sup>.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sub Koordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan Bidang Budidaya yakni Ibu Umi Utami Dewi S.Pi., M.Si. Kolaborasi DKP Jatim dengan WOAHA ini diinisiasi oleh organisasi induk yang menaungi DKP Jatim yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. WOAHA yang pada saat itu ingin melakukan pengawasan terkait kesehatan ikan di Indonesia diarahkan oleh KKP yang berkewajiban untuk melaporkan segala kejadian penyakit yang ada di Indonesia dimana Jawa Timur ditunjuk menjadi sample evaluasi bagi WOAHA<sup>91</sup>.

Hal ini dikarenakan data-data terkait tentang kesehatan ikan nasional tentunya didapat dari laporan setiap Provinsi yang tersebar di Indonesia. Langkah otomatis yang dilakukan KKP untuk memilih Provinsi Jawa Timur untuk dijadikan sampling bagi WOAHA juga dilandasi oleh beberapa alasan seperti bagaimana Jawa Timur menjadi salah satu penghasil produk perikanan terbesar

---

<sup>88</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. KKP Gandeng Organisasi Kesehatan Hewan Dunia Untuk Tingkatkan Produktivitas Budidaya. 2022. <https://www.kkp.go.id/djpb/kkp-gandeng-organisasi-kesehatan-hewan-dunia-untuk-tingkatkan-produktivitas-budidaya65c2ff33becb3/detail.html>. Diakses Pada 11 Mei 2024

<sup>89</sup> KKP-RI, KKP Gandeng

<sup>90</sup> Diskanlajatom. KUNJUGAN TIM WOAHA (World Organizations for Animal Health) Dalam Rangka PVS (Performance Veterinary Service) di Indonesia. 2022. [https://www.instagram.com/p/ChoBKRZpUOd/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/ChoBKRZpUOd/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==). Diakses Pada 11 Mei 2024

<sup>91</sup> Umi Utami Dewi, wawancara oleh penulis, 25 April 2024.

serta keberagaman komoditas perikanan yang ada di Jawa Timur yang dianggap menjadi yang paling beragam<sup>92</sup>.

Alasan lainnya dikarenakan juga bagaimana Jawa Timur memiliki fasilitas budidaya yang lebih baik daripada daerah yang lain. Fasilitas pendukung di Jawa Timur juga jauh lebih baik dan lengkap seperti keberadaan pabrik *cold storage* yang lengkap di Jawa Timur menjadi pertimbangan KKP untuk menunjuk Jawa Timur sebagai sample yang tepat untuk dievaluasi oleh WOA<sup>93</sup>. Ditunjuknya Jawa Timur yang dinaungi oleh DKP Jatim mengawali mulainya monitoring WOA di Provinsi Jawa Timur terkait kesehatan ikan.



Gambar 2 Kunjungan Tim WOA di kantor DKP Jatim / Source: DKP Jatim

<sup>92</sup> Umi Utami Dewi, wawancara

<sup>93</sup> Umi Utami Dewi, wawancara



## D. Tujuan Dipilihnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Untuk Berkolaborasi Dengan World Organisations for Animal Health

Terdapat dua tujuan utama dilakukannya kolaborasi DKP Jawa Timur dan WOAAH yaitu kesehatan dan ekonomi. Alasan tersebut akan dianalisa menggunakan konsep *one health* dan *blue economy*.

### 1. Kesehatan Ikan, Manusia, dan Lingkungan

Terkait Kesehatan ikan, manusia dan lingkungan. Disini WOAAH akan mengevaluasi terkait bagaimana penanganan kesehatan ikan yang dilakukan oleh DKP Jawa Timur. WOAAH yang merupakan otoritas global dalam kesehatan hewan, memiliki area fokus pada penyebaran informasi secara transparan tentang penyakit hewan, meningkatkan kesehatan hewan secara global. Selain itu, kunjungan Tim WOAAH juga akan membantu pembuat kebijakan dan pemerintah dalam kasus ini adalah pemerintah Indonesia menciptakan masa depan di mana manusia dan hewan saling menguntungkan dan mendukung satu sama lain sehingga dunia lebih aman dan sehat<sup>94</sup>.

WOAH secara garis besar akan menerima segala laporan terkait permasalahan kesehatan ikan dan menanyakan tindakan apa yang dilakukan suatu negara untuk mengatasi wabah tersebut. Setelah itu WOAAH akan mengambil langkah untuk memperingatkan negara tetangga agar waspada terhadap penyakit ikan tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah dan juga meminimalisir adanya wabah terhadap ikan seperti contohnya ketika terjadi wabah *koi herpes virus* didekade tahun 90an<sup>95</sup>.

Dalam monitoring yang dilakukan oleh WOAAH di Jawa Timur Ada beberapa hal yang menjadi saran pembenahan bagi DKP Jatim dalam penanganan kesehatan ikan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sub Koordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan Bidang Budidaya yakni Ibu Umi Utami Dewi S.Pi.,

---

<sup>94</sup> Umi Utami Dewi, wawancara

<sup>95</sup> Umi Utami Dewi, wawancara

M.Si. WOAAH memberikan saran perbaikan terhadap DKP Jatim terkait kinerja DKP Jatim dalam pemantauan obat dimana DKP Jatim tidak memberikan salinan *checklist* pemeriksaan obat pada pembudidaya<sup>96</sup>.

Salinan tersebut berisi hasil pemeriksaan penggunaan obat oleh pembudidaya terhadap ikan yang dibudidaya. Selain terhadap pembudidaya, distributor obat juga perlu mendapatkan salinan *checklist* kuisisioner pemeriksaan oleh DKP Jatim yang selama ini masih belum diterapkan. Hal-hal tersebutlah yang menjadi bahan masukan WOAAH bagi DKP Jatim untuk diperhatikan dan diperbaiki mengingat penggunaan obat yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam kesehatan ikan dan lingkungan<sup>97</sup>.

Penanganan kesehatan ikan dan lingkungan ini dapat dikatakan bukan hanya demi kesehatan ikan semata namun juga dapat meningkatkan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Hal dapat dibuktikan lewat bagaimana DKP Jatim juga menggaungkan untuk tidak menggunakan antibiotik dan mendorong penggunaan alternatif lainnya seperti probiotik, herbal, dan vaksin akibat kekhawatiran akan *antimicrobial resistance* yang menjadi isu global karena anti-biotik dianggap akan tidak mempan dalam melawan penyakit dimasa yang akan datang<sup>98</sup>.

Apa yang dilakukan oleh DKP Jatim ini sejalan dengan WOAAH yang juga menggaungkan hal yang sama terkait *antimicrobial resistance*. WOAAH berargumen bahwa *antimicrobial* atau antibiotik dapat membantu hewan dan manusia dimasa ini namun butuh berapa lama hingga hal tersebut akan bertahan sampai penyakit kebal akan antibiotik. *Antimicrobial resistance* merupakan ancaman yang semakin besar terhadap kesejahteraan hewan dan manusia yang mana hal ini menjadi salah satu tantangan kesehatan global terbesar dimasa ini<sup>99</sup>.

Oleh karena itu, kolaborasi yang dilakukan oleh DKP Jatim dan WOAAH ini dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan *one health approach*. *One Health* disini menerangkan akan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan saling bergantung dan terikat pada kesehatan ekosistem dimana mereka berada. *One Health* juga sejalan dengan SDG's yang digaungkan oleh PBB

---

<sup>96</sup> Umi Utami Dewi, wawancara

<sup>97</sup> Umi Utami Dewi, wawancara

<sup>98</sup> Umi Utami Dewi, wawancara

<sup>99</sup> World Organisations for Animal Health. Antimicrobial resistance. <https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/antimicrobial-resistance/>. Diakses Pada 11 Mei 2024



terutama SDG's 3 yakni *Good Health and Well Being* dimana DKP Jatim tentunya berkomitmen penuh akan terwujudnya SDG's<sup>100</sup>.

## 2. Pembangunan Sektor Perikanan Yang Berkelanjutan

Salah satu tujuan penting kolaborasi antara DKP Jatim dan WOAAH dalam penanganan kesehatan ikan adalah pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan di Jawa Timur. Manajemen kesehatan ikan dan lingkungan merupakan salah satu fokus utama didalam pembangunan perikanan budidaya di Indonesia yang mana sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, melalui program pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi biru<sup>101</sup>.

Dipilihnya Jawa Timur sebagai sample monitoring evaluasi *Performance Veterinary Services (PVS)* WOAAH oleh KKP merupakan alasan ekonomis kenapa evaluasi dilakukan di Jawa Timur seperti fasilitas budidaya yang lebih baik daripada daerah yang lain dan fasilitas pendukung di Jawa Timur juga jauh lebih baik dan lengkap seperti keberadaan pabrik *cold storage* yang lengkap di Jawa Timur<sup>102</sup>. Kesehatan ikan bukan hanya penting bagi pelaku budidaya namun juga pelaku eksportir di Jawa Timur.

Dalam kolaborasi DKP Jatim dan WOAAH. DKP Jatim menunjuk PT. Baramuda Bahari yang merupakan salah satu eksportir produk aquatic di Jawa Timur sebagai bahan evaluasi bagi WOAAH dikarenakan perusahaan ini selalu menjaga kualitas produk yang baik dan telah memenuhi persyaratan international. *Quality Director* PT. Baramuda Bahari Junita Lia mengatakan, kunjungan yang dilakukan oleh WOAAH ini bertujuan untuk memastikan *raw material* dan produk yang diekspor perusahaan itu baik dan bebas dari hama dan penyakit ikan<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> Umi Utami Dewi, wawancara

<sup>101</sup> KKP-RI, KKP Gandeng

<sup>102</sup> Umi Utami Dewi, wawancara

<sup>103</sup> Lintartika, Galih. Dikunjungi WOAAH, Perusahaan di Pasuruan Ini Sampaikan Skema Karantina Ketat Sebelum Ekspor. 2022. Surya.co.id.

<https://surabaya.tribunnews.com/2022/09/10/dikunjungi-woah-perusahaan-di-pasuruan-ini-sampaikan-skema-karantina-ketat-sebelum-ekspor?page=2>. Diakses Pada 12 Mei 2024





Gambar 3 Kunjungan WOAHA ke PT. Baramuda Bahari  
Source: Surya.co.id

Pembangunan disektor perikanan budidaya dan sektor industri perikanan ini dilandasi oleh kesehatan ikan yang baik guna memastikan produk perikanan Indonesia, khususnya perikanan budidaya Indonesia dapat bebas dari penyakit, aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, berorientasi ekspor serta dapat menerapkan pengelolaan lingkungan budidaya yang berkelanjutan sesuai dengan harapan KKP selaku inisiator<sup>104</sup>. Hal ini juga sesuai dengan DKP Jatim selaku pelaku kolaborasi yang berkomitmen terhadap perikanan yang berkelanjutan<sup>105</sup>.

*Blue economy concept* yang diusung dalam kolaborasi ini merupakan langkah agar sektor perikanan di Jawa Timur dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa harus merusak ekosistem bawah air. Sektor perikanan yang sehat dan bebas dari penyakit akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan juga dapat membantu dalam menjaga ekosistem bawah air seperti yang tertuang dalam *goals* SDG's 14 PBB yakni *Life Below Water* yang didukung penuh oleh dua DKP Jatim dan juga WOAHA.

## E. Kesimpulan

Dipilihnya Jawa Timur dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Timur sebagai satu-satunya instansi dibawah KKP-RI yang berkolaborasi dengan WOAHA dikarenakan Jawa

<sup>104</sup> Ibid [13]

<sup>105</sup> Ibid [17]



Timur merupakan penghasil produk perikanan terbesar serta keberagaman komoditas perikanan yang ada di Jawa Timur yang dianggap menjadi yang paling beragam. Alasan lainnya dikarenakan juga bagaimana Jawa Timur memiliki fasilitas budidaya yang lebih baik daripada daerah yang lain. Fasilitas pendukung di Jawa Timur juga jauh lebih baik dan lengkap seperti keberadaan pabrik cold storage yang lengkap di Jawa Timur menjadi pertimbangan KKP untuk menunjuk Jawa Timur sebagai sample yang tepat untuk dievaluasi oleh WOAHA

Selain itu kolaborasi mengenai kesehatan ikan pada tahun 2022 merupakan kolaborasi yang bertujuan agar produk perikanan Jawa Timur dari sektor budidaya dan produksi bebas dari penyakit, aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, berorientasi ekspor, serta dapat menerapkan pengelolaan lingkungan budidaya yang berkelanjutan. Kolaborasi ini memiliki dua tujuan yakni melindungi kesehatan ikan, manusia, dan lingkungan yang mana sesuai dengan *one health aproach* dan selaras dengan SDG's 3 yakni *good health and well-being*.

Tujuan yang kedua adalah pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dimana Jawa Timur dapat memaksimalkan potensi perekonomian dari sektor perikanan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan diterapkannya perikanan yang berkelanjutan maka Jawa Timur dapat memaksimalkan perekonomiannya dari sektor perikanan tanpa harus merusak ekosistem bawah air seperti yang tertuang dalam konsep *blue economy* dan dapat mendukung SDG's 14 PBB yakni *life below water*.

# BAB 9

## STRATEGI DIPLOMASI KOMERSIAL: *BUSINESS MATCHING* JAWA TIMUR-TIONGKOK DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR

*Dian Putri Ratnadewi*

### A. Pendahuluan

Dalam lanskap ekonomi global yang kompleks saat ini, pembangunan hubungan ekonomi yang kuat antarwilayah menjadi landasan utama bagi kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat jelas dalam dinamika hubungan antara Jawa Timur, Indonesia, dan Tiongkok, dua kekuatan ekonomi yang memiliki sejarah panjang dan masa depan yang menjanjikan. Di tengah interaksi ekonomi yang dinamis ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memainkan peran sentral dalam membina dan memfasilitasi hubungan komersial antara kedua wilayah.

Signifikansi strategis hubungan Jawa Timur dengan Tiongkok tidak dapat diremehkan. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dan kekuatan ekonomi yang berkembang pesat, Tiongkok menawarkan beragam peluang bagi wilayah-wilayah yang ingin memperluas cakrawala ekonominya. Sebaliknya, Jawa Timur, dengan lanskap industrinya yang beragam dan lokasi geografisnya yang strategis, menyediakan sumber daya berharga dan potensi pasar yang menarik bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Dalam konteks ini, peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur menjadi sangat krusial sebagai penghubung utama dalam memfasilitasi perdagangan bilateral dan investasi antara Jawa Timur dan Tiongkok. Salah satu mekanisme utama yang digunakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat hubungan komersial ini adalah *business matching*. Proses ini melibatkan pemaduan bisnis



secara strategis antara kedua wilayah berdasarkan kekuatan komplementer, kepentingan bersama, dan tujuan yang sejalan. Melalui pendekatan yang terencana dan fasilitasi yang cermat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur berupaya mendorong kemitraan produktif yang mampu melampaui batas geografis dan perbedaan budaya.

Artikel ini bertujuan untuk menggali kompleksitas *business matching* sebagai alat diplomasi yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur dalam mempromosikan pertukaran komersial antara Jawa Timur dan Tiongkok. Melalui analisis strategi, tantangan, dan keberhasilan yang mendasari inisiatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur, artikel ini berupaya mengungkap mekanisme yang mendukung keberhasilan diplomasi komersial antara kedua wilayah dinamis ini.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tulisan ini akan mengeksplorasi pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti ITPC Beijing, Indonesian Exim Bank, dan Export Center Surabaya, dalam memperkuat jaringan perdagangan. Tantangan seperti kendala bahasa dan perbedaan budaya akan dianalisis, termasuk cara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur mengatasinya melalui pendekatan adaptif. Dengan memberikan wawasan mendalam mengenai kerja sama ekonomi yang bersifat multidimensi, tulisan ini bertujuan untuk menyoroti peran penting *business matching* dalam menentukan arah hubungan Jawa Timur-Tiongkok di masa depan serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

## **B. Diplomasi Komersial Sebagai Kerangka Berpikir**

Diplomasi komersial, yang juga dikenal sebagai diplomasi ekonomi, merupakan bagian integral dari hubungan internasional yang berfokus pada upaya mempromosikan kepentingan ekonomi suatu negara di luar negeri. Diplomasi ini melibatkan pemanfaatan hubungan diplomatik dan jaringan internasional untuk mendorong perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi. Dalam era globalisasi saat ini, diplomasi komersial menjadi semakin penting bagi negara-negara yang berusaha untuk bersaing di pasar global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diplomasi komersial mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yang biasanya melalui kedutaan besar, konsulat, dan perwakilan dagang, untuk mendukung dan memfasilitasi kepentingan bisnis domestik di luar negeri. Kegiatan ini meliputi promosi ekspor dan investasi, di mana pemerintah mendorong perusahaan domestik untuk mengekspor barang dan layanan mereka ke pasar internasional serta menarik investasi asing ke negara tersebut.

Selain itu, negosiasi perjanjian perdagangan merupakan bagian yang sangat penting dari diplomasi komersial. Melalui negosiasi perdagangan bilateral atau multilateral, negara-negara dapat membuka pasar baru dan mengurangi hambatan perdagangan. Fasilitas bisnis adalah aspek lain dari diplomasi komersial, di mana pemerintah membantu perusahaan domestik mengatasi hambatan di pasar asing, seperti peraturan yang ketat atau hambatan tarif dan non-tarif. Intelijen ekonomi juga memainkan peran penting dalam diplomasi komersial, dengan pemerintah mengumpulkan dan menganalisis informasi pasar untuk membantu perusahaan memahami kondisi dan peluang yang ada di pasar asing. Mengadvokasi kepentingan nasional dalam forum internasional untuk memastikan kebijakan ekonomi global mendukung kepentingan negara juga merupakan bagian dari diplomasi komersial (Naray, 2014).

Diplomasi komersial memiliki beberapa tujuan utama yang saling terkait. Pertama, meningkatkan ekspor dan investasi langsung asing (FDI) adalah prioritas utama karena hal ini dapat memperluas basis ekonomi negara, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan nasional. Kedua, diplomasi komersial bertujuan untuk memastikan akses ke pasar internasional bagi perusahaan domestik, agar mereka dapat bersaing dengan adil dan efisien.

Ketiga, melalui perjanjian perdagangan dan kerjasama internasional, negara dapat memperoleh teknologi, pengetahuan, dan praktik terbaik yang mendukung inovasi dan daya saing. Manfaat diplomasi komersial sangat signifikan. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, diplomasi komersial juga memperkuat hubungan diplomatik secara keseluruhan. Hubungan perdagangan yang kuat sering kali mengarah pada stabilitas politik, karena negara-negara dengan hubungan ekonomi yang dekat cenderung memiliki insentif untuk menjaga hubungan diplomatik yang harmonis. Selain itu, diplomasi komersial yang efektif dapat



membantu perusahaan domestik untuk berkompetisi secara global dan meningkatkan pengenalan merek negara di pasar internasional (International Trade Centre, 2019).

Untuk mengimplementasikan diplomasi komersial secara efektif, berbagai strategi dan alat digunakan. Pemerintah sering mengorganisir misi perdagangan dan pameran internasional untuk memperkenalkan produk dan layanan domestik ke pasar global. Acara ini memberikan platform bagi perusahaan untuk membangun kontak bisnis dan mencari mitra baru. Konsulat perdagangan di kota-kota besar di seluruh dunia berfungsi sebagai pusat untuk kegiatan diplomasi ekonomi, menyediakan informasi pasar, mendukung masuknya perusahaan domestik, dan mengatasi hambatan perdagangan. Kemitraan publik-swasta juga sangat penting dalam diplomasi komersial, di mana pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar internasional serta mengembangkan strategi untuk menghadapinya.

Diplomat dan perwakilan perdagangan sering terlibat dalam lobi untuk mendukung kepentingan bisnis domestik di luar negeri, termasuk mendorong kebijakan dan peraturan yang lebih menguntungkan di negara mitra perdagangan. Untuk memastikan bahwa pelaku bisnis memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, banyak negara menawarkan program pendidikan dan pelatihan tentang perdagangan internasional dan praktik bisnis global. Indonesia, sebagai negara berkembang yang berusaha memperluas pengaruh ekonominya di pasar global, telah mengimplementasikan berbagai inisiatif diplomasi komersial. Melalui Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia secara aktif mempromosikan peluang investasi dan mengeksport produk-produk seperti tekstil, pertanian, dan manufaktur.

Pemerintah Indonesia juga terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi regional, seperti ASEAN dan RCEP, untuk membuka akses pasar baru dan meningkatkan daya saing produk domestik. Dalam konteks ini, peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur sangat penting. Mereka tidak hanya membantu mempromosikan produk lokal di pasar internasional, tetapi juga memberikan dukungan dan pelatihan kepada pengusaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka. Melalui inisiatif seperti misi perdagangan dan partisipasi dalam pameran



internasional, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur membantu perusahaan Indonesia menemukan mitra bisnis dan pelanggan baru di luar negeri.

Meskipun diplomasi komersial memiliki banyak manfaat, ia juga menghadapi beberapa tantangan. Perbedaan budaya dan bahasa dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam membangun hubungan bisnis internasional. Ketidakpastian politik dan ekonomi di negara mitra perdagangan dapat memengaruhi stabilitas hubungan ekonomi. Selain itu, peraturan yang berbeda dan kompleksitas sistem hukum di pasar internasional sering kali menjadi tantangan bagi perusahaan yang ingin memperluas operasi mereka di luar negeri. Diplomasi komersial merupakan alat yang sangat penting dan strategis dalam memperkuat posisi ekonomi negara di panggung global. Dengan memanfaatkan hubungan diplomatik untuk mempromosikan perdagangan dan investasi, negara dapat memperluas basis ekonomi mereka, meningkatkan kesejahteraan warga negara, dan memperkuat hubungan mereka dengan negara lain. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, diplomasi komersial dapat membawa manfaat besar dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi (Rusadze, 2020).

### C. *Business matching* dan Strategi Diplomasi Komersial Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Tiongkok

*Business matching* adalah proses strategis di mana perusahaan dipasangkan dengan mitra potensial untuk menciptakan hubungan komersial yang saling menguntungkan. Praktik ini sangat signifikan dalam perdagangan internasional, di mana ia membantu menjembatani kesenjangan antara produsen domestik dan pembeli asing. Melalui *business matching*, perusahaan dapat menemukan mitra yang sesuai dengan kualitas produk, harga, dan kebutuhan pasar mereka, sehingga memfasilitasi interaksi perdagangan yang lebih lancar dan lebih sukses. Tujuan utama dari *business matching* adalah untuk menciptakan peluang bagi perusahaan untuk bertemu dan menjalin koneksi dengan mitra, klien, atau investor potensial. Dengan mempertemukan bisnis yang kompatibel, proses ini bertujuan



untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan dan ekspor, memperluas jaringan bisnis, memfasilitasi perjanjian perdagangan, serta mendorong inovasi dan kolaborasi. Proses *business matching* biasanya melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, kedua pihak yang terlibat dalam *business matching* harus mendefinisikan kebutuhan, tujuan, dan jenis mitra yang mereka cari dengan jelas. Ini bisa mencakup industri tertentu, segmen pasar, atau wilayah geografis. Kemudian, mitra potensial diidentifikasi dan disaring berdasarkan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan. Ini melibatkan evaluasi faktor-faktor seperti penawaran produk, ukuran bisnis, jangkauan pasar, dan stabilitas finansial.

Setelah mitra potensial teridentifikasi, perkenalan difasilitasi melalui berbagai saluran seperti misi perdagangan, acara *business matching*, platform daring, dan pameran perdagangan. Perkenalan ini dirancang untuk memberikan platform bagi perusahaan untuk mempresentasikan produk dan layanan mereka kepada calon mitra. Setelah perkenalan awal, pertemuan lanjutan dan negosiasi dilakukan untuk membahas kemitraan secara lebih mendetail. Fase ini melibatkan pembahasan tentang syarat, ketentuan, dan perjanjian yang terkait dengan perdagangan, investasi, atau kolaborasi. Setelah kedua pihak menyetujui syarat-syaratnya, perjanjian formal ditandatangani. Ini bisa mencakup nota kesepahaman (MoU), surat niat (LoI), atau kontrak perdagangan. Setelah itu, kegiatan yang telah disepakati dilaksanakan, dan kemitraan dipantau untuk memastikan manfaat bersama. *Business matching* menawarkan berbagai manfaat bagi perusahaan dan perekonomian yang terlibat.

Ini memberikan perusahaan cara yang efisien untuk memasuki pasar baru dan memperluas kehadirannya secara global (Kurniadi & Ibrahim, 2021). Dengan menyediakan platform terstruktur untuk menemukan mitra, *business matching* mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan riset pasar dan identifikasi mitra. Dengan melakukan penyaringan yang cermat terhadap mitra potensial, *business matching* membantu mengurangi risiko yang terkait dengan memasuki pasar yang belum dikenal. Dengan mengakses pasar dan sumber daya baru, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan kemampuan inovasi mereka. Secara lebih luas, *business matching* yang berhasil dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan volume perdagangan dan mendorong kerjasama

ekonomi internasional. Dalam konteks Jawa Timur, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur memainkan peran penting dalam menyelenggarakan acara *business matching* yang mempertemukan pelaku usaha dari Jawa Timur dengan pembeli dari negara lain, seperti India dan China. Salah satu contoh pentingnya *business matching* adalah acara yang diadakan pada 21 Maret 2024, yang melibatkan peserta dari Jawa Timur dan pembeli dari Tiongkok, di mana para pelaku usaha dapat mempresentasikan produk mereka dan menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Bapak Ervina Lucky, Kepala Bidang Pengembangan dan Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur, wawasan berharga diperoleh terkait upaya dan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pemasaran produk di Jawa Timur. Bapak Lucky menjelaskan bahwa kegiatan *business matching* telah menjadi praktik yang berlangsung lama di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur, khususnya di bawah naungan Seksi Pengembangan dan Perdagangan Luar Negeri. Untuk tahun 2024, fokus kegiatan *business matching* ditujukan pada negara-negara seperti Malaysia, Australia, Jepang, dan Tiongkok. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan pemasaran produk-produk Jawa Timur. Bapak Lucky menekankan pentingnya memperkenalkan produk lokal dan para pengusaha atau eksportir kepada pembeli potensial. Melalui *business matching*, diharapkan tercapai kesesuaian baik dari segi kualitas maupun harga antara penjual dan pembeli.

Bapak Lucky memberikan contoh spesifik tentang kegiatan *business matching* yang berhasil. Misalnya, dalam acara *business matching* dengan Tiongkok, dua perusahaan, Manohara dan PT Satoria Agroindustri, berhasil mencapai kesepakatan untuk melakukan pembelian melalui Surat Pernyataan Minat (LOI). Namun, Bapak Lucky menegaskan bahwa tanpa membuka pasar baru, ada risiko terjadinya stagnasi ekspor. Stagnasi ekspor ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mempengaruhi pendorong-pendorong utama ekonomi seperti belanja konsumen, belanja pemerintah, investasi, dan neraca perdagangan.

Salah satu bahaya signifikan dari stagnasi ekspor yang diungkapkan oleh Bapak Lucky adalah potensi deflasi. Beliau menjelaskan bahwa deflasi bukan hanya tentang penurunan harga,



melainkan penurunan harga secara umum, yang dapat menyebabkan volatilitas tinggi dalam harga barang, terutama yang menggunakan bahan baku impor. Contoh yang diberikan adalah kenaikan tajam harga susu formula bayi saat terjadinya deflasi. Lebih lanjut, Bapak Lucky juga mencatat bahwa deflasi yang berlanjut selama dua kuartal berturut-turut dapat berujung pada inflasi, yang berpotensi menyebabkan resesi ekonomi. Dalam keadaan resesi, harga barang menjadi sangat tidak stabil, yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi tetapi juga faktor sosial seperti meningkatnya pengangguran dan ketidakstabilan keamanan.

Sejak bergabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, *business matching* telah menjadi aktivitas penting. Bapak Lucky berbagi tentang aspek unik dari *business matching*, terutama dalam mempertemukan pelaku bisnis dengan pembeli potensial dan membangun jaringan bisnis yang kuat. Beliau menceritakan kunjungan tamu dari Tawau di Malaysia Timur, yang berbatasan dengan Kalimantan Utara, untuk bertemu dengan pelaku usaha di Jawa Timur. Ini menyoroti pentingnya *business matching* dalam memfasilitasi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, yang dapat menghasilkan kesepakatan bisnis yang lebih efektif.

Dalam konteks perdagangan internasional, Bapak Lucky juga menjelaskan kerangka hukum yang mengatur masuknya produk ke negara lain, seperti perjanjian perdagangan internasional seperti ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Melalui perjanjian ini, produk Indonesia dapat lebih mudah memasuki negara mitra perdagangan tanpa hambatan tarif yang tinggi. Namun, Bapak Lucky juga mencatat bahwa perdagangan internasional bukan hanya tentang hambatan tarif tetapi juga berbagai peraturan dan standar non-tarif yang harus dipenuhi. Misalnya, produk impor harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang bisa menjadi hambatan bagi eksportir dari negara mitra perdagangan.

Bapak Lucky juga menyoroti perbedaan antara perjanjian perdagangan bilateral dan regional, dengan mencatat bahwa perjanjian regional seperti ACFTA memiliki cakupan yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak negara. Hal ini menggarisbawahi kompleksitas hubungan perdagangan internasional, di mana negara-negara harus mempertimbangkan dinamika bilateral dan regional. Untuk memfasilitasi perdagangan internasional, Bapak Lucky menekankan pentingnya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan internasional seperti

World Trade Organization (WTO). Pelanggaran terhadap regulasi perdagangan internasional dapat berakibat pada sanksi dari organisasi tersebut, yang dapat merugikan perekonomian negara.

Dari wawancara ini, jelas terlihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Bapak Ervina Lucky, memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi regional. *Business matching* adalah salah satu strategi yang digunakan untuk memperluas pasar ekspor dan mencegah stagnasi ekonomi, yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Melalui *business matching*, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur berhasil memfasilitasi pertemuan antara pelaku bisnis lokal dan pembeli asing, membangun jaringan bisnis yang kuat, dan meningkatkan pemasaran produk lokal. Ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan pelaku bisnis tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan. Selain itu, wawancara ini juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap kompleksitas hubungan perdagangan internasional dan kerangka hukum yang mengaturnya. Dengan mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan internasional seperti WTO, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan dilaksanakan sesuai dengan standar internasional dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

#### D. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, kegiatan *business matching* yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menunjukkan efektivitas diplomasi komersial dalam mempromosikan kepentingan ekonomi regional. Dengan memfasilitasi interaksi langsung antara eksportir lokal dan pembeli internasional, acara ini menciptakan peluang nyata untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan ekspor. Hasil positif, termasuk penandatanganan Surat Pernyataan Minat (LOI), mencerminkan potensi untuk perjanjian perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Namun, mengatasi tantangan yang teridentifikasi, seperti hambatan bahasa dan kompleksitas regulasi, sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari inisiatif *business matching*. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap upaya ini menegaskan pentingnya



fasilitasi perdagangan yang strategis dan kerjasama internasional dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

# BAB 10

## DAMPAK PERANG UKRAINA DAN RUSSIA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

*Reno Firmansyah Putra Hermawan*

### A. Pendahuluan

Perang antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 telah memicu berbagai dampak global yang signifikan, termasuk dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan kedua negara, tetapi juga menyeret berbagai negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu negara yang merasakan dampak dari perang ini adalah Indonesia, terutama dalam hal perekonomian. Sebagai negara dengan ketergantungan yang cukup besar pada perdagangan internasional dan impor bahan pangan serta energi, Indonesia harus menghadapi serangkaian tantangan ekonomi akibat ketidakstabilan global yang disebabkan oleh perang ini.

Perang Ukraina dan Rusia mengganggu rantai pasokan global, terutama dalam komoditas penting seperti minyak, gas, dan bahan pangan. Rusia dikenal sebagai salah satu eksportir minyak dan gas terbesar di dunia, sementara Ukraina adalah produsen utama gandum. Ketika konflik ini terjadi, pasokan minyak mentah dan gas dari Rusia terhambat akibat sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Selain itu, Ukraina sebagai pemasok gandum global juga mengalami penurunan produksi yang signifikan karena aktivitas militer yang mengganggu proses pertanian. Dampak dari gangguan ini dirasakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang mengandalkan impor bahan-bahan tersebut.

Kenaikan harga minyak dan gas dunia akibat terganggunya pasokan dari Rusia berdampak langsung pada Indonesia. Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan energinya, Indonesia harus menghadapi lonjakan harga bahan bakar yang berdampak pada biaya produksi di berbagai sektor. Kenaikan harga bahan bakar juga memicu inflasi yang cukup signifikan, mempengaruhi harga-harga barang dan jasa di dalam negeri. Inflasi ini memperlemah daya beli masyarakat dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga merasakan dampak dari krisis pangan global akibat terganggunya produksi dan distribusi gandum dari Ukraina. Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor gandum terbesar di dunia harus menghadapi kenaikan harga gandum, yang

kemudian berimbas pada harga produk olahan berbasis gandum, seperti roti, mi, dan produk pangan lainnya. Hal ini memberikan tekanan tambahan pada perekonomian rumah tangga dan memicu keresahan sosial di beberapa kalangan.

Tidak hanya pada aspek energi dan pangan, ketidakpastian global yang dihasilkan dari perang Ukraina dan Rusia juga berimbas pada sektor investasi. Ketidakpastian politik dan ekonomi global membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan modalnya. Arus investasi ke negara berkembang seperti Indonesia mengalami penurunan, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, di balik tantangan tersebut, Indonesia juga berusaha untuk memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan geopolitik ini. Dengan adanya gangguan pada pasokan energi global, Indonesia melihat peluang untuk memperkuat industri energi terbarukan sebagai alternatif jangka panjang. Selain itu, negara ini juga berupaya untuk meningkatkan kemandirian pangan dengan memperkuat sektor pertanian dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor.

Secara keseluruhan, perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Baik dalam hal kenaikan harga energi dan pangan, inflasi, maupun penurunan investasi, perang ini memaksa Indonesia untuk mengadopsi langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Respons pemerintah dan masyarakat terhadap krisis ini akan sangat menentukan kemampuan Indonesia



dalam bertahan dan bahkan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

## **B. Dampak Perang terhadap Pasokan Energi**

Salah satu dampak paling signifikan dari perang antara Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian Indonesia adalah pada sektor energi. Indonesia, meskipun merupakan produsen minyak, tetap bergantung pada impor energi, terutama minyak mentah dan gas alam, untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Ketika perang meletus, pasokan energi global mengalami gangguan besar, terutama karena Rusia merupakan salah satu eksportir terbesar minyak dan gas di dunia. Sanksi ekonomi yang diberlakukan negara-negara Barat terhadap Rusia, termasuk pembatasan ekspor energi, memicu kelangkaan dan lonjakan harga minyak di pasar internasional. Hal ini memberikan efek domino terhadap negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia.

Kenaikan harga minyak global secara langsung mempengaruhi biaya bahan bakar di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia memberikan subsidi bahan bakar untuk menjaga kestabilan harga di dalam negeri, lonjakan harga minyak dunia yang tajam tetap tidak bisa dihindari. Akibatnya, harga bahan bakar domestik meningkat, yang memicu kenaikan biaya produksi di berbagai sektor industri. Biaya transportasi juga mengalami peningkatan, yang akhirnya berdampak pada harga barang-barang dan jasa. Kenaikan harga bahan bakar secara signifikan memperburuk tekanan inflasi di Indonesia, yang sudah terdampak oleh ketidakpastian global lainnya.

Inflasi ini mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan dasar. Kenaikan harga bahan bakar dan energi memperbesar beban hidup sehari-hari, baik untuk transportasi, pemanas, maupun listrik. Di sektor industri, terutama yang sangat bergantung pada energi, seperti manufaktur dan transportasi, kenaikan biaya operasional menyebabkan banyak perusahaan harus menyesuaikan harga produk mereka, yang pada gilirannya menekan konsumen akhir. Situasi ini menciptakan siklus inflasi yang lebih tinggi dan dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, perang Ukraina dan Rusia mempengaruhi ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Dengan harga minyak

mentah yang terus meningkat, beban finansial pemerintah untuk menyediakan subsidi bahan bakar semakin besar. Ini mendorong wacana untuk mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan. Indonesia, sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, melihat krisis energi ini sebagai momentum untuk memperkuat industri energi bersih. Namun, transisi ini membutuhkan waktu dan investasi yang besar, sehingga dampak jangka pendeknya masih cukup terbatas.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia berupaya meredam dampak kenaikan harga energi dengan sejumlah kebijakan. Misalnya, pemerintah meningkatkan anggaran subsidi bahan bakar dan listrik untuk menjaga stabilitas harga. Meski demikian, langkah ini juga menghadirkan tantangan tersendiri karena beban anggaran negara semakin besar. Pada saat yang sama, pemerintah juga mencoba untuk memperkuat cadangan energi nasional dan mendorong penghematan energi melalui kampanye publik.

Secara keseluruhan, dampak perang Ukraina dan Rusia terhadap pasokan energi di Indonesia menimbulkan banyak tantangan. Ketergantungan pada impor energi, kenaikan harga

bahan bakar, dan peningkatan inflasi merupakan masalah yang perlu segera diatasi. Meski demikian, situasi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil. Langkah-langkah kebijakan yang tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong kemandirian energi dalam jangka panjang.

### **C. Dampak Perang terhadap Ketahanan Pangan**

Perang antara Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memengaruhi ketahanan pangan global, termasuk Indonesia. Ukraina adalah salah satu produsen dan pengeksport gandum terbesar di dunia, sementara Rusia juga memiliki peran besar dalam pasokan bahan pangan global. Ketika konflik meletus, produksi dan distribusi gandum dari Ukraina terganggu secara signifikan, dan sanksi ekonomi terhadap Rusia memperburuk situasi. Akibatnya, harga gandum melonjak tajam di pasar internasional, yang berimbas pada banyak negara yang bergantung pada impor gandum, termasuk Indonesia.

Sebagai salah satu pengimpor gandum terbesar di dunia, Indonesia sangat terpengaruh oleh gangguan pasokan ini. Gandum



adalah bahan baku penting dalam berbagai produk pangan sehari-hari seperti roti, mi instan, dan produk olahan lainnya. Ketika harga gandum di pasar dunia naik, Indonesia mengalami lonjakan biaya impor, yang kemudian menyebabkan harga produk-produk berbasis gandum juga meningkat di pasar domestik. Konsumen Indonesia, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, sangat merasakan dampak kenaikan harga ini, karena produk pangan berbasis gandum merupakan bagian integral dari diet harian banyak masyarakat.

Krisis pangan ini juga memperburuk situasi inflasi yang telah dipicu oleh kenaikan harga energi. Kenaikan harga pangan membuat biaya hidup sehari-hari semakin meningkat, dan hal ini menambah tekanan pada daya beli masyarakat. Bagi sebagian besar rumah tangga, terutama yang berpenghasilan rendah, pengeluaran untuk pangan menjadi semakin besar, yang kemudian mempengaruhi alokasi anggaran untuk kebutuhan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, ketahanan pangan Indonesia diuji, karena kenaikan harga pangan global mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas pangan dalam negeri.

Selain itu, perang Rusia dan Ukraina juga mempengaruhi harga komoditas pangan lainnya, seperti minyak biji matahari, yang diekspor dalam jumlah besar oleh kedua negara. Gangguan pasokan komoditas ini turut memperburuk situasi pangan global. Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada

impor gandum dan bahan pangan lainnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi pangan lokal dan diversifikasi sumber pangan, termasuk memperkuat sektor pertanian domestik. Pemerintah juga mendorong pengembangan produk berbasis tepung non-gandum, seperti singkong, jagung, dan sagu, sebagai alternatif untuk menggantikan produk berbasis gandum.

Di sisi lain, Indonesia juga harus memperkuat sistem distribusi pangan dalam negeri agar mampu menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah. Pemerintah telah berupaya menstabilkan harga pangan dengan intervensi pasar dan pemberian subsidi tertentu. Namun, tantangan dalam hal distribusi dan produksi pangan tetap ada, terutama karena ketergantungan pada impor bahan pangan strategis masih relatif tinggi.

Dalam jangka panjang, krisis pangan akibat perang ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Diversifikasi sumber pangan, peningkatan produktivitas pertanian, serta pengembangan teknologi pertanian menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada impor. Selain itu, krisis ini juga menunjukkan pentingnya membangun cadangan pangan strategis yang memadai untuk menghadapi ketidakpastian global.

Secara keseluruhan, perang Rusia dan Ukraina telah menciptakan tantangan serius bagi ketahanan pangan Indonesia. Gangguan pasokan gandum dan komoditas lainnya meningkatkan harga pangan, yang berdampak pada inflasi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik tantangan ini, terdapat peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kemandirian pangan melalui diversifikasi dan peningkatan produksi lokal. Upaya pemerintah dalam merespons krisis ini akan sangat menentukan bagaimana Indonesia dapat mempertahankan stabilitas pangan di tengah gejolak ekonomi global.

#### **D. Dampak pada Sektor Investasi**

Perang antara Rusia dan Ukraina juga mempengaruhi sektor investasi global, termasuk di Indonesia. Konflik tersebut telah menciptakan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik yang berdampak pada minat investor asing untuk menanamkan modal mereka di berbagai negara, terutama negara berkembang. Ketidakpastian ini muncul karena perang mengganggu stabilitas pasar global, mempengaruhi harga komoditas, dan menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang pada perekonomian dunia. Sebagai salah satu negara berkembang yang sangat bergantung pada investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, Indonesia tidak luput dari dampak negatif ini.

Salah satu dampak utama perang terhadap sektor investasi adalah meningkatnya kehati-hatian investor asing dalam menempatkan modal mereka di Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi global akibat perang membuat banyak investor menunda atau bahkan menarik investasi mereka dari pasar negara berkembang, karena mereka lebih memilih untuk menunggu situasi menjadi lebih stabil. Penurunan arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena investasi memainkan



peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, fluktuasi harga komoditas, terutama energi dan bahan pangan, akibat perang juga memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Kenaikan harga energi membuat biaya operasional perusahaan meningkat, yang dapat mengurangi margin keuntungan dan menurunkan minat investor untuk berinvestasi di sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh, industri manufaktur yang sangat bergantung pada energi menghadapi tantangan dalam menekan biaya produksi di tengah kenaikan harga bahan bakar. Kondisi ini membuat sektor tersebut menjadi kurang menarik bagi investor yang mencari keuntungan jangka pendek.

Selain itu, inflasi yang meningkat akibat lonjakan harga energi dan pangan juga berdampak negatif pada daya tarik investasi di Indonesia. Inflasi yang tinggi dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menciptakan risiko lebih besar bagi investor. Dengan daya beli masyarakat yang menurun, pasar domestik menjadi kurang menguntungkan, yang pada akhirnya menurunkan prospek pertumbuhan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Investor cenderung mencari pasar yang lebih stabil dan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih jelas dalam jangka panjang.

Namun, meskipun terjadi penurunan minat investasi di beberapa sektor, ada pula peluang investasi baru yang muncul akibat perubahan geopolitik ini. Salah satunya adalah peningkatan minat pada sektor energi terbarukan. Dengan meningkatnya ketergantungan global pada energi terbarukan sebagai alternatif dari energi fosil yang terganggu oleh perang, Indonesia melihat potensi besar untuk menarik investasi di bidang ini. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, dan perang Ukraina-Rusia mendorong semakin banyak negara mencari sumber energi alternatif. Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat investasi energi bersih di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Indonesia juga telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga daya tarik investasi di tengah ketidakpastian global. Salah satu langkah utama adalah dengan menawarkan berbagai insentif fiskal, seperti pemotongan pajak dan kemudahan perizinan bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan mitra dagang internasional untuk menciptakan iklim investasi yang lebih

kondusif. Selain itu, upaya untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia menjadi fokus utama dalam menarik lebih banyak investasi asing.

Secara keseluruhan, perang antara Rusia dan Ukraina membawa dampak yang signifikan terhadap sektor investasi di Indonesia. Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global membuat investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, yang berdampak pada penurunan arus investasi. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan, yang dapat menarik minat investasi di masa depan. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mempertahankan daya saingnya sebagai tujuan investasi yang menarik di kawasan.

## E. Peluang yang Muncul akibat Perang

Meskipun perang antara Rusia dan Ukraina telah menimbulkan banyak dampak negatif bagi ekonomi global, termasuk Indonesia, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional. Perubahan geopolitik dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh konflik ini membuka ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor-sektor strategis dan mengurangi ketergantungan pada impor dari negara-negara yang terdampak oleh perang. Di tengah tantangan, terdapat beberapa peluang yang bisa diambil Indonesia untuk meraih keuntungan jangka panjang dan membangun ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu peluang terbesar yang muncul adalah peralihan ke energi terbarukan. Sebelum perang, ketergantungan Indonesia pada impor minyak dan gas, terutama dari Timur Tengah dan Rusia, menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ketika harga minyak melonjak akibat perang, negara-negara di seluruh dunia mulai beralih ke energi bersih untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang harganya sangat fluktuatif. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri energi terbarukan, seperti tenaga surya, panas bumi, dan angin. Dorongan global untuk energi bersih ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi di sektor ini dan meningkatkan produksi energi hijau, yang pada

akhirnya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan kemandirian energi.



Selain itu, sektor pertanian Indonesia juga mendapatkan peluang untuk berkembang lebih lanjut. Ketergantungan global pada gandum dan produk pertanian dari Ukraina dan Rusia terganggu akibat perang, yang menyebabkan banyak negara harus mencari alternatif sumber pangan. Dalam situasi ini, Indonesia dapat memperkuat sektor pertaniannya dengan meningkatkan produksi pangan lokal, seperti beras, jagung, dan sagu, yang merupakan komoditas pangan utama di dalam negeri. Selain itu, upaya untuk memperluas lahan pertanian dan memperbaiki teknologi pertanian dapat membantu Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tetapi juga berpotensi menjadi eksportir pangan yang lebih kompetitif di pasar global.

Diversifikasi produk pangan juga menjadi salah satu peluang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan tertentu, seperti gandum. Pengembangan produk pangan berbasis bahan baku lokal, seperti singkong dan sorgum, dapat menjadi alternatif bagi produk berbasis gandum, seperti roti dan mi. Ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga dapat mendukung petani lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain sektor energi dan pertanian, perang Rusia dan Ukraina juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama regional dan memperluas pasar ekspor. Banyak negara yang kini mulai mencari mitra dagang baru untuk menggantikan produk yang terganggu akibat perang. ASEAN, sebagai kawasan yang stabil secara politik dan ekonomi, menjadi wilayah yang menarik bagi banyak negara. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, memiliki peluang untuk memimpin upaya regional dalam memperkuat perdagangan intra- ASEAN dan menarik investor asing yang ingin memanfaatkan potensi pasar yang besar di kawasan ini.

Pemerintah Indonesia juga dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kerja sama internasional di sektor teknologi dan industri manufaktur. Ketika rantai pasok global terganggu oleh perang, ada dorongan untuk memperkuat industri domestik dan meningkatkan produksi barang-barang penting seperti semikonduktor dan teknologi hijau. Indonesia, dengan populasi yang besar dan berkembang, memiliki potensi untuk menjadi pusat manufaktur di Asia Tenggara. Ini juga memberikan peluang untuk meningkatkan transfer teknologi dan membangun industri yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan situasi global yang berubah ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peluang yang muncul dari krisis ini memberikan Indonesia kesempatan untuk memperkuat sektor-sektor penting, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menjadi pemain yang lebih kuat dalam perekonomian global. Pengembangan energi terbarukan, diversifikasi produk pangan, dan peningkatan kerja sama regional menjadi beberapa langkah strategis yang dapat membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi dan keberlanjutan di masa depan.

## **F. Langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perang**

Dalam menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan nasional. Ketidakpastian global yang diakibatkan oleh perang ini memaksa Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan ekonominya dan memperkuat berbagai sektor agar dapat menghadapi tantangan yang muncul. Langkah-langkah tersebut mencakup kebijakan di sektor energi, ketahanan pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan kerja sama internasional.

Di sektor energi, salah satu fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas pasokan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Ketika harga minyak dunia melonjak akibat perang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga harga energi domestik tetap stabil. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar subsidi dan terus mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi agar dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap masyarakat bisa diminimalisasi. Namun, subsidi ini juga menambah beban anggaran negara, sehingga pemerintah harus mencari solusi jangka panjang untuk masalah energi.

Dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Sejumlah proyek energi terbarukan telah diluncurkan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, angin,



dan panas bumi. Melalui kebijakan ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan kapasitas energi hijau yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mengurangi dampak ketidakpastian harga energi global. Pemerintah juga mempercepat investasi dalam infrastruktur energi untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau bagi industri dan rumah tangga.

Selain energi, ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi dampak perang. Krisis pangan global yang disebabkan oleh terganggunya pasokan gandum dari Ukraina dan Rusia berdampak langsung pada Indonesia. Pemerintah merespons dengan meningkatkan produksi pangan lokal dan mendorong diversifikasi pangan. Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas lahan pertanian dan mendorong petani untuk menanam komoditas alternatif, seperti jagung, singkong, dan sagu, yang dapat menjadi substitusi gandum. Melalui kebijakan ini, Indonesia bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah juga melakukan intervensi melalui operasi pasar dan program stabilisasi harga pangan pokok. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk memastikan ketersediaan bahan pangan di pasar, terutama menjelang hari-hari besar seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri, ketika permintaan pangan meningkat tajam. Selain itu, upaya untuk memperkuat cadangan pangan nasional terus dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi gangguan pasokan global di masa mendatang.

Dalam menghadapi inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan, Bank Indonesia (BI) berperan penting dalam menjaga stabilitas moneter. BI telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali, salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan secara bertahap untuk mengurangi tekanan inflasi. Kebijakan moneter yang hati-hati ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan perekonomian tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global.

Selain kebijakan di sektor energi dan pangan, pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi. Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional, seperti G20, ASEAN, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan global. Pada

saat yang sama, pemerintah juga berupaya menarik lebih banyak investasi asing, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur. Upaya untuk memperbaiki iklim investasi, melalui reformasi regulasi dan kemudahan berbisnis, diharapkan dapat membantu Indonesia menarik investor asing yang ingin memanfaatkan peluang di tengah perubahan geopolitik global.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak perang Rusia dan Ukraina difokuskan pada menjaga stabilitas ekonomi,

meningkatkan ketahanan energi dan pangan, serta memperkuat kerja sama internasional. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, respons yang tepat dan kebijakan yang terukur dapat membantu Indonesia melewati masa krisis ini dan memperkuat fondasi ekonominya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Diversifikasi sektor energi, peningkatan produksi pangan lokal, serta penguatan kerja sama perdagangan dan investasi menjadi kunci dalam memastikan Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.

## G. Kesimpulan

Perang Rusia dan Ukraina telah membawa dampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Dalam artikel ini, kita melihat bagaimana berbagai sektor ekonomi Indonesia, mulai dari energi, pangan, investasi, hingga perdagangan, terkena dampak langsung dan tidak langsung dari konflik ini. Ketidakstabilan harga energi dan pangan, gangguan rantai pasok, serta penurunan minat investasi asing telah menciptakan tantangan yang serius bagi Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan, diversifikasi pangan, dan memperluas pasar ekspor. Upaya pemerintah Indonesia dalam merespons tantangan ini, seperti meningkatkan ketahanan energi dan pangan, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat kerja sama internasional, menjadi langkah-langkah penting dalam menghadapi dampak perang tersebut.

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global, diperlukan beberapa langkah tambahan. Pertama, pemerintah perlu mempercepat transisi ke energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada energi



fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Ini dapat dilakukan melalui insentif investasi di sektor energi hijau dan pengembangan infrastruktur yang mendukung. Kedua, diversifikasi pangan harus terus digalakkan dengan fokus pada peningkatan produksi lokal dan pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien. Ketiga, Indonesia perlu memperkuat sektor manufaktur dan teknologi dalam menghadapi perubahan rantai pasok global akibat perang. Selain itu, kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara lain harus terus diperluas, terutama di kawasan ASEAN dan Asia Timur, untuk mengurangi dampak dari konflik geopolitik. Melalui pendekatan yang holistik dan terukur, Indonesia dapat memanfaatkan peluang di tengah tantangan global ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

# BAB 11

## ANALISIS *PUBLIC DIPLOMACY* DALAM ACARA *SURABAYA CROSS CULTURE* *INTERNATIONAL FOLK ART FESTIVAL* TAHUN 2023

*Muhammad Rhenaldy Ferdiansyah*

### A. Pendahuluan

Dengan munculnya era informasi dan pertumbuhan globalisasi yang cepat, diplomasi publik dan diplomasi budaya telah menjadi instrumen kunci dalam pelaksanaan hubungan internasional. Keduanya bertujuan untuk memproyeksikan citra yang baik dari suatu negara dan juga meningkatkan hubungan antar negara. Salah satu aspek dari hubungan internasional adalah diplomasi publik, yang difokuskan pada pembangunan citra suatu negara dan interaksinya dengan seluruh dunia. Karena kompleksitas dunia saat ini, diplomasi publik tidak hanya melibatkan negara dan perwakilan negara, tetapi juga sejumlah pihak lain yang mungkin termasuk aktor non-negara, seperti gerakan, jaringan, media, dan individu.

Istilah *Public Diplomacy* pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Gullion pada tahun 1965, yang mendefinisikannya sebagai upaya untuk memengaruhi pembentukan sikap publik dan pelaksanaan kebijakan luar negeri<sup>106</sup>. Diplomasi publik mencakup berbagai kegiatan seperti pertukaran budaya, program pendidikan, dan komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan di antara negara-negara. Salah satu fungsi utama diplomasi publik adalah membangun dan mempertahankan citra positif suatu negara di kancah internasional. Diplomasi publik dapat dilalui dengan mengadakan program-

---

<sup>106</sup> Raluca-Gabriela, Z. (2013). The Role and Importance of Public Diplomacy, Romania Case Study in the Context of Integration into NATO. *European Scientific Journal*, 1, 468–475.



program seperti pertukaran pelajar, festival budaya, dan kampanye media sosial didalam suatu negara. Maka negara dapat menampilkan nilai-nilai dan budaya mereka kepada audiens global dan memiliki relevansi yang signifikan dalam lingkup persaingan global, di mana persepsi suatu negara berperan dalam kegiatan diplomasi dan ekonominya<sup>107</sup>.

Di sisi lain, diplomasi budaya merupakan bagian dari diplomasi publik yang menggunakan sarana budaya untuk mencapai tujuan politik dan sosial tertentu. Terdapat hubungan yang erat antara diplomasi budaya dan diplomasi publik. Diplomasi budaya pada gilirannya dapat diposisikan dalam konteks yang lebih luas dari diplomasi publik sebagai salah satu kegiatannya. Caranya yaitu memprakarsai dan memfasilitasi kegiatan lintas budaya, seperti pertukaran karya seni, praktik pendidikan, atau bahkan nilai-nilai sosial akan membantu menkonstruksi dan mempertahankan hubungan persahabatan antara negara-negara yang berbeda baik dari segi geografisnya maupun budayanya.

Hal ini juga berkorelasi dengan tulisan Joseph Nye yang mengatakan bahwa soft power yang mencakup budaya sebagai sumber daya yang menarik merupakan aspek integral dari diplomasi publik. Diplomasi budaya telah menjadi alat yang ampuh untuk mempromosikan pemahaman global dan kolaborasi di berbagai tingkat politik di dunia yang semakin terhubung. Meskipun diplomasi budaya selalu dilihat sebagai lingkup pemerintah nasional, organisasi sub-nasional-terutama kota-telah mulai menggunakannya sebagai instrumen taktis untuk meningkatkan daya tarik dan visibilitas di seluruh dunia<sup>108</sup>. Pemerintah daerah berinteraksi dengan negara lain melalui interaksi budaya, telah muncul sebagai hasil dari pergeseran paradigma ini, yang menawarkan peluang khusus untuk promosi kota dan pemosisian global. Di kawasan Asia, di mana kota-kota sedang mencari identitas unik di arena global karena meningkatnya urbanisasi dan ekspansi ekonomi menjadi sangat relevan.

Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, merupakan studi kasus yang menarik dalam penerapan diplomasi publik untuk tujuan pencitraan atau branding sebuah kota. Acara Surabaya Cross Cultural International Folk Art Festival (SCCIFAF), sebuah

---

Sonenshine, T. (2013). Bottom Line Diplomacy: Why Public Diplomacy Matters. <https://www.diplomacy.edu/resource/bottom-line-diplomacy-why-public-diplomacy-matters/>

<sup>108</sup> Acuto, M., & Rayner, S. (2016). City networks: Breaking gridlocks or forging (new) lock-ins? *International Affairs*, 92(5), 1147–1166. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12700>



perayaan budaya tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya, menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat menyelenggarakan acara budaya berskala besar untuk melestarikan warisan budaya sekaligus memproyeksikan citra kontemporer yang berorientasi kepada global. Inisiatif ini sejalan dengan apa yang disebut oleh para ahli sebagai “*Municipal Diplomacy*” atau “Diplomasi Kota”, di mana pusat-pusat kota secara aktif berpartisipasi dalam hubungan internasional melalui pertukaran budaya dan sosial. (Acuto et al., 2017). Festival ini berfungsi sebagai platform untuk pertukaran budaya, pengembangan ekonomi, dan pembangunan hubungan internasional, menjadikannya lensa yang ideal untuk memeriksa persimpangan antara para-diplomasi dan strategi pencitraan kota.

Tulisan ini ingin menganalisis bagaimana pemerintah kota Surabaya memanfaatkan kegiatan Cross Culture Festival 2023 sebagai alat diplomasi budaya dan branding kota melalui diplomasi publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menjelaskan pendekatan strategis yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan Surabaya melalui bantuan para aktor non-negara untuk menyukseskan acara Surabaya Cross Cultural International Folk Art Festival. Dengan mengkaji penyelenggaraan festival, partisipasi internasional, dan program budaya, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada literatur yang terus berkembang tentang diplomasi publik dan memberikan wawasan tentang bagaimana kota-kota menengah di negara-negara berkembang dapat secara efektif memanfaatkan acara kebudayaan untuk mendapatkan pengakuan internasional.

## **B. Diplomasi Publik Sebagai Kerangka Konseptual**

Diplomasi publik merupakan gagasan yang rumit dan memiliki banyak aspek yang telah mengalami perubahan luar biasa karena keadaan eksternal. Banyak ahli dan akademisi telah menyumbangkan pandangan mengenai Diplomasi Publik yang memperluas cakupan pemahaman konsep ini, terutama berkaitan dengan bagaimana upaya suatu negara diarahkan untuk menghasilkan dan memproyeksikan pengaruh terhadap komunitas asing. Dalam konteks proses komunikasi pemerintah, mengutip



Hans Tuch<sup>109</sup> (1990) memberikan landasan pemahaman yang fundamental. Dalam penelitiannya ia menekankan bahwa diplomasi publik merupakan proses komunikasi yang terstruktur dan strategis dari pemerintah kepada masyarakat internasional. Komunikasi ini tidak sekadar bersifat informatif, tetapi mencakup upaya komprehensif untuk menjelaskan berbagai aspek negara, mulai dari sistem nilai, institusi, hingga kebijakan-kebijakan strategis. Tujuannya yaitu menciptakan pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan tentang karakteristik dan kepentingan nasional suatu negara di mata dunia internasional. Mengutip dari Melissen (2005) mendefinisikan diplomasi publik sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memulai dialog dan membangun hubungan jangka panjang dengan publik asing<sup>110</sup>. Fokusnya adalah pada pengaruh terhadap opini publik yang dapat berdampak pada kebijakan luar negeri negara tersebut.

Mengutip penelitian dari Jan Mellisen (2006) menggambarkan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi di luar negeri dengan cara positif, sehingga mengubah cara pandang mereka terhadap suatu negara yang mencerminkan strategi untuk membentuk persepsi yang saling menguntungkan. Dan menurut Jay Wang (2006) melihat diplomasi publik sebagai konsep multi-dimensi yang mencakup promosi tujuan dan kebijakan negara, komunikasi nilai-nilai, serta peningkatan pemahaman bersama dan kepercayaan antara negara dan masyarakat. Diplomasi publik tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga berbagai aktor non-negara seperti NGO dan sektor swasta<sup>111</sup>.

Adapun beberapa definisi dari diplomasi budaya, seperti yang dikonseptualisasikan dalam para sarjana kontemporer, mewakili pendekatan multifaset untuk hubungan internasional yang memanfaatkan aset dan pertukaran budaya untuk mendorong saling pengertian dan membangun hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat. diplomasi budaya dapat didefinisikan sebagai intervensi sistematis pemerintah dalam seni, ilmu pengetahuan, dan ekspresi budaya lainnya untuk menciptakan dan mempromosikan identitas nasional di tingkat internasional

---

<sup>109</sup> Citra, H. (2009). Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 22(1), 12 pages. [https://journal.unair.ac.id/filerPDF/03\\_Hennida\\_DIPLOMASI\\_PUBLIK.pdf](https://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Hennida_DIPLOMASI_PUBLIK.pdf)

<sup>110</sup> Trisni, S., & Putri, A. (2023). Diplomasi Publik dan Soft Power: Sama atau Berbeda? *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.25077/ajis.12.1.1-12.2023>

<sup>111</sup> Citra, H. (2009). Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 22(1), 12 pages. [https://journal.unair.ac.id/filerPDF/03\\_Hennida\\_DIPLOMASI\\_PUBLIK.pdf](https://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Hennida_DIPLOMASI_PUBLIK.pdf)

(Zamorano, 2016). Diplomasi budaya sering digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat internasional melalui pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek budaya lainnya guna memperkuat pemahaman bersama antarbangsa. Lalu menurut Zhou et al, diplomasi budaya adalah pendekatan untuk mengembangkan kekuatan lunak dan pengaruh dengan mempromosikan budaya, nilai, dan gagasan suatu negara kepada khalayak asing melalui elemen dan pertukaran budaya yang menciptakan kesan positif.

Diplomasi ini melibatkan keterlibatan individu, organisasi, dan pemerintah asing dalam kerja sama dan pertukaran yang inklusif di bidang seni, pendidikan, ide, sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, adat istiadat, olahraga, dan bahasa. Tujuannya adalah membangun saling pengertian, kepercayaan, dan hubungan antarnegara dengan harapan mempengaruhi opini publik asing serta kebijakan yang menguntungkan kepentingan dan tujuan luar negeri suatu negara dalam jangka panjang.<sup>112</sup> Pendekatan ini menyoroti nilai narasi budaya dalam hubungan internasional karena memungkinkan negara-negara untuk berinteraksi dengan audiens di seluruh dunia sambil menampilkan diri mereka dengan cara yang positif. Negara-negara dapat meningkatkan status internasional mereka dan membangun forum komunikasi dan kolaborasi yang melintasi kesenjangan politik dan ekonomi dengan mendukung kegiatan budaya.

Diplomasi publik dan diplomasi budaya adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam promosi identitas suatu negara atau kota di arena internasional. Diplomasi publik berfokus pada upaya pemerintah untuk membentuk opini publik luar negeri melalui berbagai media, termasuk media sosial, acara budaya, dan program pertukaran, sementara diplomasi budaya berfokus pada peningkatan pemahaman dan hubungan antarbangsa melalui seni, pendidikan, dan tradisi. Keterkaitan keduanya terletak pada penggunaan budaya sebagai alat utama diplomasi publik untuk memperkenalkan nilai-nilai dan identitas lokal kepada dunia. Melalui kegiatan budaya seperti festival seni, pameran, dan pertunjukan, sebuah kota atau negara dapat membangun citra positif sekaligus menciptakan saluran komunikasi yang efektif antar masyarakat global. Misalnya, program residensi seniman yang diadakan oleh pemerintah kota tidak hanya menarik perhatian

---

<sup>112</sup> Zhou, J., Barnes, P., & Gustafsson, M. S. (2022). The Developing Role of Cultural Diplomacy in Soft Power? A Case Study of Japanese Cultural Promotion. 96. [www.liu.se](http://www.liu.se)



internasional tetapi juga mendekatkan seniman lokal dan global, menciptakan kesempatan untuk berbagi nilai dan memperkuat hubungan diplomatik<sup>113</sup>. Dalam era globalisasi, diplomasi publik memiliki urgensi tinggi karena informasi yang menyebar cepat melalui media digital semakin mempertegas pentingnya kemampuan sebuah kota untuk menampilkan citra positif.

Hal ini membantu menarik investasi asing, wisatawan, serta mendorong kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan<sup>114</sup>. Kota-kota seperti Paris dan Tokyo berhasil memanfaatkan diplomasi publik dengan baik, menjadikan diri mereka pusat seni dan budaya melalui berbagai program pertukaran dan festival internasional yang memikat audiens global.

Untuk meningkatkan daya tarik dan eksposur sebuah kota dalam skala global, maka melakukan sebuah branding kota memiliki urgensi tersendiri. Agar dapat menonjol dalam persaingan dan menarik talenta, investasi, dan pariwisata, kota harus menciptakan identitas yang khas. Mengintegrasikan berbagai elemen diperlukan untuk branding kota yang efektif, termasuk menyoroti atraksi alam, keunggulan kuliner, keragaman budaya, layanan publik yang lebih baik, dan langkah-langkah keamanan yang kuat<sup>115</sup>. Tujuannya dari branding itu sendiri adalah untuk menciptakan narasi yang menarik yang mencerminkan kekuatan dan nilai-nilai kota, sehingga mempengaruhi persepsi dan mendorong pengakuan internasional. Dengan memanfaatkan aset budaya dan ciri khasnya, kota dapat memposisikan diri mereka dengan baik di kancah global, berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kohesi sosial<sup>116</sup>.

### C. SCCF dan Diplomasi Publik Pemkot Surabaya

Surabaya Cross Cultural International International Folk Art Festival, atau juga dikenal dengan Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival (SCCIFAF) atau SCCF, adalah acara

---

<sup>113</sup> Fernández, S. M. G. (2021). the Role of the Cultural and Creative Industries in Cultural Diplomacy and Soft Power Between China and the European Union. *Janus.Net*, 12(1), 31–61. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.12.1.3>

<sup>114</sup> Isar, Y. R., & Triandafyllidou, A. (2021). Introduction to this Special Issue Cultural Diplomacy: What Role for Cities and Civil Society Actors? *International Journal of Politics, Culture and Society*, 34(4), 393–402. <https://doi.org/10.1007/s10767-020-09385-1>

<sup>115</sup> Zahrah, F. (2023). City Branding Dimensions, Strategies, and Obstacles: A Literature Review. *Jurnal Bina Praja*, 15(1), 101–109. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.101-109>

<sup>116</sup> Lucarelli, A., & Olof Berg, P. (2011). City branding: A state-of-the-art review of the research domain. *Journal of Place Management and Development*, 4(1), 9–27. <https://doi.org/10.1108/17538331111117133>

tahunan di Kota Surabaya yang merayakan seni dan budaya lintas negara<sup>117</sup>. Festival ini bertujuan mempromosikan keberagaman budaya dengan menghadirkan pertunjukan dari berbagai negara dan daerah di Indonesia, memperkuat hubungan antarbangsa melalui interaksi budaya, serta meningkatkan pariwisata dengan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Acara ini mencakup parade budaya dengan kostum tradisional, tarian, dan musik, pertunjukan seni seperti tari, musik, dan teater, workshop budaya, serta kuliner khas dari negara peserta, menjadikannya sarana mempererat hubungan diplomatik dan promosi kota. Tema utama Surabaya Cross Cultural International Folk Art Festival bervariasi setiap tahunnya, namun secara umum temanya selalu mengusung semangat persatuan dalam keberagaman budaya. Beberapa tema yang sering diangkat contohnya keharmonisan dalam keragaman, yang menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan perbedaan budaya secara damai; persaudaraan antarbudaya dengan tujuan membangun jembatan persahabatan antarnegara melalui seni dan budaya; pelestarian warisan budaya, yang menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya dari setiap negara; serta inovasi budaya, yang mendorong kreativitas dan inovasi dalam bidang seni dan budaya.

Pada tahun 2023, event tahunan ini digelar di Jalan Tunjungan Kecamatan Genteng Kota Surabaya pada tanggal 16-20 Juli setelah sebelumnya dihentikan akibat pandemi. Event budaya ini diikuti sebanyak delapan negara dan sembilan daerah di Indonesia<sup>118</sup>. Negara dan daerah yang turut memeriahkan Surabaya Cross Cultural International Folk Art Festival antara lain Yunani, India, Korea Selatan, Meksiko, Filipina, Sri Lanka, Uzbekistan, dan Prancis. Sementara itu, daerah di Indonesia yang berpartisipasi mencakup Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Mengwi (Bali), Kendari (Sulawesi Tenggara), Flores (NTT), DKI Jakarta, Banjarmasin (Kalimantan Barat), Bone (Sulawesi Selatan), Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kota Surabaya, serta Mojokerto (Jawa Timur)<sup>119</sup>.

---

<sup>117</sup> Hakim, A. (2023). *Wawali Surabaya: SCCIFAF 2023 jadi sarana pertukaran budaya*. ANTARA News, from <https://www.antaraneews.com/berita/3645357/wawali-surabaya-sccifaf-2023-jadi-sarana-pertukaran-budaya>

<sup>118</sup> Widiyana, E. (2023). *Surabaya Cross Culture 2023 Diikuti 8 Negara dan 9 Daerah, Peserta Ketagihan*. detikcom, from <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6825370/surabaya-cross-culture-2023-diikuti-8-negara-dan-9-daerah-peserta-ketagihan>

<sup>119</sup> Diagusty, H. F. (2023). *Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival 2023 Digelar Meriah Bak Pesta, Simak Keseruannya*. Jawa Pos, from <https://www.jawapos.com/surabaya->



Parade festival yang dibuka oleh Wali Kota Surabaya dan berlangsung selama 4 hari pada tanggal 16-20 Juli 2023 ini menampilkan beragam tarian, musik, dan kostum tradisional yang memukau para penonton Festival ini bukan hanya sekadar pertunjukan seni, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling mengenal dan menghargai keberagaman budaya. Melalui acara ini, Pemerintah Kota Surabaya berhasil menciptakan sebuah pesta budaya yang terkenal dan semakin memperkuat posisi Surabaya sebagai kota yang inklusif dan terbuka terhadap budaya-budaya dari berbagai belahan dunia.

Festival ini tidak hanya menjadi ajang seni dan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan antarnegara dan antarbudaya. SCCIFAF memberikan kesempatan kepada Surabaya untuk memperkenalkan kekayaan budayanya sekaligus membangun citra positif di mata dunia. Melalui acara ini, kota ini tidak hanya menjadi tuan rumah bagi beragam pertunjukan seni internasional, tetapi juga membuka jalan bagi pertukaran budaya yang berharga antara negara-negara peserta. SCCIFAF melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Dari pihak pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya memimpin penyelenggaraan festival ini dengan peran utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta menjalin kemitraan dengan negara-negara partisipan. Adapun aktor dari pemerintah seperti Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya bertanggung jawab untuk memilih tema, mengatur jadwal, dan mempromosikan festival kepada masyarakat luas. Peran dari Wali Kota Surabaya, sebagai wajah publik acara ini, turut memberi sambutan serta dukungan yang penting untuk menarik perhatian media dan publik.

Di luar kepentingan pemerintah, komunitas seni lokal dan organisasi internasional non pemerintah seperti CIOFF berpartisipasi aktif, dengan media lokal dan digital berperan dalam menyebarkan informasi agar festival ini dikenal luas, baik di dalam negeri maupun internasional. CIOFF sendiri adalah organisasi internasional dibawah naungan UNESCO yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2003<sup>120</sup>. CIOFF Indonesia berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari organisasi global CIOFF (Conseil

---

raya/011797292/surabaya-cross-culture-international-folk-art-festival-2023-digelar-meriah-bak-  
pesta-simak-keseruannya

<sup>120</sup> Widianingtyas, H. (2020). Misi CIOFF Indonesia Lestarian Tarian Daerah sambil Jaga Perdamaian Dunia. <https://kumparan.com/millennial/misi-cioff-indonesia-lestarian-tarian-daerah-sambil-jaga-perdamaian-dunia-1u1X7NJaFe4>

International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels), yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan saling pengertian antarbangsa melalui seni tradisional. CIOFF Indonesia menjalankan beberapa kegiatan utama yang berfokus pada promosi budaya Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah mengirim delegasi dari sekolah dan universitas di Indonesia untuk berpartisipasi dalam festival-festival internasional di bawah naungan CIOFF, di mana mereka dapat memperkenalkan tarian, musik, dan kesenian tradisional Indonesia kepada audiens global. Selain itu, CIOFF Indonesia juga secara aktif menyelenggarakan berbagai festival di dalam negeri<sup>121</sup>, mengundang penari dan musisi dari berbagai negara untuk turut serta dan berkolaborasi dengan seniman lokal.

Tidak hanya itu, CIOFF Indonesia menyediakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk mendalami serta melestarikan beragam tarian dan musik tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, dengan harapan agar warisan budaya ini terus berkembang dan dilestarikan oleh generasi muda. CIOFF Indonesia memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya Indonesia ke panggung internasional. Melalui partisipasi rutin dalam berbagai festival budaya di luar negeri, CIOFF Indonesia memperkenalkan keragaman seni dan tradisi lokal kepada komunitas global, sehingga memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara dengan warisan budaya yang kaya.

Selain itu, CIOFF Indonesia aktif dalam bidang pendidikan dan kolaborasi, bekerja sama dengan institusi pendidikan dan universitas untuk menanamkan nilai-nilai pelestarian budaya sejak dini. Melalui program-program khusus yang melibatkan sekolah-sekolah, organisasi ini berupaya mengajarkan pentingnya melestarikan seni dan tradisi lokal kepada anak-anak dan remaja, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus yang memahami dan menjaga warisan budaya bangsa. Tidak hanya itu, CIOFF Indonesia juga mendorong partisipasi dari berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya. Kolaborasi dengan komunitas lokal, seniman, dan organisasi budaya menciptakan ruang di mana setiap orang, dari berbagai latar belakang, dapat berperan aktif dalam menjaga serta memperkaya budaya tradisional. Kehadiran CIOFF Indonesia membawa dampak yang signifikan dalam pelestarian dan promosi budaya lokal.

---

<sup>121</sup> CIOFF Indonesia. <http://www.cioff-indonesia.org/>



Kembali ke konteks festival ini. CIOFF Indonesia memiliki berbagai kontribusinya di festival Surabaya Cross Culture ini. CIOFF Indonesia berperan dalam memfasilitasi kehadiran grup seni dari negara-negara yang diundang menjadi peserta festival, sehingga dapat menciptakan pertukaran budaya yang lebih luas. Selain itu, CIOFF Indonesia memiliki komitmen untuk membantu mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional dengan media festival ini, CIOFF akan mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkenalkan kesenian dan tradisi lokal kepada audiens global.

Hal ini sejalan dengan misi CIOFF yang tadi sudah dijelaskan yaitu untuk melestarikan dan mempromosikan seni rakyat di seluruh dunia<sup>122</sup>. Selain CIOFF Indonesia, banyak pihak dari non-pemerintah yang turut andil dalam festival ini seperti Komunitas Rumah Kreasi Teater Mata Flores, berbagai sanggar seni di Surabaya dan daerah sekitarnya, Komunitas Tari Remo dan Yosakoi, Delegasi Seni dari Daerah di Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu aktor yang lainnya seperti media massa atau media digital digunakan sebagai sarana promosi bagi festival ini.

Diplomasi publik yang dilakukan melalui SCCIFAF berdampak nyata bagi Surabaya dalam beberapa aspek. Festival ini berhasil menciptakan pertukaran budaya yang memperkaya pengalaman masyarakat Surabaya dan tamu internasional, dengan menghadirkan beragam seni dari berbagai negara. Selain itu, workshop yang diselenggarakan selama festival memungkinkan warga lokal untuk belajar langsung dari seniman asing, memberikan wawasan baru dan apresiasi lebih dalam terhadap seni tradisional. Festival ini juga menjadi alat promosi pariwisata yang efektif bagi Surabaya, meningkatkan kunjungan wisatawan selama acara berlangsung. Secara keseluruhan, SCCIFAF memperkuat relasi internasional Surabaya, tidak hanya dalam lingkup budaya, tetapi juga membuka peluang kerja sama di bidang ekonomi dan pendidikan di masa depan, sehingga menciptakan jaringan yang bermanfaat bagi kota ini dalam jangka panjang.

Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival (SCCIFAF) 2023 juga mencerminkan praktik diplomasi budaya yang efektif, yang berfokus pada penguatan hubungan antarnegara melalui seni dan budaya. Seperti yang sudah disampaikan

---

<sup>122</sup> Firdaus, J. (2023). Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival 2023 Suguhkan Tarian Yosakoi. <https://lenteratoday.com/surabaya-cross-culture-international-folk-art-festival-2023-suguhkan-tarian-yosakoi/>



sebelumnya bahwa festival ini diadakan dengan tujuan mempertemukan berbagai budaya dari delapan negara peserta. Dalam festival ini, Pemkot Surabaya berperan sebagai fasilitator interaksi antara peserta dari berbagai negara. Mengutip dari Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Surabaya kepada dunia dengan melalui penyelenggaraan pertunjukan seni dan workshop yang melibatkan masyarakat lokal dan peserta internasional, pemerintah kota mampu menciptakan kesempatan bagi warga untuk belajar dan berinteraksi dengan budaya asing<sup>123</sup>. Ini tidak hanya meningkatkan apresiasi terhadap keberagaman tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata. Selain itu, Pemkot Surabaya juga memiliki komitmen untuk menjaga festival ini tetap ada di kemudian tahun dan berharap dapat diadakan secara rutin di tahun-tahun mendatang.

Dampak dari SCCIFAF terlihat dalam upaya pemerintah kota dalam melakukan penguatan kerjasama internasional. Festival ini membuka peluang bagi Surabaya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara peserta dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pariwisata, dan ekonomi yang melibatkan para seniman dan budayawan dari luar negeri<sup>124</sup>. Festival ini mendorong kolaborasi yang dapat menghasilkan inovasi dalam seni dan budaya. Selain itu, kegiatan seperti city tour dan workshop seni memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk belajar langsung dari budaya asing, meningkatkan pengetahuan dan apresiasi terhadap keberagaman.

Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival (SCCIFAF) 2023 memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap citra Kota Surabaya. Pertama, festival ini berhasil meningkatkan visibilitas Surabaya di tingkat internasional. Dengan melibatkan delapan negara dan sembilan daerah di Indonesia, maka acara ini bakal memperkenalkan keragaman budaya yang dimiliki Kota Surabaya kepada audiens global. Adanya kegiatan festival seperti parade budaya dan pertunjukan seni yang melibatkan peserta dari berbagai negara akan menciptakan kesan positif tentang potensi budaya yang dimiliki Surabaya sebagai kota

---

<sup>123</sup> Wicaksono, Y. (2023). *Surabaya Cross Culture Folk Art Festival 2023*. <https://www.superradio.id/surabaya-cross-culture-folk-art-festival-2023/>

<sup>124</sup> Manumoyoso, A. H. (2023). *Hidupkan Lagi Surabaya Cross Culture*.



yang terbuka dan ramah terhadap keragaman, serta mampu menyelenggarakan acara berskala internasional. Dampak yang kedua, SCCIFAF 2023 dapat memperkuat identitas budaya di Kota Surabaya. Melalui pertunjukan seni tradisional dan modern, festival ini tidak hanya melestarikan budaya lokal tetapi juga menempatkan Surabaya sebagai pusat kegiatan seni dan budaya. Penampilan tari dari berbagai daerah dan negara, seperti Tari Remo dan Yosakoi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2023, menunjukkan bahwa Surabaya tidak hanya kaya akan tradisi tetapi juga inovatif dalam mengadaptasi seni. Hal ini berkontribusi pada pembentukan citra Surabaya sebagai kota yang menghargai dan merayakan perbedaan budaya. Ketiga, festival ini memiliki dampak signifikan terutama pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Dengan menarik pengunjung dari luar kota dan luar negeri, SCCIFAF 2023 berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke Surabaya. Aktivitas selama festival, seperti city tour ke berbagai landmark kota, juga mempromosikan destinasi wisata lokal yang mungkin sebelumnya kurang dikenal. Dengan demikian, festival ini tidak hanya memperkuat citra kota tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata.

## D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Surabaya Cross Cultural International Folk Art Festival adalah contoh nyata bagaimana diplomasi publik dapat dimanfaatkan untuk membangun citra positif suatu kota serta memperkuat hubungan internasional melalui kegiatan budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Acara festival ini tidak hanya meningkatkan daya tarik pariwisata, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dengan menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Melalui tema-tema yang diusung setiap tahunnya, festival ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, pelestarian warisan budaya, dan inovasi dalam seni.

Dengan adanya Diplomasi publik dan budaya, hal ini menjadi bukti sebagai alat strategis yang efektif dalam membangun pemahaman dan kepercayaan antara negara. SCCIFAF tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk pertukaran budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai lokal kepada audiens global. Festival ini melibatkan partisipasi internasional dari

berbagai negara, yang memperkaya pengalaman budaya dan memperkuat ikatan diplomatik.

Meskipun penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang SCCIFAF 2023, Penelitian ini mungkin tidak mencakup semua aspek festival, seperti interaksi antara peserta dari berbagai negara atau dampak sosial yang lebih luas di masyarakat Surabaya. Lalu penelitian ini membutuhkan analisis lebih mendalam tentang bagaimana elemen-elemen budaya tertentu mempengaruhi hubungan antarnegara.



# BAB 12

## ANALISIS BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) JAWA TIMUR DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI TAIWAN TAHUN 2022

*Sulthan Farrel Wicaksono*

### A. Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dikenal sebagai pejuang devisa negara, karena PMI turut meningkatkan perekonomian negara dalam bentuk remitansi. Remitansi, sendiri adalah transfer uang dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke penerima di negara asalnya. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, sepanjang 2018 para PMI dari berbagai daerah di provinsi NTB telah mengirim remitansi sekitar Rp 1,3 Triliun, sedangkan remitansi sepanjang 2020 berjumlah Rp 1,1 Triliun. Itu artinya remitansi PMI NTB mengalami penurunan selama masa pandemi Covid-19.<sup>125</sup>

Taiwan menjadi salah satu negara penempatan PMI terbanyak yang memiliki resiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Dapat dilihat dari sektor kerja yang ditawarkan, rata-rata PMI yang bekerja di Taiwan menempati sektor formal di pabrik dan konstruksi, maupun sektor informal seperti caregiver di panti maupun di rumah tangga. Merujuk data Kemenaker 2023, 70% PMI di Taiwan bekerja di sektor informal.

Dalam bekerja, PMI akan berhadapan dengan peralatan dan benda yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi, karena manufaktur tidak jauh dari benda-benda berat maupun benda dengan tegangan listrik yang tinggi. Pada tahun 2021, PMI yang mengalami kecelakaan kerja berjumlah 8 orang, begitu pula dengan

---

<sup>125</sup> Saipul Hamdi, dkk. 2023. *Remitansi Pekerja Migran pada Masa Pandemi Covid-19 di Lombok Timur*. Jurnal Kebijakan Pembangunan Volume 18 Nomor 2 Desember 2023.

tahun sebelumnya di 2020. Namun, pada tahun 2022, kasus kecelakaan kerja ini meningkat menjadi 21 kasus, dimana kasus tersebut didominasi dari negara penempatan Taiwan.<sup>126</sup> Dari kasus tersebut, BP2MI sebagai lembaga non kementerian yang bergerak di bidang keamanan PMI memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan yang terjamin pada PMI, berupa diwajibkannya untuk seluruh PMI memiliki BPJS.

## B. Kerja Sama Indonesia dan Taiwan

BP3MI Jawa Timur sebagai balai pelayanan perlindungan PMI bagian Jawa Timur, sudah menjadi kewajiban untuk melakukan pelayanan pemberangkatan PMI dari awal proses hingga keberangkatan PMI, sampai fasilitasi pemulangan PMI ke tempat asal. Dari banyaknya negara tujuan penempatan, Taiwan merupakan salah satu tujuan negara penempatan PMI untuk bekerja. Taiwan sendiri menjadi negara dengan pengiriman PMI yang terbanyak per-tahun 2023, yakni sebanyak 82,216. Angka tersebut mengalami peningkatan dari pengiriman PMI negara tujuan Taiwan di tahun sebelumnya yang berada di angka 53.459 per-tahun 2022.<sup>127</sup>

Indonesia dan Taiwan sendiri memiliki hubungan kerjasama, namun keduanya belum memiliki hubungan diplomatik yang resmi. Kerjasama antara dua negara tersebut diwujudkan dengan pendirian perusahaan swasta di masing- masing negara sebagai wujud adanya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Taiwan. Didirikannya KDEI dan TETO adalah sebagai wujud hubungan antara Indonesia dan Taiwan dalam lembaga ekonomi non-pemerintah, dan berkaitan dengan tersebut dikenal dengan Skema P to P atau SP2T.

Skema P to P atau SP2T merupakan istilah yang dikenal untuk menggambarkan penempatan PMI yang diselenggarakan oleh P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) untuk menempatkan PMI kepada perusahaan swasta yang baik berbadan hukum (perusahaan) ataupun individu yang ada di negara penempatan.<sup>128</sup> Penempatan tersedia telah difasilitasi oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), akan tetapi

---

<sup>126</sup> BP2MI. Data Penempatan dan Pelindungan PMI. Pusat Data dan Informasi BP2MI. (bp2mi.go.id)

<sup>127</sup> TETO. 2016. Kondisi Hubungan Bilateral antara Taiwan dan Indonesia. Kondisi hubungan bilateral antara Taiwan dan I... - Taipei Economic and Trade Office, Jakarta, Indonesia 駐印尼台北經濟貿易代表處 (roc-taiwan.org)

<sup>128</sup> BP2MI. Skema Penempatan. BP3MI PROVINSI SUMATERA BARAT (bp2mi.go.id)



penempatan ini juga melibatkan pihak swasta dari Indonesia atau yang dikenal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan negara penerima. CPMI yang akan bekerja di luar negeri akan diarahkan ke situs resmi BP2MI yaitu [siskop2mi.bp2mi.go.id](http://siskop2mi.bp2mi.go.id). Berjalannya skema SP2T memiliki signifikansi terhadap banyaknya PMI dengan negara tujuan Taiwan tiap tahunnya,

KDEI atau singkatan dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei merupakan salah satu lembaga ekonomi non-pemerintah Indonesia yang terletak di Taipei, Taiwan yang bertugas untuk mewakili serta melindungi kepentingan ekonomi warga Indonesia yang ada di Taiwan. Selain itu, KDEI sendiri memberikan pelayanan informasi serta membantu kelancaran pemasaran komoditas ekspor Indonesia ke Taiwan.<sup>129</sup> Dalam melakukan tugasnya, KDEI memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan pada PMI yang sakit maupun mengalami kecelakaan kerja, dan juga memenuhi hak finansial PMI yang belum terpenuhi di Taiwan. Selama bekerja di Taiwan, PMI yang memiliki keluhan maupun aduan terkait paspor, seperti paspor hilang, penambahan nama anak di paspor, penggantian, hingga perpanjangan juga harus melaporkannya kepada KDEI untuk diselesaikan. Agensi swasta yang mengirimkan PMI ke Taiwan memiliki kewajiban untuk memastikan PMI untuk mengecek masa berlaku kepesertaan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Apabila masa berlaku kartu jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan tersebut sudah kadaluarsa, maka KDEI memiliki kewajiban untuk memfasilitasi PMI untuk mendaftarkan kembali kepesertaan jaminan sosial tersebut. Pentingnya KDEI untuk memastikan masing-masing PMI yang berangkat bekerja ke Taiwan untuk melihat masa berlaku kartu jaminan sosial BPJS sebagai upaya mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti sakit, meninggal dunia, kecelakaan kerja, PHK sepihak, dan permasalahan lainnya.

### C. Manfaat Jaminan Sosial Bagi PMI

Masalah yang kerap dialami oleh PMI terkait jaminan sosial yaitu terkait dengan proses jaminan kecelakaan kerja yang dialami oleh PMI yang bekerja di bidang manufaktur. Tidak sedikit juga PMI bidang kerja informal seperti profesi asisten rumah tangga

---

<sup>129</sup> KDEI. 2020. Tugas Pokok dan Fungsi KDEI Taipei. KDEI Taipei - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia ([kdei-taipei.org](http://kdei-taipei.org))

yang mengalami kecelakaan kerja. Adanya proses perawatan dan pengobatan yang dibutuhkan oleh PMI tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban untuk menanggung biaya yang timbul sebagaimana mestinya.<sup>1</sup> Manfaat yang berhak diterima oleh PMI yang terdaftar dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan antara lain mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian yang terjadi saat sedang menjalani persiapan atau pelatihan, selama berada di negara penempatan kerja, sampai dengan kembali ke Indonesia setelah masa kerja berakhir.

BPJS atau singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan salah satu badan asuransi Indonesia yang bertugas untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia, bukan hanya melindungi fisik saja namun hingga ke kesehatan mental. Jaminan sosial adalah salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi CPMI sebelum bekerja di negara penempatan, guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja maupun sakit di negara penempatan. Pada 2018, aduan PMI terbanyak adalah terkait gaji tidak dibayar oleh majikan, kecelakaan kerja, hingga pelecehan seksual. PMI yang sudah memiliki jaminan sosial dapat mengajukan permohonan tindakan atas keluhan yang dialami terkait gaji tidak dibayar, sakit, kecelakaan kerja dan kasus lainnya kepada KDEI guna dilakukan tindakan dan jalan keluar permasalahan. Dari kasus tersebut, BP3MI Jawa Timur sebagai lembaga non kementerian yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dalam meningkatkan perlindungan PMI yang bekerja di Taiwan dengan meningkatkan jaminan sosial PMI, sehingga apabila terdapat kasus yang dialami oleh PMI dengan asal tempat daerah Jawa Timur, BP3MI Jawa Timur memiliki kewajiban sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan dan mengatasi permasalahan PMI.

Manfaat yang didapatkan PMI ketika memiliki jaminan sosial sangat bermacam-macam. Jaminan sosial tersebut melingkupi perlindungan sebelum dan setelah bekerja. PMI mendapatkan perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis mencakup pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap, perawatan intensif, penunjang diagnostik, pengobatan, pelayanan khusus, alat kesehatan dan implan, jasa dokter/medis, operasi, transfusi darah serta rehabilitasi medik.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Ratna Sari Yunita. 2023. "Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Jamsostek* Volume 1 Nomor 2, Desember 2023.



Manfaat tersebut dapat didapatkan CPMI dan PMI apabila terbukti mengalami resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.

## D. Kecelakaan Kerja Pada PMI

PMI yang bekerja di Taiwan umumnya bekerja di Sektor formal daripada sektor non formal. Dalam penempatan kerja PMI dimanapun itu, terdapat dua kategori penempatan kerja, yaitu sektor formal dan non formal. Sektor formal merupakan sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan di bawah naungan pabrik maupun perusahaan yang pekerjaannya mengandalkan fisik. Kebanyakan dari PMI yang bekerja di Taiwan bekerja di bidang manufaktur, yang langsung berhadapan dengan alat-alat berat dan juga beberapa bekerja tidak jauh dari risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Tidak hanya sektor formal yang terlihat sangat berat dan memiliki risiko tinggi, pun dengan PMI yang bekerja di sektor non-formal juga memiliki kemungkinan kecelakaan kerja. PMI yang bekerja di sektor non-formal biasanya bekerja sebagai *caregiver*, *house maid*, *nursing home*, *housekeeper*, *restaurant worker* dan lainnya.<sup>131</sup> Walaupun resiko dari sektor non-formal ini tidak begitu tinggi, kemungkinan kecelakaan dapat terjadi.

Seperti contoh kasus yang baru saja terjadi, yakni pada 10 Oktober 2024, kecelakaan kerja pada PMI di Taipei, menimpa dua PMI di dua tempat kerja terpisah yang ada di pabrik Yunlin pada Kamis pagi di tanggal tersebut. Insiden tersebut telah melukai satu PMI dan menewaskan satu wanita, pemadam kebakaran melaporkan.<sup>132</sup> Departemen Pemadam Kebakaran Kabupaten Yunlin menerima laporan dari masyarakat setempat mengenai seorang PMI yang terjebak di sebuah pabrik di Kota Douliou kabupaten tersebut. Menurut laporan tersebut, ia tertimbun pasir dan batu hingga hanya bagian kepalanya saja yang terlihat, namun pekerja tersebut masih dalam keadaan sadar. Para petugas membantu pihak pabrik untuk membuka mesin tersebut dan segera mengevakuasi tubuh wanita tersebut, yang kemudian diserahkan kepada kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti. Lin Tsung-wei, seorang pejabat Administrasi Keselamatan Kerja dan Kesehatan Taiwan, mengatakan bahwa pabrik di Douliu tersebut telah didenda NT\$300.000 (Rp150 juta). Lin mengatakan bahwa mesin tersebut tidak dilengkapi dengan pagar pengaman yang memadai dan

<sup>131</sup> BP2MI. Data Penempatan dan Pelindungan PMI. Pusat Data dan Informasi BP2MI. (bp2mi.go.id)

<sup>132</sup> Flor Wang, dkk. 2024. <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202410105001>.

seharusnya dimatikan sebelum Huang mencoba memperbaikinya. Kecelakaan yang dialami PMI ini dapat mendapatkan fasilitas kesehatan dan perawatan, bahkan pemulangan jenazah dengan adanya BPJS yang mereka dapatkan. Hal tersebut guna melindungi kemungkinan terburuk lainnya.

## E. Peran BP3MI Jawa Timur

BP3MI Jawa Timur yakni balai pelayanan yang terletak di enam kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Malang, Madiun, Banyuwangi dan Pamekasan menyediakan pelayanan bagi masyarakat setempat yang ingin bekerja di luar negeri. BP3MI Jawa Timur sendiri merupakan lembaga nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan memiliki perusahaan perpanjangan tangan dari BP2MI yaitu P3MI (Perusahaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Taiwan menjadi negara dengan penempatan PMI terbanyak dari Indonesia, dengan kurang lebih di angka 70,057 per-Oktober 2023.

Mengetahui banyaknya WNI yang bekerja di Indonesia sebagai PMI, pemerintahan Taiwan mengistimewakan Indonesia sebagai pengirim pekerja migran terbanyak, dengan bukti membuka lapangan pekerjaan melalui Program *Special Placement Program to Taiwan* (SP2T), yang merupakan cara pemerintah menempatkan CPMI lewat *Direct Hiring Service Centre* (DHSC) Taiwan. DHSC sendiri merupakan Badan Pelayanan milik Pemerintah Taiwan di bawah koordinasi *Ministry of Labour*. Program yang diadakan oleh pemerintah Taiwan ini dalam rangka memberantas praktek jual beli Job / fee agency yang membebani Pekerja Migran Indonesia (PMI).<sup>2</sup> Selain itu, Taiwan juga menjadi salah satu negara di Asia Timur yang memiliki undang-undang yang jelas dalam hal perlindungan ketenagakerjaan dari luar negeri.

Dengan banyaknya pengiriman PMI, Indonesia dan Taiwan memperat kerjasama hubungan antar negara dengan mengadakan KDEI sebagai kantor perlindungan PMI di Taiwan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI dengan Pemerintah Taiwan terus bekerja sama untuk meningkatkan berbagai aspek perlindungan bagi PMI dan peningkatan kesejahteraan bagi PMI yang bekerja di Taiwan. Melihat jumlah angka PMI yang bekerja di Taiwan, Indonesia mewajibkan kepada seluruh PMI untuk memiliki BPJS atau kartu jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagai jaminan apabila terjadi hal



yang tidak diinginkan ketika bekerja di negara penempatan. Kewajiban PMI untuk memiliki BPJS ini adalah guna mengantisipasi terjadinya sakit, kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau bahkan mendapatkan perlakuan tidak pantas dari majikan.

Maka dari itu, BP3MI Jawa Timur sebagai pengirim PMI terbanyak di Indonesia selalu memastikan serta mengingatkan kewajiban tiap PMI untuk memiliki BPJS ketika sebelum memverifikasi dokumen lainnya. Namun kenyataannya, masih banyak PMI yang belum memahami bagaimana sistem BPJS ini, dan banyak PMI yang tidak paham bagaimana sistem jaminan sosial mereka diperpanjang dikarena telah habis masanya, mengingat masa tersebut mengikuti hitungan kontrak kerja PMI di negara penempatan.<sup>3</sup> Contoh permasalahan yang pernah terjadi oleh PMI yang bekerja di sektor perikanan mengalami kebijakan buruh migran di Taiwan berkaitan dengan penyalahgunaan buruh dengan cara memaksakan buruh migran menandatangani kontrak kerja yang bahkan buruh migran itu sendiri tidak mengetahui apa yang harus ditandatangani, tanpa informasi yang kurang lengkap dan terkadang dalam bahasa asing yang tidak dapat dimengerti oleh PMI.

Peristiwa kericuhan antarkelompok di Taiwan ini kemudian menjadi dorongan bagi BP2MI maupun BP3MI Jawa Timur untuk meningkatkan keamanan PMI melalui jaminan sosial, terlebih PMI yang terletak di negara penempatan Taiwan sebagai negara tujuan PMI terbanyak. Kasus yang terjadi ini merupakan kejadian yang sangat tidak diduga dalam menjalankan pekerjaan, oleh karenanya PMI memiliki kewajiban untuk memiliki kartu jaminan sosial guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja seperti yang dialami oleh Almarhum Jaenal Fanani. BP3MI Jawa Timur memiliki peran yang sangat besar untuk meningkatkan jaminan sosial PMI, karena jumlah PMI asal Jawa Timur merupakan angka terbanyak di Indonesia. Oleh karenanya, fasilitasi aduan PMI menjadi sebuah celah untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan keamanan PMI, dan jaminan sosial menjadi kartu jaminan apabila PMI mengalami kecelekaan kerja, sakit, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar atau bahkan PMI meninggal dunia.

## F. Kesimpulan

Banyaknya PMI yang bekerja di Taiwan merupakan gambaran bahwa Indonesia dan Taiwan memiliki hubungan kerjasama yang baik. Selain itu, dalam mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak

diinginkan, maka didirikan KDEI sebagai lembaga non kementerian Indonesia yang memiliki tugas salah satunya untuk melakukan perlindungan PMI yang bekerja di Taiwan. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI maupun BP3MI Jawa Timur sebagai balai yang bertanggung jawab mewakili BP2MI yang berlokasi di Jawa Timur, dengan Pemerintah Taiwan terus bekerja sama untuk meningkatkan berbagai aspek perlindungan bagi PMI dan peningkatan kesejahteraan bagi PMI yang bekerja di Taiwan.

Kecelakaan kerja merupakan sebuah hal yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi PMI yang bekerja jauh dari keluarga dan berekspektasi membiayai dan menafkahi keluarganya. Tidak bisa dibayangkan, apabila terdapat PMI yang mengalami kecelakaan dalam bekerja, akan bagaimana nasib PMI tersebut dan keluarganya. Dengan kejadian kasus tersebut, BP2MI mewajibkan seluruh PMI yang akan bekerja dimanapun untuk mendapatkan fasilitas keamanan PMI ketika bekerja, salah satunya dengan cara memiliki kartu akses jaminan sosial ketenagakerjaan yang biasa dikenal BPJS. BPJS sendiri menjadi peran penting akan keselamatan PMI ketika bekerja di negara penempatan, yakni sebagai antisipasi apabila PMI sakit, mengalami kecelakaan kerja, keamanan terganggu, dan lain sebagainya. BP3MI Jawa Timur sebagai balai pelayanan PMI yang berada di Jawa Timur berkewajiban melindungi PMI yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur untuk bekerja di luar negeri, dan memastikan segala keselamatan serta kesehatan PMI di negara penempatan, khususnya Taiwan yang menjadi negara tujuan bekerja PMI terbanyak.



# BAB 13

## UPAYA PROMOSI KERANGKA KERJA SENDAI 2015-2030 OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MITIGASI BENCANA ALAM PADA FORUM UCLG ASPAC TAHUN 2019

*Yoga Jahfal*

### A. Pendahuluan

Di Indonesia Kota Surabaya merupakan kota metropolis kedua terbesar dengan jumlah populasi yang sangat tinggi dan padat, yakni sebesar 3.158.943 jiwa pada tahun 2019. Secara geografis dan topografi Kota Surabaya berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah Timur dan Utara, sehingga kondisi tanah di Kota Surabaya memiliki bentuk yang landai di kawasan utaranya dan masuk dalam kategori dataran rendah. Dengan adanya kondisi tersebut Kota Surabaya mempunyai tingkat rawan bencana yang sangat tinggi, sehingga Pemerintah Kota Surabaya harus mempunyai kesiapsiagaan dalam melakukan mitigasi bencana dan manajemen bencana. Seperti pada umumnya Kota Surabaya mempunyai Unit Pelayanan Teknis mandiri dalam mengatasi permasalahan bencana berupa pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, akan tetapi dalam pelaksanaan mitigasi bencana memiliki respons waktu yang lambat sehingga hal ini menjadi faktor utama bertambahnya korban dalam suatu kejadian bencana alam ditambah teknologi yang kondisi kota yang masih belum memungkinkan untuk siap siaga bencana.

Dalam mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 sebagai usaha Pemerintah Kota Surabaya dalam meminimalisir risiko bencana alam dan jumlah korban yang diakibatkan dari bencana alam di perkotaan, yang dimana gagasan tersebut tidak hanya berisikan mitigasi dan penanggulangan bencana akan tetapi juga membahas langkah pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota pasca terjadinya bencana menggunakan program pembangunan berkelanjutan. Kerangka Kerja Sendai merupakan sebuah instrumen internasional turunan dari Kerangka Aksi Hyogo (HFA) yang dibentuk pada 2005-2015 yang bertujuan membangun ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap terjadinya bencana alam. Instrumen ini merupakan hasil diskusi dari konsultasi para tenaga ahli dan pemangku kepentingan yang dimulai pada bulan Maret 2012 dan negosiasi antar pemerintah di dunia yang dilaksanakan bulan Juli 2014 hingga Maret 2015, yang didukung oleh *United Nation Office For Disaster Risk Reduction* atas permintaan Majelis Umum PBB.<sup>133</sup> Dalam implementasinya terdapat 7 target utama, dengan target keberhasilan capaian pada tahun 2030.

Di Kota Surabaya hadirnya Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Target E memiliki dampak yang sangat besar, hal ini dapat dilihat dari kesiapsiagaan Kota Surabaya dalam menghadapi berbagai bencana di tengah padatnya populasi perkotaan. Selain itu implementasi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 juga sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan-peningkatan infrastruktur kota, penggunaan teknologi dan pengembangan edukasi yang digunakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis terkait, sehingga Pemerintah Kota dan Unit Pelaksanaan Teknis terkait dapat bekerja sama sehingga lebih mudah melakukan peringatan dini terhadap masyarakat pada saat terjadinya bencana dan mendapatkan data yang lebih akurat yang bersifat *real-time*.

Keberhasilan yang dicapai oleh Kota Surabaya dalam melaksanakan Implementasi Kerangka Kerja Sendai Target E menumbuhkan citra baru di mata internasional, sehingga pencapaian tersebut memberikan kesempatan bagi Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan *United Cities and Local Governments In Asia Pacific* atau UCLG ASPAC dalam melakukan promosi instrumen tersebut khususnya di Kawasan Asia Pasifik. Mengingat Kawasan Asia Pasifik merupakan sebuah kawasan yang rawan akan terjadinya bencana dan padat populasi, sehingga dengan adanya Kerangka Kerja Sendai Pemerintah Lokal atau Daerah dapat lebih siap dalam menghadapi segala bentuk bencana alam khususnya di lingkungan perkotaan. *United Cities and Local*

---

<sup>133</sup> United Nations Office For Disaster Risk Reduction 2015-2030. n.d. "What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction?" UNDRR. diakses pada May 25, 2024. <https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework>.



*Governments In Asia Pacific Council Meeting and Disaster Risk Reduction and Management Forum* Tahun 2019 merupakan sebuah forum pertemuan para anggota UCLG ASPAC yang membahas regulasi dan kebijakan organisasi, pada tahun ini berfokus pada peran Pemerintah Lokal atau Daerah dalam mengatasi risiko bencana, yang bertujuan mempercepat implementasi Kerangka Sendai untuk Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana (DRRM).<sup>134</sup> Upaya promosi dan kontribusi yang dilakukan Kota Surabaya dalam forum internasional *United Cities and Local Governments In Asia Pacific Council Meeting and Disaster Risk Reduction and Management Forum* Tahun 2019 melalui sambutan Walikota Surabaya, yang pada saat itu juga menjabat sebagai Presiden *United Cities and Local Governments In Asia Pacific* di Indonesia.

Berdasarkan pada paparan di atas, maka tulisan ini mencoba menjelaskan lebih jauh tentang upaya promosi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mitigasi bencana alam di forum UCLG ASPAC Tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk dengan tujuan agar pembaca memahami secara lebih jelas apa saja usaha-usaha promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam konteks Kerangka Kerja Sendai 2015-2030.

Dalam artikel “***Upaya Promosi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam Mitigasi Bencana Alam pada Forum UCLG ASPAC Tahun 2019***” penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, hal ini mengacu kepada rumusan masalah yang menggunakan kata tanya ‘bagaimana’ untuk menjawab problematika yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah induktif, yaitu, penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka dengan melakukan pencarian referensi dalam bentuk buku, artikel, dan jurnal ilmiah, selain itu penulis juga berupaya menggunakan situs resmi dari unit analisis yang dibahas serta memanfaatkan media informasi online lainnya.

---

<sup>134</sup> Annisa, Jihan. 2019. “Kerja Sama Internasional Pemerintah Kota Surabaya dengan United Cities and Local Government in Asia Pacific (UCLG ASPAC) 2016-2018.” UNS Institutional Repository. diakses pada 25 Mei <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/73579/Kerja-Sama-Internasional-Pemerintah-Kota-Surabaya-Dengan-United-Cities-And-Local-Governments-In-Asia-Pacific-UCLG-ASPAC-Tahun-2016-2018>



## B. Konsep Upaya Promosi

Dalam mewujudkan kepentingannya, Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan upaya promosi yang berkolaborasi dengan *United Cities and Local Government in Asia Pacific* dalam *United Cities and Local Government in Asia Pacific Council Meeting and Disaster Risk Reduction and Management Forum* Tahun 2019. Promosi merupakan aspek bauran pemasaran yang berhubungan dengan teknik-teknik yang paling efektif untuk menjual suatu produk. Promosi merupakan bagian dari bauran komunikasi untuk menyampaikan informasi produk kepada konsumen dan pihak lain yang berinteraksi dengan perusahaan. Implementasi upaya promosi Kerangka Kerja Sendai yang dilakukan Kota Surabaya dalam forum internasional yang diadakan oleh *United Cities and Local Government in Asia Pacific* bertujuan meningkatkan kesadaran Pemerintah Lokal atau Daerah dalam melaksanakan manajemen tanggap bencana alam, khususnya di lingkungan perkotaan dengan padat penduduk.

Upaya promosi yang dilakukan oleh Walikota Surabaya melalui sambutannya dalam forum internasional *United Cities And Local Government In Asia Pacific Council Meeting And Disaster Risk Reduction And Management Forum* Tahun 2019 dinilai sangat inovatif dalam memperkenalkan Kota Surabaya di mata dunia melalui berbagai forum kerjasama salah satunya dalam forum internasional *United Cities And Local Government In Asia Pacific Council Meeting And Disaster Risk Reduction And Management Forum* Tahun 2019, yang dimana Walikota Surabaya Tri Rismaharini memperkenalkan Kerangka Sendai sebagai salah satu konsep pengurangan bencana 2015-2030 dalam menghadapi bencana alam di perkotaan.

## C. Konsep Kerangka Kerja Sendai atau *Sendai Framework For Disaster Risk Reduction 2015-2030*

Kerangka Kerja Sendai dibentuk di Sendai, Jepang pada tahun 2015. Kerangka Kerja Sendai merupakan sebuah instrumen internasional dalam Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, yang mana kesepakatan besar pertama dalam agenda pembangunan pasca-2015 dan memberikan tindakan nyata kepada Negara-negara Anggota untuk melindungi kemajuan pembangunan dari risiko



bencana.<sup>135</sup> Dalam proses implementasinya Kerangka Kerja Sendai di kolaborasikan dengan berbagai agenda internasional yang ditargetkan pada tahun 2030, sehingga terdapat beberapa fokus dalam instrumen internasional tersebut, seperti: memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko, investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan, meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk tanggapan yang efektif dan membangun kembali menjadi lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan konstruksi. Terdapat 7 target utama dalam Kerangka Kerja Sendai, yaitu:

1. Mengurangi angka kematian akibat bencana secara global.
2. Mengurangi jumlah orang yang terdampak bencana secara global.
3. Mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana terkait PDB.
4. Mengurangi kerusakan infrastruktur kritis dan gangguan layanan dasar.
5. Meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal.
6. Meningkatkan kerjasama internasional untuk negara berkembang untuk mendukung pelaksanaan kerangka kerja ini.
7. Meningkatkan akses ke sistem peringatan dini dan informasi risiko bencana bagi masyarakat.

#### **D. United Cities and Local Government in Asia Pacific Council Meeting and Disaster Risk Reduction and Management Forum 2019**

*United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019 and Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Forum*, merupakan serangkaian forum internasional *United Cities Local and Local Government In Asia Pacific* yang digelar di Mekati, Filipina. Forum ini bertema “Membangun Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan” dengan diikuti kurang lebih 200 peserta dan salah satunya Kota Surabaya. Dalam forum internasional tersebut Walikota Surabaya memberikan sambutan selaku Presiden *United Cities Local and Local Government In Asia Pacific*.

---

<sup>135</sup> Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. 2019. *Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030*. Indonesia: Badan Nasional Penanggulangan Bencana. p. 4

Surabaya menjadi kota yang dijadikan percontohan dalam penerapan Kerangka Kerja Sendai dalam menghadapi bencana alam di perkotaan. Dalam forum tersebut para pembicara dan audiens berharap diadakannya forum ini dapat melindungi masyarakat dari bencana alam di perkotaan, selain itu dalam forum ini juga membahas terkait instrumen keuangan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan PRB. Adapun narasumber dalam forum tersebut adalah Dr. Chandra Bahadur Shrestha yang merupakan Otoritas Rekonstruksi Nepal. Dalam Pembahasan forum tersebut para narasumber dan audiens juga diperkaya dengan dua diskusi panel. Diskusi panel pertama membahas terkait korelasi antara strategi PRB nasional dan lokal dalam percepatan pencapaian Target E Kerangka Sendai, sedangkan diskusi panel kedua berfokus pada rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Adapun ruang lingkup dalam diskusi tersebut mencakup perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah lokal, dan masyarakat sipil.

## E. Teori Manajemen Perkotaan

Dalam melakukan mitigasi bencana alam di lingkungan perkotaan terdapat banyak sekali faktor yang harus diperhatikan agar risiko yang dimiliki setelah terjadinya bencana alam tidak terlalu besar, dalam memahami manajemen tersebut Ian Burton, menyimpulkan indikator-indikator penting yang diperlukan dalam teorinya yang bernama *Integrated Risk Management*. Dalam teori tersebut berfokus kepada bencana alam yang sering terjadi, seperti gunung merapi, banjir, gempa bumi, angin topan. Teori ini juga mengkorelasikan antara bencana alam dan keamanan nasional sebagai suatu komponen ketahanan utama dalam melakukan mitigasi bencana alam. Dalam teorinya ini Ian Buton berpendapat bahwa “munculnya bencana alam, menghadirkan suatu permasalahan serius yang bersifat teoritis dan praktis; yang pertama, karena kecenderungan mereka untuk menyingkap ciri-ciri dan langkah penting dalam organisasi sosial dan budaya, yang kedua, karena sempitnya kebutuhan mereka yang terancam atau terkena bencana akan pencegahan, perlindungan, pertolongan, atau rekonstruksi yang efektif”.

Dari pernyataan tersebut ketika diimplementasikan ke dalam manajemen perkotaan peran yang dimiliki pemerintah lokal atau daerah dalam menghadapi bencana alam dinilai sangat dibutuhkan karena di dalamnya terdapat banyak sekali permasalahan



infrastruktur dan permasalahan sosial yang akan dihadapi, mengingat Kota Surabaya berada di lingkungan geografis yang sangat rawan bencana alam menjadikan Pemerintah Kota Surabaya sadar akan resiko dari munculnya bencana alam tersebut. Sebelum menghadapi resiko yang besar tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan kolaborasi dengan komunitas sosial melalui Unit Pelayanan Teknis Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya. Dalam kegiatan tersebut keduanya memberikan edukasi kepada masyarakat umum di berbagai instansi, sekolah, organisasi pemerintah, dan organisasi sosial lainnya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam melakukan pemetaan bencana alam di wilayah Kota Surabaya, serta menambahkan sistem peringatan dini di beberapa tempat dengan tujuan lebih mengetahui hadirnya bencana alam dengan kondisi *real-time* dan lebih mengetahui skala bencana yang terjadi agar lebih mudah dalam menentukan mitigasi dan pertolongan pertama terhadap masyarakat.

Dalam teori ini Pemerintah Kota Surabaya juga diharuskan melaksanakan evaluasi dan pengecekan secara berkala sehingga mitigasi dan teknologi yang dilaksanakan bisa lebih dikembangkan, selain itu infrastruktur kota dan berbagai komponen harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan kembali sesuai dengan kondisi lahan yang ditempati dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

## **F. *United Cities and Local Government In Asia Pacific* dan Keanggotaan Kota Surabaya**

Hadirnya globalisasi dan modernisasi melahirkan banyak sekali konsep baru dalam melakukan kerjasama dalam lingkup internasional dan regional, kerjasama internasional ini ditujukan untuk memudahkan negara-negara dalam membangun komunikasi satu sama lain sehingga dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Kerjasama Internasional merupakan sebuah hubungan kerjasama negara merdeka dan berdaulat dengan jumlah dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Dampak kerjasama ini harus menghasilkan *win win solution* antara negara satu dengan negara yang lainnya, selain itu kerjasama ini bisa dilakukan dalam bentuk bilateral maupun multilateral<sup>136</sup>. Holsti berpendapat bahwa kerja

---

<sup>136</sup> Amanullah, Juni. 2021. "Kerja Sama Internasional Antar Bangsa." ORMAWA UNIVERSITAS STEKOM. diakses pada 26 Mei 2024. <https://ormawa.stekom.ac.id/berita/kerjasama-internasional->



lokal di Kawasan Asia Pasifik dan merupakan satu-satunya suara pemerintah lokal yang diterima secara langsung dan dianggap resmi oleh PBB. Tujuan berdirinya *United Cities and Local Government in Asia Pacific* untuk melayani kota-kota anggotanya, organisasi ini sebagai wadah untuk pusat pengetahuan utama mengenai semua permasalahan pemerintah daerah di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu dalam organisasi ini juga memungkinkan terjadinya kolaborasi antar kota, pemerintah daerah dan asosiasinya, serta mendorong pemerintahan daerah yang demokratis<sup>138</sup>. Dalam lingkup kerjanya UCLG ASPAC mempunyai empat tugas utama:

- Support to Decentralization In Developing Countries (SDDC)
- Zero Waste
- Public Space Development
- Partnership For Democratic Local Governance In Southeast Asia

Jumlah koneksi yang dimiliki oleh *United Cities And Local Government In Asia Pacific* sangat banyak dan sangat luas, fungsi koneksi yang dimiliki oleh *United Cities And Local Government In Asia Pacific* dianggap sebagai pihak ketiga yang disambungkan kepada kota-kota di seluruh dunia untuk memudahkan segala pelaksanaan program dan kegiatannya. Selain itu UCLG ASPAC juga melakukan pengembangan member secara teratur melalui berbagai forum, seperti: *congress, conference, workshop*, dan lain sebagainya.



Gambar 4 Kota Surabaya hadir dalam United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019

---

<sup>138</sup> United Cite and Local Government. 2024. "Who We Are The Historie Of United Cities and Local Governments In Asia Pacific." UCLG ASPAC E-Learning, diakses pada 7 Mei 2024 <https://uclg-aspac.org/who-we-are/>.

Kota Surabaya hadir dalam *United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019 and Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Forum* di Kota Makati, Filipina.

Sebagai anggota aktif, Pemerintah Kota Surabaya sangat inofatif dalam mengembangkan ide-idenya demi mencapai kemajuan dan mencapai target kepentingan kotanya. Dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan mengurangi risiko bencana alam, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengadopsi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Target E, yang dimana implementasi tersebut dinilai efektif dan efisien dalam meningkatkan kesiapsiagaan wilayah khususnya di lingkungan perkotaan. Keberhasilan yang dicapai oleh Kota Surabaya memberikan respons positif di dunia internasional dan menjadi sebuah model sebagai kota yang siap siaga saat menghadapi bencana, sehingga pada *United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019 and Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Forum* berhasil memberikan sambutan di depan para pejabat internasional dan delegasi dari berbagai kota di Kawasan Asia Pasifik.

## **G. Kondisi Kota Surabaya Sebelum Mengadopsi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Target E**

Kota Surabaya merupakan sebuah Kota metropolis terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya juga merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus pusat perekonomian dan pemerintahan di Jawa Timur. Secara geografis Wilayah Kota Surabaya berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah Utara dan Timur, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat. Kota Surabaya memiliki Luas wilayah 52.087 Hektar, dengan luas daratan 33.048 Hektar atau 63,45% dan luas wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar 19.039 Hektar atau 36,55%. Adapun secara tipografi kondisi Kota Surabaya berada di dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah (Kecamatan Lakarsantri) dan Gayungan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut.





Gambar 5 Peta Wilayah Administratif Kota Surabaya

Kondisi geografis Kota Surabaya dinilai wilayah yang sangat aman dari bencana alam “tsunami”, akan tetapi pada perkembangannya sesuai dengan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditemukan wilayah sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng yang bergerak dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Selain itu Kota Surabaya juga dinilai rawan genangan air dan banjir rob pada saat musim penghujan, yang dimana banjir rob ini sering terjadi di kawasan utara Kota Surabaya yang memiliki posisi di kawasan pesisir utara Kota Surabaya. Terjadinya banjir rob ini diakibatkan oleh landainya kawasan pesisir utara Kota Surabaya dan tersumbatnya saluran air di beberapa wilayah Kota Surabaya, derasnya arus air yang berada di kawasan selatan tidak dapat tersalur dan dikendalikan dengan baik sehingga terjadi banjir rob dari kawasan selatan dan pusat Kota Surabaya ke arah utara.

Adapun jenis bencana lainnya yang sering terjadi di Kawasan Perkotaan adalah kebakaran. Munculnya bencana kebakaran tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga hal ini menjadi suatu kewaspadaan tersendiri bagi masyarakat. Ditambah dengan meningkatnya kepadatan penduduk Kota Surabaya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota dan Unit Pelayanan Teknis Pemadam Kebakaran sehingga perlu adanya strategi yang matang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hadirnya

permasalahan-permasalahan tersebut perlu adanya antisipasi dini saat terjadinya kejadian bencana di kota Surabaya, selain itu kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan agar sejalan dengan tujuannya untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai kota yang tangguh dalam menghadapi bencana, agar dampak dan risiko yang diberikan pada saat pasca bencana tidak terlalu besar.

Dalam menanggapi permasalahan bencana alam di Indonesia, pada tahun 2015 Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pendataan terkait Indeks Risiko Bencana Nasional, yang mana data tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi tahunan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggapi permasalahan bencana alam khususnya di perkotaan.

Tabel 7 Indeks Risiko Bencana 2015

<b>Indeks Risiko Bencana</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Skor</b>	<b>Kelas Risiko</b>
Indeks Risiko Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2015	18	166.8	Sedang
Potensi Semua Jenis Bencana Kota Surabaya Tahun 2015	-	167.945	Sedang
Korban Jiwa Semua Jenis Bencana Kota Surabaya Tahun 2015	1	14.883.086	Tinggi
Matriks Hasil Kesiapan Bencana Tahun 2015	4	0,82	Tinggi

Selain itu tingkat respons Unit Pelayanan Teknis Kota Surabaya sebelum mengadopsi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Target E dinilai sangat lambat dan lama, hal ini sangat mempengaruhi kondisi pada saat bencana dan pasca bencana. Munculnya kelambatan ini sangat dipengaruhi banyak sekali faktor sosial seperti kemacetan lalu lintas, padatnya jumlah kendaraan di jalan utama, dan buruknya kondisi jalan. Selain itu padatnya populasi dan rapatnya posisi bangunan menjadi permasalahan baru bagi Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan proses mitigasi, sehingga hal ini menjadi kendala umum bagi pemerintah Kota Surabaya dalam merespons kesiapsiagaan dan mitigasi bencana khususnya di lingkungan



perkotaan. Adapun total waktu yang dibutuhkan oleh Unit Pelayanan Teknis Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya sebelum mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai:

- ❖ **Unit Pelayanan Teknis Pemadam Kebakaran** di Kota Surabaya normalnya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk mencapai lokasi kebakaran setelah menerima laporan, yang mana tantangannya adalah kemacetan lalu lintas, kondisi jalan, dan kepadatan pemukiman.
- ❖ **Unit Pelayanan Teknis Penanggulangan Bencana** di Kota Surabaya dalam menanggapi kejadian banjir, normalnya respons awal termasuk pengerahan tim pemantauan dan penyelamatan bisa memakan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam, tergantung pada skala dan lokasi banjir. Sebagai langkah pertama yang bisa dilakukan, yaitu: penilaian situasi; penyelamatan korban; dan pengaturan lalu lintas untuk memfasilitasi evakuasi.

## H. Kondisi Kota Surabaya Setelah Mengadopsi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Target E

Kota Surabaya merupakan kota yang dapat berkembang dengan sangat pesat dan signifikan, hal ini memberikan citra yang baik dan menjadi wajah baru dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Berkembangnya globalisasi menghadirkan permasalahan - permasalahan yang dinilai kompleksitas dan terhubung satu sama lain, salah satunya permasalahan tanggap bencana yang menjadi sorotan utama bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam tempo waktu yang singkat Kota Surabaya berhasil mengatasi permasalahan tersebut, sehingga strategi dan manajemen mitigasi yang diimplementasikan selalu dipertanyakan dari berbagai sudut pandang akademisi dan politisi. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2015 Kota Surabaya mulai mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai sebagai upaya Pemerintah Kota dalam menanggapi permasalahan bencana alam khususnya di wilayah perkotaan. Kerangka Kerja Sendai merupakan sebuah turunan instrumen internasional dari Kerangka Hyogo 2005-2015, instrumen internasional ini berfokus kepada Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, instrumen ini dibentuk

oleh para ahli dan pemangku kepentingan dengan berbagai fokus bidang dengan 7 target utama.

Strategi Kota Surabaya dalam menghadapi permasalahan bencana alam tidak semudah yang dibayangkan, terdapat banyak sekali langkah-langkah kecil yang harus diperhatikan sehingga diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dalam lingkup pemerintah maupun non-pemerintah. Kota Surabaya menggunakan implementasi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Target E yaitu “Meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal”, dalam target ini terdapat 3 indikator penting untuk memenuhi capaian utama target, yaitu:

- Mengurangi Kerentanan dan Risiko  
Dalam indikator ini strategi yang dimiliki oleh suatu kota dan komunitas lokal sangat diperlukan, tanpa adanya strategi dan kolaborasi yang kuat maka risiko yang dihadapi semakin tinggi. Dalam hal ini bukan hanya teknologi saja yang diperlukan, akan tetapi juga edukasi terhadap masyarakat umum melalui lembaga maupun non-lembaga, seperti: sekolah, perkantoran, dan masyarakat umum lainnya. Dengan hadirnya strategi yang matang baik negara, kota dan komunitas lokal dapat mengidentifikasi data pasca-bencana dengan data *realtime* dan mengurangi risiko sebelum bencana terjadi, yang berujung pada pengurangan kerugian dan dampak bencana.
- Meningkatkan Ketahanan Komunitas  
Strategi pengurangan risiko yang bersifat komprehensif dan inklusif dapat menumbuhkan ketahanan komunitas, sehingga sangat memungkinkan mereka untuk lebih siap dan responsif terhadap bencana. Dalam menghadapi bencana alam khususnya di lingkungan perkotaan, para Unit Pelayanan Teknis dan Komunitas yang tergabung dan terkait harus dalam keadaan siap siaga dalam menghadapi kondisi tersebut. Sehingga pelatihan-pelatihan umum dalam menghadapi bencana alam dan edukasi penggunaan teknologi yang siap digunakan saat bencana terjadi dapat dikuasai para relawan.
- Mendukung Pembangunan Berkelanjutan  
Hadirnya pembangunan yang berkelanjutan mempunyai esensi sendiri dalam pembangunan suatu kota, sampai saat ini kota-kota di seluruh dunia khususnya Kawasan Asia



Pasifik mulai mengadakan kerja sama untuk mempelajari bagaimana sistem dan konsepsi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam indikator Target E penekanan pembangunan berkelanjutan yang dituju adalah pengurangan risiko bencana yang efektif mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa upaya pembangunan tidak terganggu oleh bencana yang dapat dicegah atau diminimalkan dampaknya.

Dalam pemenuhan indikator Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Target E, Pemerintah Kota Surabaya segera berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk penyusunan strategi dan langkah-langkah yang dibutuhkan menjadi Kota Tangguh akan bencana alam. Adapun beberapa langkah yang dijalankan Kota Surabaya saat mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai 2015- 2030 Target E sebagai berikut:

1. **Penyelarasan Kebijakan**, setelah mengadopsi Instrumen Internasional Kerangka Kerja Sendai, Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Organisasi Perangkat Daerahnya bersinergi untuk menyelaraskan kebijakan dan program pengurangan risiko bencana mereka dengan prinsip berkelanjutan dan menentukan target sesuai dengan proses yang dijalankan.
2. **Penguatan Institusi**, BPBD Kota Surabaya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) memulai untuk mengadopsi metodologi dan pendekatan Kerangka Kerja Sendai dalam perencanaan dan pelaksanaan operasional mereka. Sehingga hal Ini termasuk penilaian risiko yang lebih komprehensif dan meningkatkan kapasitas respons bencana.
3. **Edukasi dan Pelatihan**, Upaya pelaksanaan program edukasi dan pelatihan terhadap Unit Pelayanan Teknis dan masyarakat di Kota Surabaya selalu ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Kegiatan Ini melibatkan pelatihan tanggap darurat, simulasi bencana, dan kampanye kesadaran risiko di berbagai komunitas.
4. **Sistem Peringatan Dini**, Dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya bencana alam, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengembangan dan peningkatan sistem peringatan dini untuk berbagai jenis bencana, seperti: banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Sistem ini didesain untuk memberikan peringatan tepat waktu

kepada masyarakat untuk mengurangi dampak dan risiko bencana.

5. **Perencanaan Tata Ruang**, Pemerintah Kota Surabaya melakukan integrasi analisis risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang kota. tujuannya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di dan pemukiman baru di wilayah Kota Surabaya mempertimbangkan risiko bencana dan mitigasi yang diperlukan.
6. **Kerjasama dan Kolaborasi**, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional, nasional, dan regional dalam melaksanakan implementasi pengurangan risiko bencana. Hal ini tidak hanya terbatas di menghadiri forum saja, akan tetapi juga Pemerintah Kota Surabaya berbagi informasi, praktik terbaik, dan sumber daya.
7. **Pengelolaan Data dan Informasi**, Bagian terpentingnya adalah pengumpulan data yang lebih baik dan menganalisis risiko yang lebih mendalam bersama para akademisi dan para ahli, untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya dapat dengan mudah mengevaluasi seluruh kegiatan berdasarkan data yang ada dan ini melibatkan teknologi dan sistem informasi dengan model terbaru untuk memetakan risiko dan kerentanan.

Di tahun 2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah berhasil merekap data Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur. Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan sebuah instrumen atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Indeks ini mengkolaborasikan berbagai faktor yang mempengaruhi risiko bencana, seperti kerentanan, kapasitas, paparan, dan bahaya, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan spesifik mengenai potensi dampak bencana terhadap suatu wilayah atau area geografis. Tujuan utama dari IRB adalah untuk membantu perencanaan, mitigasi, dan manajemen risiko bencana.



Tabel 8 Indeks Risiko Bencana 2019

<b>Indeks Risiko Bencana</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Skor</b>	<b>Kelas Risiko</b>
Multi ancaman Kabupaten/Kota Indonesia 2019	161	159.87	Tinggi
Indeks Risiko Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2019	9	159.87	Tinggi
Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten/Kota Indonesia 2019	42	17.58	Tinggi
Indeks Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten/Kota Indonesia 2019	68	28.95	Tinggi
Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2019	181	29.98	Tinggi
Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota Indonesia 2019	205	28.95	Tinggi

Berdasarkan data yang telah dikalkulasi oleh Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Surabaya telah menempati posisi ke 161 secara nasional dengan kondisi kota atau kabupaten multi ancaman yang diurutkan berdasarkan total skor yang didapat di tahun 2019 dengan skor berjumlah 159.87 dengan kelas resiko tinggi. Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Risiko Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2019 Kota Surabaya berada di peringkat 9 dengan skor 159.87 dan kelas risiko tinggi. Berdasarkan data dari Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten/Kota Indonesia 2019, Surabaya berada di peringkat 42 dengan skor 17.58 dan kelas risiko tinggi. Selanjutnya Indeks Risiko Gelombang Ekstrem Dan Abrasi Kabupaten/Kota Indonesia 2019, Surabaya berada di peringkat 69 dengan skor 28.95 dan kelas risiko tinggi. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2019, Surabaya menempati posisi ke 181 dengan skor 29.98 dan kelas risiko tinggi. Kemudian Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten/Kota Indonesia 2019, Surabaya menempati posisi ke 205 dengan skor 28.95 dan kelas risiko tinggi.

Selain itu Pada tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah merekapitulasi terkait Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pemerintah

Kota Surabaya. Keduanya telah berhasil berkolaborasi dalam mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas waktu terkait respons mereka terhadap munculnya berbagai bencana baik alam maupun non-alam. Berdasarkan rekapan data-data dan laporan terbaru, berikut adalah gambaran mengenai waktu respons Unit Pelayanan Teknis Pemerintah kota Surabaya pada saat terjadi bencana di tahun 2018:

- Dalam menghadapi permasalahan kebakaran Unit Pelayanan Teknis Pemadam Kebakaran di Surabaya pada tahun 2018 meningkat, dan berhasil menyingkat waktu menjadi 7-10 menit untuk tiba di lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Hal Ini menunjukkan bahwa Kerangka Kerja Sendai Target E berhasil dan lebih berdampak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- Dalam menghadapi permasalahan banjir, Unit Pelayanan Teknis membutuhkan waktu respons awal termasuk pengerahan tim pemantauan dan penyelamatan normalnya membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit untuk tiba di lokasi yang terdampak setelah adanya panggilan dan berita. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Target E dinilai sangat efisien.

Berhasilnya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan waktu respons tidak lepas dari segala upaya-upaya dan perbaikan setelah adanya evaluasi, dengan singkatnya waktu yang dibutuhkan sangat berpengaruh terhadap jumlah dan tatacara mitigasi yang akan dihadapi oleh Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Selain itu dengan diimplementasikannya Kerangka Kerja Sendai 2015- 2030 Target E di Kota Surabaya memberikan dampak positif lainnya baik dalam pengoperasian lalu lintas maupun infrastruktur kota. Di wajah dunia internasional hasil ini menjadi progres yang sangat baik dan pesat, sehingga menimbulkan citra baik dan baru bagi Kota Surabaya dalam menanggapi suatu isu dan permasalahan sosial di kota. Dengan efisiennya Kerangka Kerja Sendai Target E dalam menangani permasalahan bencana alam, Walikota Surabaya Tri Rismaharini berhasil memberikan sambutan dalam *United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019 and Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Forum* di Mekati, Filipina. Selain itu Kota Surabaya dijadikan kota percontohan bagi kota berkembang lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri, dalam sambutannya tersebut Walikota Surabaya berharap bahwa dengan adanya instrumen



tersebut peran pemerintah bisa lebih dioptimalisasikan lagi baik dalam segi fisik maupun non-fisik.



Gambar 6 Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberikan sambutan pada United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019 and Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Forum di Makati, Filipina.

## I. Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 Diadopsi Oleh Kota Lain di Kawasan Asia Pasifik

Seperti yang kita ketahui hadirnya Kerangka Kerja Sendai merupakan turunan dari instrumen internasional sebelumnya, yaitu Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015. Hadirnya Kota Surabaya sebagai kota tangguh yang berhasil dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana alam khususnya di lingkungan perkotaan, menjadikannya sebuah model percontohan dalam *United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019 and Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Forum* di Mekati, Filipina. Promosi Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 yang dilakukan oleh Walikota Surabaya melalui sambutannya di forum tersebut mendapatkan respons positif, sehingga instrumen tersebut mulai banyak diadopsi oleh Pemerintah Kota di Kawasan Asia Pasifik. Forum yang diadakan oleh *United Cities and Local Government In Asia Pacific* memberikan kesadaran secara alami kepada delegasi yang hadir, sehingga beberapa Pemerintah Kota di Kawasan Asia Pasifik berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan mengurangi risiko melalui kebijakan dan program

yang sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai 2015-2030. Adapun daftar negara yang mengadopsi instrumen internasional Kerangka Kerja Sendai 2015- 2030, yaitu:

1. Tokyo, Jepang

*Tokyo Metropolitan Government* telah memperkuat infrastruktur dan mengimplementasikan sistem peringatan dini yang canggih, serta melakukan simulasi bencana secara rutin. Mengingat negara Jepang merupakan sebuah negara yang berada dalam kawasan Cincin Api Pasifik dan berada di atas pertemuan 2 lempeng yang berlawanan arah yaitu Lempeng Pasifik dan Lempeng Filipina. Sebagai bentuk kesiapannya Pemerintah Kota Tokyo mengadakan Program mitigasi gempa dan tsunami secara berkala di berbagai kalangan, serta mengadakan edukasi untuk peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

2. Bangkok, Thailand

Pemerintah Kota Bangkok sudah mulai berfokus pada peningkatan kapasitas manajemen banjir, termasuk pembangunan infrastruktur drainase yang lebih baik dan pengelolaan sungai. Hal ini mengingat banyaknya tanah di Kawasan Bangkok yang selalu turun setiap tahunnya sehingga berdampak pada aliran saluran air, selain itu Kawasan Bangkok dinilai terlalu padat penduduk yang mengakibatkan rendahnya Ruang Terbuka Hijau dan daerah resapan air hujan. Program yang diimplementasikan oleh Pemerintah Bangkok yaitu melalui Integrasi sistem peringatan banjir dan pengembangan rencana evakuasi yang efektif.

3. Manila, Filipina

*Metropolitan Manila Development Authority* mulai meningkatkan kesadaran publik tentang risiko gempa bumi dan banjir, serta memperkuat bangunan dan infrastruktur publik. Dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai Pemerintah Kota Manila membangun beberapa drainase untuk penampungan air hujan, mengingat Kota Manila memiliki iklim tropis dan curah hujan yang sangat tinggi. Dalam mengantisipasi permasalahan bencana alam Pemerintah Kota Manila membuat program "Shake Drill" untuk latihan kesiapsiagaan gempa dan pembangunan infrastruktur tahan bencana.



4. Jakarta, Indonesia  
Pada tahun 2020 Kota Jakarta baru saja mengadopsi Kerangka Kerja Sendai, dalam pelaksanaan implementasinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengembangkan rencana mitigasi banjir dan manajemen risiko gempa bumi. Mengingat Kota Jakarta merupakan wilayah yang sangat padat penduduk dan mengalami erosi yang sangat tinggi setiap tahunnya dan berdampak terhadap naiknya permukaan air laut, sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran saluran air. Adapun program yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta sebagai antisipasi adalah meningkatkan teknologi sistem peringatan dini banjir dan pembangunan tanggul serta kanal untuk pengendalian banjir.
5. Wellington, Selandia Baru  
Dewan Kota Wellington berfokus pada mitigasi risiko gempa bumi dan tsunami, termasuk memperkuat infrastruktur dan melakukan pendidikan publik. Mengingat Kota Wellington berada dalam Zona Subduksi Hikurangi menjadikan Pemerintah Kota Wellington lebih waspada, selain itu program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Wellington yaitu Program mitigasi gempa, seperti penguatan bangunan dan peningkatan sistem peringatan dini tsunami.
6. Kobe, Jepang  
Setelah melalui pengalaman gempa besar Hanshin pada tahun 1995, Kota Kobe telah berhasil menjadi pionir dalam pengurangan risiko bencana, termasuk dalam pengembangan kebijakan dan teknologi mitigasi bencana di Jepang. Hal ini ditujukan agar Kota Kobe lebih siap dalam menghadapi bencana alam seperti gempa dan tsunami. Dalam mengadopsi Kerangka Kerja Sendai, Pemerintah Kota Kobe menjalankan program *Disaster Reduction and Human Renovation Institution* yang bertujuan untuk edukasi dan pelatihan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
7. Chennai, India  
Implementasi Kerangka Kerja Sendai juga diadopsi oleh Pemerintah Kota Chennai, yang mana sudah fokus pada pengelolaan risiko banjir dan siklon melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas tanggap darurat. Diadopsinya Kerangka Kerja Sendai di kota ini disebabkan oleh cuaca yang ekstrim dan tingginya curah hujan, selain itu

tanah di Kota Chennai juga mengalami penurunan setiap tahunnya yang mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Dalam menanggapi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Chennai menjalankan proyek pengelolaan air hujan dan sistem peringatan dini siklon.

## J. Prestasi Kota Surabaya Dalam Manajemen Perkotaan dan Pelaksanaan Mitigasi Bencana Alam

Kota Surabaya merupakan sebuah kota yang memiliki prestasi gemilang baik dalam skala nasional maupun internasional, yang dimana hal ini dapat dilihat melalui pencapaian-pencapaian yang dimiliki oleh Kota Surabaya. Hadirnya prestasi ini dipengaruhi beberapa faktor utama seperti globalisasi, legitimasi, transformasi rezim, dan persepsi kepercayaan/ketidakpercayaan. Faktor-faktor tersebut dinilai sangat mempengaruhi kebijakan dan juga strategi yang dimiliki oleh Kota Surabaya. Dalam implementasi manajemen perkotaan, Kota Surabaya dinilai sangat berkembang secara signifikan hal ini ditinjau dari berbagai prestasi internasional yang salah satunya Kota Surabaya mendapat penghargaan internasional sebagai taman terbaik di Asia pada 2013.

Diberikannya penghargaan ini bukan tanpa alasan, akan tetapi sebagai pengakuan internasional terhadap keberhasilan Walikota Surabaya dalam melakukan pembangunan, revitalisasi, dan peremajaan hutan di 400 taman di Kota Surabaya. Selain itu dalam mengatasi permasalahan sampah Kota Surabaya memiliki solusi mandiri dengan membangun rumah 3r dan bank sampah yang sampah-sampah tersebut dialihkan kepada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Hadirnya prestasi gemilang menjadikan Kota Surabaya mempunyai citra baik di wajah internasional dan mendapatkan beberapa pengakuan internasional, seperti mendapat penghargaan *Special Mention dalam Lee Kuan Yew World City Prize 2018*, sebuah penghargaan internasional untuk pencapaian dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan *ASEAN Environmentally Sustainable City Award*, penghargaan ini diberikan kepada Surabaya atas upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup warganya.

Dalam bidang mitigasi bencana alam juga Kota Surabaya Surabaya mendapat penghargaan *Sasakawa Award for Disaster Risk Reduction* dari *United Nations Office for Disaster Risk*



*Reduction* (UNISDR) pada tahun 2011 atas inisiatif dan inovasi dalam pengurangan risiko bencana. Penghargaan ini diberikan kepada kota yang menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ketahanan terhadap bencana melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2013 Surabaya menerima penghargaan *ASEAN Environmentally Sustainable City Award*, yang dimana penghargaan ini untuk kategori kota besar. Penghargaan ini mengakui upaya Surabaya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melakukan mitigasi terhadap bencana alam melalui pengelolaan lingkungan yang baik dan program-program berkelanjutan. Selain itu Kota Surabaya dianugerahi *UN-Habitat Scroll of Honour* untuk berbagai upaya perbaikan kota, termasuk mitigasi bencana. Penghargaan ini mengakui kota-kota yang menunjukkan kepemimpinan luar biasa dalam perbaikan kondisi kehidupan di lingkungan perkotaan.

Dalam bidang ketahanan kota, Pemerintah Kota Surabaya dianugerahi *Future Policy Award on Climate Resilience* ada 2019 pengakuan dalam kategori ini diberikan oleh *World Future Council* atas kebijakan-kebijakan yang berfokus pada peningkatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam, termasuk strategi mitigasi banjir dan pengelolaan lingkungan yang adaptif. Pada tahun 2013 mendapat penghargaan *Asian Townscape Award*, penghargaan ini diberikan kepada Surabaya atas upaya dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang ramah lingkungan dan tahan bencana. Penghargaan ini menyoroti transformasi Surabaya dalam manajemen tata ruang dan infrastruktur hijau yang berkontribusi pada mitigasi bencana. Dalam bidang penghijauan kota, Pemerintah Kota Surabaya mendapat *Green City Awards* beberapa kali, Surabaya telah menerima penghargaan *Green City* dari berbagai organisasi nasional dan internasional. Penghargaan ini mengakui upaya Surabaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan kota dan mengurangi risiko bencana melalui berbagai inisiatif hijau.

## **K. Promosi Kerangka Kerja Sendai 2015 -2030 Oleh Pemerintah Kota Surabaya pada *United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019 and Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Forum***

Keberhasilan Kota Surabaya dalam mengadopsi Kerangka Kerja Sendai merupakan sebuah kebanggaan tersendiri, yang dimana keberhasilan tersebut membawa Kota Surabaya menjadi lebih disegani dan dihormati oleh dunia internasional. Dalam kegiatan internasional *United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019 and Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Forum*, Walikota Surabaya menyampaikan sambutannya yang didalamnya mengajak kepada seluruh delegasi yang hadir untuk lebih memahami kondisi dunia saat ini, utamanya kesiapsiagaan Pemerintah Lokal dalam menghadapi bencana alam khususnya di lingkungan perkotaan. Melalui sambutan tersebut Walikota Surabaya mendapatkan respons yang sangat baik, sehingga secara berkala dan alami banyak sekali Pemerintah Kota atau Daerah di Kawasan Asia Pasifik yang mengikuti dan meniru langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

Sambutan merupakan sebuah ide, gagasan, dan informasi yang disampaikan secara lisan kepada para pendengar dalam suatu kegiatan, biasanya sambutan hanya diberikan kepada orang-orang dengan jabatan khusus atau memiliki prestasi tertentu. Tujuan dilakukannya sambutan sebagai pembicaraan yang bersifat persuasif dan bisa mengajak para pendengarnya untuk melaksanakan arahan yang telah diucapkan. Dalam konteks berdiplomasi sambutan seringkali menjadi pusat perhatian, karena dalam dunia internasional hanya orang dengan jabatan khusus atau prestasi khusus yang dapat melakukan sambutan di depan delegasi negara lain. Adapun tujuan sambutan dalam kondisi berdiplomasi untuk memenuhi beberapa target utama, yaitu:

- ❖ Menyampaikan pesan dan sikap resmi kepada pejabat tinggi dan para delegasi.
- ❖ Membangun citra negara atau wilayah asal yang dibawa untuk menambah relasi baru dalam suatu kegiatan internasional.
- ❖ Menjelaskan kepastian suatu agenda yang dijalani atau yang akan dijalani.



- ❖ Membangun citra positif di hadapan media dan masyarakat internasional.
- ❖ Merespons suatu isu global dan menjelaskan negara atau kota dalam merespons isu tersebut.
- ❖ Meningkatkan kerja sama dalam lingkup regional maupun internasional dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam implementasinya Walikota Surabaya dinilai berhasil dalam mempromosikan Kerangka Kerja Sendai di forum internasional, hal dibuktikan dengan adanya Pemerintah Kota di Kawasan Asia Pasifik yang mengadopsi Kerangka Kerja Sendai pada tahun 2020 dan setelahnya. Dalam menyampaikan suatu pesan Walikota Surabaya memiliki ketegasan dan kehangatan, yang dimana hal tersebut tertuang dalam salah satu kalimat sambutannya yang berbunyi “Bapak dan ibu, munculnya bencana sudah banyak sekali merenggut nyawa dan menyebabkan kerusakan dengan skala dampak yang sangat besar pada kota, lingkungan dan komunitas kami. Bagi saya, melindungi rakyat adalah peranan yang sangat penting dan akan saya wujudkan dalam program kegiatan yang dijalankan oleh UCLG Aspac ini”.

Sambutan yang diberikan dalam forum tersebut memiliki sebuah ajakan tersirat kepada para delegasi dan audiens dalam forum tersebut, walaupun beliau seorang perempuan keberanian dan ketegasannya sebagai seorang pemimpin patut diikuti oleh para pemimpin di tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional. Selain itu Walikota Surabaya Tri Rismaharini berhasil membangun citra Indonesia dan Kota Surabaya sebagai wilayah yang berhasil terbangun dari berbagai keterpurukan, sehingga suatu wilayah di negara berkembang juga patut dijadikan suatu model keberhasilan dalam berbagai forum internasional tanpa memandang suku, agama, ras, gender dan warna kulit. Berkembangnya globalisasi harus selalu menjadi suatu kewaspadaan tersendiri sebagai seorang pemimpin atau delegasi, baik dalam forum nasional, regional, dan internasional.

Hal ini menjadi suatu boomerang tersendiri apabila seorang pemimpin atau delegasi tidak dapat menjaga sikap dan perkataannya di depan publik, karena dalam kondisi dan situasi apapun seorang pemimpin atau delegasi merupakan sebuah cerminan sumber daya manusia dari wilayah yang dibawa. Implementasi sambutan yang dibawakan oleh Walikota Surabaya mendapatkan suatu hasil yang sangat positif dan patut di contoh oleh Pemerintah Kota lain di Indonesia, karena dengan adanya

forum tersebut Kota Surabaya dan Indonesia sangat terkenal menjadi wilayah tangguh yang siap siaga dalam menghadapi kejadian bencana, khususnya di lingkungan perkotaan.

Dalam forum internasional yang membawakan isu mitigasi bencana alam sebagai suatu urgensi baru dalam isu internasional, merupakan sebuah kemajuan tersendiri karena didalamnya memberikan kesadaran bahwa masyarakat dalam suatu wilayah juga mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi oleh Pemerintah yang menaunginya. Hadirnya forum ini memberikan *branding* terhadap Kota Surabaya sebagai kota yang tanggap akan hadirnya bencana. Selain itu hadirnya Kota Surabaya dalam forum tersebut juga bertujuan untuk belajar lebih dalam mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam dan membangun relasi untuk berkolaborasi dalam mengembangkan teknologi dalam menghadapi bencana alam di perkotaan

## L. Kesimpulan

Hadirnya Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 yang diadopsi oleh Kota Surabaya memberikan respons yang sangat positif di dunia internasional, khususnya Kota lain di Kawasan Asia Pasifik. Kesiapsiagaan Kota Surabaya dalam menghadapi bencana alam dinilai berkembang dengan sangat signifikan setelah mengadopsi instrumen internasional tersebut. Selain itu upaya promosi yang dibawakan oleh Kota Surabaya melalui sambutan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam *United Cities and Local Government In Asia Pacific Council Meeting 2019 and Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Forum* mendapatkan respons positif dari berbagai delegasi dan Walikota lainnya di Kawasan Asia Pasifik. Dalam upaya promosi ini juga Pemerintah Kota Surabaya membangun citra yang tegas dan tanggap dalam mengambil dan mengimplementasikan setiap regulasi di tingkat Pemerintah Kota, sehingga citra ini memberikan kepercayaan terhadap kota-kota lain untuk mengadopsi instrumen internasional tersebut. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan peneliti berikutnya, yang ingin menganalisis lebih dalam terkait keanggotaan Kota Surabaya dalam *United Cities and Local Government In Asia Pacific* dan kontribusi Pemerintah Kota Surabaya dalam forum internasional yang diadakan oleh organisasi tersebut.

Hadirnya segala upaya ini tidak lepas dari peranan kolaborator yang terlibat di dalamnya seperti Unit Pelayanan



Teknis Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya, serta Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Dalam segala upaya tersebut diharapkan Kota Surabaya dapat mengembangkan teknologi yang dibutuhkan dalam menanggapi terjadinya permasalahan bencana alam, khususnya di lingkungan perkotaan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan mempelajari keberhasilan kota-kota lain saat sebelum terjadinya bencana alam dan saat proses mitigasi bencana alam, melalui analisis dan tinjauan tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya dapat mengevaluasi dan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kapasitas pemerintah lokal dalam menghadapi bencana alam tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2004). How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism. *International organization*, 58(2), 239–275.
- Acuto, M., & Rayner, S. (2016). City networks: Breaking gridlocks or forging (new) lock-ins? *International Affairs*, 92(5), 1147–1166. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12700>
- Adha, L. H. (2013). *URGENSI RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1990 TENTANG PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA*. 1(2), 312–326.
- Adriansah, A. (2021). Peran Politik Muhammad Bin Salman Dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Arab Saudi. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56659>
- Ali, M. (2021). Arah Kebijakan Militer Arab Saudi di Bawah Komando Mohammed Bin Salman (MBS) Menghadapi Visi Saudi 2030. *Journal Middle East and Islamic Studies*, 8.
- Amanullah, Juni. 2021. “Kerja Sama Internasional Antar Bangsa.” ORMAWA UNIVERSITAS STEKOM.
- Annisa, Jihan. 2019. “Kerja Sama Internasional Pemerintah Kota Surabaya dengan United Cities and Local Government in Asia Pacific (UCLG ASPAC) 2016-2018.” UNS Institutional Repository.
- Apriska, L, V H Husni, J Anggara, and M D Fadlli. “STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENCAPAI SDGs DESA:(STUDI KASUS PENURUNAN TINGKAT STUNTING DI DESA SAKRA SELATAN KABUPATEN ....” *Jurnal*



- Konstanta*, 2022, 82–90.  
<http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/365%0Ahttps://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/download/365/236>.
- Aryadi, R., & Hoesin, S. H. (2022). Kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Solusi Untuk Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 8(1), 57–72.
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>
- Azizah, Tri Nur, and Isna Fitria Agustina. “Peran Desa Dalam Menekan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian SGDs Desa Sukondo.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2023, 1–12. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>.
- Babak Baru Timur Tengah Di Balik Pengaruh China.” *Kuat Baca*. Diakses 29 Juni 2023. <https://kuatbaca.com/telik/detail/internasional/babak-baru-timur-tengah-di-balik-pengaruh-china-469>.
- Bakrie, C. R., Delanova, M. O., & Yani, Y. M. (2022). Pengaruh perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian negara kawasan Asia Tenggara. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 65-86.
- Banurea, P. P., Aini, R., & Manurung, H. (2023). Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Volume Perdagangan dan Perubahan Pola Perdagangan. *JOURNAL OF BUSINESS STUDIES*, 8(1), 1-10.
- BP2MI. 2019. *BNP2TKI Adakan Kegiatan Review Meeting Pilot Project Penempatan PMI Formal ke Taiwan Melalui Skema Special Placement to Taiwan (SP2T)*. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-adakan-kegiatan-review-meeting-pilot-project-penempatan-pmi-formal-ke-taiwan-melalui-skema-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>.
- BP2MI. 2019. *Pelepasan PMI ke Taiwan Melalui Skema Penempatan Special Placement Program to Taiwan (SP2T)*. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/pelepasan-pmi-ke-taiwan-melalui-skema-penempatan-special-placement-program-to-taiwan-sp2t>.

- BP2MI. 2023. *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja migran Indonesia Periode Tahun 2023*. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023>. Hal 6.
- BP2MI. Data Laporan Tahunan 2023 mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Asia dan Afrika pada tahun 2021, 2022, 2023. Diakses melalui [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_07-02-2024\\_Laporan\\_Publikasi\\_Tahun\\_2023.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_07-02-2024_Laporan_Publikasi_Tahun_2023.pdf) pada tanggal 30 Oktober 2024.
- BP2MI. Data Laporan Tahunan 2023 mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Asia dan Afrika pada tahun 2021, 2022, 2023. Diakses melalui [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_07-02-2024\\_Laporan\\_Publikasi\\_Tahun\\_2023.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_07-02-2024_Laporan_Publikasi_Tahun_2023.pdf) pada tanggal 30 Oktober 2024.
- BP2MI. Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Skema G to G Periode Tahun 2021-2023. BP2MI JDIH.\
- BP2MI. Data Penempatan dan Pelindungan PMI. Pusat Data dan Informasi BP2MI. ([bp2mi.go.id](http://bp2mi.go.id))
- BP2MI. Laporan Tahunan 2023 Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI tahun 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan skema G to G Korea Selatan.
- BP2MI. Pelepasan Pekerja Migran Indonesia G to G Korsel, sektor Manufaktur dan Perikanan jadi Favorit. Humas BP2MI, 2023. Diakses melalui <https://bp2mi.go.id/berita-detail/pelepasan-pekerja-migran-indonesia-g-to-g-korsel-sektor-manufaktur-dan-perikanan-jadi-favorit> pada tanggal 31 Oktober 2024.
- BP2MI. Pemanggilan Perekaman Biometrik dan Mekanisme Verifikasi Dokumen Online Pendaftaran Program G to G Korea, 2024. Diakses melalui <https://bp2mi.go.id/gtog-detail/korea/pemanggilan-perekaman-biometrik-dan-mekanisme-verifikasi-dokumen-online-pendaftaran-program-g-to-g-ke-korea-tahun-2024> pada tanggal 5 November 2024.
- BP2MI. Pengumuman Kontak Pelayanan Program G to G Korea Selatan. Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, 2022. Diakses melalui <https://www.bp2mi.go.id>



- [/gtog-detail/korea/pengumuman-kontak-pelayanan-program-g-to-g-korea-selatan](#) pada tanggal 31 Oktober 2024.
- BP2MI. Pengumuman Pendaftaran Program G to G ke Korea dengan Sistem Poin tahun 2023. Diakses melalui <https://www.bp2mi.go.id/gtog-detail/korea/pengumuman-dan-pra-pendaftaran-ujian-eps-topik-ubt-khusus-program-g-to-g-ke-korea-dengan-sistem-poin-tahun-2023> pada tanggal 30 Oktober 2024.
- BP2MI. Skema Penempatan. BP3MI PROVINSI SUMATERA BARAT (bp2mi.go.id)
- BP2MI. Tugas dan Fungsi BP2MI. Diakses melalui <https://www.bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>, pada tanggal 28 Oktober 2024.
- BP3MI Jawa Timur. (2024). *Data Pelayanan Pelindungan BP3MI Jawa Timur*.
- Calvin Alexander. Analisis Penyimpanan Data Biometrik pada Basis Data. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020.
- Chikhladze, N., & Rusadze, N. (2020). *CHALLENGES OF ECONOMIC AND COMMERCIAL DIPLOMACY (book summary)*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/344439284>
- Cindy Mutia Annur. 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia tahun 2023. Databoks, 2023. Diakses di [10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Pertengahan 2023 \(katadata.co.id\)](https://www.katadata.co.id).
- CIOFF Indonesia. (n.d.). <http://www.cioff-indonesia.org/>
- Citra, H. (2009). Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 22(1), 12 pages. [https://journal.unair.ac.id/filerPDF/03\\_Hennida\\_DIPLOMASI\\_PUBLIK.pdf](https://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Hennida_DIPLOMASI_PUBLIK.pdf)
- Dano, D. (2022). Analisis Dampak Konflik Rusia–Ukraina Terhadap Harga Bahan Bakar Minyak Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 261-269.
- Daud, Abdul H. et. al. “Hubungan Iran-Arab Saudi dan Kestabilan Rantau Timur Tengah.” *Malaysian Journal of History, Politics & Strategy* 45, no. 1 (September 2019).
- Dewanto, P. A. (2020). The domestication of protection: The state and civil society in Indonesia’s overseas labour migration. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 176(4), 504–531. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10018>

- Diagusty, H. F. (2023). *Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival 2023 Digelar Meriah Bak Pesta, Simak Keseruannya*. <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/011797292/surabaya-cross-culture-international-folk-art-festival-2023-digelar-meriah-bak-pesta-simak-keseruannya>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. (2022). DKP “Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2022”. [https://dkp.jatimprov.go.id/public/uploads/2024/01/rb\\_lampiran\\_20240123010202\\_422825.pdf](https://dkp.jatimprov.go.id/public/uploads/2024/01/rb_lampiran_20240123010202_422825.pdf). Diakses Pada 27 Mei 2024
- Dini Prilia Putri Syamsul. Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Melalui Employment Permit System Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Korea Selatan (2013-2017). Universitas Komputer Indonesia, n.d
- Diskanlajatim. KUNJUGAN TIM WOAHA (World Organizations for Animal Health) Dalam Rangka PVS (Performance Veterinary Service) di Indonesia. 2022. [https://www.instagram.com/p/ChoBKRZpUOd/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==](https://www.instagram.com/p/ChoBKRZpUOd/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==). Diakses Pada 11 Mei 2024
- DMA/RJP, BPMI-Setwapres. “Buka Rakornas Stunting, Wapres Ungkap Keberhasilan Pemerintah Turunkan Prevalensi Lima Tahun Terakhir,” 2024. [https://www.youtube.com/live/Rfg\\_9k-4w00?si=vElgqHVbcPTQ6BnG](https://www.youtube.com/live/Rfg_9k-4w00?si=vElgqHVbcPTQ6BnG).
- EIA SAUDI ARABIA. (2021). *2021 primary energy data in quadrillion Btu*. <https://www.eia.gov/>. <https://www.eia.gov/international/overview/country/SAU>
- Elaine, M. (2023). *Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival Digelar Lagi Setelah Pandemi*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/surabaya-cross-culture-international-folk-art-festival-digelar-lagi-setelah-pandemi/>
- Emilia, Ova. “Stunting-Deteksi Dan Intervensi.” UGM Channel, 2022. <https://youtu.be/icotQZUZRA4?si=Qa7nR7W3oP1QmyYl>.
- Ester Imbir. Kerja sama Indonesia – Korea Selatan dalam Penempatan Tenaga Kerja Buruh Migran Indonesia di Korea Selatan di Masa Pandemi COVID-19. Universitas Komputer Indonesia, 2021.



- Fahmida, Umi. “Talkshow Capai Target SDGs Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Era Dan Pasca Covid Di Indonesia.” SEAMEO REFCON, 2021. <https://www.youtube.com/live/8I6QefiYn4w?si=TWuFAkOzi1VG-iGt>.
- Farah Diana. Mekanisme dan Persyaratan Bekerja di Luar Negeri serta Alur Rekomendasi Pasport CPMI. Disnarketrans, 2022. Diakses melalui <https://disnakertrans.serangkota.go.id/detailpost/mekanisme-dan-persyaratan-bekerja-keluar-negeri-serta-alur-rekomendasi-pasport-cpmi> pada tanggal 30 Oktober 2024.
- Fernández, S. M. G. (2021). the Role of the Cultural and Creative Industries in Cultural Diplomacy and Soft Power Between China and the European Union. *Janus.Net*, 12(1), 31–61. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.12.1.3>
- Firdaus, J. (2023). *Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival 2023 Suguhkan Tarian Yosakoi*. <https://lenteratoday.com/surabaya-cross-culture-international-folk-art-festival-2023-suguhkan-tarian-yosakoi/>
- Flor Wang, dkk. 2024. <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202410105001>
- Fokus Taiwan. 2024. *Wawancara/Aktivist: Pengaduan PMI beli job hingga Rp100 Juta melalui Sponsor, tak Punya Bukti Kuat untuk Melapor*. <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202408205009>.
- General Information for Direct Hiring Service. 2018. <https://dhsc.wda.gov.tw/en/Info/About>.
- Ghafur, F. (2019). *Politik Islam Arab Saudi, Kuwait, & Uni emirat Arab*.
- Gilpin, Robert. *The Political Economy of International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1987).
- Grumet, Tali R. “New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran’s Rivalry.” (Thesis, University of Denver, 2015).
- Hanindita, Meta Herdiana. “Stunting Tidak Mengenal Sosial Dan Ekonomi.” Nikita Willy Official, n.d. [https://youtu.be/vao1NB\\_i6eA?si=yYg76d8gBB7LAWk2](https://youtu.be/vao1NB_i6eA?si=yYg76d8gBB7LAWk2).
- Haryono. 2017. *Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan)*. Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika Vol. 3, No. 2.
- Hikmah, C. N., & Abrar. (2019). Saudi Vision : Reformasi Ekonomi Arab Saudi. *Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 27–39.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/73579/Kerja-Sama-Internasional-Pemerintah-Kota-Surabaya-Dengan-United-Cities-And-Local-Governments-In-Asia-Pacific-UCL-G-ASPAC-Tahun-2016-2018>.

<https://ormawa.stekom.ac.id/berita/kerjasama-internasional-antar-bangsa#:~:text=Kerjasama%20internasional%20diartikan%20sebagai%20hubungan,ini%20bisa%20bilateral%20maupun%20multilateral>.

<https://uclg-aspac.org/who-we-are/>.

<https://www.gramedia.com/literasi/kerja-sama-internasional/>.

<https://www.surabaya.go.id/id/berita/52044/di-forum-uclg-aspac-filipina-wali-kota-ris-ma-paparkan-manajemen-resiko-bencana>.

[https://www.youtube.com/live/Rfg\\_9k-4w00?si=vEIgqHVbcPTQ6BnG](https://www.youtube.com/live/Rfg_9k-4w00?si=vEIgqHVbcPTQ6BnG).

Hudson, Michael C. "To Play the Hegemon: Fifty Years of US Policy Toward the Middle East." *The Middle East Journal* 50, no. 3 (1996).

Huwaitin, Mohamed. "The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations." *Review of History and Political Science* 2, no. 2 (Desember 2015).

International Trade Centre. (2019). *TRADE IMPACT FOR GOOD A Guide to Commercial Diplomacy*. Retrieved from <http://www.intracen.org>

Interview oleh Deputy Penempatan BP3MI Jawa Timur. Mengenai Mekanisme Verifikasi Dokumen G to G Korea Selatan, 2024.

IOM Joins Hands with BPS to Support the Development of a Roadmap for the Implementation of the One International Migration Data. (t.t.). Diambil 15 Oktober 2024, dari <https://indonesia.iom.int/news/iom-joins-hands-bps-support-development-roadmap-implementation-one-international-migration-data>

IOM UN Migration. 2021. *Membuat Narasi Migrasi Panduan Praktis Meliputi Migrasi Berstandar Etika Untuk Profesional Media*. <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/ID%20Media%20Guidelines%20-%20Membuat%20Narasi%20Migrasi%202021.pdf>.

Irfan Fadhlurrahman. Jumlah Penduduk di 38 Provinsi Indonesia Desember 2023, 2023. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/d88acb>



[b7c85bdb3/jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-desember-2023](#) pada tanggal 26 Oktober 2024.

- Isar, Y. R., & Triandafyllidou, A. (2021). Introduction to this Special Issue Cultural Diplomacy: What Role for Cities and Civil Society Actors? *International Journal of Politics, Culture and Society*, 34(4), 393–402. <https://doi.org/10.1007/s10767-020-09385-1>
- Isnarti. R, Astuti. W.R.D., Irawan. P. 2021. *Analisa Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pemberlakuan Mutual Recognition Agreement (MRA) di Negara-Negara Anggota ASEAN*. Jurnal transborders, Vol. 4, No. 2.
- Journal Article*
- Karman, M. M., Widian, R., & Yazid, S. (2020). *Challenges in norm-localization at the city level: The case of localizing the human rights city concept in Bandung, Indonesia: Asian Affairs: An American Review: Vol 50, No 1. 50(1), 1–26*. <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1850222>
- KDEI. 2020. Tugas Pokok dan Fungsi KDEI Taipei. KDEI Taipei - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia ([kdei-taipei.org](http://kdei-taipei.org))
- Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023, Januari 27). *Lindungi Pekerja Migran, Pemerintah Perkuat Program Desa Migran Produktif | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. <https://www.kemenkopmk.go.id/lindungi-pekerja-migran-pemerintah-perkuat-program-desa-migran-produktif>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. KKP Gandeng Organisasi Kesehatan Hewan Dunia Untuk Tingkatkan Produktivitas Budidaya. 2022. <https://www.kkp.go.id/djpb/kkp-gandeng-organisasi-kesehatan-hewan-dunia-untuk-tingkatkan-produktivitas-budidaya65c2ff33becb3/detail.html>. Diakses Pada 11 Mei 2024.
- Kennedy, P. S. J. (2023). Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Perekonomian Global. *Fundamental Management Journal*, 8(2), 1-12.
- Kominfo Jawa Timur. Pemprov Jatim Ekspor Produk Perikanan Senilai 14,4 Juta Dollar. 2021. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemprov-jatim-ekspor-produk-perikanan-senilai-14-4-juta-dollar>. Diakses Pada 11 Mei
- Konkrit News. 2020. *Peluang kerja Taiwan melalui Penempatan Direct Hiring Special Placement Program to Taiwan (SP2T)*.

- <https://www.konkritnews.com/2020/03/peluang-kerja-taiwan-melalui-penempatan.html>.
- KPMG. (2019). Kingdom of Saudi Arabia Budget Report: A review of KSA 2019 budget and recent economic development. *Ministry of Finance, December 2019*, 2–4. <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/sa/pdf/2019/KingdomofSaudiArabia2020BudgetReport.pdf>
- Kurniadi, K., & Ibrahim, S. (2021). *BUSINESS MATCHING MODEL. International Journal of Business Information Systems Strategies (IJBISS)*, 10(4). <https://doi.org/10.14810/ijbiss.2021.10401>
- Laelah, Nur, and Sukarni Setya Ningsih. “Efektivitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Terhadap Kenaikan Tinggi Badan Dan Berat Badan Balita Stunting Di Puskesmas Gunung Kaler Tangerang.” *Malahayati Nursing Journal* 6, no. 5 (2024): 1930–38. <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i5.11261>.
- Lapian, Jonathan Edward, and Insan Harapan Harahap. “Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Menurunkan Stunting (SDG 2.2).” *Management, and Industry (JEMI)* 06, no. 03 (2023): 175–86.
- Lintartika, Galih. Dikunjungi WOA, Perusahaan di Pasuruan Ini Sampaikan Skema Karantina Ketat Sebelum Ekspor. 2022. <https://surabaya.tribunnews.com/2022/09/10/dikunjungi-woah-perusahaan-di-pasuruan-ini-sampaikan-skema-karantina-ketat-sebelum-ekspor?page=2>. Diakses Pada 12 Mei 2024
- Lucarelli, A., & Olof Berg, P. (2011). City branding: A state-of-the-art review of the research domain. *Journal of Place Management and Development*, 4(1), 9–27. <https://doi.org/10.1108/17538331111117133>
- M. Chaerul dan Nursita Sari. BP2MI Ungkap 35.000 Warga Daftar Jadi Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan, 2023. Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/18/22385701/bp2mi-ungkap-35000-warga-daftar-jadi-pekerja-migran-indonesia-di-korea> pada tanggal 5 November 2024.
- Macqueen, K. M., Guest, G., & Namey, E. (2011). *Qualitative Research Methods: A DATA COLLECTOR’S FIELD GUIDE*



- NATASHA MACK • CYNTHIA WOODSONG. Retrieved from [www.fhi360.org](http://www.fhi360.org).
- Mahardika, A., & Rosyidin, M. (2020). Penyesuaian Norma Global di Asia Tenggara: Konsep Adopsi Parsial Dalam Lokalisasi Responsibility to Protect Dalam Krisis Humaniter Myanmar 2008. *Journal of International Relations Diponegoro*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/jirud.v6i3.28193>
- Mahardika. T.M., Darmawan. A. 2020. *Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 5. No. 2.
- Maheswara, M. Y. H., & Sari, A. M. (2022). Migrant Worker Protection in Labor Disputes Reviewed From Law Number 6 of 2012 Concerning Ratification of International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Year 1990. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5), 368–394. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.265>
- Manumoyoso, A. H. (2023). *Hidupkan Lagi Surabaya Cross Culture*.
- Mappapa. L. 2017. *Organisasi TKI Taiwan Keluhkan Praktik Overcharging*. [Organisasi TKI Taiwan Keluhkan Praktik Overcharging \(detik.com\)](https://www.detik.com).
- Marwanto Rolasta, Siti Hayati, dkk. Analisis Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Terhadap Perekrutan Pekerja Migran Indonesia ke Jerman Tahun 2022. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. 2019. *Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030*. Indonesia: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Monardo, Doni. “Talkshow Capai Target SDGs Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Era Dan Pasca Covid Di Indonesia.” SEAMEO REFCON, 2021. <https://www.youtube.com/live/8I6QefiYn4w?si=TWuFAkOz1iVG-iGt>.
- Murdijana, D., Hodijah, S. N., & Mukarramah, E. (Ed.). (2019). *Risalah Kebijakan Perempuan Pekerja Migran: Kekerasan Seksual dan Tercerabutnya Hak Masa Depan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

- Mustahyun. “Rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah pada Arab Spring Suriah Tahun 2011-2016.” *Journal of Islamic World and Politics* 1, no. 1 (Juli 2017).
- Muttaqien, M. “Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional dan Global.” *Jurnal Global & Strategis* 15, no. 9 (2015).
- Naray, O. (2014). *Commercial Diplomacy: A Conceptual Overview*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/255601282>
- Naseem, S., & Dhruva, K. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Issues and Challenges of Saudi Female Labor Force and the Role of Vision 2030: A Working Paper. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 23–27. <http://www.econjournals.com>
- Nurdina, Utami, A. et. al. “Pengaruh Pertentangan Ideologi Sunni-Syiah Terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi-Iran di Timur Tengah.” *Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 4, no. 1 (2018).
- Nurhayat, Wiji. AS Hentikan Impor Ikan Patin dari Vietnam karena Mengandung Antibiotik. (2017). *Kumparan Bisnis*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/mengandung-antibiotik-as-hentikan-impor-ikan-patin-dari-vietnam>. Diakses Pada 27 Mei 2024.
- Office, Jakarta, Indonesia 駐印尼台北經濟貿易代表處  
(roctaiwan.org)
- OHCHR. (2005). *Fact Sheet No. 24 (Rev. 1): The International Convention on Migrant Workers and Its Committee* [Fact Sheet]. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-24-rev-1-international-convention-migrant-workers-and-its>
- Pemerintah Kota Surabaya. 2016. *Data - Pemerintah Kota Surabaya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*. Surabaya, Jawa Timur: n.p.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2019. “Di Forum United Cities and Local Government in Asia Pacific Filipina, Walikota Risma Paparkan Manajemen Resiko Bencana,.” Pemerintah Kota Surabaya.
- Pengaruh Cina di Timur Tengah Meningkat.” Deutsche Welle. Diakses 29 Juni 2023. <https://www.dw.com/id/pengaruh-cina-di-timur-tengah-meningkat/a-65003091>.
- Penulis, T., Robby Yana, P., Ardiansyah Hernadi, N., Rachmawati, F., Putri Hayam Dey, N., Wahyuning Purwanti, E., ...



- Kharisma Putra, G. (2024). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)*. Retrieved from [www.freepik.com](http://www.freepik.com)
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Perdamaian Arab Saudi-Iran, Hasil Diplomasi Mengejutkan China,” *Tempo*. Diakses 29 Juni 202. [https://fokus.tempo.co/amp/1702430/perdamaian-arab-saudi-iran-hasil-diplomasi-mengejutkan-china?page\\_num=2](https://fokus.tempo.co/amp/1702430/perdamaian-arab-saudi-iran-hasil-diplomasi-mengejutkan-china?page_num=2)
- Raluca-Gabriela, Z. (2013). The Role and Importance of Public Diplomacy, Romania Case Study in the Context of Integration into NATO. *European Scientific Journal*, 1, 468–475.
- Ratna Sari Yunita. 2023. “*Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*”. *Jurnal Jamsostek* Volume 1 Nomor 2, Desember 2023.
- Rodi, K. (2009). Cedaw. *DjbZ*, 12(2), 68–69. <https://doi.org/10.5771/1866-377x-2009-2-68>
- Roza Andriani dan Kenepri. Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bagi Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan pada program G to G. *Jurnal SUMUR*, 2024.
- Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Sahide, Ahmad. *Ketegangan Politik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah*. (Yogyakarta: Pinsi Press, 2013).
- Saipul Hamdi, dkk. 2023. *Remitansi Pekerja Migran pada Masa Pandemi Covid19 di Lombok Timur*. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Volume 18 Nomor 2 Desember 2023.
- Sarana Advokasi & Edukasi Save PMI Taiwan. 2018. Indonesia-Taiwan Teken MOU Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://savepmi.kdei-taipei.org/2018/12/indonesiataiwan-teken-mou-peningkatan.html>.
- Setyowati, Yayuk. “Webinar Nasiona: Pencegahan Dan Penanganan Stunting Dengan Pendekatan Holistik.” *Healthy Cendikia*, 2023. <https://www.youtube.com/live/gQJAJpp1qeg?si=caQIgzVegw-jUIM>.
- Sianturi, N. (2017). Pengaruh Saudi Vision 2030 dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia. *Jom Fisip*, 4(2), 1–15. <https://www.vision2030.gov.sa/en/node/134>

- Simanjuntak, T. M., & Dermawan, D. (2023). Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina terhadap Perekonomian di Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 24923-24930.
- Sinuraya, R. F. (2022). Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Tribuere*, 1(1), 65-75.
- Sonenshine, T. (2013). *Bottom Line Diplomacy: Why Public Diplomacy Matters*. <https://www.diplomacy.edu/resource/bottom-line-diplomacy-why-public-diplomacy-matters/>
- Sudarmanto. H. 2022. *Upaya Meningkatkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Penempatan Wilayah Asia*. *Jurnal Pendidikan dasar dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.11.
- Sukotjo, Sri Wahyuni. “Webinar Hari Anak Nasional 2020: Stunting Dan COVID-19 Di Indonesia.” CIMSA, 2020.
- Sulistyaning, Afna Ratna. “Gizi Dan Stunting: Ruang Cakap SDGs Desa.” DESA Institute, 2023. <https://www.youtube.com/live/NbynamXCWIU?si=HjddkNcL2Z-nZbos>.
- Suryani Ritonga, L., & Qarni, W. (2022). ANALISIS PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KOTA MEDAN. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 635-644. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.71>
- Sylvia Yzid. *Labour Migration from Indonesia to South Korea: Challenges in Maximizing Potentials*. Parahyangan Catholic University, 2017.
- TETO. 2016. Kondisi Hubungan Bilateral antara Taiwan dan Indonesia. Kondisi hubungan bilateral antara Taiwan dan I... - Taipei Economic and Trade
- TETO. 2016. *Kondisi Hubungan Bilateral antara Taiwan dan Indonesia*. <https://www.roc-taiwan.org/id/en/post/50.html>.
- The U.S. Shouldn't Choose Saudi Arabia Over Iran,” Politico Magazine. Diakses 29 Juni 2023. <https://www.politico.com/magazine/story/2016/01/saudi-arabia-iran-213504/>.



- Trading Economics. Korea Selatan – Populasi tahun 2023. Diakses melalui <https://id.tradingeconomics.com/south-korea/population> pada tanggal 26 Oktober 2024.
- Tri Sulistiyono. Pelindungan Buruh Migran Indonesia di Korea Selatan di Masa Pandemi Covid-19. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021.
- Trisni, S., & Putri, A. (2023). Diplomasi Publik dan Soft Power: Sama atau Berbeda? *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.25077/ajis.12.1.1-12.2023>
- Umi Utami Dewi S.Pi, teks “wawancara oleh M. Rafi Azizi”, 25 April 2024
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* (1999).
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012.* (t.t.).
- United Citie and Local Government. 2024. “Who We Are The Historie Of United Cities and Local Govenments In Asia Pacific.” UCLG ASPAC E-Learning.
- United Nations Office For Disaster Risk Reduction 2015-2030. n.d. “What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction?” UNDRR. Accessed May 25, 2024. <https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework>.
- Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia. (2020). Government of Saudi Arabia. *Government of Saudi Arabia*, 1–85. <https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/417>
- Wahyudi, Try. Kekayaan Laut Melimpah, Potensi Perikanan Layak Sumbang PAD Jawa Timur. 2024. DPRD Jawa Timur. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/12963/kekayaan-laut-melimpah-potensi-perikanan-layak-sumbang-pad-jawa-timur>. Diakses Pada 11 Mei 2024.
- Waltz, Kenneth. *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis* (New York: Columbia University Press, 2001).
- Wicaksono, Y. (2023). *Surabaya Cross Culture Folk Art Festival 2023*. <https://www.superradio.id/surabaya-cross-culture-folk-art-festival-2023/>
- Widianingtyas, H. (2020). *Misi CIOFF Indonesia Lestarikan Tarian Daerah sambil Jaga Perdamaian Dunia*. <https://kumparan.com/millennial/misi-cioff-indonesia-lestarikan-tarian-daerah-sambil-jaga-perdamaian-dunia-1u1X7NJJaFe4>

- World Organisation for Animal Health. What We Do? <https://www.woah.org/en/what-we-do/>. Diakses Pada 27 Mei 2024.
- World Organisations for Animal Health. Antimicrobial resistance. <https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/antimicrobial-resistance/>. Diakses Pada 11 Mei 2024
- World Organisations for Animal Health. Who we are. <https://www.woah.org/en/who-we-are/>. Diakses Pada 9 Mei 2024.
- Worldmeters. South Korea Population, 2023. Diakses di [South Korea Population \(2023\) - Worldometer \(worldometers.info\)](https://worldometers.info)
- Yeoh, B. S. A., Goh, C., & Wee, K. (2020). Social Protection for Migrant Domestic Workers in Singapore: International Conventions, the Law, and Civil Society Action. *American Behavioral Scientist*, 64(6), 841–858. <https://doi.org/10.1177/0002764220910208>
- Yunazwardi, M. I., & Nabila, A. (2021). Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *Indonesian Perspective*, 6(1), 1–21.
- Yusuf, Mochamad A. 2021. “Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Bentuk dan Contoh.” Gramedia Blog.
- Zahrah, F. (2023). City Branding Dimensions, Strategies, and Obstacles: A Literature Review. *Jurnal Bina Praja*, 15(1), 101–109. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.101-109>
- Zamorano, M. M. (2016). Reframing cultural diplomacy: The instrumentalization of culture under the soft power theory. *Culture Unbound*, 8(2), 165–186. <https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.1608165>
- Zarkasy, R. A., Fahrezi, D. N., Rosyid, I. A. H., Aji, K., & Yuha, W. (2022). Dampak Pemberhentian Pasok Gas Terhadap Kerja Sama Rusia –Uni Eropa. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(02), Article 02.
- Zhou, J., Barnes, P., & Gustafsson, M. S. (2022). *The Developing Role of Cultural Diplomacy in Soft Power? A Case Study of Japanese Cultural Promotion*. 96. [www.liu.se](http://www.liu.se)



